



METODOLOGI DALAM MEMOTRET PERUBAHAN SOSIAL KONTEMPORER

Editor :
Henry Thomas Simarmata
Yustina Trihoni Nalesti Dewi
Andreas Ryan Sanjaya

[page left blank]

Metodologi dalam Memotret Perubahan Sosial Kontemporer

LPPM UNIKA Soegijapranata
2023

Metodologi dalam Memotret Perubahan Sosial Kontemporer
Andreas Ryan Sanjaya, Henry Thomas Simarmata, Trihoni Nalesti
Dewi, (co-editor)

LPPM Unika Soegijapranata
2023

LPPM Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Duwur, Semarang
Jawa Tengah 50234

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	5
PENGANTAR CO-EDITOR	7
ACKNOWLEDGEMENT	9
PUBLIKASI DAN KETENTUAN PENGUTIPAN	12
I. Pendekatan Konseptual: Perubahan Sosial disekitar Kita	13
II. Metodologi	17
III. Kerangka Kolokium 13-14 Juli 2021	23
IV. Kolokium 13-14 Juli 2023	27
Hari 1: Selasa 13 Juli 2021	
Sesi 1	27
Sesi 2	93
Hari 2: Rabu 14 Juli 2021	
Sesi 3	167
Sesi 4	228
V. Perubahan Sosial yang dicermati dengan <i>mix-methodology</i> : Kajian Unika Soegijapranata	277
VI. Catatan Penutup: interaksi akademik dalam membaca perubahan sosial	297

[page left blank]

KATA PENGANTAR

LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Katolik (Unika) Soegijapranoto berterimakasih atas partisipasi akademisi, praktisi, penggerak masyarakat dalam edisi publikasi “Metodologi dalam memotret Perubahan Sosial Kontemporer”. Publikasi ini kami harapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan lanjut dalam berbagai subyek kajian dan berkontribusi dalam ragam pengabdian masyarakat. Kami juga berterimakasih karena kajian yang dihadirkan dalam publikasi ini amatlah penting karena keunikan cara pandang terhadap masyarakat.

Secara khusus, kami berterimakasih kepada Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi., M. Si., Rektor Unika Soegijapranata yang secara khusus mendukung upaya-upaya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dibangun oleh LPPM Unika Soegijapranata, termasuk yang dihasilkan dalam publikasi ini.

Publikasi ini merupakan rangkuman dari kajian yang dikerjakan oleh LPPM Unika Soegijapranata dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk yang dilakukan secara berjejaring, dan yang dibangun bersama dalam lingkup Pusat Studi Urban Unika Soegijapranoto dan Indonesia Peace Network. Dalam kajian ini, dihelat kolokium dalam format online pada 13-14 Juli 2021. Kolokium ini menerima kontribusi penting dalam mengkaji metodologi dalam memotret perubahan sosial kontemporer.

Dengan seluruh partisipasi dan kontribusi dari akademisi, praktisi, penggerak masyarakat yang berkolaborasi dalam kajian metodologi ini, kami seterusnya mengangkat partisipasi dan kontribusi tersebut dalam kajian lanjutan melalui publikasi ini.

Kami sepenuhnya mendukung akademisi, praktisi dan penggerak masyarakat yang berpartisipasi dalam kajian ini untuk terus mengembangkan subyek kajian mereka. Kami juga mendukung dalam karya-karya akademik dan kemasyarakatan yang muncul dari publikasi ini.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Unika Soegijapranata yang telah mendukung sepenuhnya inisiatif kajian ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada kolega dalam lingkup Unika Soegijapranata yang turut mendukung inisiatif kajian ini, dan yang mendukung penerbitan publikasi ini.

Trihoni Nalesti Dewi

Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Katolik Soegijapranata

PENGANTAR CO-EDITOR

Ilmu-Ilmu mengalami perkembangan yang amat cepat dan unik. Ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu sosial (*social science*), ilmu hayati (*natural science*), epistemologi, kajian budaya, kajian kebijakan publik. Ilmu-ilmu ini, dengan kekhasan mereka, hendak memahami perubahan masyarakat kontemporer yang juga berkembang secara cepat dan unik. Ilmu-ilmu ini kemudian mengembangkan metodologi untuk dapat mampu memahami dan membahasakan perubahan sosial kontemporer tersebut.

Metodologi ini mengembangkan cara-cara tertentu untuk dapat membahasakan pemahaman mereka ke dalam bahasa-bahasa dan kajian ilmiah. Metodologi juga mengembangkan pola validasi mereka sendiri. Mengenai ini, kita kembali pada pemahaman bahwa metodologi ilmu-ilmu sejatinya mengantar kita untuk masuk ke dalam perubahan sosial kontemporer tersebut.

Begitu kompleksnya perubahan sosial sehingga satu metodologi tidak cukup untuk mampu mengangkat perubahan tersebut ke dalam alam kajian. Dalam publikasi ini, kita dapat melihat perubahan-perubahan sosial kontemporer tersebut. Ada banyak contoh dan banyak metodologi yang diajukan secara khas.

Kami, co-editor, mengamati bahwa karya-karya dalam publikasi secara unik memotret perubahan sosial. Metodologi mereka mencari pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber, dan membangun cara menyimpulkan. Juga, secara unik,

baik melalui pola induktif atau deduktif, partisipan dalam publikasi ini memvalidasi pengamatan mereka. Apakah ilmu-ilmu terkini haruslah mempunyai pola yang lurus, dan kemudian dengan yakin menghadirkan hasil? Partisipan dalam publikasi ini hendak secara unik “menggunakan” ilmu-ilmu terkini, namun dengan pola yang unik, yang tidak terpaku pada pola deduktif atau induktif. Demikian pula informasi dan pengetahuan yang mereka galang, partisipan mencarinya dari sumber-sumber yang unik. Hal ini termasuk bagaimana para partisipan menggunakan pengetahuan dan informasi dari alam alam dan benda budaya.

Kami mendorong kajian-kajiaan lebih lanjut terutama dalam melihat kembali metodologi ilmu-ilmu. Tanpa “bermaksud paling benar”, kami memandang bahwa kajian atas metodologi ini masih membutuhkan karya akademik dari berbagai pihak.

Co-editor

Andreas Ryan Sanjaya

Henry Thomas Simarmata

Trihoni Nalesti Dewi

Acknowledgement

Rektorat Unika Soegijapranata,
LPPM Unika Soegijapranata
Fakultas dan Jurusan, segenap civitas akademika Unika

Indonesia Peace Network

Para penulis (alphabet order):

Abraham Wahyu Nugroho, Adrianus Bintang Hanto Nugroho, Agnes Ratih Ari Indriyani, Aldi Herindra Lasso, Aloysius Gunadi Brata, Andreas Pandiangan, Bernadeta Resti Nurhayati, Damasus Ferix Loys Hermawan, Gatot Sasongko, Dedi Adhuri Supriadi, Heronimus Heron, Kristian Oentoro, Ichmi Yani Arinda Rohmah, Muhammad Reza Shahib, Titi Susilowati Prabawa, Tyas Susanti, Wiyatiningsih, Yovita Indrayati

Publikasi dan Ketentuan pengutipan

Publikasi ini dicatat dan didaftarkan sebagai publikasi LPPM Unika Soegijapranata

Masing-masing penulis, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan penulis lain dalam publikasi ini, sepenuhnya mempunyai hak atas karya akademik mereka.

Ketentuan pengutipan dengan Chicago Style Bibliography.

Contoh:

Hermawan, Damasus Ferix Loys, Metodologi Menuliskan Kapitalisme Pada 'Tragedi' Pusan di Longsep, dalam *Metodologi dalam Memotret Perubahan Sosial Kontemporer*, 2023. (...halaman...), Semarang: LPPM Universitas Katolik Soegijapranata

I. Pendekatan konseptual: Perubahan Sosial di sekitar kita

Datang ke berbagai kegiatan masyarakat merupakan kegiatan yang amat penting bagi peneliti, penggiat masyarakat, akademisi, dan juga penting bagi *pollster*, politisi, dan *market research*. Dalam satu titik pengamatan, peneliti mendapatkan berbagai hal, berbagai dimensi, dan berbagai cara mengambil kesimpulan.

Marilah kita mengambil kegiatan *pollster*. Kredibilitas *pollster* seringkali dirujuk pada kemampuan mereka memunculkan hasil elektoral -katakanlah kita sebut “menang”, atau “terpilih” Namun, kredibilitas *pollster* juga dirujuk kemampuan mereka untuk memahami masyarakat -*politics at their fingertips*. Mereka dapat mencermati hal-hal artifisial (yang sedang tren), dan hal-hal yang lebih substantif. Karena pekerjaan mereka, seringkali, mereka dapat mengambil kesan awal (*first impression*) dari suatu situasi masyarakat. Pengetahuan “sistematis” yang dikelola terus-menerus seringkali menghasilkan intuisi. Contoh yang dapat dipakai dalam hal ini adalah karya “Microtrends” dari Mark Penn tahun 2007. Karya ini tentu saja didasarkan pada pengetahuan si penulis sebagai *pollster*, namun, isi karya tersebut mencerminkan intuisi dari si penulis. Mark Penn dapat melihat perubahan-perubahan kecil di kawasan sub-urban. Perubahan-perubahan ini membentuk sikap sosial politik mereka. Kawasan sub-urban ini dianalisis sebagai segmen penting dalam putaran-putaran pemilu nasional dan lokal.

Marilah kita juga mengambil kegiatan lain, yaitu kegiatan dari seorang ekonomi yang bernama Robert Shiller. Melalui risetnya yang kemudian ditajuk "Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception" (Robert Shiller, George Akerlof, 2015) memberikan gambaran mengenai "behaviour" masyarakat yang amat dipengaruhi oleh insentif, "gimmick", "click bait" dan naratif yang dicocokkan dengan aspirasi mereka. "Phishing" adalah istilah yang dikenal dalam dunia internet, namun, sekarang banyak dipakai di berbagai bidang kehidupan. "Phishing" juga dipahami sebagai kecenderungan manusia yang lebih cepat merespon hal-hal artifisial dan bersifat percakapan (*conversational*). Dunia ekonomi, dunia politik, media sosial, media sosial, bahkan dunia pendidikan dipengaruhi secara signifikan oleh "phishing". Robert Shiller sebagai ekonom mengamati perubahan ini dan membuat analisis. Analisis yang dibangun olehnya banyak dipakai oleh praktisi, dunia akademi, otoritas dalam membantau dan mengurangi resiko negatif dari "phishing" ini.

Kita ambil contoh lain. Konflik di berbagai wilayah di Indonesia pada era 2000-an memberikan tekanan luar biasa terhadap dunia akademi peneliti. Konflik itu, diantaranya, Konflik Aceh, Konflik Poso, Konflik Ambon, Konflik Papua. Bagaimana konflik ini dipahami, dan, kemudian, transformasi seperti apakah yang perlu dibangun. Amat jelas bahwa demokratisasi yang dipahami secara *text-book* mempunyai kenyataan lain di kehidupan nyata. Para analis dan dunia akademi membangun analisis dalam berbagai sudut pandang atau bidang, termasuk dalam bidang ekonomi sumber daya, dalam bidang sosial termasuk dalam hal segregasi sosial budaya, dalam hal bidang elektoral dimana kompetisi partai politik justru membawa hasil yang tidak diduga. Analisis dan akademisi memperkaya metodologi mereka untuk dapat membaca perubahan sosial dalam konflik dan sesudah konflik.

Berbagai perubahan sosial yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap penelitian dan pengabdian oleh

perguruan tinggi. Perubahan sosial ini dipahami sebagai sesuatu yang konstruktif untuk kehidupan bersama suatu masyarakat. Pada saat yang sama, perubahan sosial ini juga menghasilkan tegangan baru, kompetisi baru, dan problem sumber daya baru. Bagaimana penelitian dan pengabdian membaca dan memunculkan “cara baca baru” dan “cara tindak publik”, itulah yang menjadi proses penting. Sumber-sumber pengetahuan dan proses analisisnya akan terus berkembang.

Pada tahun 2020-2021, Pusat Studi Urban (PSU) Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata mengadakan penulisan saintifik yang memunculkan naskah publikasi “Membangun Kota Inklusif, sebuah Antologi”. Penulisan saintifik ini merupakan kerjasama antara PSU Unika Soegijapranata dan Indonesia Peace Network. Penulisan saintifik ini menjadi latar dari proses kolokium “Metodologi ilmu-ilmu dalam memotret perubahan sosial kontemporer” yang diselenggarakan pada Juni-Juli 2021.

Memakai istilah “memotret” terhadap “perubahan sosial kontemporer” mempunyai risiko tersendiri meskipun perlu dipahami sebagai sebuah proses. Masyarakat dan perubahannya adalah sesuatu yang dinamis. Bisa jadi “memotret” dapat dimengerti sebagai proses melihat perubahan patahan-patahan gambar (*moving stills*), atau sebagai proses reflektif dengan menggunakan sudut pandang tertentu. Dengan ini, kita dapat melihat bahwa metodologi ilmu-ilmu menjadi penting untuk masuk dalam diskusi, perdebatan, konstruksi dan rekonstruksi, atau sekedar suatu proses refleksi.

Nilai-nilai yang dibawa dalam suatu perubahan masyarakat juga memaksa metodologi ilmu-ilmu untuk melihat dirinya kembali. Perubahan tidaklah bebas nilai tetapi seringkali membawa suatu nilai. Sejak munculnya perkembangan ilmu-ilmu

sosial dan filsafat ilmu-ilmu sosial, pemahaman semacam ini sudah menjadi pondasi dasar. Demikian pula, sejak munculnya “studi perdamaian”, ilmu-ilmu “dipaksa” untuk memakai suatu dasar dan kerangka nilai tertentu terutama nilai-nilai perdamaian, termasuk di dalamnya penghargaan, koeksistensi, *self-preservation*, kolaborasi, dan berbagai kualifikasi dan atribusi lain yang relevan.

Perdebatan mengenai ilmu-ilmu perlu untuk kita refleksikan lagi, meskipun tidak untuk terjebak pada penjara monolitik atas masing-masing kubu perdebatan. Pemisahan dan pembedaan mengenai *geisteswissenschaften* dan *naturwissenschaften*, kemudian mengenai “verstehen” dan “erklären” dapat membantu kita untuk mererefleksikan kembali metodologi ilmu-ilmu, termasuk terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana ilmu-ilmu hendak membangun “objek” sedekat atau sedikriptif mungkin. Apapun perdebatannya, proses inilah yang penting untuk kita refleksikan kembali.

Masyarakat yang dinamis sekaligus penuh kontradiksi seringkali membawa proses membangun “objek” menjadi proses yang berjalan terus-menerus, tanpa berhenti. Metodologi ilmu-ilmu juga mengalami “rekalibrasi””. Proses yang menarik.

Metodologi ilmu-ilmu ini yang menjadi perhatian dari kolokium -bagaimana metodologi ini hendak sejauh-jauhnya tiba pada sisi terdalam dari perubahan sosial, dan sejauh-jauhnya memahami dampak jangka pendek dan jangka jauh-nya.

II. Metodologi

Seri kajian ini mengundang kajian dan pengabdian yang sedang berjalan dan/atau yang sudah selesai, dan kemudian mengundang co-author untuk mengajukan bahasan mereka. Co-editor membangun bahasan mengenai metodologi ilmu-ilmu yang dipakai atau dibangun dalam mencermati perubahan masyarakat. Karena ini tema yang amat luas, maka perubahan sosial yang dimaksud adalah hal-hal yang mempengaruhi “inklusivitas”, “proses saling merangkul” -atau kekurangan atau ketiadaannya (*lack of it*). Ilmu-ilmu dan khasahnya tidak dibatasi. Hal ini dapat berasal dari ilmu murni dan ilmu terapan (*applied science*) seperti *geometry*, teknik (*engineering*), arsitektur, *urban planning*; dan yang berasal dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*humanities*).

Kajian yang diundang adalah hasil atau isi dari “pengabdian” dan/atau “penelitian” yang diselenggarakan dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kajian ini diolah ke dalam artikel sepanjang 5 halaman (tidak termasuk daftar pustaka) -lihat pengaturan penulisan.

Kajian ini sebaiknya masih berada dalam kerangka waktu 7 tahun terakhir ini, meskipun tidak menghalangi pengolahan kembali atau recalibrasi kajian yang sudah dilakukan melampaui 7 tahun terakhir ini.

Dalam seri kajian ini, kolokium diadakan sebagai pertukaran hasil dari penelitian atau pengabdian secara kolegal, dan bukan proses yang amat rigid, namun PSU Unika Soegijapranata membentuk komite saintifik untuk membantu proses kolokium tetap mempunyai dasar-dasar saintifik yang minimal dan/atau

relevan. Komite Saintifik akan diketuai oleh *ex-officio* Kepala PSU Unika Soegijapranata, dan dengan anggota-anggota komite.

Dari proses kolokium, komite saintifik akan mengolah diskusi dan pertukaran masukan menjadi suatu dokumen prosiding yang nantinya akan menjadi publikasi khusus. Komite saintifik juga akan mendorong isi dan hasil dari kolokium menjadi kajian-kajian lanjutan baik dalam pengabdian dan penelitian di berbagai bidang.

Co-editor untuk edisi “Metodologi dalam Memotret Perubahan Sosial Kontemporer” adalah Trihoni Nalesti (UNIKA Soegijapranata), Henry Thomas Simarmata (Apintlaw/associated program for international law), Andreas Ryan Sanjaya (UNIKA Soegijapranata)

Methodologies of sciences and social change whom they want todigest

Key Framework

Center for Urban Studies (Pusat Studi Urban) of Catholic University of Soegijapranata (hereinafter PSU-Unika) is to convene a colloquium in 13-14 July 2021. This colloquim will converse methodologies which this far has been developed, employed and projected towards “inclusion”. This colloquium is welcoming the publication of the PSU, entitled “Membangun Kota Inklusif”(building an inclusive city), edited by Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.H. and Dr. Antonius M. Laot Kian, S.S., M.Hum -both member of the Center (published by Rajawali Press).

Along with the process of this publication, the study series is set. This set, “methodology on social change” is developing discusions and analysis on social change by employing a

methodology of choice. This methodology should be able to shed a light into said social change. Moreover, this methodology could grow into a form which can detect newness or something missing in past and present analysis into the social change.

This set hold a colloquium. This colloquium was to invite researcher, practitioners, community leaders to present their experience and work on inclusion. The colloquium is to take their past and present works on inclusion into scientific inquiry. Hence, would-be-participants shall have past and present work on employing a methodology in which inclusion is addressed and/or impacted.

The colloquium is to set a space for participants to converse on methodologies -how weird it maybe- on inclusion. The conversation should come into scientific inquiry. The basis for that “methodology on inclusion” is as follow:

Inclusion:

- Inclusion, as Indonesian may found in the term and concept “merangkul” (embracing), “mengembangkan” (growing), “memampukan” (enabling) refers to the “state of spirit” of a society, community, or people where they grow a shared life and mutual recognition. In this context, inclusion (or inclusive) denotes to social and cultural terms -in certain extent, economic term.
- Inclusion would imply also a hermeneutic inquiry. The term and its working concept has certain meaning and its scope, and how deep the term could project an enduring understanding.
- As it is applied to society, inclusion relates with space/spatials in which a given society project values and togetherness. For a city and a growing urban lives, the dynamic of

space/spatials could ensure or alter the existence of member of that very society.

- History has its own role and dynamics in developing meaning and existence of inclusion. Big history, small histories both have their unique scope and dynamics towards inclusion.
- Some may relate inclusion with education and law - separately. In this sense, inclusion is understood in normative term. What an inclusion should imply in a society.
- Some other may relate inclusion with philosophy. There are more than enough catalogues and schools in philosophy which could shed light into inclusion. The term "inclusion" itself are differentiated with other concept such as "multicultural", "plural(ism)", a classic reference to *gemeinschaft* (communal society)-*gesellschaft* (associational society) -an ideal construction of meaning.

On methodology, this would denotes or refer to a set of knowledge and its framework, and the projection out of it. Methodology could be understood in an expansive way as long as it is organised adequately based on certain approach and middle-range applications.

The context of Indonesia

Indonesia has a polity which assume the inclusion/inclusive life in its core. Since the development of a nation, then to modern society, Indonesia has been shaped by her existence in relation with the inclusion. One particular example is on the choice of Bahasa Indonesia as unifying language -thus addressing first what could

impede a mutual experience as a nation. The language preceded many platforms and outlets towards a mutual life.

At the same time, one could apply inclusion onto Indonesia's various and successive conflicts -be it based on ethno-nationalism, sectarian one, or identity. These conflicts shapes the living experience of Indonesians towards their fellow citizens, and towards themselves as individual and in the community they are living in.

In other, and many, instances, Indonesians' experience on inclusion varies and is very rich. The likes of conflict transformation, urban life, local democracy, and many others are well researched. All of these represent Indonesians' living experience on inclusion.

It is hoped that the context of Indonesia is addressed in the colloquium. Different entry points and point of views are certainly welcomed.

Works and discussion in colloquium

The colloquium is inviting researcher, practitioners, community leaders to present their experience and work on inclusion, or their works in employing a methodology on analysing the social change and its impact.

The article should present 2 key takes:

1. The past or present researchs or works on covering or addressing the social change (contemporary one, in the period of current to 7 years)
2. Which methodology is applied to these research or works? How far this methodology could explain and projected scientific findings?

The Committee will work on the scientific discussion arises from submitted articles -and still working on the key framework which guide the discussion.

The committee will manage all conversation and result of the colloquium. They will work on this into a proceeding document, and working on further academic works.

Co-editor for the edition of “Metodologi dalam Memotret Perubahan Sosial Kontemporer” are Trihoni Nalesti (UNIKA Soegijapranata), Henry Thomas Simarmata (Apintlaw/associated program for international law), Andreas Ryan Sanjaya (UNIKA Soegijapranata)

III. Kerangka Kolokium 13-14 Juli 2021

Paper dan bahasan:

1. Damasus Ferix Loys Hermawan, *Metodologi Menuliskan Kapitalisme Pada 'Tragedi' Punan di Longsep*
2. Ichmi Yani Arinda Rohmah, *Digitalisasi dalam Membangun Jaringan Industri Pemasok Minyak dan Gas Bumi dengan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Perkotaan*
3. Andreas Pandiangan, Adrianus Bintang Hanto, Andreas Ryan Sanjaya., *Moderasi Beragama Umat Kristiani melalui Media Sosial, Riset pada Tiga Wilayah (Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta)*
4. Muhammad Reza Shahib, *Air dan komunitas: Kasus Padangrincang dan kasus Semanga*
5. Wiyatiningsih, Kristian Oentoro, *Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Tata Ruang Perajin Tenun Ikat, Studi Kasus Sentra Tenun Ikat Gunung Mako di Kabupaten Alor*
6. Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Tri Susilowati Prabawa., *Transisi Inter-Temporal dalam Ekonomi, Studi Kasus Penghidupan berbasis Pariwisata*
7. Dedi Adhuri, *Pengetahuan Tradisional pada masyarakat Nelayan dan Pesisir: Commons Pulau Selayar*
8. Yovita Indrayati, Henry Thomas Simarmata, Trihoni Nalesti, *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Sumber Daya*

Genetik untuk Pengembangan Obat-Obatan (Studi di Jawa Tengah)

9. Abraham Wahyu Nugroho, *Studi Literatur sebagai Metode Penelitian Unobstrusive, Kajian tentang Konservasi Benda Budaya sebagai Simbol Adat Negeri di Ambon*
10. Aloysius Gunadi Brata, *Kuburan, Segregasi Kelas dan Bisnis Penguburan*
11. Heronimus Heron, *Pahlawan dan Imaji Nasionalisme Indonesia*

Bahasan Penanggap:

1. Muhammad Reza Shahib menanggapi Damasus Ferix Loys Hermawan
2. Yovita Indrayati, menanggapi Ichmi Yani Arinda Rohmah
3. Wiyatiningsih menanggapi Andreas Pandiangan
4. Andreas Pandiangan. menanggapi Muhammad Reza Shahib
5. Agnes Ratih Ari Indriyani menanggapi Wiyatiningsih
6. Heronimus Heron menanggapi Agnes Ratih Ari Indriyani
7. Aloysius Gunadi Brata menanggapi Dedi Adhuri
8. Dedi Adhuri menanggapi Yovita Indrayati
9. Ichmi Yani Arinda Rohmah menanggapi Abraham Wahyu Nugroho
10. Abraham Wahyu Nugroho menanggapi Heronimus Heron
11. Damasus Ferix Loys Hermawan menanggapi Aloysius Gunadi Brata

Panduan bahasan dan diskusi dalam kolokium:

1. mengenai subyek penelitian/kajian

- Apakah anda mengenal kajian tersebut? Atau pernahkan anda melakukan penelitian/kajian? (misalnya, mengenai masyarakat desa, atau mengenai masyarakat dalam konflik...)
- Apakah anda melihat ada hubungan atau relevansi antara kajian tersebut dengan bidang kajian anda, atau dengan penelitian yang sedang anda lakukan

2. mengenai metodologi dalam penelitian/kajian tersebut

- Apakah anda mengenal metodologi dalam penelitian/kajian tersebut? Apakah anda pernah menggunakan atau mengembangkannya?
- Sebearapa sulit atau seberapa mudah metodologi tersebut digunakan dalam penelitian/kajian?
- Apakah metodologi tersebut dapat menjelaskan perihal yang diteliti/dikaji? Apakah ada hubungan kuat antara metodologi dengan perihal tersebut?

3. rekomendasi

- Apakah anda berpendapat bahwa jenis penelitian/kajian dan metodologi yang dipakai layak untuk digunakan dan dikembangkan dalam penelitian/kajian lainnya?
- Apakah anda berpendapat bahwa penelitian/kajian tersebut perlu diseminarkan? Cukup penting untuk menjadi kajian akademik berkelanjutan?
- Apakah penelitian/kajian tersebut dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik; atau pada advokasi masyarakat?
- Adakah pendapat lain yang perlu disampaikan mengenai topik dan metodologi penelitian/kajian?

IV. Kolokium 13-14 Juli 2021

SESI 1

SELASA, 13 JULI 2021

09.00-12.00

1. PEMBUKA SESI

2. AGENDA BAHASAN

Paper dan bahasan:

Damasus Ferix Loys Hermawan, *Metodologi Menuliskan Kapitalisme Pada 'Tragedi' Punan di Longsep*

Ichmi Yani Arinda Rohmah, *Digitalisasi dalam Membangun Jaringan Industri Pemasok Minyak dan Gas Bumi dengan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Perkotaan*

Andreas Pandiangan, Adrianus Bintang Hanto, Andreas Ryan Sanjaya, *Moderasi Beragama Umat Kristiani melalui Media Sosial, Riset pada Tiga Wilayah (Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

Penanggap:

Muhammad Reza Shahib menanggapi Damasus Ferix Loys Hermawan

Yovita Indrayati menanggapi Ichmi Yani Arinda Rohmah

Wiyatiningsih menanggapi Andreas Pandiangan

3. BAHASAN DAN DISKUSI

Memahami Gerak Kapitalisme pada 'Tragedi' Orang Punan di Longsep

Damasus Ferix Loys
Alumni Pascasarjana Kajian Ilmu Budaya
Universitas Sanata Dharma
dferix.df@gmail.com

Penulisan makalah ini berdasarkan hasil dari proses penelitian memahami kehidupan Dayak Punan Longsep yang disajikan dalam Tesis berjudul "Tragedi orang Punan di Longsep; Negosiasi Dayak Punan dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur". Ketika penelitian dilakukan peneliti tidak dapat menutup mata atas keberadaan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit. Karena lokasi Longsep berada tepat di areal sekitar operasional perusahaan Kelapa Sawit. Perusahaan sebagai sebuah industri tentu mengedepankan *capital* sehingga memungkinkan peneliti memandang perusahaan sebagai kapitalis yang melahirkan hegemoni kapitalisme atas kehidupan Punan di Longsep. Penelitian terhadap Punan ini dilakukan dalam rangka memahami bagaimana peran dan sejauh apa kapitalisme telah mendominasi kehidupan Dayak Punan di Longsep. Dalam penelitian ini hegemoni digunakan sebagai alat bedah dengan etnografi baru sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran yang hidup.

Pertanyaan dan Gambaran singkat Penelitian

Dalam rangka memahami Punan Longsep secara lebih mendalam peneliti merumuskan beberapa masalah dalam pertanyaan penelitian. Perumusan masalah ini yang kemudian menjadi penentu metode yang tepat untuk menghadirkan obyek sebagai subyek dalam analisis penelitian. Rumusan masalah yang mendasari

penelitian didirikan atas upaya menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut; Pertama, mengapa dan bagaimana Proses perpindahan Punan Longsep dari Long Sulu hingga ke Longsep? Pertanyaan ini untuk menjawab dan membahas mengenai proses awal orang Punan ke Longsep serta keberadaan perusahaan di Longsep. Hal ini penting untuk mengetahui *historical* Punan hingga pada akhirnya tinggal di Longsep dan berinteraksi/bergantung pada perusahaan kelapa sawit. Kedua, bagaimana terciptanya hegemoni wacana kapitalisme yang dilakukan perusahaan di Longsep? Pertanyaan ini menuntun peneliti untuk melihat dan menampilkan narasi keseharian hidup keluarga orang Punan di Longsep serta kontribusi berbagai pihak di Longsep. Hal ini guna menjelaskan bentuk-bentuk ruang negosiasi wacana dan hegemoni wacana di Longsep. Ketiga, bagaimana pengaruh hegemonisasi kapitalisme pada Punan setelah tinggal di Longsep? Pertanyaan ini menjadi arah bagi penulis untuk melakukan analisa terhadap berbagai hasil temuan data saat penelitian dilakukan.

Kajian analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan hegemoni yang terbentuk oleh wacana dominan. Pemikiran Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe berpijak dari hegemoni Gramsci menggunakan analisa wacana sebagai alat untuk melihat bagaimana hegemoni itu muncul dan bekerja. Konsep pemikiran hegemoni Laclau-Mouffe menawarkan tambahan dimensi-dimensi lain dari pemikiran Gramsci, yaitu tidak lagi memfokuskan kelas buruh sebagai praktek hegemoni namun agen sosial baru yang bisa mengisi ruang kosong dalam gerakan sosial ketika kelas buruh melemah. (Laclau & Mouffe, 2008 : xxvii) Pentingnya pemikiran Gramsci terletak pada fakta dia menekankan bahwa setiap “kelas” harus dibentuk untuk berpotensi menjadi agen aktif secara historis dan politik. (Robert Bocoock, 2015 : 137) Bahwa memungkinkan dalam suatu hegemoni muncul agen yang mampu menghimpun tandingan atas hegemoni tersebut. Gagasan ini seperti yang tercatat dalam buku *Pengantar Komprehensif untuk*

memahami Hegemoni, Laclau dan Mouffe berusaha memberikan pandangan bahwa, kesatuan hegemoni terbentuk dalam masyarakat melalui praktik-praktik artikulatif yang memiliki makna yang tidak tetap. Makna yang tidak tetap ini yang kemudian dapat dimobilisasi sebagai wacana tandingan.

Pada tanggal 24 – 30 November 2017 Peneliti melakukan observasi lapangan untuk menentukan topik serta sasaran penelitian. Ini dilakukan untuk melihat kembali relasional tema yang telah peneliti pilih serta domain penelitian untuk menjaga fokus dan membatasi kajian. Setelah dilakukannya wawancara dan perijinan penelitian ini dengan pihak terkait, pada tanggal 30 Juli sampai 06 September 2018 Peneliti mulai tinggal di Longsep. Di Longsep peneliti tinggal di rumah gembala yang dalam kondisi hampir terselesaikan pengerjaan bangunannya. Peneliti melakukan studi *lived experience* di lokasi penelitian dan membuka diri terhadap kajian teks serta penemuan wacana sesuai dengan konteks sosial, ekonomi dan politik. Model ini dilakukan dalam rangka mendapat data secara langsung dan orisinil kemudian perlu dikomparasi kembali dengan literatur lainnya. Sebagai langkah awal peneliti melakukan *oral story* atau wawancara dengan tokoh masyarakat diantaranya; Kepala Adat Dayak dan tokoh masyarakat di sekitar pemukiman Longsep, aparat pemerintah Desa dan Kecamatan secara administrasi pemerintahan dekat dan atau bersinggungan dengan Longsep. Untuk mendukung informasi dilakukan juga wawancara dengan pihak perusahaan yang diwakili CSR sebagai ‘pengelola’ langsung aktivitas perusahaan di Longsep.

Perihal penelitian ini mungkin ada yang mempertanyakan tentang rentang waktu penelitian yang satu setengah bulan dilakukan di lokasi penelitian. Tidak seperti penelitian etnografi kebanyakan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun tinggal di lokasi penelitian. Hal itu telah menjadi pertimbangan Peneliti bersama Pembimbing. Melihat pengalaman interaksi dengan komunitas Longsep telah dilakukan

selama kurang lebih 3 tahun (2013 – 2016) saat peneliti masih aktif bekerja di daerah sekitar komunitas tersebut berada. Saat itu peneliti merupakan karyawan yang tentu memungkinkan banyak interaksi dengan warga Punan Longsep dan melihat secara lebih dekat mengenai kebiasaan serta beberapa perubahan yang dialami. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya penelitian tetap dilakukan tanpa mengurangi realitas hasil temuan data yang dicari saat tinggal di Longsep. Bahkan kesempatan tinggal bersama di Longsep semakin membuka mata peneliti melihat kehidupan dari sudut pandang Punan terhadap semua pihak yang bersinggungan dengannya di Longsep. Model penelitian *lived experience* memang diharapkan memberikan informasi dengan lengkap pada suatu komunitas namun perlu domain (batasan) terhadap budaya saat penelitian dilakukan. Penetapan domain dalam etnografi ini merupakan hasil refleksi ahli etnografi seperti yang tertulis dalam *Metode Etnografi* karya James Spradley, bahwa karena waktu dan sumber daya yang terbatas kebanyakan etnografer sepakat bahwa studi yang utuh terhadap suatu budaya tidak akan pernah terlaksana. (James Spradley, 2007) Perlu diakui bahwa penelitian ini belum dapat dikatakan sebagai tulisan etnografi yang sempurna namun beberapa *set* penting dalam *Metode Etnografi* James Spradley dijadikan pedoman penelitian dan penulisan.

Tentu ketika peneliti masih menjadi karyawan salah satu perusahaan tempat obyek penelitian berada tidak banyak hal yang dapat dilakukan, terutama untuk membuat analisis dan kajian tentang Punan di Longsep. Hal ini karena keterikatan peneliti sebagai karyawan yang perlu berpegang erat pada peraturan perusahaan dan tidak kehilangan fokus pekerjaan dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Peneliti tetap meneguhkan keberpihakan pada saat penelitian dilakukan demi menjaga independensi atau kepentingan peneliti pada obyek penelitian. Tujuan penulisan ini sesungguhnya bukan hanya untuk memperlihatkan bahwa perubahan yang dialami Punan merupakan

“tragedi yang menceritakan suatu peristiwa menyedihkan seperti sebuah drama”. Tetapi berusaha memperlihatkan kepada semua pihak seperti Negara, Perusahaan, bahkan pemerintah lokal dan warga sekitar yang dialami Punan di Longsep mengenai dampak praktik kapitalisme; Ketergantungan dan dampak-dampak lain dari kapitalisme dalam kehidupan mereka (Punan Longsep) yang membuat keberlanjutan hidupnya perlu dipertanyakan. Ketika masih menjadi karyawan tentu cara pandang dan menerjemahkan tanda-tanda artikulasi di Longsep akan berbeda ketika penafsiran dan tulisan sebagai peneliti. Saat itu pula kesempatan bagi peneliti sedikit banyak belajar bahasa lokal dengan warga dayak maupun punan yang menjadi bekal pula dalam melakukan studi etnografi. Hal inilah yang memicu peneliti perlu bersikap atas keraguan beberapa pihak pada penelitian ini, bahwa penelitian dilakukan mengutamakan keberpihakan *sense* kemanusiaan.

Warga Punan Longsep dikenal pemalu saat kehadiran orang asing/baru dalam komunitasnya, beruntunglah sebelumnya peneliti telah cukup mengenal beberapa tokoh di sana. Walau demikian upaya mendekatkan diri secara sosial agar lebih ada keterbukaan tetap perlu dilakukan. Hal pertama yang dilakukan peneliti adalah pendekatan sosial kultural dengan beberapa tokoh Longsep. Beberapa diantaranya Guk (tetua) dan keluarga, Awun (ketua RT) dan keluarga, Benyiu (tetua) dan keluarga serta berusaha mengenal dan mengakrabi seluruh warga Longsep baik orang tua dan anak-anaknya. Namun tidak semua warga ada di tempat. Beberapa dari mereka yang tidak di Longsep pergi ke kampung asalnya di Long Sului Kabupaten Berau dan beberapa lainnya bersama keluarganya melakukan aktivitas di hutan, berburu babi atau hewan lainnya. Saat mereka yang pergi ke hutan tidak dapat ditentukan lama jangka waktunya. Banyak diantaranya akan pulang ke Longsep setelah buruan atau pencarian hasil hutan cukup untuk dijual dan atau dikonsumsi sendiri. Saat telah merasa diterima secara nyaman, berikutnya peneliti melakukan pencatatan demografi warga

Longsep termasuk jumlah bangunan serta perabotan di setiap rumah sekaligus menjalin komunikasi dan melakukan berbagai obrolan terkait dengan tema penelitian. Hasil pencatatan terdapat 21 bangunan terdiri dari 1 gereja dan 1 pastori, 17 rumah yang dibangun perusahaan dan 1 rumah Ping An anak dari mantan *bos* penampung gaharu hasil pencarian orang Punan Longsep. Tercatat warga Longsep 87 orang dan 12 orang diantaranya tidak dapat ditemui karena sedang beraktivitas di hutan. (Catatan demografi terdapat pada lampiran hasil penelitian) Selain Punan yang beraktivitas di hutan sebagian besar warga usia produktif (pria-wanita) bekerja sebagai buruh perkebunan sawit (panen-rawat). Pencatatan aktivitas keseharian terutama pekerjaan atau kegiatan ekonomi Punan menjadi hal yang semakin menyatakan jelas perubahan komunitas ini dalam menjalani hidup. Studi model *lived experience* memungkinkan peneliti lebih mudah memahami dan memetakan berbagai wacana sesuai kepentingan pihak-pihak di Longsep. Pemetaan demografi dan obrolan mendalam terhadap subyek penelitian (Punan Longsep) mempermudah peneliti memperoleh catatan mengenai historis perjalanan Punan dari kampung asalnya di Long Sului Berau hingga tinggal menetap di Longsep. Selain itu, data yang diperoleh mengindikasikan wacana berterbangan yang mengitari kehidupan Punan di Longsep.

Kajian teori dan metodologi penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berpegang konsep wacana kapitalisme, hegemoni dan dominasi dalam mengkaji fenomena Punan di Longsep. Kata kunci tersebut menjadi arah analisis fenomena yang ada. Ciri khas Kajian Budaya, penelitian empiris fokus pada *lived experience* (pengalaman hidup), wacana dan teks, dan konteks sosial. (Tri Subagya & Supratiknya, 2017 : 1) Upaya membaca fenomena mengacu pada 'kebenaran' realita sebagaimana adanya. Pengalaman hidup bersama dengan obyek penelitian memberikan peluang bagi peneliti melakukan

pembacaan terhadap sebuah fenomena di tengah masyarakat secara langsung dan lebih luas dari berbagai sudut pandang. Peneliti memaksimalkan pengalaman hidup bersama dengan Punan agar mampu menangkap realita hidup mereka di Longsep. Realitas keseharian orang Punan di Longsep menjalani kehidupannya menjadi data/tanda yang kemudian membangun wacana di sana.

Konsep wacana kapitalisme sendiri menjadi alat untuk melihat berbagai tanda praktik artikulasi dan suara yang tersamarkan di Longsep. Kapitalisme didefinisikan beragam oleh berbagai ahli namun hal yang mendasarinya adalah kebutuhan terhadap modal sebagai sarana produksi. Modal merupakan bagian dari sistem ekonomi yang tak terpisahkan dan terus berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Abad pertengahan mewariskan dua bentuk kapital, kapital riba dan kapital dagang yang mana dalam suatu masyarakat sebuah kegiatan ekonomi dalam susunan sosial yang berbeda-beda dan sebelum lahirnya cara produksi kapitalis yang dianggap sebagai kapital *quand meme*. (Karl Marx, 1965 : 3) Menurut Marx dalam *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, kapitalisme adalah suatu sistem produksi komoditi yang tidak hanya sebagai pemenuhan individu namun melibatkan pasar pertukaran (*exchange market*) yang mencakup nasional bahkan seringkali mencakup dunia internasional. (Anthony Giddens, 1985 : 57) Dalam kaitannya dengan Punan di Longsep, kapitalisme ditempatkan sebagai bagian terdekat dalam hidupnya. Karena nampak berbagai tanda-tanda artikulasi dalam domain kapitalisme.

Tanda kemunculan kapitalisme dan bentuk praktik kapitalisme sering diartikan dengan isu-isu kekerasan pada operasinya. Jalmi Salmi pada *Violence and Democratic Society* menyatakan kekerasan yang berlangsung dalam rangka kelanjutan kapitalisme dirumuskan dalam empat bentuk; *pertama*, kekerasan langsung yang merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis orang secara langsung, *kedua*, kekerasan tidak langsung yang bermakna tindakan yang membahayakan manusia juga, tetapi

tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut, *ketiga*, kekerasan represif yang merupakan kekerasan yang dilegalkan atau tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat yang umumnya dilakukan negara atau pemerintah, *keempat*, kekerasan alienatif yang merupakan kekerasan yang merujuk pada pencabutan hak individu yang lebih tinggi. (Athiqah Nur Alami, 2006 : 114-117) Saat penelitian dilakukan tidak ditemui praktik kekerasan langsung secara fisik dan psikologis yang dialami Punan di Longsep namun memungkinkan praktik kekerasan lainnya. Situasi ini yang hendak diperlihatkan pada fenomena keberadaan orang Punan Longsep yang tinggal di sekitar areal HGU perusahaan kelapa sawit.

Kita perlu melihat bentuk kekerasan yang dialami orang Punan Longsep saat masih di Long Sului dan ketika sudah di Longsep. Di kedua tempat itu menandakan akumulasi primitif dalam bentuk berbeda. Berbagai upaya mengalihkan, mengelabui, menyerobot ataupun memisahkan produsen lokal dari sarana produksinya dengan kekerasan merupakan akumulasi primitif tanda awal munculnya kapitalisme. Seperti beralihnya kegiatan produksi pertanian menjadi perkebunan yang dialami masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Seperti tersirat dalam catatan Marx berikut; "Pemuda-pemuda yang diculik dilemparkan ke dalam tahanan-tahanan rahasia di Sulawesi sebelum diangkut dalam kapal budak... di kota Makasar banyak penjara rahasia yang berisi penuh sesak orang-orang yang malang yang direnggut dari keluarganya." (Karl Marx, 1965 : 6) Saat-saat inilah kapitalisme lahir memainkan perannya dalam berbagai bentuk berikut juga kekerasan.

Di Long Sului mereka dipaksa untuk berhadapan secara tidak langsung dengan pasar ekonomi yang bahkan internasional. Gaharu sejak awal masehi telah menjadi komoditi perdagangan dari Nusantara ke negeri lain (India, Persia, Jazirah Arab, Afrika Utara dll). Para pedagang asal Cina dan Arab yang mencari gaharu dan

rotan sebagai komoditas utama perdagangannya berinteraksi secara langsung dengan orang Punan kemudian menjadikan mereka tenaga kerja sebagai pencari dan pengumpul komoditas ini. (Makoto Inoue, 1991) Saat-saat inilah akumulasi primitif terjadi, Punan tidak lagi bebas beraktivitas di hutan, hanya mengandalkan 'perintah' *bos* mencari mengumpulkan gaharu dan rotan. Walaupun berbasis pada perdagangan pasar internasional, upah dari pekerjaan mereka belum tentu sepadan. Ini mungkin terjadi karena tingkat pengetahuan dan kecenderungan komunikasi yang dibangun tidak banyak saling menguntungkan. Akibatnya hutang menjadi jalan bagi mereka di Long Sului untuk melanjutkan hidup. Mereka yang terjerat hutang kemudian berupaya untuk melakukan 'pelarian' dan beberapa sampai di Longsep. Di Longsep, Punan mengalami kekerasan secara tidak langsung yang memaksa mereka "hidup dengan bekerja pada perusahaan" sesuai peraturan perusahaan sehingga tidak memiliki kebebasan seperti sebelumnya. Pemaksaan tidak langsung tersebut dapat dilihat dengan berbagai peran atau aksi perusahaan yang membuat Punan secara sadar mulai meninggalkan cara hidup lamanya. Sebagai contoh; pembangunan rumah layak huni mengubah hidup nomaden di hutan, kini di Longsep mereka akan jarang ke hutan untuk berburu atau mengumpulkan hasil hutan. (Di Longsep, laki-laki maupun perempuan usia produktif sudah ikut bekerja jadi buruh sawit sedangkan anak-anak beberapa sudah mulai mengikuti kegiatan sekolah. Jadi tidak ada waktu yang cukup lama bagi mereka untuk pergi ke hutan.) Kekerasan telah dialami orang Punan saat masih di Long Sului dan ketika sudah di Longsep, walaupun di kedua tempat itu menandakan akumulasi primitif dalam bentuk berbeda. Ini terjadi saat Punan tidak lagi memiliki kebebasan di hutan dan hanya mengandalkan 'perintah' *bos* atau perusahaan saat inilah akumulasi primitif terjadi.

Peneliti meyakini bahwa segala gerak-gerik hidup Punan Longsep dipengaruhi oleh wacana kapitalisme. Dengan pendekatan

Laclau-Mouffe, teori analisa wacana yang membentuk hegemoni. Peneliti melihat berbagai aktivitas keseharian orang Punan sebagai pangkal praktik artikulatoris terstruktur yang membentuk wacana. Seperti Laclau-Mouffe berpendapat bahwa setiap praktik pembangunan suatu relasi di antara elemen-elemen itu sedemikian rupa sehingga identitas elemen-elemen tersebut termodifikasi sebagai akibat dari praktik artikulatoris, totalitas terstruktur yang dihasilkannya disebut sebagai wacana (*discourse*). (Laclau & Mouffe, 2008 : 152) Wacana merupakan totalitas tanda-tanda terartikulasikan yang disebut momen dan praktik yang tidak terartikulasikan dalam sebuah wacana sebagai unsur (elemen). (Marianne W Jorgensen dan Lousie J Phillips , 2010 : 53) Totalitas praktik/tanda yang terartikulasikan dalam hubungan antar satu tanda dan yang lainnya menjadi awal sebuah wacana. Dari berbagai praktik artikulatoris yang ada beberapa memiliki relasi dalam suatu bidang dan diidentifikasi kembali dalam kesatuan bidang lain sehingga memiliki makna. Maksudnya, beberapa praktik artikulatoris yang teridentifikasi momen dalam satu wacana kemudian memiliki relasi hubungan terkait dengan momen-momen lain bahkan wacana itu sendiri dalam suatu wacana besar. Wacana besar itu yang oleh Peneliti sebut sebagai wacana dominan. Wacana dominan ini yang kemudian berpengaruh terhadap Punan pada berbagai segi kehidupan hingga akhirnya tinggal di dalam iklim hegemoni kapitalisme.

Praktik Artikulatoris Wacana Kapitalisme di Longsep

Pada kesempatan ini peneliti memberikan beberapa hasil temuan/data dan upaya menemukannya. Beberapa tanda/data yang diperoleh dianalisis dan disatukan dalam domain kehidupan yang membentuk wacana mengambang hingga akhirnya bersatu pada titik simpul dengan makna yang sama dan dominan. Setelah mendapatkan cukup data saat observasi pertama, peneliti menentukan domain penelitian sesuai kajian teori yang dipakai.

Domain penelitian wacana kapitalisme menjadi rujukan untuk dapat menemukan dan mengidentifikasi tanda praktik artikulatoris wacana kapitalisme di Longsep. Kemudian berpedoman pada metode etnografi baru pengumpulan data dilakukan.

Etnografi baru merupakan cara yang digunakan peneliti menemukan data/tanda yang sesuai prinsip kajian budaya. Perbedaan etnografi klasik dan etnografi baru secara sederhana adalah mengenai teknik membaca obyek penelitian dan menuliskannya. Etnografi klasik merupakan suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. (Emzir, 2009 : 143) Penelitian etnografi klasik cenderung tidak membuka ruang atas berbagai 'tanda' yang hidup dalam realita masyarakat. Hal ini mengartikan bahwa etnografi klasik kurang dapat menangkap realitas tanda tersembunyi yang hidup di tengah keseharian masyarakat. Bahwa obyek penelitian tidak dapat dihadirkan secara nyata sebagai upaya pendukung kebenaran. Saat mencoba mendeskripsikan Punan Longsep, peneliti dihadapkan pada realita bahwa mereka bukan seperti yang tergambar atau bahkan digambar oleh pihak dari luar Longsep.

Etnografi baru memberikan ruang bagi kajian budaya agar memahami obyek penelitian/masyarakat memiliki kebenaran sesuai realitas hidup. Peluang ini yang memungkinkan peneliti untuk membaca fenomena dalam kerangka lebih kompleks. Sehingga pembacaan dan usaha memahami wacana yang ada terkait dengan wacana besar bahkan global ada dibalikinya. *The new interpretative or ethnographic research programme aimed to find more collaborative ways of studying and writing about people that would be both more sensitive to different worlds and aware of limits and commitments of our own understanding.* (Denzin, 1997a dalam Paula Saukko, 2003)

Penelitian *lived experience* di Longsep ini berbeda dengan hasil penelitian etnografi dalam buku "Potret Punan Kalimantan

Timur: Sensus Punan 2002 – 2003”. (Soadun Sitorus, Patrice Levang dkk, 2004) Pada hasil penelitian tersebut banyak menuliskan kembali hasil penelitiannya dengan angka, tabel atau grafik, tidak banyak memberikan analisis data tersebut dengan kajian ilmu yang terkait. Inilah yang membedakannya dengan etnografi baru. Etnografi baru dimampukan melihat adanya wacana-wacana besar dibalik wacana lokal, ini merupakan upaya menghadirkan kebenaran yang hidup di Longsep. Laclau-Mouffe memandang pula bahwa dari sekian wacana yang beterbangan dan dominan, juga membuka diri terhadap tanda yang samar yang memunculkan agen sosial baru. Agen sosial baru yang mampu membangun wacana tandingan terhadap hegemoni.

Berbagai wacana yang ada muncul karena negosiasi terhadap tanda-tanda yang terartikulasi di Longsep. Dari sekian *tanda-tanda* artikulasi di Longsep yang Peneliti catat sebagian besar adalah peran dari perusahaan yang dalam hal ini merupakan subyek artikulatoris utama. Ini karena hampir di setiap lini kehidupan punan Longsep tidak luput dari pengaruh perusahaan. Selain karena faktor kedekatan geografis, perusahaan mau tidak mau perlu ikut bertanggung jawab atas kelanjutan hidup Punan Longsep yang berada di sekitar HGU perusahaan.

Dilakukan kategorisasi pada data hasil penelitian. Kategorisasi itu sesuai domain makna yang membentuk wacana. Domain itu dalam lingkup konsep kebutuhan dasar hidup manusia sebagai makhluk sosial, dalam arti nampak pada kesehariannya di Longsep. *Pertama*, domain tinggal menetap menjadi yang paling mencolok pada Punan Longsep. Pembangunan rumah bagi Punan Longsep yang dianggap sebagai layak huni merupakan salah satu praktik artikulasi membentuk wacana tinggal di Longsep. Pembangunan rumah dan berbagai sarana penunjangnya (bangunan rumah, akses listrik, lahan plasma, program kebun buah dan sayur dan lainnya) untuk komunitas nomade dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang. Diantaranya sebagai bentuk bantuan

perusahaan merumahkan mereka agar hidup subsisten, dan atau sebagai upaya negosiasi perusahaan atas aktivitasnya menghilangkan lahan garapan digantikan dengan sawit atau merupakan paksaan agar mereka menjadi menetap dan kemudian dijadikan pekerja sawit. *Kedua*, pekerjaan merupakan domain penting dalam mengamati Punan Longsep karena pekerjaan merupakan sarana mereka memenuhi kebutuhannya. Sembari menanti waktu pembagian uang penjualan TBS (Tandan Buah Segar) hasil panen kebun plasma, Punan Longsep membutuhkan aktivitas yang dapat menghasilkan pemenuhan kebutuhan pangan kesehariannya. Aktivitas-aktivitas itu yang menjadi domain totalitas wacana pekerjaan. Setiap harinya mereka bekerja sebagai buruh sawit, kaum laki-laki bertugas sebagai pemanen buah sedangkan wanita bertugas pemungut *brondolan* sawit yang dipanen dan rawat sawit. *Ketiga*, domain religius nampak pada Punan Longsep yang telah mengenal Kristen sejak di Long Sului. Keberadaan gereja bantuan dari jemaat Dayak Kayan Kristen Miau Baru merupakan penanda awal pemicu domain religius sebagai titik simpul wacana. Momen-momen wacana religius dapat terlihat dengan tanda/praktik yang teratikusikan seperti pemberian persepuluhan sebagai ucapan berkah Tuhan, aturan dan ajaran gereja, dipahaminya larangan-larangan rokok dan perkawinan sedarah, ungkapan/pujian doa melalui perkataan saat melakukan obrolan dan kemampuan menyanyi serta memainkan alat musik dengan *genre* religi pujian pada Tuhan. *Keempat*, pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan hidup masa kini. Kaitan kedua bidang domain pendidikan dan kesehatan ini disatukan dalam satu wacana pendidikan dan kesehatan karena keduanya sama-sama bertugas untuk mengedukasi. Edukasi dalam pendidikan mengartikan usaha membentuk/membangun kemampuan intelektual orang sesuai dengan bidang yang diajarkan. Sedangkan edukasi dalam kesehatan diterjemahkan sebagai upaya menyadarkan orang akan pentingnya keadaan fisik yang bugar dan segar sehingga tidak rentan sakit.

Kelima, Dari sekian domain yang ada muncul pula wacana identitas Punan sebagai kelompok yang tertinggal. Wacana ini terbentuk oleh setiap asumsi, deskripsi hampir semua obrolan dengan warga desa sekitar Longsep karyawan perusahaan dan berbagai tulisan yang menggambarkan Punan. Sebagai contoh salah satu ungkapan bahwa kata “Punan” digunakan sebagai stigma atau istilah *ledekan* oleh anak-anak dan beberapa warga dewasa yang mendefinisikan Punan berdasarkan penglihatannya di masa lalu. Punan di Longsep dianggap tertinggal jauh dan tidak seperti kehidupan warga desa tersebut. Momen-momen seperti hasil penelitian, cerita masa lalu, *ledekan* yang ada membangun wacana identitas yang diidentikan bahwa Punan sebagai kelompok bodoh, *liar* dan terbelakang.

Hasil kategorisasi diatas dicatat sebagai berikut; wacana tinggal, wacana pekerjaan, wacana pendidikan dan kesehatan, wacana religius dan wacana identitas Punan. Masing-masing wacana tersebut dikategorisasikan berdasarkan domain kebutuhan dasar, wacana-wacana tersebut memungkinkan berterbangan mencari makna lain selain yang telah di tentukan. Dari berbagai wacana yang berterbangan yang memiliki momen-momen polisemi, melalui medan kewacanaan memperoleh makna kembali dalam wacana kapitalisme. Karena di setiap wacana tersebut terdapat praktik artikulatoris yang memiliki jalinan atau keterkaitan dengan kepentingan perusahaan. Kapitalisme dikaitkan erat dengan perusahaan sebagai kapitalis yang sekaligus subyek artikulatoris dominan dari praktik-praktik artikulatoris di Longsep. Subyek artikulatoris melakukan praktik-praktik artikulatoris dominan dan pada titik inilah hegemoni terwujud. Hegemoni memaksa obyek dengan tanpa upaya pemaksaan untuk melakukan sesuai kepentingan. Orang Punan mengalami hegemoni sehingga ‘secara sadar’ mengikuti peran sesuai posisinya dalam iklim kapitalisme

Kesimpulan

Dalam pembacaan fenomena kehidupan punan inilah etnografi baru menyatakan kehadirannya dalam memahami gerak kapitalisme pada “Tragedi” orang Punan di Longsep. Sedangkan etnografi klasik sebatas memberikan data hidup berdasar pada narasi-narasi dengan penuh kepentingan yang dapat saja kemudian mengingkari kebenaran hidup. Metode etnografi klasik tidak memungkinkan peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian melihat gerak gerik kapitalisme. Sedangkan studi *lived experience* etnografi baru sangat membantu peneliti menemukan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut beberapa poin dan narasi yang menjawab pertanyaan penelitian;

Pertanyaan pertama, mengapa dan bagaimana Proses perpindahan Punan Longsep dari Long Sului hingga ke Longsep? Awalnya Punan di Longsep merupakan suku yang berasal dari Long Sului. Mereka melakukan perjalanan dari Long Sului singgah di beberapa tempat hingga akhirnya sampai di Longsep. Ketika tiba di Longsep mereka meminta ijin tokoh-tokoh Dayak Wehea dan dan Dayak Kayan yang telah lebih dahulu menempati daerah tersebut. Ketika di Long Sului mereka telah menjadi pekerja dari salah satu *bos* asal Cina bernama Sintaq pedagang gaharu, rotan dan hasil hutan lainnya. Saat bekerja sebagai pencari gaharu mereka terlilit hutang dengan *bos*. Inilah salah satu alasan beberapa orang Punan Long Sului melakukan perjalanan hingga ke Longsep. Pada tahun 1989an Punan berpindah ke Nahas Banung yang tidak jauh dari Long Sului. Ada 7 kepala keluarga yang tidak ikut pindah ke Nahas Banung memilih melakukan perjalanan hingga ke Longsep. Kondisi alam dan kegiatan orang Punan di Long Sului diperoleh dari obrolan dengan beberapa warga Longsep. Salah satunya *Naek* Ulai (54) yang menceritakan bahwa, ‘...di Sului orang-orang kerja (*mencari emas, gaharu dan rotan...*, (*tidak mencari ikan*) *air sungai “jahat” dan di Sului itu batu-batuan dan terjal di atas gunung-gunung.., tapi*

kalo di Nahas Banung (itu) datar.¹ Selain itu alasan ketersediaan gaharu dan hasil hutan lain mulai sulit dicari sedangkan mereka butuh bekerja untuk membayar hutang akhirnya melakukan perjalanan hingga tiba di Longsep. Areal Longsep saat itu diceritakan sebagai *hutan gaharu* (rimbun dengan gaharu). Di Longsep kemudian mereka diketemukan kembali dengan *bos* Sintaq dan kembali bekerja untuknya mencari gaharu di Longsep dan sekitarnya. Saat Gaharu di sekitar Longsep mulai habis dan sulit dicari mereka tetap tinggal di Longsep. Hingga perusahaan kayu pada tahun 1985 mulai berinteraksi dengan Punan dilanjutkan pada tahun 1989 oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Punan di Longsep banyak berinteraksi dengan perusahaan sehingga sering mendapatkan program bantuan yang menunjang kehidupan mereka. Ini wujud kapitalisme memainkan geraknya, sehingga mereka menetap di Longsep enggan kembali ke kampung asalnya di Long Sului.

Pertanyaan kedua, bagaimana terciptanya hegemoni wacana kapitalisme yang dilakukan perusahaan di Longsep? Mengenai ini beberapa poin penting telah dijelaskan pada bagian *Praktik Artikulasi Wacana Kapitalisme* di atas. Bahwa pada wacana-wacana yang berterbangan di Longsep terdapat wacana besar/dominan yang mengorganisir setiap momen-momen polisemi dari wacana tersebut. Perusahaan sebagai aktor utama/subyek artikulatoris yang melibatkan Punan pada wacana kapitalisme. Dominasi wacana kapitalisme telah sungguh menampilkan perannya pada kehidupan orang Longsep. Di berbagai bidang hidup perusahaan hadir memainkan kepentingan bisnisnya. Dapat saja kita memandang apa yang terjadi pada orang Longsep merupakan seperti aksi kemanusiaan dan tanggung jawab

¹ Obrolan dengan *Naek* Ulai pada 08 Agustus 2018. *Naek* Ulai adalah istri Wahai, salah satu orang dari 7 kepala keluarga yang pertama tiba di Longsep.

sosial. Namun latar belakang ekonomi yang mendasari praktik operasional perusahaanlah hal itu menjadi diragukan. Motivasi bisnis selalu menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan sebuah program atau bantuan. Hegemoni wacana kapitalisme dalam hidup orang Longsep membuat seolah bergantung dan tak berdaya pada perusahaan.

Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh hegemonisasi kapitalisme pada Punan setelah tinggal di Longsep? Praktik-praktik kapitalisme telah akrab dalam kehidupan Punan di Longsep. Saat praktik artikulasi wacana kapitalisme tidak berhenti dan terus memberikan kenyamanan yang berlebihan dapat saja menjadikan Punan di Longsep semakin berpikir praktis. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan selalu mengandalkan perusahaan yang artinya praktik-praktik artikulasi perusahaan diterjemahkan sebagai kesempatan bergantung pada perusahaan. Ketergantungan inilah yang berbahaya bagi Punan di Longsep. Mereka menjadi selalu mengharap bantuan perusahaan untuk kelanjutan hidup mereka. Selain itu iklim kapitalisme ini mampu mengubah cara hidup Punan menjadi semakin individualis dan konsumtif. Pada akhirnya ketergantungan warga Punan Longsep pada perusahaan membuat mereka tak dapat melakukan sesuatu yang dapat saja dilakukan sendiri. Ini merupakan sebuah peristiwa yang menyedihkan. Punan tidak lagi memiliki kebebasan dan mengembangkan hidup. Bukan berarti bahwa perubahan yang dialami Punan di Longsep tidak layak mereka alami, namun perusahaan perlu bertanggung jawab pula mempersiapkan kemajuan hidup mereka dalam iklim kapitalisme. Bukan sebaliknya, membuat mereka menggantungkan diri pada perusahaan yang akhirnya menjadikan mereka sebagai bagian dari alat produksi dan komunitas yang semakin tertinggal. Dari sekian wacana ada saat penelitian dilakukan belum diketemukan momen-momen yang dapat diartikulasikan membuat wacana tandingan atas hegemoni wacana kapitalisme di Longsep. Belum diketemukan

agen sosial baru yang dipandang mampu untuk membentuk kesatuan wacana tandingan atas hegemoni wacana kapitalisme.

Menggunakan analisis wacana memungkinkan peneliti menjadi lebih jelas memandang sosok perusahaan. Perusahaan sebagai subyek artikulatoris secara nyata menggerakkan momen-momen yang hidup. Kesatuan momen-momen dalam wacana inilah yang kemudian membangun hegemoni, pemaksaan secara sadar. Subyek artikulatoris itu mengusung wacana kapitalisme yang pada gilirannya bertugas secara diam, 'memaksa' dan mengekang Punan di Longsep masuk dalam bagian dari skenario kapitalisme. Skenario dalam tema kapitalisme ini sebenarnya telah menceritakan *scene* tragedi. Punan menjadi pribadi yang konsumtif dan individualis adalah cerminan 'tragedi' bahwa terjadi krisis dalam hidup mereka. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan etnografi baru karena sangat memungkinkan inklusifitas dalam penelitian empiris. Bahwa penelitian etnografi baru tidak hanya deskriptif namun sangat memungkinkan analitis. Metode penelitian etnografi baru mampu memberikan gambaran lain dari fenomena kehidupan Punan di Longsep. Dengan etnografi baru jawaban pertanyaan penelitian diperoleh langsung sebagaimana realitas hidupnya. Informasi yang disajikan pada hasil penelitian dalam bentuk narasi merupakan cara untuk menyampaikan data seperti yang disampaikan oleh informan.

Perlu memberi perhatian khusus bagi Punan Longsep, karena *nyaris* punan menggantungkan hidup sepenuhnya pada perusahaan. Hal ini yang menjadikan petanda bahwa peran perusahaan sebagai subyek artikulatoris telah sangat memungkinkan menjadikan Punan Longsep sebagai *nilai surplus/nilai lebih* dalam iklim Kapitalisme. Seperti prinsip ekonomi bahwa kapitalis mengejar laba dan menceraubut produsen lokal dari sarana produksinya (akumulasi primitif) merupakan praktek artikulasi kapitalisme.

KEPUSTAKAAN

- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jorgensen, Marianne W dan Phillips, Lousie J. 2010. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*, Ed Prof. Dr. Abdul Syukur Ibrahim, terj. Imam Suyitno, Lilik Wahyuni dan Suwarna, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Giddens, Anthony. 1985. *Kapitalisme dan teori sosial modern suatu analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Terj. Suheba Kramadibrata. Jakarta: UI-Press.
- Inoue, Makoto. Lugin dan Igin Bilung. 1991. *Changes in Economic Life of the Hunters and Gatherers: the Kelay Punan in East Kalimantan*. Tropics Journal.
- Laclau, Ernesto dan Mouffe, Chantal. 2008. *Hegemoni Dan Strategi Sosialis: Post Marxisme dan Gerakan Sosial Baru – Ernesto Laclau and Chantal Mouffe* judul asli *Hegemony and Strategy: Toward a Radical Democratic Politics/ Ernesto Laclau and Chantal Mouffe 1999*, Ed Dian Yanuardy. Terj Eko P Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.
- Marx, Karl. 1965. *Asal Usul Kapitalis Industri (Bab XXXI “Kapital” Jilid I Karl Marx)*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Y Tri Subagya dan A. Supratiknya (pengampu) 2017 Melakukan Riset dalam Kajian Budaya: Pengantar ke Aneka Pendekatan Metodologis Klasik maupun Baru Paulo Saukko. Dipakai sebagai salah satu sumber bacaan mata kuliah Metodologi Penelitian pada Program Magister Ilmu Religi dan Budaya (Kajian Budaya). Pengampu Y Tri Subagya dan A. Supratiknya. 2017. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

- Saukko, Paula. 2003. *Doing Research in Cultural Studies; An Introduction to Classical and New Methodological Approaches*. SAGE Publication; London . Thousand Oaks . New Delhi.
- Sitorus, Soadun, dkk. 2004 . *Potret Punan Kalimantan Timur: Sensus Punan 2002 – 2003*. Jakarta: Center for International Forestry Research.
- Spradley, James P. 2006. *Metode Etnografi. terj The Ethnographic Interview (1979)*. Tiara Wacana: Yogyakarta

PENANGGAP

Muhammad Reza Shahib

Sangat menarik apa yang dilakukan mas Damas. Pengamatan diarahkan kepada bagaimana posisi masyarakat dalam ekspansi perkebunan sawit. Saya sendiri sejak sekitar 2001 itu banyak belajar pada masyarakat yang terisolasi oleh ekspansi perkebunan sawit di lapangan. Metodologi penelitian yang lebih dibangun adalah mengenai bagaimana kita banyak belajar mengenai soal konflik agraria, soal masyarakat. Juga, konflik agraria yang melibatkan tuduhan seperti komunis, melibatkan penggusuran, dan bagaimana tanah yang diambil itu kemudian kemudian dijadikan lahan sawit. Tadi banyak diceritakan bagaimana masyarakat sekitar perkebunan sawit juga industri ekstraktif lainnya, tambang. Bagaimana membangun analisis triangulasi terhadapnya. Tidak jelas memang budayanya dalam masyarakat yang sedemikian -budaya urban atau rural, menjadi tidak jelas. Hal ini terkait dengan bagaimana pola konsumsi dan produksi di satu sisi, mengenai putaran duit, yang sangat industrial, sangat besar. Pola konsumsi yang sedemikian bergeser secara signifikan dalam arti bahwa pendapatan tidak bisa dibelanjakan untuk hal-hal seperti layaknya orang di kota dengan lebih banyak fasilitas di luar selain fasilitas dasar, termasuk untuk mengapresiasi budaya, berkehidupan sosial.

Terkait metodologinya sangat menarik. Metodologi ini lahir dari kritik, yaitu metodologi dengan interaksi di 2 subjek penelitian, baik di masyarakat maupun di dunia kerja yang sedang digeluti. Jadi penelitian yang tidak sekedar *desk research*. Hal ini dilakukan baik sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama saat berada dalam dunia kerja, atau melakukan penelitian dengan masuk ke dunia kerja. Ada interaksi dengan dan di antara 2 subjek.

Pada judul kita mendapati hal menarik dimana pengamatan terhadap kapitalisme sudah dinyatakan dalam judul tersebut, mengenai bagaimana kapitalisme bekerja dipandang dalam etnografi baru. Tidak sekedar *desk research*, berangkat dari kritik terhadap etnografi klasik. Ada proses mencelupkan diri dinamika, sekaligus membaca fenomena.

Pembacaan secara mendalam perlu dilakukan dari titik ini. Dari sini, muncul kesan bahwa seolah-olah masyarakat yang pasif, *victim*, korban, tidak terlalu terbaca respon mereka. artinya bangunan pengetahuan, sistem budaya. Bahasan mengenai tutur bahasa memberikan informasi mengenai hal ini. Bagaimana asal mula muncul situasi kebahasaan ini. Tidak jelas bahasa tutur yang dipakai, bahasa Daya sulit. Bahasa asli tidak muncul.

Bahasan mengenai cara kapitalisme bekerja sangat singkat. Jika kita mengambil misal kapitalisme klasik, ada rujukan pada definisi bahwa persepsi sosial masyarakat sangat dipengaruhi semata-mata oleh cara produksinya. Pun jika menggunakan teori hegemoni, termasuk yang masih dalam tradisi neo-marxis, rujukan ini sebenarnya meluas. Rujukan ini menunjuk pada bagaimana kelas dominan menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi, mendominasi. Dalam rujukan yang demikian, persepsi mengenai latar belakang suatu komunitas atau lebih individu terbentuk juga diinterpretasi secara lebih luas. Pola konsumsi juga itu akan mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, cara merespon orang.

Metodologi yang digunakan dan dibangun sangat menarik tapi kaitan dengan bagaimana masyarakat berubah masih perlu didiskusikan sehingga bahasan akan lebih kayak. Bagaimana perpindahan dari Berau ke Longsep, seperti apa di Longsep, seperti apa di kesehariannya. Bagaimana akses terhadap hak-hak dasar. Bagaimana itu dipenuhi oleh otoritas. Bagaimana otoritas dalam hal ini Pemerintah itu bertindak dalam hal-hal demikian.

Mengenai perihal kapitalisme, perlu diperdalam mengenai pengaruhnya pada masyarakat, mulai dalam hal bagaimana

mendapat uang, dan untuk tujuan apa uang tersebut digunakan. Hal-hal demikian akan memberikan gambaran mengenai masyarakatnya. Kita perlu menghindari viktimisasi saya. Viktimisasi menunjuk pada perlakuan terhadap masyarakat semata-mata pasif dan korban. Perlu untuk tidak gagal membaca respon masyarakat tersebut. Artinya, meskipun mereka diliputi dengan tantangan-tantangan, masyarakat mempunyai keunggulan-keunggulan orisinal yang lahir dari kehidupan mereka -bagaimana cara mereka bertahan. Ini yang amat penting dalam analisis. Dalam analisis ini, ada pengamatan jangka panjang, juga dalam hal advokasi, terhadap kesejarahan masyarakatnya, terhadap benturan-benturan dari yang dihegemoni dengan yang meng-hegemoni. Perlu mencari cara dalam hal mengamati perubahan, bukan semata otoritas yang menjadi baik, tetapi masyarakat yang juga melakukan atau mengalami berubah. Mereka melakukan respon kapitalisme yang sedang terjadi. Ada pertimbangan-pertimbangan dalam pembentukan pengetahuan mereka -ada yang bisa dituturkan, ada yang ada dalam dirinya, bersifat intuitif, dan yang dinyatakan dalam tindakan-tindakannya. Ada hal-hal yang juga kita amati dimana ada adaptasi terhadap hegemoni yang terjadi, terhadap kapitalisme tersebut.

Digitalisasi dalam Membangun Jaringan Industri Pemasok Minyak dan Gas Bumi dengan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Perkotaan

Ichmi Yani Arinda Rohmah
Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional
Email: ichmi@civitas.unas.ac.id

A. Pertanyaan Penelitian

Era industri 4.0 membawa perubahan yang cukup signifikan pada semua sektor, termasuk salah satunya adalah sektor industri minyak dan gas (migas). Perubahan tersebut tidak terlepas dengan adanya peran teknologi digital. Berbagai jaringan informasi dapat diperoleh dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Hal tersebut memberikan peluang bagi industri migas, khususnya di bagian hilir untuk mendistribusikan minyak dan gas yang siap pakai kepada para konsumen, salah satu sektor yang paling banyak memanfaatkan minyak dan gas adalah kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) di perkotaan.

Bahkan pada beberapa kesempatan, terdapat perusahaan gas bumi menjalin kerjasama dengan kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan komitmen akan membantu UKM dalam penyediaan sumber energi bersih secara keberlanjutan (Amanda, 2020). Kerjasama yang dibangun tentu sedikit banyak akan memberikan manfaat kedua belah pihak, meskipun dalam kondisi tertentu UKM yang memiliki modal kecil masih banyak yang mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak dan gas bumi (Antara/agt, 2018).

Pada dasarnya sumber energi minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau

memiliki keterbatasan jumlahnya. Sewaktu-waktu industri migas akan mengurangi jumlah produksi minyak dan gas bumi karena keterbatasan jumlah sumber energy dari alamnya. Informasi ini yang seharusnya juga diinformasikan kepada kelompok masyarakat pengguna minyak dan gas bumi, sehingga dapat memilik sumber energi alternatif ketika terjadi kelangkaan minyak dan gas bumi.

Adanya kemajuan teknologi informasi menjadi sebuah pilihan alternatif bagi industri minyak dan gas bumi dalam membangun jaringan dengan para konsumen. Pemanfaatan teknologi digital industri migas dapat meningkatkan pelayanan informasi tentang ketersediaan produksi sumber energi minyak dan gas bumi, sekaligus dapat memberikan pelayanan distribusi yang optimal kepada masyarakat ketika minyak dan gas bumi yang diproduksi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Teknologi digital yang dimaksudkan dapat berupa aplikasi android, website, dan lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana strategi industri migas memanfaatkan teknologi digital untuk membangun jaringan dalam meningkatkan pelayanan informasi dan distribusi minyak dan gas bumi kepada kelompok usaha kecil menengah di perkotaan.

B. Kajian Teori dan Metodologi

a. Kajian Teori

1) Teori Jaringan

Barry Wellman (1983) menjelaskan bahwa dalam analisis jaringan lebih pada mempelajari tentang keteraturan cara dan kolektivitas dalam berperilaku. Selain itu, juga perlu untuk mempelajari tentang pola ikatan-ikatan yang menghubungkan para aktor di dalam struktur sosial (Ritzer, 2014). Terdapat lima indikator yang

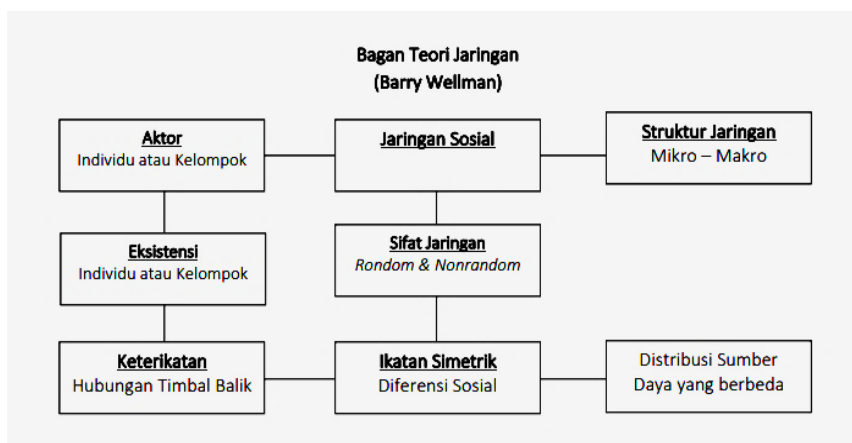
dijelaskan oleh Wellman (1983) tentang ikatan-ikatan dalam jaringan sosial, yaitu:

Pertama, sifat simetris dari ikatan-ikatan antar aktor baik di dalam core maupun intensitasnya. Para aktor di dalam kelompoknya saling memberikan support antara satu dengan lainnya, baik dalam kapasitas yang besar maupun kecil. Kedua, perlu adanya analisis pada ikatan-ikatan yang terbentuk antara individu-individu di dalam kondisi struktur jaringan mulai dari yang kecil hingga struktur jaringan yang lebih besar. Ketiga, terbentuknya jaringan tidak acak (nonrandom networks) di dalam ikatan sosial antara aktor. Keempat, terbentuknya hubungan lintas individu maupun kelompok ketika terdapat eksistensi yang terlihat antara kelompok-kelompok yang ada. Kelima, pada sebuah sistem terdapat unsur-unsur yang memiliki ikatan dengan sifat simetrik, sehingga dalam hal tersebut terkadang sumber daya yang terdistribusikan kepada individu-individu maupun kelompok-kelompok yang ada cukup berbeda (Ritzer, 2014).

Wellman dan Wortley (1990) memberikan penjelasan bahwa teori jaringan memiliki kekhasannya yang memberikan fokus perhatian pada struktur-struktur mulai dari yang mikro hingga struktur yang makro. Para aktor di dalam jaringan dimaknai sebagai individu-individu yang saling terkait (Ritzer, 2014). Pada referensi lain yang dijelaskan oleh W.Baker (1990); Clawson, Nestadtl, dan Bearden (1986); kemudian Mizruchi dan Koenig (1986) dijelaskan pula bahwa aktor-aktor di dalam jaringan yang dimaksudkan juga bisa merupakan kelompok-kelompok, korporasi, dan warga masyarakat yang berjejaring (Ritzer, 2014).

Hubungan antara aktor di dalam jaringan dapat terjadi pada level struktur sosial yang berskala besar hingga mikroskopik. Granoveter (1985) juga menjelaskan adanya hubungan-hubungan yang terbentuk antara aktor pada level mikro, yang mana dalam level tersebut terdapat “kelekatan” pada hubungan yang bersifat pribadi dan struktur maupun jaringan-jaringan yang terbentuk. Hal

yang menjadi dasar dari hubungan antara aktor tersebut adalah adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor, seperti perihal yang bersifat materialistik, otoritas atau kekuasaan, dan informasi). Dengan demikian, hal yang mungkin terjadi di dalam struktur sosial adalah terbentuknya stratifikasi dan rasa saling ketergantungan antara satu dengan lainnya (Ritzer, 2014)



b. Metodologi

1) Objek Penelitian

Objek penelitian di Perusahaan Pertamina dan Kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) kuliner di Jakarta Selatan yang masih menggunakan energi minyak atau gas untuk memproduksi sajian kulinernya.

2) Jenis Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif seringkali digunakan sebagai metode untuk menginterpretasikan gejala-gejala sosial di masyarakat. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan pemaknaan realita sosial. Peneliti dalam penelitian kualitatif

dicirikan memiliki kedekatan yang erat dengan subjek penelitiannya (Denzin & Lincoln, 2009).

3) Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Observasi

Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah jenis observasi nonpartisipan. Peneliti akan mengobservasi bagaimana perusahaan minyak dan gas memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu strategi dalam membangun jaringan dengan para konsumen, khususnya kelompok usaha kecil menengah.

Selain itu, peneliti juga mengobservasi bagaimana kelompok usaha kecil menengah kuliner memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh layanan informasi dan jasa distribusi minyak ataupun gas dari pemasoknya.

b) Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung dan terbuka. Informan yang akan diwawancarai yaitu pegawai perusahaan minyak dan gas yang ada di posisi pengelola teknologi informasi digital di perusahaan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara kepada kelompok usaha kecil menengah kuliner yang memanfaatkan teknologi digital/aplikasi yang terhubung dengan perusahaan migas.

c) Dokumentasi

Data dokumentasi berupa foto-foto kegiatan maupun dokumen yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan focus penelitian ini, baik dari perusahaan migas maupun dari kelompok usaha kecil menengah.

4) Teknik Pengecekan Kevalidan Data

Teknik pengecekan kevalidan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode atau teknik.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan cara untuk menguji keakuratan data dengan cara peneliti harus melakukan pengecekan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengecekan data pada beberapa informan yang berbeda-beda tetapi memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

b) Triangulasi Metode/Teknik

Triangulasi metode atau teknik merupakan cara untuk menguji keakuratan data dengan cara peneliti melakukan pengecekan data kepada sumber informasi yang sama, namun teknik pengambilan datanya berbeda (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengecekan data dengan membandingkan hasil perolehan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data dari Miles dan Huberman (1984) yaitu dengan cara: (1) Data Collection, (2) Data Reduction, (3) Data Display, (4) Conclusions: Drawing/Verifying (Sugiyono, 2013).

C. Kesimpulan

Kemajuan teknologi digital di era industri 4.0 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Era industri 4.0 mencirikan masyarakat yang semakin open mind dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal

tersebut yang kemudian menjadi kesempatan bagi para pebisnis termasuk di berbagai sektor, termasuk industri minyak dan gas untuk meningkatkan jaringan informasi kepada kelompok masyarakat tentang barang maupun jasa yang dikomersialkan. Melalui teknologi pelaku industri migas dapat membangun jaringan dengan kelompok usaha kecil menengah, selain untuk memberikan informasi tentang ketersediaan sumber energi minyak dan gas yang diproduksi, juga dapat meningkatkan pelayanan distribusinya. Hal lain yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok usaha kecil menengah dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu memberikan evaluasi, kritik, dan saran kepada pemasok minyak dan gas bumi dalam memberikan pelayanannya.

KEPUSTAKAAN

- Amanda, G. (2020, 08 11). PGN dan UMKM Sinergi Menunjang Ekonomi Berkelanjutan. Retrieved 07 04, 2021, from [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/qewln4423/pgnumkm-sinergi-menunjang-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan):
<https://www.republika.co.id/berita/qewln4423/pgnumkm-sinergi-menunjang-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan>
- Antara/agt. (2018, 11 27). Masyarakat Daerah Keluhkan Kelangkaan dan Kenaikan Harga LPG. Retrieved 07 04, 2021, from [CNN Indonesia](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181126161932-85-349360/masyarakat-daerah-keluhkan-kelangkaan-dan-kenaikan-harga-lpg):
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181126161932-85-349360/masyarakat-daerah-keluhkan-kelangkaan-dan-kenaikan-harga-lpg>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Hanbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

PENANGGAP

Yovita Indrayati

Luar biasa penelitiannya ini karena bisa mengaitkan teknologi informasi teknologi informasi dengan usaha mikro kecil menengah dan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah kita untuk mendukung iklim investasi khususnya UMKM. Ada beberapa hal mungkin yang bisa dijadikan sebagai bahan *sharing* kita berdua dari paparan Ichmi tadi, yang menarik sekali. Ada gambar, alurnya jelas. Saya belum menemukan sebetulnya ada persoalan apa dengan UMKM terkait dengan pasokan bahan bakar itu sehingga dibutuhkan penelitian tentang strategi tentang membangun jaringan. Itu yang saya belum menemukan. Karena kalau dari penjelasan mbak Ichmi Yani tadi itu, saya melihat bahwa sebetulnya sudah tidak ada persoalan karena semuanya sudah bisa teratasi dengan adanya sistem teknologi informasi yang ada. Jadi saya belum melihat bahwa ini ada kepentingan apa sih sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Mungkin nanti mbak Ichmi bisa menjelaskan pada saya, mungkin yang belum paham begitu, karena kita ada pada dua bidang ilmu yang berbeda. Saya kebetulan hukum begitu. Itu yang pertama yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian untuk metodologinya, teorinya menggunakan teori jaringan karena memang penelitiannya tentang jaringan strategi untuk jaringan digital tadi. Kemudian juga dengan metode metode penelitiannya ini tadi. Hanya untuk sasarannya, yang menjadi pertanyaan saya itu kenapa memilih Jakarta. Apakah Jakarta itu, untuk ukuran kota megapolitan, ada masalah dengan persoalan jaringan sistem digital ini. Untuk kelas Jakarta saja, itu

apakah ada masalahnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dengan daerah-daerah lain terutama yang terpencil terluar, yang terpinggirkan. Itu hal kedua. Hal yang pertama adalah saya belum melihat ada persoalan apa sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah kenapa memilih Jakarta yang jelas bahwa itu megapolitan dengan sistem yang serba modern dengan fasilitas yang paling lengkap. Saya berpikir kalau Jakarta saja memang punya masalah bagaimana dengan wilayah Indonesia yang lain padahal kita mau mendukung UMKM. Itu yang yang kedua. Ini lebih ke klarifikasi. Kemudian mudah-mudahan juga bermanfaat untuk penelitian yang menarik ini. Kemudian yang ketiga adalah kenapa kok memilih usaha kuliner. Apakah karena memang bisnis kuliner itu cukup menjanjikan, dan memang itu yang paling gampang dilakukan, dan tumbuh seperti jamur di kala hujan, apalagi pada masa pandemi. Luar biasa itu.

**Moderasi Beragama Umat Kristiani Melalui Media Sosial: Riset
Pada Tiga Wilayah, Semarang Raya, Solo Raya & Daerah Istimewa
Yogyakarta²**

Andreas Pandiangan
Adrianus Bintang Hanto Nugroho
Andreas Ryan Sanjaya
UNIKA Soegijapranata

Email:

pandiangan@unika.ac.id, bintang@unika.ac.id,
ryansanjaya@unika.ac.id

Pertanyaan Penelitian

Moderasi beragama di Indonesia menjadi kebutuhan utama guna merawat perjalanan bangsa ini menuju cita-cita sebagaimana dimaksud di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea 4: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”.

² Andreas Pandiangan, Adrianus Bintang Hanto Nugroho, Andreas Ryan Sanjaya, 2021, *Moderasi Beragama Umat Kristiani Melalui Media Sosial: Riset Pada Tiga Wilayah (Semarang Raya, Solo Raya & Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Penelitian didanai Program Penelitian Kompetitif SBKU tahun 2021 Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Sehingga moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) (Kementerian Agama, 2019: 17-18). Maka perihal moderasi beragama tidak hanya menyangkut umat Islam tapi justru moderasi beragama berlaku bagi semua pemeluk agama lain termasuk juga umat beragama Kristiani (Katolik dan Protestan).

Salah satu tantangan aktual moderasi beragama adalah implementasi 4 indikator moderasi yakni 1) Komitmen kebangsaan; 2). Toleransi; 3). Anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal di ruang media sosial. Wahid Foundation (2018: 10) mencatat bahwa penguatan intoleransi dilakukan melalui media massa termasuk media sosial. Media massa termasuk media sosial merupakan infrastruktur pokok yang digunakan kelompok intoleran dan radikal dalam upaya melakukan dominasi atas isu-isu keagamaan.

Pada praktik dunia internasional, Statista.com mencatat lima media sosial paling populer di dunia adalah berurutan dari Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Weixin/WeChat (Clement, 2020). Penghitungan tersebut dilihat dari jumlah pengguna. Sementara dalam konteks Indonesia ditemukan hal yang sedikit berbeda. Lima media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia adalah berurutan YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter (Jayani, 2020). Persamaan dari kedua konteks tersebut adalah posisi pertama hingga ketiga (secara tidak berurutan) diraih oleh tiga media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, dan YouTube.

Studi komunitas Young Interfaith Peacemaker (YIPC) menunjukkan peranan media sosial untuk membangun perdamaian [dengan cara] menghilangkan prasangka-prasangka yang terjadi

antar agama. (Huda & Fila, 2019). Menurut riset tersebut media sosial memiliki peran sebagai sarana komunikasi mewujudkan perdamaian termasuk kerukunan umat beragama. Artinya, media sosial terbukti memiliki peranan penting dalam gerakan pembangunan perdamaian antar agama. untuk mendorong orang memahami perdamaian, khususnya dalam hal praktik beragama.

Dengan pertimbangan itulah riset ini akan mengeksplorasi dan memetakan isi pembicaraan di media sosial khususnya kelompok-kelompok WA berbasis gereja/jemaat sebagai 'lokasi digital' komunitas umat Kristiani. Mengapa komunitas umat Kristiani?. Selama ini ada kesan yang terbangun bahwa karena minoritas maka Kristiani akan otomatis mendukung moderasi beragama. Suatu kesan dan anggapan yang perlu dibuktikan dengan memetakan di 4 indikator moderasi beragama yakni: 1) Komitmen kebangsaan; 2). Toleransi; 3). Anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada pertanyaan: 1. Isu-isu moderasi beragama seperti apa yang ada dan didiskusikan dalam kelompok WA komunitas umat Kristiani berbasis gereja/jemaat di wilayah Semarang Raya, Solo Raya, dan DIY?, 2. Bagaimana potensi pembentukan gerakan membangun moderasi beragama di media sosial khusus kelompok WA berbasis gereja/jemaat di wilayah Semarang Raya, Solo Raya, dan DIY guna menciptakan kerukunan umat beragama?

Wilayah penelitian yang dimaksud Semarang Raya terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Solo Raya terdiri dari Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Sementara DIY terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Kajian Teori dan Metodologi

Pertama, riset dari Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri (2019: 95-100), mengatakan bahwa pemahaman tentang moderasi beragama

harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat. Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri menemukan bahwa dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya lima karakteristik. Pertama, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. *Kedua*, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan semacamnya. *Ketiga*, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. *Keempat*, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. *Kelima*, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbat*). Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi *Rahmatan lil 'Alamin*.

Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri menyimpulkan bahwa Islam tidak menganggap semua itu sama tapi memperlakukan semua agama itu sama, dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasattiyah itu sendiri yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama yang lain. Dan adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep *tasamuh* (toleransi). Sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam. Dapat dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah hidup bersampingan dan saling toleransi, akan menjaga kestabilan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Konsep lainnya yang ditawarkan oleh Islam yaitu *tawazun* (berkesimbangan), *l'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tahawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).

Riset kedua, dilakukan Elma Haryani (2020: 145-158) atas teror pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 08.45 yang dilakukan seorang anak 19 tahun terhadap Pastor Albertus

Pandriangan yang sedang menyampaikan khotbah di Gereja Santo Joseph Medan. Elma Haryani menyimpulkan bahwa pelaku penyerangan adalah seorang anak muda yang besar kemungkinan terjadi akibat dampak perkembangan teknologi yang cepat yang memudahkan seorang anak menangkap ide atau paham keagamaan secara personal (tanpa guru). Kedua, seiring perkembangan media, berkembang pula paham keagamaan yang radikal yang mudah diakses dan dikonsumsi pelaku. Ketiga, beberapa pemuka agama, tokoh masyarakat, aparaturnya keamanan memandang perlu pengembangan pendidikan moderasi beragama berbasis keluarga. Oleh karena itu Elma Haryani merekomendasikan: 1. Perlunya pendidikan moderasi beragama dikembangkan dalam lingkungan keluarga; 2. Beberapa teknis pendidikan moderasi beragama yang bisa dilakukan orang tua antara lain sering-sering orang tua mengajak dialog secara terbuka pada anak untuk membangun sikap moderat dalam paham keagamaan anak.

Riset ketiga, dari Demsey Jura (2020: 315-323) yang menyebutkan bahwa tantangan untuk beragama secara moderat dalam bingkai NKRI memberi tantangan tersendiri sebab dalam kemajemukan beragama dan kondisi mayoritas-minoritas seringkali dijadikan alasan untuk menolak keberadaan agama lain. Salah satunya adalah radikalisme agama yang ada pada hampir semua agama. Konflik SARA yang pernah terjadi di Ambon dan Poso beberapa tahun yang lalu harusnya menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak. Untuk itu diperlukan moderasi agama guna mencegah radikalisme dan juga liberalisme dalam setiap agama. Pemahaman keyakinan keagamaan akan membawa kesejahteraan jika ditmepatkan pada porsinya masing-masing.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Disebabkan, ada permasalahan, yakni moderasi beragama umat kristiani melalui media sosial, yang perlu dieksplorasi. Ekplorasi diperlukan disebabkan: ada kebutuhan untuk mempelajari masalah suatu

kelompok atau populasi tertentu; mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya; kebutuhan pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut; dan menyajikan jalan keluar dari permasalahan yang dibahas dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2015: 63-65, 145). Dengan pendekatan studi kasus maka fokus penelitian pada mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus (moderasi beragama umat Kristiani). Metode ini dipilih karena tim peneliti berupaya untuk menemukan jawaban dari persoalan yang kompleks karena menyangkut pandangan, tindakan komunikasi di dalam grup percakapan, serta pandangan umat Kristiani tentang indikator-indikator yang ada dalam moderasi beragama. Namun, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai kajian holistik tentang moderasi beragama umat Kristiani melalui media sosial, namun lebih menekankan representatif. Metode studi kasus akan didukung dengan metode etnografi digital (Christine Hine, 2000), Nasrullah 2019). Termasuk di dalamnya analisis jaringan sosial di masing-masing komunitas (Agusyanto, 2014).

Interaksi anggota kelompok WA juga berkaitan dengan isu-isu Moderasi Beragama. Dinamika ditelaah dalam masing-masing indikator. Indikator Komitmen Kebangsaan mencakup 9 sub indikator yakni: 1. Mencintai Tanah Air; 2. Bersedia Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia; 3. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; 4. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara

Berikut sub indikator lainnya: 5. Bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; 6. Pemuliaan dan pemajuan potensi diri dan hasil karya yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara; 7. Semangat gotong-royong demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika; 8. Semangat memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan 9. Peran dan kewajiban negara dalam

menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinnekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

Indikator toleransi mencakup 12 sub indikator yakni: 1. Bahasa yang merendahkan dan fitnah kelompok-kelompok budaya; 2. Bahasa yang merendahkan, dan fitnah kelompok-kelompok ras; 3. Penggambaran kelompok tertentu dengan kecenderungan negatif; 4. Mengolok-olok tindakan orang atau kelompok masyarakat yang cenderung mengejek atau menghina.

Sub indikator berikutnya: 5. Buruk sangka atas kasus atau tindakan individu atau kelompok; 6. Pengambyinghitaman atas peristiwa-peristiwa traumatis; 7. Pengambyinghitaman atas masalah sosial pada kelompok tertentu; 8. Diskriminasi atas aktivitas-aktivitas sosial kelompok masyarakat; 9. Pengabaian seolah-olah orang lain tidak ada; 10. Penolakan orang lain untuk berbicara dan budaya mereka; 11. Pelecehan untuk mengintimidasi dan merendahkan orang lain, dan 12. Penggunaan superioritas kapasitas fisik atau angka yang lebih besar untuk mempermalukan orang lain.

Indikator anti kekerasan mencakup 16 sub indikator yakni: 1. Kekerasan dalam pekerjaan; 2. Kekerasan di lingkungan masyarakat terdekat; 3. Kekerasan saat pelaksanaan Pemilu 2019; 4. Kekerasan saat pelaksanaan Pilkada 2020; 5. Politik uang/bagi-bagi uang saat pelaksanaan Pemilu 2019.

Sub indikator berikutnya: 6. Politik uang/bagi-bagi uang saat pelaksanaan Pilkada 2020; 7. Sosialisasi tolak politik uang saat pelaksanaan Pemilu 2019; 8. Sosialisasi tolak politik uang saat pelaksanaan Pilkada 2020; 9. Korupsi yang dilakukan Pejabat Negara/Pejabat Publik; 10. Sosialisasi tidak melakukan korupsi. Sub indikator lanjutnya: 11. Kekerasan karena beda suku; 12. Kekerasan karena beda agama; 13. Kekerasan karena kegiatan keagamaan; 14. Main hakim sendiri; 15. Terorisme; dan 16. Kegiatan perdamaian/lintas agama.

Indikator kebudayaan lokal mencakup 5 sub indikator yakni: 1. Benda budaya (arsitektur, seni lukis dan pahat, pakaian, makanan); 2. Bahasa daerah; 3. Unsur budaya dalam perayaan ekaristi/kebaktian; dan 4. Unsur budaya dalam ibadah peringatan arwah, dan 5. pengetahuan dan teknologi tradisional.

Simpulan

Di 3 wilayah penelitian, umat Kristianinya sebanyak 672.003 orang. Terdiri dari umat Protestan sebanyak 355.509 orang (52.90 persen) dan umat Katolik sebanyak 316.494 orang (47.10 persen). Responden penelitian ini berjumlah 310 orang. Penelitian ini mengkategorikan responden ke dalam 2 (dua) kategori responden: Pertama, kategori anggota kelompok WA, merupakan umat gereja/jemaat yang dalam 6 bulan terakhir menjadi anggota salah satu kelompok WA berbasis umat/gereja. Kedua, kategori administrator/pengelola kelompok WA. Ke 310 orang responden merupakan umat dari 80 gereja-gereja (Katolik/Protestan). Tersebar di 8 Kabupaten/Kota pada 3 wilayah penelitian. 37,50 persen berasal dari Kota Semarang. Sementara paling sedikit (2.5 %) dari Kabupaten Bantul.

Kategori anggota kelompok WA ini terdiri dari 2 (dua) unsur yakni: 1. Unsur kaum muda, dan 2. Unsur non kaum muda. Kategori anggota kelompok WA dari unsur kaum muda merupakan responden yang selama 6 bulan terakhir merupakan umat/jemaat di gereja masing-masing yang aktif di salah satu kegiatan anak muda. Kalau di Gereja Katolik, mereka merupakan aktivis atau pengurus Orang Muda Katolik (OMK). OMK merupakan salah satu kelompok pembinaan umat Katolik untuk usia muda. Sementara di Gereja Protestan mereka merupakan aktivis atau pengurus pemuda Gereja. Terdapat sebanyak 60 orang dari kategori anggota kelompok WA dari unsur kaum muda (Orang Muda Katolik-OMK/Pemuda Gereja). Sementara yang dimaksud dengan kategori anggota kelompok WA dari unsur non kaum muda adalah

responden yang selamat 6 bulan terakhir merupakan umat/jemaat di gereja masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Sebanyak 176 orang merupakan kategori anggota dari unsur non pemuda.

Kategori administrator/pengelola kelompok WA, yang lebih dikenal sebagai kategori admin kelompok WA. Admin merupakan pribadi-pribadi umat di masing-masing gereja yang ditugasi pihak di lingkungan gereja untuk membuat dan atau mengelola kelompok WA. Termasuk bila kelompok WA dibuat berdasarkan inisiatif admin namun ditujukan untuk kepentingan umat gereja-gereja dimana si admin mengelola kelompok WA. Begitu sebuah kelompok WA dibuat maka tugas admin berlanjut dengan mengajak peserta yang menjadi target pembuatan kelompok WA. Admin dapat membuat kelompok WhatsApp dengan jumlah peserta hingga 256 peserta (faq.whatsapp.com). Terdapat sebanyak 74 orang merupakan admin/pengelola kelompok WA.

Responden kategori anggota kelompok WA, paling banyak dari kelompok usia di bawah 30 tahun, 30.93 persen. Dari sisi latar belakang pendidikan, mayoritas responden berlatarbelakang sarjana (48.31 persen). Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini, di lingkungan Gereja, responden merupakan pribadi-pribadi yang aktif di lingkungan Gereja. Aktivitas masing-masing dengan varian berbeda baik dari sisi lingkungan kegiatan umat dan varian kegiatan di tingkat Gereja/Jemaat. Meskipun sudah aktif dengan menyita waktu yang baik di lingkungan gereja, masih terdapat responden sebanyak 71.19 persen yang aktif di masyarakat sekitar responden tinggal dan berdomisili. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (Nopember 2020-April 2021), 62.29 persen responden aktif di tingkat RT/RW/PKK. Namun, hanya 17.80 persen yang ikut dan aktif di ormas. Responden di wilayah Semarang Raya lebih banyak yang aktif di ormas ketimbang responden di 2 wilayah lainnya.

Sementara responden kategori administrator/pengelola kelompok WA, didominasi laki-laki (78.67 persen) dan

perempuannya hanya 21.33 persen. Responden admin lebih banyak dari Semarang Raya lalu disusul DIY dan Solo Raya. Selain menjadi admin kelompok WA tertentu di lingkungan gereja/jemaat, admin sebagai responden juga ikut dan terlibat di kelompok WA internal dan eksternal gereja/jemaat.

80 persen responden yang merupakan anggota kelompok WA berbasis gereja/jemaat memiliki lebih banyak memiliki akun WA ketimbang akun media sosial lainnya seperti facebook, instagram, dan twitter. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, 58.90 persen responden bergabung di 1-5 kelompok WA di lingkungan internal gereja/jemaat. Dalam konteks kelompok WA di luar lingkungan gereja/jemaat, kurun waktu 6 bulan terakhir, 61.86 persen responden bergabung di 1-5 kelompok WA di luar lingkungan gereja/jemaat. Suatu peningkatan jumlah bila dibandingkan dengan keikutsertaan dengan kelompok WA di internal lingkungan gereja/jemaat.

Lalu bagaimana materi kelompok WA Berbasis Gereja/Jemaat?. Materi kelompok WA berbasis gereja/jemaat dalam bentuk tulisan, video dan kartun/meme. Sementara tema materi yang tersajikan yakni: 1. Renungan rohani, 2. Informasi/pengumuman gereja/jemaat, 3. Informasi yang berkaitan tugas-tugas di gereja/jemaat, 4. Informasi kegiatan gereja/jemaat, 5. Informasi kehidupan sosial kemasyarakatan, 6. Informasi kehidupan keagamaan Katolik/Kristen, 7. Informasi kehidupan keagamaan Non Katolik/Kristen, dan 8. Lain tema materi tersajikan. Materi yang tersajikan mayoritas dalam bentuk tulisan. Sementara tema materi yang menonjol adalah tema informasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Antara lain dominan di Semarang Raya dan di Solo Raya. Informasi kehidupan agama Non Katolik/Non Protestan menonjol menjadi materi di wilayah DIY. Dominasi tema materi di masing-masing wilayah mencerminkan dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakatnya.

Sebagai anggota kelompok WA berbasis gereja/jemaat memiliki pengalaman interaksi di kelompok WA. Interaksi dapat dilihat dari: 1. Apakah pernah memproduksi materi (tulisan, video, kartun) dan mengirimkan ke kelompok WA gereja/jemaat yang diikuti. Termasuk didalamnya alasan memproduksi materi dan bentuk materi yang diproduksi; 2. Apakah pernah melanjutkan materi (tulisan, video, kartun) dari komunitas WA berbasis non gereja/jemaat ke kelompok WA berbasis gereja/jemaat yang diikuti. Termasuk didalamnya alasan meneruskan serta bentuk materi yang diteruskan; 3. Apakah pernah melanjutkan materi (tulisan, video, kartun) dari kelompok WA berbasis gereja/jemaat yang diikuti ke berbasis non gereja/jemaat ke kelompok WA Termasuk didalamnya alasan meneruskan serta bentuk materi (tulisan, video, kartun) yang diteruskan; 4. Apakah pernah melanjutkan materi (tulisan, video, kartun) dari situs dan kelompok WA berbasis non gereja/jemaat dan umum ke kelompok WA berbasis gereja/jemaat yang diikuti; 5. Jumlah anggota kelompok WA berbasis gereja/jemaat yang selalu aktif merespon materi, dan 6. Apakah pernah merespon materi di dalam kelompok berbasis gereja/jemaat yang diikuti.

53.39 persen responden sebagai anggota kelompok WA berbasis gereja/jemaat pernah memproduksi materi. Tulisan sebagai bentuk materi yang dominan. Serta mengirimkan tulisan tersebut ke kelompok WA gereja/jemaat yang diikuti. Bila ditanyakan apa alasan responden sebagai anggota kelompok WA internal gereja/jemaat memproduksi materi?. 53.97 persen mengatakan bahwa responden memiliki informasi yang banyak dan perlu disampaikan ke anggota grup/kelompok WA. Sementara 26.98 persen lainnya mengatakan karena sebab lainnya. Tema materi yang diproduksi anggota kelompok WA berbasis gereja/jemaat mencakup: 1. Renungan rohani, 2. Informasi/pengumuman gereja/jemaat, 3. Informasi yang berkaitan tugas-tugas di gereja/jemaat, 4. Informasi kegiatan gereja/jemaat, 5. Informasi kehidupan sosial kemasyarakatan, 6. Informasi

kehidupan keagamaan Katolik/Kristen, 7. Informasi kehidupan keagamaan Non Katolik/Kristen, dan 8. Lain tema materi tersajikan.

Sebanyak 59.75 persen, responden pernah melanjutkan tulisan dari kelompok WA berbasis non gereja/jemaat ke kelompok WA berbasis gereja/jemaat yang diikuti. Menunjukkan keterkaitan antara anggota kelompok WA berbasis gereja/jemaat dengan dinamika kelompok WA masyarakatnya masing-masing. Sementara responden yang di wilayah Solo Raya yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang mengatakan pernah melanjutkan materi dari luar ke kelompok WA berbasis gereja/jemaat. Bila ditanyakan alasannya, 47.65 persen responden mengatakan bahwa sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok WA berbasis gereja/jemaat yang saya ikuti.

Sementara 28.86 persen responden mengakui agar anggota kelompok WA di lingkungan berbasis gereja/jemaat yang ikuti mendapatkan informasi yang banyak. 10.74 persen responden beralasan merupakan kombinasi antara sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok WA dan mendapatkan informasi yang banyak. Tema materi yang dilanjutkan dari komunitas kelompok WA lainnya mencakup: 1. Renungan rohani, 2. Informasi/pengumuman gereja/jemaat, 3. Informasi kehidupan sosial kemasyarakatan, 4. Informasi kehidupan keagamaan Katolik/Kristen, 5. Informasi kehidupan keagamaan Non Katolik/Kristen, dan 6. Lain tema materi tersajikan.

Hanya 38.98 persen responden yang pernah melanjutkan tulisan dari kelompok WA berbasis gereja/jemaat yang diikuti ke kelompok WA berbasis non gereja/jemaat. Menunjukkan bahwa materi di kelompok WA berbasis gereja/jemaat dipandang responden tidak begitu relevan di luar komunitas mereka. Responden yang di wilayah DIY yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang mengatakan pernah melanjutkan materi dari luar ke kelompok WA berbasis gereja/jemaat.

Saat berinteraksi di kelompok WA berbasis gereja/jemaat, sebanyak 35.17 persen responden mengatakan bahwa di kelompok WAny, hanya sebanyak 6-10 orang anggota yang selalu aktif merespon materi (tulisan, kartun, video) dan aktif dalam pembicaraan di kelompok WA. Suatu jumlah kecil bisa dibandingkan dengan jumlah anggota yang bergabung. Ada kecenderungan anggota kelompok WA pasif. Sementara yang aktif di atas 10 orang, dikatakan 31.36 persen responden.

Dari paparan singkat dapat disimpulkan bahwa Pertama, dinamika dan diskusi isu-isu moderasi beragama dalam kelompok WA komunitas umat Kristiani berbasis gereja/jemaat di 3 wilayah penelitian berbeda satu sama lain. Selain dipengaruhi minimal 3 faktor: 1. suasana kondisi budaya, ekonomi dan politik setempat. Termasuk bagaimana relasi komunitas umat Kristiani dengan masyarakat; 2. relasi jaringan sosial di masing-masing komunitas secara internal gereja/jemaat dan dengan komunitas umat non Kristiani; dan 3. pengelolaan dinamika dan diskusi di dalam kelompok WA yang dilakukan admin dan atau Romo/Pendeta/Dewan Paroki/Majelis yang selalu ada di dalam kelompok WA berbasis gereja/jemaat.

Kedua, peningkatan pemahaman akan moderasi beragama di umat Kristiani khususnya di kelompok-kelompok WA menjadi penting. Tersedia peluang karena tema materi yang menonjol selama ini adalah tema informasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Peluang demikian bersamaan dengan tidak aktifnya anggota kelompok WA dalam merespon dan mendiskusikan yang berkaitan dengan tema informasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Peningkatan pemahaman akan moderasi beragama tidak hanya menyentuh anggota kelompok WA melainkan juga admin pengelola. Admin memerlukan kesempatan pelatihan dan dukungan ketrampilan sehingga tidak sekadar menjadi 'penjaga' dan 'pengatur lalu lintas'. Admin sudah saatnya memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk memproduksi materi (tulisan,

video, kartun) untuk kelompok WA yang menjadi tanggungjawabnya.

KEPUSTAKAAN

Buku

Ahmad Basarah. 2017. Bung Karno, Islam dan Pancasila. Jakarta: Konstitusi Press.

Amin Mudzakkir dkk. 2018. Menghalau Ekstremisme-konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia. Jakarta: Wahid Foundation.

Cresswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publication.

Cresswell, J. W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset-Memilih di antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwi Winanto Hadi, Mohammad Dokhi, Tiodora Hadumaon Siagian, Rini Rahani, Sukim. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Sikap Toleransi Di Indonesia, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Hine, C, 2000, Virtual Ethnography, London: Sage Publications, Ltd.

Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Nasrullah, Rulli, 2019, Etnografi Virtual-Riset Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi di Internet, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

Ruddy Agusyanto, 2014, Jaringan Sosial Dalam Organisasi, edisi Revisi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Safroedin Bahar, Nannie Hudawati Sinaga, Ananda B. Kusuma et al. (Tim Penyunting). (1992). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setara Institute, 2020, Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2020, Jakarta: Setara Institute.

The Wahid Institute. 2014. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Intoleransi 2014-“Utang” Warisan Pemerintah Baru. Jakarta: The Wahid Institute.

UNESCO. 1994. Tolerance: the threshold of Peace-A teaching/Learning Guide For Education For Peace, Human Rights And Democracy (Preliminary version). France: UNESCO, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098178>

Wahid Foundation. 2018. Strategi Penguatan Nilai dan Praktik Toleransi di Indonesia- Naskah Rekomendasi. Jakarta: Wahid Foundation, Juli.

Jurnal

Demsey Jura. 2020. Peran Pendidikan Agama Kristen (PAK) Dalam Semangat Moderasi Beragama Demi NKRI. Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 13, No. 3, November 2020: Jakarta: Universitas

Kristen Indonesia. 315-323

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp/article/view/1979/1648>.

Elma Haryani. (2020). Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus 'Lone Wolf' Pada Anak di Medan, *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 18 (2) 2020, 145-158. [Jurnaledukasimenag.org](http://jurnaledukasimenag.org).

Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia, *Intizar*, Vo. 25, No. 2. Desember 2019, <http://jurnal.radenpatah.ac.id/index.php/intizar> ISSN 1412-1697, e-ISSN 2477-3816.

Subkhi Ridho (2018). Pesan Instan Muslimah Kelas Menengah Baru: Studi Identitas Islam di Gorup Whatsapp "Islam", *Maarif* No. 13 No. 1-Juni. 137-157.

PENANGGAP

Wiyatiningsih

Terima kasih untuk pak Andreas untuk paparannya. Paparannya sangat luar biasa menurut saya. Temanya sangat relevan. Kalau tadi bu Trihoni sudah menyampaikan tentang kerjasama yang mendasari dari kegiatan ini yaitu adanya kerjasama Indonesia Peace Network dengan PSU. Tema ini akan sangat relevan. Di Indonesia Peace Network, kami banyak membahas topik-topik tentang toleransi beragama; bagaimana hidup di dalam keberagaman dan yang sangat-sangat sesuai dengan tema ini. Jadi menurut saya ini tema yang relevan dan juga cocok dengan kondisi di negara kita, di bangsa Indonesia yang sangat beragam ini sehingga kalau kita lihat memang kecenderungan dengan media sosial yang ada saat ini, ada kecenderungan bahwa itu menjadi *tools*, menjadi alat yang dipakai. Untuk orang tidak toleran itu, sangat-sangat dekat gitu alat itu; meskipun media sosial itu juga bisa bermanfaat. Jadi ada dua mata mata pisau. Terima kasih untuk pencerahan dari tema ini. Kemudian yang terkait dengan metodologi, dari pak Andreas dan tim, metodologinya sangat dekat dengan pengalaman pribadi, dengan yang saya lakukan. Saya juga banyak melakukan metode penelitian kualitatif studi kasus juga eksplorasi. Kalau dari metodologi semacam ini, kita akan merumuskan sebuah hipotesis baru yang nanti akan diuji ulang oleh penelitian berikutnya; atau itu memang tentatif. Hasil dari kajian ini mestinya akan merumuskan sebuah hipotesis baru dan itu temuan itu akan dilanjutkan lagi. Tadi bapak Pak Andreas menyebutkan bahwa nanti perlu ada penelitian lanjutan lagi. Yang mungkin tadi agak belum tersampaikan adalah hasil perumusan dari penelitian ini. Itu teori baru, atau hipotesis baru dari “moderasi” ini. Dalam topik “moderasi” ini kemudian ada

statement-statement akhir yang kemudian membuat orang bisa berpikir ulang, “oh ini nggak bener, ini harus dipatahkan”. Mungkin ini yang kurang. Tetapi metode studi kasus memang cocok karena kita di kondisi yang sangat beragam, ini kita harus memilih. Tidak mungkin semua agama itu kita kita teliti sekaligus. Jadi ini kelompoknya pak Andreas, menurut saya, studi kasusnya adalah kelompok Kristiani. Kemudian yang agak belum tersampaikan menurut saya tentang konteksnya Jadi mengapa dipilih Jawa Tengah, Semarang Raya, kemudian Solo Raya dan DIY. Nah itu mungkin perlu diberi konteks dulu, bagaimana dalam ketiga lokasi ini mempresentasikan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia semuanya kah, atau mungkin cukup pulau Jawa atau apa sehingga itu menjadi arahan bagi kita bahwa studi kasusnya tepat, pilihan lokasinya tepat. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, studinya Kristiani sebagai studi kasus. Tidak semua semua agama dipilih, tapi satu yang dipilih karena mungkin kedekatan untuk bisa berinteraksi, untuk mendapatkan data. Itu bisa dipahami tapi mestinya dituliskan di penjelasan latar belakang itu. Kenapa kok dipilih kelompok Kristiani, kenapa dipilih lokasinya ada di Jawa Tengah dan sekitarnya itu. Kemudian kelompok *user*-nya. Tadi pelakunya kelompok orang muda. Jadi saya juga membaca bahwa orang muda ini dianggap sangat aktif di dalam menggunakan media sosial tapi orang muda yang mana sih. Tadi ada kelompok muda yang bagian dari gereja, orang muda Katolik. Itu juga harus ada konteksnya, kenapa orang muda ini yang dipilih. Kenapa bukan *adiyuswa* atau orang-orang *sepuh* yang mungkin mereka ini mungkin malah lebih ramai dalam pembicaraan tentang toleransi. Karena kan sudah pensiun, temanya bisa sangat beragam. Ini perlu diberi konteks, kenapa kelompok muda ini yang dipilih. Konteks itu penting; jadi supaya orang yakin bahwa pilihan-pilihan yang dibahas pada penelitian ini memang sangat relevan, dan itu yang penting yang bisa mewakili dari topik yang akan diajukan itu. Kemudian ada satu lagi yang agak mungkin belum terbaca, dengan makalah yang singkat ini, ada

proses yang menurut saya kok tidak tersampaikan. Jadi memang disampaikan, ada kajian teori, kemudian ada indikator, ada macam-macam, kemudian langsung simpulan. Di dalam prosesnya itu tidak bisa terbaca, bagaimana indikator-indikator yang sudah disampaikan di depan tadi dipakai untuk menganalisis temuan-temuan dari lapangan itu, seperti apa, itu belum ada. Kemudian bagaimana data itu diambil. Saya terus berpikir apakah pak Andreas dan tim masuk ke dalam grup itu, atau hanya mendapatkan informasi dari admin atau bagaimana. Itu mungkin bisa di dimasukkan juga dalam penjelasan proses, mengenai pengambilan datanya itu seperti apa. Kalau pak Andreas dan teman-teman masuk dalam dalam grup WA, saya membayangkan grup wa-nya bapak semakin banyak, jadi bapak mungkin butuh HP baru. Untuk penelitian ini, masuk semua semua grup WA. Ini menurut saya sangat menarik untuk bisa dirunutkan, ini lho prosesnya. Kemudian nanti hasil akhirnya sangat komplis menurut saya. Sebelum dirumuskan, dikembalikan lagi teorinya. Apa sih yang tadi dipakai untuk membahas ini, dan ini mau mengambil bagian yang mana, mau menekankan bagian yang mana. Ini mungkin perlu sedikit lagi satu langkah lagi untuk memberikan hasil dari penelitian ini lebih bagus, lebih menarik untuk bisa dilihat orang. Kemudian orang berpikir ulang dan orang kemudian juga terpacu untuk menilai lagi atau meneliti lagi. Tadi disampaikan bahwa media sosial yang dipilih adalah WhatsApp grup. Jadi ada *perankingan*, saya baca di situ, media sosial yang banyak dipakai untuk grup itu, ada Facebook, ada WhatsApp, macam-macam. Ini dipilih whatsapp. Kenapa demikian, itu mungkin juga bisa disampaikan. Orang-orang di Jawa Tengah dan sekitarnya lebih memilih WA daripada di Facebook. Itu juga menjadi konteks untuk sebuah studi kasus. Menurut saya, kajian ini memang, kalau menurut kisi-kisinya dari bu Trihoni, ini luar biasa dan ini layak didiseminasikan. Artinya memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perumusan kebijakan publik terutama untuk mewujudkan Indonesia yang toleran, yang inklusif, yang

semua orang itu tidak ingin menonjolkan diri sendiri, tapi bagaimana bersifat moderat itu supaya menerima orang lain; juga di dalam dirinya sendiri juga berproses.

Retang Wohangara, Unika Soegijapranata

kepada Damasus

Bahasan tadi itu membuat saya terkenang lagi atau mengingat kembali apa yang terjadi di Sumba, dari mana saya berasal, mengenai kapitalisme, kemudian adanya pabrik gula di sana, mengenai, boleh saya sebut, penjajahan chiki-chiki. Saking tergantungnya Sumba pada makanan kecil, chiki-chiki; 1 tahun hampir 1 milyar. Atau juga ingatan saya langsung ke American Indian, bagaimana mereka dikuasai, bagaimana mereka dihegemoni. Ada tadi dalam presentasi mengenai bagaimana gereja itu ikut serta dalam kontrol sosial. Itu menarik ya. Jadi institusi gereja bukan hanya sebagai bentuk transformasi sosial tetapi juga bisa menjadi alat untuk kontrol sosial. Dan, kita tahu bahwa dalam hegemoni itu ada penguasaan fisik, *decolonisation of mind*. Kan ada lagu “semut pun marah”, apalagi manusia; dalam setiap hegemoni, dalam setiap penguasaan itu pasti ada *crack*, pasti ada celah dimana orang melakukan resistensi. Tidak mungkin orang pasrah begitu saja. Pasti ada perlawanan. Apakah dalam teman-teman di perkebunan tadi ada resistensi atau tidak, karena tidak mungkin diam-diam saja? Atau mereka sama sekali tidak tahu kalau sedang dihegemoni? Ada resistensi atau tidak? Apapun bentuknya, apakah yang sangat kelihatan atau yang tersembunyi.

Yovita Indrayati

Terima kasih tiga penyaji hari ini memberikan materi yang luar biasa semua itu, dan ketiganya mempunyai bidang ilmunya yang menarik semuanya. Terima kasih sekali. Yang pertama ke Mas Damas. Penelitian ini menarik, dan menurut saya ini memang harus dilanjutkan. Mengapa? Dari sisi saya, hal ini berbicara sisi hukum

bahwa negara Indonesia itu sekarang sedang mengangkat kembali masyarakat hukum adat kemudian hukum adatnya. Ini sedang diangkat kembali. Tetap dari penjelasan mas Damas tadi, saya tertarik bahwa ini juga agak berbahaya juga untuk keberlanjutan hukum adat di Indonesia karena adanya persoalan tadi. Ya memang ini menjadi sebuah dilema. Di satu sisi bahwa mereka itu harus dilindungi, tetapi di sisi yang lain, mereka juga berhak untuk mengembangkan dirinya. Penelitian-penelitian seperti yang dilakukan Mas Damas saya pikir untuk Indonesia penting sekali. Kalau di dalam ilmu-ilmu eksak, seperti misalya ilmu biologi, itu menjadi sesuatu yang penting tapi kurang diperhatikan; kalau ini dalam antropologi atau sosiologi, ini saya pikir ini perlu untuk mendapat perhatian terutama penelitian tentang etnografi pada masyarakat adat di Indonesia dan bagaimana persoalan yang dihadapi. Hanya saja memang untuk mas Damas tadi mungkin, sekedar sharing, bahwa penelitian ini memang menurut saya harus lebih banyak mengambil data primer alias observasi ataupun *live-in* begitu, karena ini sebetulnya kan termasuk fenomenologi sebetulnya, jadi mempelajari gejala yang ada. Ini kemudian memang mau tidak mau memang harus lebih banyak pada observasi dan nanti di metodologinya observasinya itulah yang dikuatkan. Kemudian nanti untuk mendapatkan hasil yang senyatanya; kecuali kalau mas Damas asli orang Dayak. Saya pernah tinggal dengan teman-teman suku Dayak, beberapa kali juga ke pedalaman termasuk masyarakat Punan begitu; itu tapi 35 tahun yang lalu. Jadi saya tahu persis bagaimana keaslian dulu; tapi pasti berbeda dengan yang ada sekarang. Tetapi sekali lagi bawa untuk metodologinya tadi memang observasi; kelihatannya memang menjadi kekuatan di dalam penelitiannya mas Damas. Luar biasa penelitiannya.

Kemudian untuk mbak Ichmi, tadi saya sudah bahas.

Nah ini sahabat saya ini, Pak Pandiangan dan teman-teman ini, beliau bertiga itu selalu menghasilkan penelitian-penelitian yang

luar biasa setiap kali saya mereview. Dan penelitian-penelitian itu sangat dibutuhkan masyarakat tentang keberagaman, yang ini dari sisi keagamaan. Intinya saya berterima kasih sekali pada hari ini karena mendapatkan wawasan, mendapatkan pencerahan dari tiga sahabat yang sudah menghadirkan penelitian yang luar biasa dan sangat bermanfaat untuk negara kita maupun untuk diri saya. Terima kasih.

Damasus

kepada Retang Wohangara

Saya sedikit menjelaskan. Penelitian ini sudah saya lakukan tahun 2019. Lalu untuk apa karya akademis saya di Universitas Sanata Dharma. Lalu berangkat dari situ, saya merasa mendapatkan apa yang digambarkan pak Retang tadi, mengenai tragedi chiki-chiki, orang dibentuk atau dikonstruksi dengan chiki. Mungkin wacana-wacana konsumsi itulah yang membuat orang-orang sampai pada pengamatan mengenai “kehadiran chiki” di setiap lini kehidupan masyarakat. Tentang celah, resistensi sejauh saya sudah melakukan penelitian yaitu saat saya mengenal Punan ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, kemudian saya menjadi tertarik dengan kehidupan mereka, lalu kemudian saya *resign*, dan saya melanjutkan studi saya, melakukan observasi selama satu minggu, mencari data-data di lingkungan sekitar di Longsep, lalu *live-in* di Punan selama satu bulan. Saya tinggal bersama mereka, hidup bersama mereka. tinggal di antara mereka, dan dari situlah terkesan mudah untuk mendapatkan apa yang mereka suarakan. Saya merasa yakin sekali bahwa mereka menyimpan banyak hal yang ingin mereka keluarkan karena mereka distigma sebagai kelompok atau suku pemalu, cenderung takut, tidak mau berkomunikasi dengan orang asing. Nah inilah yang tangkap berbeda ketika di Longsep. Ini yang harus dipahami oleh banyak pihak, bahwa mereka bukan orang yang pemalu, tetapi mereka

lebih terbentuk dengan kultur kewaspadaan, jadi mereka mempunyai kultur kewaspadaan selama mereka tinggal di hutan.

Tentang celah resistensi yang seperti apa. Memang selama saya di sana, saya mencari-cari bagaimana sih, apakah ada upaya dari mereka untuk melakukan kegiatan perlawanan gitu, karena sebagai sebagai komunitas yang dihegemoni dan didominasi perusahaan, mereka harusnya sadar kalau mereka dihegemoni. Tetapi selama saya di sana, saya belum menemukan aksi dalam arti reaksi dari Punan terhadap hegenomini yang terjadi. Jadi mereka akhirnya merasa nyaman karena mereka kemudian tidak lagi harus bekerja beringgung-minggu, berbulan-bulan di hutan untuk mencari barang hasil hutan untuk dapat dijual kembali tetapi mereka bisa bekerja di perusahaan sawit, dan mereka mendapatkan dapat gaji walaupun kemudian inilah letak permasalahan dimana saya melihat bagaimana proses mereka menerima gaji tiap bulan itu, di sana sudah berjajar, di belakang antriannya pembagian honor itu, sudah berjajar bakul-bakul jajanan anak kecil mainan, perabotan rumah tangga. Jadi setelah mendapatkan pembayaran gaji, mereka langsung membelanjakannya. Ketika saya di sana juga, ada juga aktivitas ekonomi “ngebon”, tukang kredit yang masuk ke rumah-rumah, mencatat, menagih uang, artinya di situ ada proses utang. Kadang-kadang itulah yang membuat mereka terkesan “mau bagaimana lagi”, mau meningkatkan taraf hidup yang seperti apa juga kesulitan, karena mereka mulai konsumtif, apalagi TV, handphone. Padahal di sana tidak ada sinyal, lalu sebenarnya buat apa. Ini yang mengerikan buat saya. Jadi selama 1 bulan itu saya juga harus tinggal bersama mereka, dan bisa menikmati suasana yang tanpa handphone. Soal perlawanannya, ada beberapa intelektual organik, atau penggerak perlawanan itu, tetapi saat ini, saya belum berani menyimpulkan bahwa itu akan menjadi aksi yang besar, aksi perlawanan yang nyata. Mereka sudah diakomodir, disetir, atau dikendalikan oleh “kapitalis”, menjadi bagian dari perusahaan. Perusahaan ini benar-benar sudah menjadikan

Longsep menjadi pihak yang harus hidup di tengah operasional sawit. Sehingga muncul pertanyaan, perlawanan yang apa lagi. Saya mengangkat atau memakai analisis Laclau-Mouffe, berdasarkan pemikiran Antonio Gramsci, tentang agen sosial baru, bahwa di analisa wacana itu memungkinkan ada agen sosial baru yang berasal dari atau bukan dari intelektual organik itu. Nah itulah yang sedang mencoba bangun. Tapi kalau saat ini, saya bisa mengatakan bahwa belum bisa ditemukan yang bisa dianggap sebagai pelaku membangun pergerakan lebih nyata.

Untuk bu Yovita, saya melakukan pendekatan, atau *social cultural live-in* selama 1 bulan lebih, kemudian saya jadi semakin yakin bahwa mereka sebagai bukan orang yang pemalu, terbelakang, atau bodoh. Hanya saja mereka punya pengetahuan berbeda, pengetahuan lokal mereka sendiri.

Untuk Pak Reza. Tentang kesan pasif pada masyarakat Longsep. Ya, sementara ini, selama saya di sana, mereka, orang-orang Punan di Longsep hanya menjadi objek, sedang menikmati menikmati iklim kapitalis, sedang menikmati suasana konsumtif ini. Jadi mereka belum memikirkan atau belum sampai kepada pemikiran bahwa mereka akan tergantung terus pada perusahaan, tidak akan bisa lepas dari perusahaan.

Tentang kehadiran peran pemerintah. Pemerintah ini terjadi ketika mereka sebelumnya mereka berasal di Longsuli Berau, kemudian mereka dipindahkan atau *resettlement* oleh pemerintah masa Orde Baru, jadi utusan pemerintah waktu itu datang ke Longsuli dan memindahkan mereka ke areal Nahas Banung yang kemudian menjadi tempat pemukiman orang Punan ini. Waktu itu ada pertimbangan iklim yang lebih bagus, arus tidak jeram dan lebih datar. Potensi pada masa *resttlement* ini terjadi pada masa ketika meningkatkan kegiatan ekonomi di sana. Jadi mereka waktu sedang hangat-hangatnya atau komoditi gaharu, rotan, yang bagus untuk ekspor, banyak datang pedagang-pedagang Cina, Arab, Afrika, Cina Daratan yang bermukim di sana dan kemudian menjadi penadah

untuk hasil-hasil dari orang Punan. Kemudian mereka dibayar, dan akhirnya beberapa dari mereka lari karena terlilit hutang. Di Longsep, peran pemerintahnya saya belum menemukan. Jadi peran pemerintah terkesan absen. Peran pemerintah saya bisa dapat ketika bulan ini mulai mencatatkan diri sebagai warga dari salah satu penduduk desa. Itu saja. Tetapi ketika saya ke Kesbangpol di Kalimantan Timur, Kecamatan Muara Wahau, waktu itu mereka tidak pernah datang ke Longsep; ke sana pun hanya memberi bantuan sembako dan sebagainya, tetapi itu tidak tidak mencerminkan bagaimana peran pemerintah. Dalam tesis yang saya tulis, peran pemerintah tidak menonjol, tidak bisa dibaca.

Pola konsumsi. Saya dapat mengatakan bahwa dulu orang Punan hidup bisa mengandalkan hutan tetapi tetapi saat ini di Longsep mereka sudah akrab sekali dengan selain chiki, ada Sarimi. Sudah jarang yang berburu, meskipun sempat ada yang berburu dan saya makan bersama mereka. Terima kasih

Andreas Pandiangan

Terima kasih. Saya merespon yang dari Ibu Wiyatiningsih. Terima kasih bu atas masukannya. Setelah saya cek kembali memang betul ada beberapa hal di paper kami itu memang tidak secara tegas tentang hipotesis yang kami temukan, yang baru; tapi penelitian ini menemukan:

Pertama, diperlukan seperti tadi di paper kami sebutkan bahwa diperlukan peningkatan pemahaman akan moderasi beragama di kalangan umat Kristiani. Bila tidak, ini akan berpotensi menjadi intoleran pasif. Yang pertama.

Yang kedua, secara praktis ada perlu tampaknya ada semacam peningkatan kemampuan admin. Itu menjadi kebutuhan yang kami temukan.

Soal konteks tadi, soal Semarang Raya, Solo Raya dan DIY, tiga tempat ini memang memiliki dinamika berbeda satu sama lain. Bisa mirip atau juga berbeda. Hal ini dikarenakan masyarakatnya

secara sosial dan budaya memang sudah berbeda. Ada juga perkembangan dari luar, dalam tanda petik, dari luar pemahaman agama, seperti di Semarang Raya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa cenderung landai dan stabil dinamikanya. Bahkan kalau tidak salah sejak 4 tahun terakhir ini, di Kota Semarang sendiri atas kerjasama umat Kristiani dan pemerintah kota, itu ada yang namanya apa namanya Pawai Paskah; sementara salah satu lagi yang diikuti di Semarang Raya adalah kota Salatiga. Kita mengetahui setiap tahun, salah satu hasil dari Setara Institute menobatkan Salatiga sebagai, kalau tidak nomor 1 atau nomor 2, kota yang sangat toleran di Indonesia. Agak unik Semarang raya ini. Kalau Kabupaten Semarang otomatis, karena dia ada di antara kota Semarang dan kota Salatiga. Sementara kalau di Solo Raya, kita melihat selain dia secara budaya berbeda dengan Semarang raya yang lebih kebudayaan pesisir, dinamika kehidupan beragamanya itu juga punya keunikan ya. Dari sisi yang pertama, dari jumlah umat Kristiani di Solo Raya raya ini signifikan; tidak sampai 10%, tetapi relasi mereka dengan kehidupan diluar mereka, di kehidupan sosial politik itu relatif berarti. Demikian juga di DIY, di 3 tempat, Kota Jogja kemudian di Sleman dan Bantul, kami menemukan dinamikanya agak lebih tinggi kalau dari sisi kasus-kasus yang ditemukan 2 atau 5 tahun terakhir. Penanganannya juga oleh pemerintah, responnya berbeda-beda. Mudah-mudahan sudah lengkap kami temukan. Salah satu Respon yang menonjol dari wilayah DIY adalah sampai ada instruksi Gubernur DKI tentang pengelolaan konflik tahun 2019, kalau tidak salah. Sementara kalau di dua tempat atau wilayah, seperti Semarang Raya dan Solo Raya, intervensi pemerintah itu tidak sejauh yang di DIY. Kami memahami intervensi pemerintah itu sejalan dengan dinamika di masing-masing wilayah penelitian. Itu yang pertama.

Kemudian soal alasan WA. Betul, kami memang tidak masuk di grup-grup ini meskipun idalnya masuk, tetapi karena keterbatasan waktu riset dari Kementerian Agama sebagai

penyanggah dana penelitian ini, maka kami mencoba melakukan, pertama, mengonfirmasikan hasil-hasil yang kami dapat dari anggota grup WA tersebut dengan entah itu pastornya, dewan paroki-nya, dengan pendetanya, dengan majelisyanya. Memang, sejak awal, kami mencoba untuk berusaha menangkap bagaimana pemahaman, bagaimana persepsi anggota grup WA ini dengan mencoba untuk menyiapkan sejak awal pada masing-masing gereja atau jemaat yang kami hubungi, untuk menyiapkan 4 responden. Mereka sendiri yang memilih. Kriteria untuk adalah mereka adalah aktivis, atau administrator. Itu satu. Kemudian yang kedua anak muda. Mengapa anak muda. Kami mencoba mengonfirmasi apakah anak-anak muda ini, yang mereka masuk dalam kelompok-kelompok WA, berbeda atau tidak dengan bapak ibunya dalam berinteraksi di kelompok, termasuk juga berbeda dalam hal memandang materi moderasi beragama ini. Dari 80 gereja, 70 gereja mengembalikan semua dari empat komponen tadi. Tetapi ada yang hanya mengembalikan adminnya dengan anak muda. Kami memahami persoalan-persoalan dalam situasi pandemi sekarang, yang tidak semua bisa berkumpul, bertemu di antara umat gereja.

Analisis indikator, tidak seluruhnya kami tampilkan di sini karena keterbatasan. Di laporan kami semaksimal mungkin tapi tadi seperti sudah kami sampaikan bahwa ditemukan bahwa ada interaksi di antara mereka meskipun umpamanya grup WA untuk majelis, tetapi tetap ada ruang mereka mendiskusikan hal-hal yang sosial kemasyarakatannya. Meskipun dalam mendiskusikan informasi atau diskusi, dalam pemahaman kami, ada “demokrasi terpimpin”. Jadi misal ada kejadian kasus intoleran atau kekerasan tertentu, kemudian itu didiskusikan. Tetapi kalau sudah agak sedikit politis maka dilakukan intervensi baik oleh adminnya maupun tokoh-tokoh di dalam kelompok itu, bisa pastornya, romonya, atau pendeta. Bisa dengan menjelaskan bahwa ini seperti ini kejadiannya. Kalau yang ini sudah urusan politik. Itu yang menurut

kami menjadi sesuatu modal sosial bahwa grup atau kelompok WA itu sebetulnya khusus untuk komunitas tertentu di gereja dan jemaat tetapi mereka masih punya ruang untuk urusan sosial kemasyarakatan. Mengapa ruang yang sudah tersedia ini tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman soal moderasi beragama dan sebetulnya tugas dari, selain gereja dan jemaat pimpinannya, tapi juga tugas pemerintah. Jadi pemerintah dalam ini Kementerian Agama tidak hanya berhenti menjelaskan mengeluarkan konseptual soal moderasi beragama tetapi juga harus memanfaatkan ruang-ruang yang sudah tersedia di kalangan umat Kristiani khususnya di kelompok-kelompok WA. Itu yang kami dapatkan secara umum begitu. Yang lain, terima kasih banyak atas masukannya. Hal tersebut akan memperkaya laporan kami termasuk juga memperkaya makalah ini.

DISKUSI

Sigit Triandaru

Terima kasih atas waktunya. Saya menyimak dari penyaji pertama, kedua, ketiga, semuanya luar biasa. Saya ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk pak Damasus dan pak Andreas.

Untuk pak Damasus, penelitian yang luar biasa, terjun langsung ke masyarakat. Tadi dijelaskan, di situ ada ketergantungan masyarakat Punan di Longsep tergantung pada kapitalis yaitu perusahaan sawit. Yang saya ingin tanyakan apakah dari data yang dikumpulkan, dari metode yang digunakan itu, hal itu bisa digunakan untuk membaca atau melihat apakah di sana ada potensi jalan keluar, maksud saya jalan keluar dari ketergantungan. Sudah ada ketergantungan tetapi apakah ada potensi untuk jalan keluarnya. Yang bisa saya bayangkan, jalan keluarnya itu mungkin apakah itu bisa berbentuk pendidikan yang meningkat, karena bayangan saya kalau ada peningkatan dalam hal pendidikan, bisa jadi dalam jangka panjang, mereka bisa keluar dari ketergantungan itu. Atau mungkin akses komunikasi informasi dengan dunia luar. Atau bahkan mungkin pilihan-pilihan yang ada untuk tidak ikut dalam skema sawit itu ada atau tidak, di samping pendidikan yang sifatnya jangka panjang. Termasuk juga untuk melihat potensi jalan keluar yang mungkin datangnya dari pemerintah, meski tadi dijelaskan oleh pak Damasus, sulit membaca peran pemerintah, tetapi siapa tahu ada. Yang ingin saya tanyakan potensi-potensi untuk jalan keluar termasuk dari pemerintah.

Untuk pak Andreas, ini juga penelitian yang luar biasa yang memberi wawasan yang baru untuk kami kami ini dari bidang kajian yang sedikit berbeda. Yang ingin saya tanuakan untuk Pak Andreas. Tadi sudah dijelaskan tentang moderasi. Moderasi yang saya

bayangkan itu adalah sebuah proses ya. Jadi sebuah proses. Karena ini sebuah proses, maka saya ingin menanyakan apakah dari data yang berhasil dikumpulkan dari grup WA itu, sebenarnya yang terjadi sekarang. potretnya sekarang, itu cenderung moderasi atau kebalikannya. Apa ya namanya kebalikan dari moderasi, apakah radikalisasi mungkin ya, yang terjadi di kalangan umat, yang diamati adalah kristiani ya, apakah yang terjadi lebih moderat atau mereka menjadi lebih radikal dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Termasuk satu lagi, untuk pak Andreas, apakah bisa dipetakan, apa yang menyebabkan terjadi entah moderasi, entah radikal itu apa faktor-faktornya. Apakah bisa dibcra dari data yang berhasil dikumpulkan. Terima kasih sekali lagi untuk panitia juga untuk para penyaji. Terima kasih.

RANGKUMAN

Dalam pembahasan kita, tampak bahwa kita berusaha menangkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat; dan bagaimana ilmu-ilmu, bukan hanya ilmu sosial berusaha menangkap perubahan tersebut.

Yang pertama, perubahan sosial terkait komunikasi berbasis ICT. Mengenai komunikasi, dari pengalaman beberapa waktu lalu di UKP PIP, saya terlibat dalam penggalian yang kemudian kita kenal sekarang sebagai komunikasi berbasis ICT. Hal itu sekarang muncul dan menjadi pembahasan yang sangat menarik dari para penyaji. Dalam hal ini, kita juga dapat melihat perkembangan ilmu-ilmu, termasuk ilmu sosial menangkap perubahan mulanya tidak terlalu ada perhatian khusus, kemudian semakin intensif memperhatikan jenis perubahan itu. Termasuk dalam hal ini adalah dampak apa yang timbul dari komunikasi berbasis ICT ini, baik dan buruk, maupun perihal perubahan yang memang terjadi.

Yang kedua, secara umum, kita berbicara mengenai perubahan yang dinegosiasikan (*negotiated change*). Ketiga pembicara berbicara perubahan tetapi perubahan yang butuh dinegosiasikan oleh para pihak. Model perubahan yang dinegosiasikan ini populer di tahun 80-an, baru kemudian muncul lagi setelah penghargaan Nobel Ekonomi untuk Elinor Ostrom di tahun 2009. Studi mengenai perubahan yang dinegosiasikan menjadi populer lagi. Ini studi yang seringkali sifatnya *topical*. Jumlahnya banyak tapi setiap kali ditulis selalu ada yang baru. Ini cari dari studi mengenai perubahan yang dinegosiasikan.

Yang ketiga, yang juga peting dalam diskusi kita di sesi pertama ini. Di tahun 80-an atau 90-an, waktu itu, ibu prof. Edi Sedyawati, sebagai dirjen kebudayaan merumuskan sebuah proses

sosial ke dalam dua tindakan publik yaitu “transmit” dan “transfer”. Hal ini kemudian juga diikuti oleh para budayawan. “Transmit” itu merekam dulu hal-hal yang bersifat tradisi, seringkali bersifat archaic. Jadi sebelum berubah ke depan, kita rekam dulu sekuat tenaga. Barulah kemudian “transfer” itu dilakukan, bergerak ke depan dengan perubahan yang dinegosiasikan. Saya pikir ini penting untuk studi-studi nanti bersentuhan dengan masyarakat yang semakin intens dalam komunikasi, masyarakat yang juga berkenalan, bertemu atau terpapar dengan ultra-modernitas. Juga masyarakat yang dulunya bersifat komunal kemudian dia menemukan ruang baru untuk memutuskan untuk dirinya sendiri biasanya ini menonjol di studi-studi feminisme. Saya pikir ini titik tekan awal yang bagus di sesi ini, bahwa kita sudah disajikan hal mengenai “transmit” dan “transfer” ini.

SESI 2
SELASA, 13 JULI 2021
13.00-16.00

1. PEMBUKA SESI

2. AGENDA BAHASAN

Paper dan bahasan:

Muhammad Reza Shahib, *Air dan komunitas: Kasus Padangrincang dan kasus Semanga*

Wiyatiningsih, *Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Tata Ruang Perajin Tenun Ikat, Studi Kasus Sentra Tenun Ikat Gunung Mako di Kabupaten Alor*

Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa *Transisi Inter-Temporal dalam Ekonomi, Studi Kasus Penghidupan berbasis Pariwisata*

Penanggap:

Andreas Pandiangan menanggapi Muhammad Reza Shahib

Agnes Ratih Ari Indriyani menanggapi Wiyatiningsih

Heronimus Heron menanggapi Agnes Ratih Ari Indriyani

3. BAHASAN DAN DISKUSI

**Air dan komunitas:
Kasus Padangrincang dan kasus Semanga³**

Muhammad Reza Shahib
KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air)
Email: hanifa.reza@gmail.com

I. Konteks dan Lingkup Penelitian

Penelitian yang menjadi dasar artikel ini merupakan penelitian yang terus berjalan atas air dan masyarakat di Indonesia yang dikerjakan oleh KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air). Penelitian ini berhubungan dengan advokasi yang dikerjakan oleh KRuHA terutama yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dalam hal pelebagaan hak atas air sebagai hak konsituti warga negara. KRuHA adalah pemangku *legal standing* pada *judicial review* pada tahun 2004 yang putusannya menjadi dasar gugatan judicial review pada tahun 2014 (perkara no.85/PUU-XI/2013, diputuskan September tahun 2014).⁴

³ Proses penelitian dalam paparan ini dijalankan sepanjang tahun 2018-2020 oleh Penulis dan tim ECOTON.

⁴ Dalam kedua proses yudisial tersebut, ditetapkan (ruling) mengenai “syarat konstitusional” sebagai suatu yurisprudensi, yaitu:

1. Syarat sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai wujud hak rakyat atas air;
2. Syarat hak asasi manusia dengan rumusan kewajiban negara terhadap hak atas air;
3. Syarat kelestarian lingkungan hidup;
4. Syarat pengawasan dan pengendalian negara atas air;
5. Syarat mengenai prioritas pengusahaan air pada Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;

Penelitian ini yang dibangun KRuHA dalam hal hak atas air bersifat kolaboratif. Penelitian ini tidak menjadi suatu yang unik melainkan penelitian ini membangun titik studi (*pooled study*) mengenai hak atas air. Dalam penelitian kolaboratif ini, tentu saja sudut pandang yang muncul juga amat beragam, dari yang paling yuridis sampai pada mikro-sosial. Pada saat yang sama, penelitian ini dimaksudkan untuk selalu mencari titik silang-kerja (*intersection*) dimana manusia Indonesia menjadi subyek dalam analisis mengenai hak atas air.

Di antara banyak sudut pandang tersebut, penelitian ini mengambil 2 kolaborasi, yaitu mengenai intrusi korporasi di ruang pemuliaan air komunitas (studi Padangrincang Banten), dan komunitas yang hidup di wilayah persilangan sungai (*tributaries*) (studi Semanga, Sambas, Kalimantan Barat). Dua sudut pandang ini memberikan bagaimana masyarakat membangun ruang sosial mereka, sekaligus merespon perubahan-perubahan signifikan dalam masyarakat mereka. Dikatakan perubahan signifikan karena perubahan ini mengubah situasi dan status hidrologis, dan memaksa komunitas untuk beradaptasi. Tidak semua adaptasi berupa “perlawanan”, ada pula adaptasi yang berupa upaya-upaya kecil dalam penghidupan (*livelihood*).

Secara umum, studi mengenai perubahan dan adaptasi termasuk dalam hal komunitas dibangun oleh, salah satunya, Gerry van Klinken. Studi van Klinken memberikan gambaran mengenai perubahan dan adaptasi yang muncul dari situasi “deagrarianisasi”. Situasi ini digambarkan menjadi “situasi umum” di Indonesia

-
6. Syarat hak asasi manusia, dalam relasi dengan hak atas kesehatan (sebagai pelengkapan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada September 2014)
 7. Syarat kesinambungan ke masa depan (sebagai pelengkapan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada September 2014)

dimana kebergantungan dan identitas terhadap tanah dan desa mengalami desakan dengan berbagai perubahan, termasuk dalam perubahan ruang dan yang terkait komoditisasi desa. (van Klinken, Gerry. 2007. p. 37-39). Selanjutnya, “ruang sosial” menjadi titik analisis dari berbagai peneliti sosial, termasuk mengenai air dan komunitas. “Ruang sosial” ini dapat dipahami suatu interaksi dan proyeksi dari komunitas dimana mereka “tumbuh dalam kemandirian dan berdaulat dalam ruang hidup” (Talan, John Petrus dan Reza, Muhamad. 2021. p.9)⁵.

Dengan ini, apa yang hendak kita bahas mengenai “air sebagai ruang sosial”? Dalam rangkaian penelitian KRuHA, air menjadi titik temu dan identifikasi dari komunitas-komunitas di Indonesia, termasuk bagaimana Mahkamah Konstitusi menetapkan pengakuan atasnya. Dalam titik temu dan identifikasi ini, kita mencermati “ruang sosial” seperti apa yang saat ini (5 tahun terakhir) diproyeksikan oleh komunitas dalam relasi mereka dengan air.

II. bahasan mengenai teori dan metodologi

Mengingat banyaknya teori yang sudah dikembangkan dan “dipakai” mengenai ruang sosial, maka perlu disampaikan bahwa artikel ini lebih bersifat *topical*, mengangkat sesuatu yang terjadi saat ini (dalam kurun waktu beberapa tahun) ke dalam analisis mengenai ruang sosial. “Sesuatu” ini adalah 2 penelitian dari rangkaian penelitian kolaboratif yang dibangun oleh KRuHA.

⁵ Halaman adalah dari naskah asli “Melacak Ketidakadilan Sosial Dalam Produksi Ruang di Indonesia” yang menjadi bagian dari publikasi Ketidakadilan Sosial, Kapitalisme, dan Demokrasi: Catatan dari Penjuru Indonesia, editor: Dominggus Elcid Li dan Sujarwoto, Indonesia Social Justice Network (ISJN), Tahun: 2021

Penelitian pertama adalah mengenai komunitas yang hidup dalam cekungan Rawadano, Padangrincang Banten⁶. Komunitas ini menghidupi lanskap yang menjadi sasaran dari korporasi air kemasan dan pertambangan geothermal. Dengan mencermati 2 sektor usaha ini, kita dapat mengetahui kandungan geologi Padangrincang, termasuk mengenai tangkapan dan urat air yang menjadi titik identifikasi sosial-budaya komunitas. Komunitas yang hidup, konsisten dengan kerangka analisis van Klinken, menghadapi deagrarianisasi dalam bentuk kehadiran korporasi dan perubahan bentang alam yang diakibatkan.

Ruang sosial komunitas Padangrincang bertumpu sepenuhnya pada alam yang menghidupi mereka. Kepastian dan rasa aman yang menjadi titik tumpu dari proyeksi nilai-nilai kultural mereka. Tanpa kepastian dan rasa aman, proyeksi nilai-nilai kultural mereka juga menghadapi kemacetan (*jammed*). Ijin usaha dan usaha yang masuk membawa nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai kultural yang masih berlaku.

Penelitian kedua adalah penelitian berupa showcase yang dikerjakan oleh ECOTON (Ecological Observation and Wetland Conservation) di berbagai wilayah. ECOTON adalah bagian dari jejaring KRuHA. Penelitian yang diangkat dalam adalah wilayah persilangan sungai di Sambas, yang dibangun oleh Darmawanti R. (ECOTON), Astriani W. (GEMAWAN), Muttaqin A. (ECOTON) yang meneliti Desa Semanga, Sambas, Kalimantan Barat. Penelitian ini bermula dari kajian mengenai pencemaran yang muncul dari alih fungsi lahan, kemunculan pemukiman, dan aktivitas perkebunan besar. Sungai dan urat air yang dihidupi secara bersama menjadi perpanjangan dari berbagai kegiatan yang masing-masing dibawa.

Penelitian ini khususnya bertumpu pada penelitian mengenai polusi dan dampaknya terhadap komunitas desa-desa. Polusi ini

⁶ Penelitian KRuHA sebagaimana dipaparkan sebagai *showcase* dalam Talan & Reza, 2021 (*op.cit*)

muncul dari perpanjangan aktivitas usaha, limbah pemukiman dan digunakannya bahan kimia dalam pertanian. Ketiganya, secara masing-masing, mengubah karakter dari perairan yang dihidupi, dalam hal ini sungai sambas dan daerah persilangannya (*tributaries*).

Ruang sosial dari komunitas desa Semanga masing sangat bersifat agraria tradisional. Ruang sosial sedemikian ditandai dengan model pemukiman yang tidak mempunyai sistem sanitasi khusus. Sungai sambas masih menjadi tangkapan dari limbah manusia. Kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kegiatan perikanan, kegiatan persawahan dan kegiatan kehutanan menjadi bagian dari Masing-masing memunculkan limbah yang ditangkap oleh sungai. Ruang sosial ini bertemu dengan kegiatan perkebunan besar, terutama karet dan kelapa sawit yang mempunyai jenis dan jumlah limbah yang berbeda dengan limbah rumah tangga tradisional. Limbah yang dihasilkan ini juga ditangkap oleh sungai.

Adanya Kehadiran Fe dalam air menimbulkan tumbuhnya secara ekseksif dalam bakteri besi. Hal ini berdampak pada air dalam hal warna, rasa dan bau yang menunjukkan dengan kuat atas kualitas air yang buruk. Pertumbuhan unsur besi yang melimpah dalam air menyebabkan kondisi air menjadi berlendir. Air menjadi tidak layak konsumsi untuk keperluan rumah tangga dan industri. Kandungan besi yang direkomendasikan dalam air sungai adalah 0,3 mg/L. Konsentrasi yang lebih tinggi menyebabkan muntah. Adanya besi dalam air membuat air menjadi keruh, selain juga menimbulkan dampak warna tertentu pada pipa, cucian dan perlengkapan pada umumnya. Selain itu, zat besi mengendap di insang ikan, yang hal ini akan merusak kualitas kesehatan ikan tersebut. Besi sangat penting untuk kesehatan manusia dan diperlukan untuk berfungsinya sistem biologis. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia. Namun, kelebihan zat besi adalah racun bagi manusia. Asupan zat besi yang berlebihan menyebabkan hemokromatosis yang mengakibatkan kerusakan jaringan akibat akumulasi zat besi.

Gejala awal keracunan zat besi pada manusia adalah muntah, diare dan kerusakan usus.⁷

Secara khusus mengenai desa Semanga, ruang sosial komunitas desa Semanga tidak menjadi bagian dari perencanaan spasial yang mengintegrasikan proyeksi nilai komunitas. Hal ini juga menjadi penjelasan kenapa polusi yang dihasilkan juga mencerminkan konflik spasial antara komunitas dengan pelaku perubah lanskap alam. Semakin tingginya polusi mencerminkan tidak adanya titik pertemuan (*intersection*) antara keduanya.

Dalam hal inilah kita mencermati mengenai ruang sosial Padangrincang dan desa Semanga. Kita memahami secara segera dalam konflik spasial dari komunitas dengan pelaku yang merubah bentang alam yang dihuni oleh komunitas tersebut. Namun, jika kita menggunakan analisis van Klinken, maka kita melihat bahwa deagrarianisasi ini terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam konflik spasial. Deagrarianisasi yang menjadi situasi umum negara-negara yang sedang berubah, dalam hal ini, menuju masyarakat yang lebih multikultural dan multispasial. Dalam kedua kasus tersebut, deagrarianisasi dipicu oleh ijin usaha yang masuk yang kemudian mengubah karakter dan bentang alam, dan kemudian nilai-nilai yang menekankan rantai pasok (*supply chain*) yang melekat dengan perusahaan dan perkebunan.

Dalam kasus Padangrincang, berdasarkan perhitungan KRUA, jumlah air yang menjadi kontestasi dari komunitas dan perusahaan minuman kemasan (AMDK) adalah 63 liter/detik, atau setara dengan 5.443.200 liter air per hari. Jenis usaha AMDK tentu melakukan kegiatan ekstraktif, termasuk memunculkan kompetisi langsung atas air dengan tangkapan air. Bagi komunitas, lebih dari

⁷ Darmawanti, R., Astriani W, Muttaqin A. 2018. Paragraf ini secara keseluruhan merupakan rumusan pengamatan terhadap kualitas air dalam riset Darmawanti, Astriani, dan Muttaqin mengenai Desa Semanga.

6.000 hektar sawah di Padarincang (1 ha = hektar 2.000 kg padi /4 bulan atau 6.000 kg beras/ tahun) menjadi pertaruhan. Demikian pula dengan rantai pasok yang terhubung langsung dengan kegiatan ekstraktif tersebut, termasuk mobilisasi, ijin-ijin derivat yang muncul, dan juga problem terkait keberlanjutan (*sustainability*). Ruang sosial dibentuk oleh kontestasi nilai-nilai atas air, dan tentu perebutan ruang hidup.

Dalam kasus Semanga, dengan melihat karakter polusi, kita dapat melihat bahwa limbah kegiatan perkebunan secara langsung mengubah kualitas air, dan kemudian merubah karakter dan bentang alam. Mengenai kualitas air, sungai yang tercemar (termasuk berbau) yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan juga mengurangi biota sungai, termasuk ikan yang menjadi sumber penghidupan.

Ruang sosial “deagrarianisasi” ini kemudian beralih dari kontestasi dan perebutan soal air ke problem relasi kuasa. “Keresahan sosial” menjadi penanda adanya tentangan terhadap aktor-aktor dominan dalam relasi kuasa. Perubahan dari konflik nilai menjadi problem relasi kuasa menjadi. Tentangan terhadap kegiatan korporasi menjadi mengemuka. Tentangan ini sementara ini tidak menemukan ruang-ruang negosiasi.

Kajian KRuHA masih menitikkan fokus pada “air dan komunitas”, dan tidak secara khusus menganalisis mengenai “relasi kuasa”. Dalam berbagai kajian dan kolaborasi KRuHA, kajian mengenai air dengan mencermati “ruang sosial” yang sedang berubah. Air yang menjadi penentu dalam ruang sosial tersebut mengalami perubahan yang luar biasa yang secara tidak adil (*adverse*) menimpa komunitas-komunitas yang hidup di wilayah terkait. Hal inilah yang kemudian memicu deagrarianisasi. Pedesaan justru menjadi ruang alienasi bagi komunitas-komunitas ini dimana air menjadi unsur penting dalam alienasi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai air telah meletakkan norma mengenai air, termasuk air dan komunitas.

Putusan didasarkan, dan kemudian, memproyeksikan suatu ruang negosiasi dengan tetap mengharuskan adanya pengakuan. Putusan ini secara langsung “memperlambat” alih fungsi lahan dari komunitas desa ke wilayah komersial. Hal ini tidak perlu dianggap menjadi penghambat pembangunan, namun, hal ini dijadikan analisis bahwa komunitas desa memang tidak bisa berubah secara cepat. Jenis dan kecepatan perubahan yang dipaksakan oleh kegiatan komersial perlu dipahami dengan amat baik.

Kajian KRuHA mencermati bahwa air menjadi ruang sosial dalam “perubahan yang harus dinegosiasikan” dengan mendasarkan diri bahwa perlu ada pengakuan hak-hak komunitas air (*res commune*). Dalam ruang sosial ini, Mahkamah Konstitusi merumuskan air dalam hirarki hak, sebagai berikut:

1. Air minum (*safe and healthy drinking water*)
2. Air untuk sanitasi (*sanitation*)
3. Air untuk rumah tangga (*household*)
4. Air untuk pertanian (*agro-ecology, agriculture, rural livelihood*)
5. Air komunitas (*community-based water*, pemulia sumber air, jenis-jenis “subak”)
6. Air dalam siklus hidrologis (DAS, pengelolaan limbah, wilayah tangkapan air, *agro-ecology, rural livelihood, urban water & waste management, maritime-based ecosystem, “sadar bencana”*)
7. Air sebagai konsumsi layak untuk kemanusiaan (layanan publik, kualitas kesehatan, respon bencana)

Tingkatan air dalam ruang sosial ini menuntut adanya suatu prioritas pemenuhan, dan dengan itu, prioritas konservasi. Dalam masyarakat pedesaan, komunitas pemulia ekosistem, dan komunitas adat, prioritas ini juga diatur dan menjadi penanda masyarakat pedesaan tersebut. Tanpa ada prioritas, penanda ini

akan hilang dan akan berdampak pada hak atas hidup masyarakat pedesaan tersebut. Dalam kasus Padang Rincang dan Semanga.

Kompetisi, perambahan, dan kepentingan terhadap prioritas atas air ini bergerak dari wilayah perkotaan ke wilayah pedesaan dan kawasan sumber daya. Jika sebelumnya kompetisi, perambahan, dan kepentingan ini mengarahkan perhatian pada aspek hilir dari air, seperti pipanisasi, distribusi, pengukuran, tarif, maka ketiganya bergerak ke wilayah pedesaan yang berujung pada penguasaan dan pengusahaan, yaitu dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, dan dalam PP nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Kedua PP ini juga berdampak dalam hal bagaimana ruang sosial dibentuk di kawasan pedesaan sumber daya.

Ruang sosial ini, lebih lanjut, akan bergantung atau sangat terdampak dalam hal belum adanya data terintegrasi terkait: (i) peta alokasi, termasuk peta potensi dan penggunaan atau neraca air (water balance) untuk mengetahui seberapa besar potensi sumber daya air Indonesia (DAS, air bawah tanah dan hutan) dan, seberapa yang besar dapat di kelola (maximum available resources) untuk kepentingan publik (negara dan masyarakat), dan seberapa besar yang dapat dialokasikan sebagai Hak Guna Air untuk kepentingan komersial. Kompetisi, perambahan dan kepentingan dalam ruang sosial ini akan terus berlangsung. Pengakuan (rekognisi) terhadap ruang sosial masyarakat pedesaan, komunitas pemulia ekosistem, dan komunitas adat akan terfokus pada sisi hulu dan sisi kewilayahan. Pengakuan (rekognisi) dalam kompetisi yang sedemikian sengit ini menjadi agenda besar dari komunitas itu sendiri -sejauh mana mereka dapat memperjuangkan rekognisi itu sebagai bagian dari hak hidup mereka.

III. Simpulan

Model analisis yang dikembangkan oleh KRuHA yang mendasarkan dari pada kajian normatif berdasarkan “putusan Mahkamah

Konstitusi” masih menjadi proses “topical”, namun mempunyai posisi penting dalam mencermati perubahan-perubahan dalam masyarakat saat ini. Putusan Mahkamah Konstitusi dimulai dengan prinsip-prinsip, dan kemudian saluran dan ruang negosiasi. Hal ini menjadi penjelasan mengapa perubahan tidak bisa diserahkan hanya pada satu pihak saja, melainkan perlu ada proses kenegaraan.

Saat mencermati mengenai “pengakuan” (rekognisi) mengenai *res commune* dalam komunitas desa, khususnya 2 desa yang menjadi bagian dari kajian KRuHA maka kita melihat bahwa titik kontestasinya ada pada nilai-nilai komunitas dan nilai-nilai komersial yang berada dalam satu ruang yang sama. Secara terus-menerus, kontestasi ini mempengaruhi relasi komunitas dengan pihak-pihak di luar diri mereka. Sampai di sini, KRuHA masih terus mencermati hal-hal apa yang dapat muncul dari situasi sedemikian.

KRuHA membangun kajian mengenai pola hubungan dan identifikasi komunitas-komunitas terhadap wilayah dan situasi hidrologis, dengan dasar normatif dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Proses ini masih berjalan dengan berbagai ragam situasi dan rekomendasi yang muncul dari tiap-tiap lokalitas.

KEPUSTAKAAN

Darmawanti, R., Astriani W, Muttaqin A. 2018. *Study of Activity and Livelihood of Semanga Village (Sambas, West Borneo)*. Ecological Observation and Wetland Conservation (ECOTON) and GEMAWAN

KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air). 2019. *Laporan Indeksasi Pelembagaan Putusa Mahkamah Konstitusi mengenai Sumber Daya Air*.

_____ . 2020. Berkas-berkas kajian KRuHA 2014-2020.

Talan, John Petrus dan Reza, Muhamad. 2021. *Melacak Ketidakadilan Sosial Dalam Produksi Ruang di Indonesia*. Dalam *Ketidakadilan Sosial, Kapitalisme, dan Demokrasi: Catatan dari Penjuru Indonesia*, editor: Dominggus Elcid Li dan Sujarwoto, Indonesia Social Justice Network (ISJN), Tahun: 2021

van Klingen, Gerry. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia, Small town wars*. Abingdon Oxon: Routledge

PENANGGAP

Andreas Pandiangan

Saya tidak akan banyak menanggapi karena saya pertama-tama berterimakasih kepada forum ini. Untuk kesempatan kesekian kalinya saya mendapatkan pencerahan, dan pemahaman, sekaligus analisis yang tajam dari rekan-rekan masyarakat sipil. Apa yang dilakukan bung Reza dan teman-teman di KRuHa ini kan salah satu bentuk kerja-kerja masyarakat sipil pasca-reformasi, yang sebelumnya tidak terbayangkan di jaman Orde Baru. Mereka tidak hanya sekedar melakukan pendampingan ke komunitas atau masyarakat tertentu, tetapi juga sampai pada tingkat advokasi yang menyentuh kebijakan-kebijakan strategis, dan memang salah satu warna kebijakan Indonesia pasca reformasi itu sudah bukan sesuatu yang tidak bisa diutak-atik, bukan sesuatu yang tidak bisa dikritisi. Jadi selalu terbuka ruang dan proses kebijakan untuk selain dikritisi, bila perlu dirubah, dan hal ini sudah di alami oleh rekan-rekan masyarakat sipil. Ini salah satu keunikan dari kerja-kerja masyarakat sipil, termasuk yang dilakukan koalisi KRuHa ini. Sebenarnya saya sudah membuat catatan-catatan yang akan saya tanyakan tetapi ternyata bung Reza menyampaikannya di akhir: soal pendampingan dan seterusnya. Saya mencoba, sebenarnya sifatnya bertanya supaya kita mendapatkan semacam gambaran jelas. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan masa sipil ini, sebetulnya ini penilaian saya secara subjektif, sebenarnya adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi sejatinya. Jadi tidak hanya sekedar apa menguasai pengetahuan, menguasai konsep, tetapi sampai kepada kerja-kerja advokasi sampai perubahan. Yang menarik yang perlu disampaikan pada forum ini adalah adalah yang pertama bagaimana sebetulnya di dua komunitas ini, pendampingan yang dilakukan. Karena dalam

dua komunitas ini, hal ini adalah sesuatu yang baru waktu itu bagi teman-teman. Yang kedua tadi sudah disebut tentang para kyai di pesantren. Yang menarik adalah apakah dalam persoalan air ini tidak ada kepentingan dari tokoh sentral tersebut sehingga bisa ketemu antara ide teman-teman yang melakukan advokasi dengan kyai-kyai di pondok pesantren tersebut. Atau mungkin di Sambas, beda lagi tokoh sentralnya. Masih berkaitan dengan tokoh sentral di dua komunitas tersebut, apakah mereka tidak punya kepentingan politik ketika teman-teman melakukan advokasi. Karena, pasti tokoh sentral, apalagi di masyarakat kita, selalu ada dua Kepentingan yang tidak bisa dipisahkan antara kepentingan politiknya dia untuk mengendalikan masyarakat, mempengaruhi masyarakat tetapi sekaligus kepentingan ekonomi. Yang ketika, perlu diberikan gambaran tentang dinamika di masing-masing komunitas, ketika teman-teman melakukan pendampingan tadi disebutkan bahwa bisa beragam respon mereka. Yang terakhir, tentunya kerja-kerja ini butuh keberlanjutan. Tampaknya perlu disampaikan, apakah rekan-rekan masyarakat sipil di dua komunitas tersebut berhasil atau minimal mempunyai tokoh-tokoh baru, atau orang-orang baru yang punya kesadaran baru untuk melanjutkan kerja kerja yang sudah dibangun.

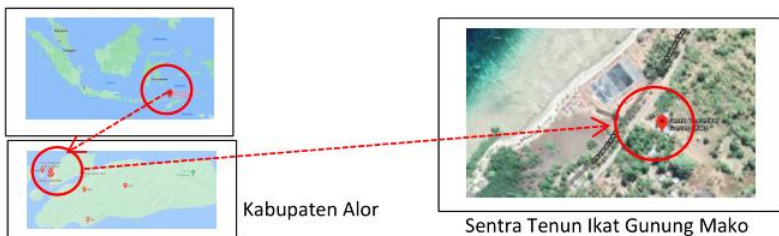
Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Tata Ruang Perajin Tenun Ikat, Studi Kasus Sentra Tenun Ikat Gunung Mako di Kabupaten Alor

Wiyatiningsih*, Kristian Oentoro
Fakultas Arsitektur dan Desain
Universitas Kristen Duta Wacana

*Email: wiyatiningsih@staff.ukdw.ac.id

Pendahuluan

Kabupaten Alor memiliki produk budaya tenun ikat yang sudah terdaftar dalam Indikasi Geografis Seri-A No. 15/IG/XII/A/2018 (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2018). Dalam berita resmi Indeks Geografis disebutkan bahwa tenun ikat/songket di Kabupaten Alor disebarakan oleh 4 (empat) kelompok etnis tenun, yaitu: Kolana, Batulolong, Kui dan Pantar (baranusa). Setiap etnis tenun membentuk sentra tenun yang tersebar di Kabupaten Alor. Salah satu sentra tenun yang masih bertahan adalah Sentra Tenun Ikat Gunung Mako di Dusun Hula, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur



Gambar 1. Peta Lokasi Sentra Tenun Ikat Gunung Mako di Kabupaten Alor.
(Sumber: google maps, 2021)

Perkembangan teknologi alat tenun, bahan dan pewarna buatan pabrik yang lebih mudah didapatkan menjadi alasan semakin langkanya produk tenun ikat alami di Kabupaten Alor. Meski demikian, Sentra Tenun Ikat Gunung Mako masih bertahan dengan proses tenun tradisional dan penggunaan bahan alam (Gambar 2). Sentra tenun ikat ini menggunakan bahan pewarna alam temuan dari ketua kelompok tenun (Mama Sariat). Sentra tenun ini juga memproduksi benang sendiri yang dibuat dari tanaman kapas. Keunikan tersebut menjadikan Sentra Tenun Ikat Gunung Mako dikenal sampai ke luar negeri (Dinas Pariwisata Alor, 2019).



Gambar 2. Hasil Kain Tenun dan Bahan Alam di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako
(Sumber: Oentoro, 2020)

Proses pembuatan tenun ikat di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako mempengaruhi tata ruang kerja pembuatan tenun. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan karakteristik dan pengaruh kearifan lokal terhadap tata ruang kerja perajin tenun ikat Alor. Pemahaman terhadap karakteristik dan pengaruh kearifan lokal terhadap ruang kerja perajin tenun di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako di Kabupaten Alor dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan strategi tata ruang kerja bagi perajin tenun yang lebih nyaman tanpa mengabaikan kearifan lokal dalam proses pembuatan tenun ikat. Ruang kerja perajin tenun ikat Alor yang memperhatikan kearifan lokal dalam proses pembuatan tenun relevan untuk dibahas, karena dapat menjadi salah satu

upaya untuk melestarikan tradisi tenun ikat alam yang semakin pudar pada saat ini.

Tinjauan Pustaka

Tradisi Tenun dalam Budaya Alor

Kain tenun bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan sekedar busana sehari-hari, namun memiliki banyak fungsi dalam adat masyarakat NTT, yaitu sebagai belis/mas kawin, penghargaan pada upacara kematian, pembayar denda adat, alat tukar (uang), lambang strata sosial, penghargaan kepada tamu dan untuk menolak bencana. Pada perkembangannya, tenun menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar kaum perempuan di Kabupaten Alor (Sarana Multi Infrastruktur 2020).

Kaum perempuan di wilayah pesisir pantai di Alor pada umumnya menjalankan tradisi menenun, baik untuk keperluan pribadi sehari-hari maupun untuk dijual. Penduduk Alor di wilayah pesisir pantai pada umumnya beragama Islam dan kaum perempuan Muslim di wilayah ini mayoritas bekerja sebagai penenun. Pengelompokan penenun di area pesisir pantai tersebut melahirkan istilah Alor sebagai Pantai dan Gunung, yaitu bahwa orang pantai (Muslim) menenun, orang gunung (Kristen) membeli (Sarana Multi Infrastruktur 2020).

Tenun ikat merupakan proses pembuatan tenun dengan mengikat benang-benang sebelum diberikan warna. Setelah diikat, benang dicelupkan atau dimasukkan ke cairan pewarna (Rini & Pitang, 2020). Tenun ikat atau *kawate* dalam Bahasa Baranusa (sebuah daerah di Pulau Pantar, Alor) merupakan artefak budaya yang mengikat masyarakat dalam ikatan batin yang kokoh. Kain tenun melambangkan ikatan tali persaudaraan dalam upacara tukar menukar kain tenun antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Kain tenun juga mencerminkan penghormatan terhadap sesama yang terlihat pada tradisi menyambut tamu. Upacara penyambutan tamu tersebut biasanya diiringi dengan

petuah-petuah adat, makan sirih pinang dan tarian adat (Munir, 2010).

Bagi masyarakat Ternate (sebuah pulau di Kabupaten Alor) menenun merupakan pekerjaan kaum perempuan sehari-hari. Menenun bagi kaum perempuan di Ternate diibaratkan sebagai catatan perjalanan kehidupan di sekitar mereka. Kaum perempuan di pulau ini belajar menenun secara turun temurun dan menjadikan tenun ini sebagai sumber penghasilan, selain ketrampilan wajib sebagai perempuan di Alor. Sementara kaum laki-laki bekerja sebagai nelayan di laut. Motif-motif hewan laut dan ikan yang terdapat di kain tenun yang dibuat oleh kaum perempuan di pulau Ternate mencerminkan kehidupan mereka sehari-hari yang mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan (Nasir, 2018).

Kearifan Lokal dalam Ruang Kerja dan Proses Pembuatan Tenun

Pembuatan tenun ikat secara tradisional merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan oleh perajin tenun lintas generasi. Pemahaman terhadap kearifan lokal dalam pembuatan tenun dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun regulasi terkait konservasi sumber daya alam hayati. Regulasi tersebut dapat mengontrol pemanfaatan bahan-bahan alami pembuatan tenun, sehingga ketersediaannya dapat terjaga (Siombo, 2019).

Kearifan lokal atau *local wisdom* dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004). Sumber kearifan lokal di Indonesia meliputi tiga komponen, yaitu 1) elemen dasar; 2) simbol budaya; dan 3) karakteristik pengetahuan. Elemen dasar mencakup interaksi sosial manusia dan habitat. Simbol budaya terdiri dari arsitektur, kesenian, kesusasteraan, ritual dan mitos lokal. Karakteristik pengetahuan meliputi persepsi logis dan non logis pada kearifan lokal (Meliono, 2011) dalam (Sulistiani, Rukayah, & Sari, 2018). Mengacu pada pembedaan sumber kearifan lokal tersebut, pembahasan tata ruang kerja perajin tenun di Sentra Tenun Ikat

Gunung Mako akan difokuskan pada sumber simbol budaya, khususnya arsitektur dan ruang untuk ritual pembuatan tenun ikat.

Kearifan lokal merupakan tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan ketrampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama yang diwariskan secara turun temurun (Hidayati, 2016). Mengacu pada prinsip Aprianto et al (2008), Hidayati (2016) mengelompokkan kearifan lokal ke dalam 5 dimensi sosial, yaitu: 1) pengetahuan lokal; 2) budaya lokal; 3) ketrampilan lokal; 4) sumber-sumber lokal; dan 5) proses sosial lokal. Lima dimensi sosial dari kearifan lokal tersebut akan dipergunakan untuk mengkaji arsitektur dan tata ruang kerja perajin tenun ikat di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako di Kabupaten Alor.

Metode penelitian

Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif – studi kasus eksploratif yang bertujuan untuk mencari tahu lebih dalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan suatu hipotesis (Raco 2010: 50). Studi kasus merupakan metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu dengan mengumpulkan beraneka sumber informasi. Studi kasus merupakan suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (bounded system), sebuah kasus dapat dipahami dengan perbandingan kasus lain (Creswell dalam Raco (2010) & Rahardja (2017)). Keberadaan Sentra Tenun Ikat Gunung Mako akan dijelaskan melalui perbandingannya dengan sentra tenun ikat lain di Kabupaten Alor, yaitu Rumah Tenun Moru (Sentra Tenun.In) dan Rumah Tenun Kelompok Beringin Jaya.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas dan artefak fisik serta dokumen yang dikumpulkan melalui media daring. Data daring dikumpulkan melalui dokumen digital yang dapat diakses melalui website, jurnal/artikel elektronik dan media sosial. Kombinasi metode pengumpulan data secara luring

dan daring ini memungkinkan untuk dilakukan, karena hanya terkait dengan teknik pengumpulan data yang tidak mempengaruhi cara analisis (Djunaedi 2020).

Data tentang kearifan lokal arsitektur dan ritual pembuatan tenun ikat yang dikumpulkan melalui observasi luring dan daring dianalisis menggunakan 5 (lima) dimensi sosial kearifan lokal menurut Aprianto et al (2008) dalam (Hidayati, 2016). Hasil analisis tersebut dipergunakan untuk merumuskan temuan penelitian tentang pengaruh kearifan lokal terhadap karakteristik ruang kerja perajin tenun ikat di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako.

Metode Analisis

Data yang dikumpulkan melalui observasi di lapangan (luring) maupun dokumen digital yang diakses secara daring dianalisis untuk menemukan faktor pengaruh kearifan lokal terhadap tata ruang kerja perajin tenun ikat Alor. Tata ruang tersebut dikaji menurut 5 (lima) dimensi sosial kearifan lokal (Aprianto et al (2008) dalam Hidayati (2016) sebagaimana ditunjukkan oleh bagan analisis pada Gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Bagan Analisis Sentra Tenun Ikat Gunung Mako sebagai Studi Kasus
 Sumber: Peneliti, 2021

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako yang terletak di Dusun Hula, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sentra tenun ini dipilih sebagai studi kasus penelitian karena memiliki jumlah anggota kelompok terbanyak di Alor, yaitu sekitar 70 perajin tenun dan lebih dikenal daripada dua sentra tenun lainnya.

Pembahasan

Eksistensi Sentra Tenun Ikat Gunung Mako di Kabupaten Alor Di Kabupaten Alor terdapat beberapa sentra tenun, di antaranya adalah tiga sentra tenun terbesar yang dibahas pada penelitian ini. Tiga rumah tenun terbesar di Kabupaten Alor dipilih sebagai konteks Sentra Tenun Ikat Gunung Mako. Sentra Tenun Ikat Gunung Mako dan Sentra Tenun. Ini terletak di pulau Alor, sedangkan Rumah Tenun Kelompok Beringin Jaya berada di pulau Ternate. Secara geografis, ketiga sentra tenun tersebut terletak di dataran rendah atau area pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan.

Situasi tersebut sesuai dengan pengelompokan masyarakat Alor sebagai orang pantai dan gunung (Sarana Multi Infrastruktur, 2020). Sebaran perajin tenun di Kabupaten Alor ditunjukkan melalui Gambar 4 berikut ini:



1. Sentra Tenun Ikat Gunung Mako
2. Sentra Tenun.In
3. Rumah Tenun Kel. Beringin Jaya


Gambar 4. Sebaran Perajin Tenun di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur

<https://www.google.com/maps/search/sentra+tenun+di+alor/@-8.3700334,124.4108056,10.88z>

Perbandingan kondisi Sentra Tenun Ikat Gunung Mako dengan dua rumah tenun yang lain ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

Nama	Lokasi	Keterangan
<p data-bbox="204 940 518 1003">Sentra Tenun Ikat Gunung Mako</p>  <p data-bbox="204 1291 565 1343">http://produktenunalor.blogspot.com/2014/08/tempat-produksi.html</p>	<p data-bbox="591 940 698 1229">Dusun Hula, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut (ABAL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="726 940 938 1083">- Tahun 2000 mulai penemuan pewarna alam <li data-bbox="726 1090 938 1194">- Pusat penenun, anggota ± 70 orang <li data-bbox="726 1201 938 1374">- Jenis tenun ikat <li data-bbox="726 1381 938 1486">- Rumah tenun digabung dg rumah tinggal pribadi <li data-bbox="726 1492 938 1520">- Fasilitas: kebun, ruang pembuatan benang,

Nama	Lokasi	Keterangan
		menenun, pewarnaan dan penjualan
<p data-bbox="206 392 538 461">Rumah Tenun Moru (Sentra Tenun.In)</p>  <p data-bbox="206 715 562 795">https://ptsmi.co.id/id/cerita-csr/warisan-mama-untuk-putri-alor/</p>	<p data-bbox="592 392 689 604">Desa Moru, Kec. Alor Barat Daya (ABAD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 392 900 453">- Pusat Tenun Suku Kui <li data-bbox="730 461 921 604">- Peninggalan penenun Muslim jaman Kerajaan Kui <li data-bbox="730 612 889 682">- Anggota 15 orang <li data-bbox="730 690 921 977">- CSR PT Sarana Multi Infrastruktur, Majelis Ta'lim Telkomsel & Yayasan Insan Bumi Mandiri (IBM) <li data-bbox="730 986 936 1012">- Jenis tenun ikat <li data-bbox="730 1020 936 1237">- Rumah tenun dibangun di atas lahan warga, terpisah dari rumah tinggal <li data-bbox="730 1246 930 1388">- Fasilitas: ruang menenun dan penjualan produk tenun

Nama	Lokasi	Keterangan
<p data-bbox="206 241 489 305">Rumah Tenun Kelompok Beringin Jaya</p>  <p data-bbox="206 638 518 687">https://www.youtube.com/watch?v=rqOJQM-Ao5M</p>	<p data-bbox="591 241 685 453">Desa Ternate, Pulau Ternate, Alor Besar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="726 241 930 453">- Thn. 2000 bantuan dari Dinas Perindustrian (40 rol benang & 2 alat tenun) <li data-bbox="726 465 930 677">- Jenis tenun ikat <li data-bbox="726 689 930 868">- Pewarna alam dari biota laut, motif binatang laut, kura-kura, ikan <li data-bbox="726 880 930 1038">- 15 tahun model pemasaran berubah, didatangi pengunjung <li data-bbox="726 1050 930 1194">- Rumah tenun digabung dengan rumah tinggal pribadi <li data-bbox="726 1206 930 1246">- Fasilitas: ruang menenun & penjualan, proses lain di luar bangunan

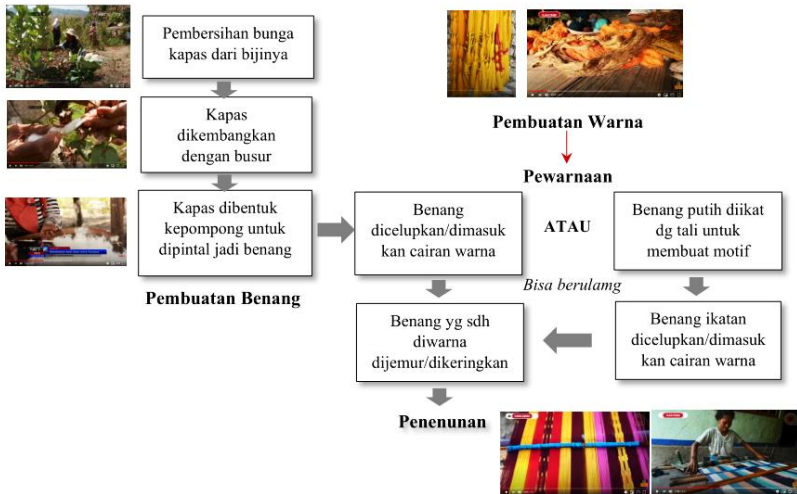
Sumber: Peneliti 2021

Seperti terlihat pada Tabel 1, ketiga sentra tenun memproduksi tenun ikat dengan pewarna alam yang terbuat dari tanaman dan binatang laut. Ketiga rumah tenun tersebut didirikan di atas tanah perorangan. Sentra Tenun Ikat Gunung Mako dan Kelompok

Beringin Jaya menggunakan rumah tinggal ketua kelompok sebagai ruang produksi. Sedangkan Rumah Tenun Moru khusus didirikan atas bantuan dana sosial dari perusahaan swasta. Ketiga sentra tenun menyediakan ruang untuk semua tahap produksi tenun, mulai dari penenunan sampai dengan penjualan. Sentra Tenun Ikat Gunung Mako memiliki fasilitas yang lebih lengkap, yaitu tersedianya kebun penghasil bahan dan pewarna alam tenun. Kelengkapan proses tenun di sentra tenun ini menjadi keunggulan produk Sentra Tenun Ikat Gunung Mako.

Proses Pembuatan Tenun Pembentuk Ruang Kerja Perajin Tenun Ikat

Proses pembuatan tenun di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako dimulai dengan ritual doa oleh Mama Sariat dengan mendendangkan lagu dengan alat musik tradisional. Nyanyian ini dianggap sebagai mantra bagi penenun agar lebih bersemangat dalam bekerja, sehingga menghasilkan tenun yang bagus (NetNews, 2015).

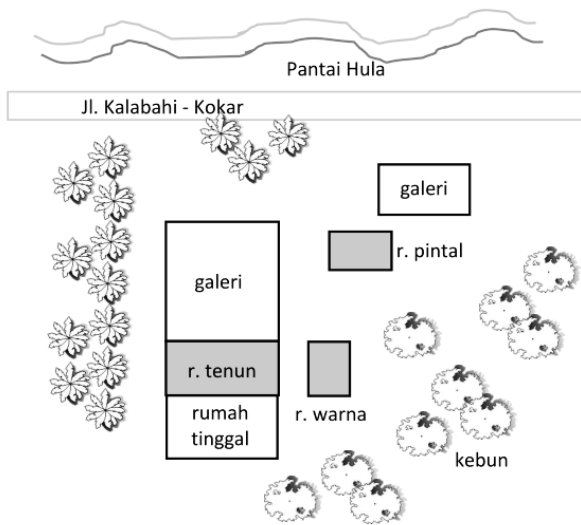


Gambar 5. Bagan Proses Pembuatan Tenun Ikat Alor dengan Bahan dan Pewarna Alami
 Sumber: Pengolahan berbagai Sumber, 2021

Gambar 5 menunjukkan proses pembuatan tenun ikat yang dilakukan oleh Sentra Tenun Ikat Gunung Mako. Proses pembuatan tenun tersebut terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Bahan Kapas dan Pembuatan Benang
2. Pembuatan Pewarna dan Pewarnaan
3. Penenunan




Proses pembuatan tenun di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako dilakukan di lingkungan rumah tinggal Mama Sariat dengan pola ruang kerja seperti terlihat pada Gambar 6 berikut ini:





Gambar 6. Tata Ruang Sentra Tenun Ikat Gunung Mako
 Sumber: Peneliti, 2020

Kegiatan produksi tenun yang dilakukan di dalam bangunan adalah penjualan dan penyimpanan bahan/benang. Ruang tenun diletakkan di teras antara ruang penjualan/galeri dan rumah tinggal. Ruang-ruang terbuka di antara bangunan dipergunakan untuk memintal kapas menjadi benang, mewarnai dan menjemur benang setelah diwarnai. Penempatan aktivitas produksi tenun di ruang terbuka dan semi terbuka dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan keleluasaan gerak sesuai dengan tahapan aktivitas produksi tenun. Kegiatan menenun dilakukan di teras rumah memungkinkan adanya aliran udara dan pencahayaan yang mencukupi untuk aktivitas menenun. Kegiatan menjemur benang setelah diwarnai dilakukan di luar rumah untuk mendapatkan panas yang cukup sehingga benang cepat kering.

Tabel 2 Fungsi Ruang di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako

No	Fungsi ruang	Layout
1.	Galeri: - Pemajangan produk tenun - Penjualan produk tenun - Penyimpanan bahan tenun (benang, pewarna dan peralatan)	
2.	Ruang Tenun: - Proses ikat benang - Menenun	
3.	Ruang Pewarnaan: - Pembuatan	

No	Fungsi ruang	Layout
	pewarna alami - Pen- celupan/ pewarnaan - Pen- jemuran/ pengeringan	http://produktenunalor.blogspot.com/2014/08/p-roses-pembuatan-tenun-ikat-alor.html
4.	Ruang Pemintalan Benang - Pelepasan kapas dari bijinya - Peng- halusan kapas - Pemin- talan benang	 https://news.detik.com/foto-news/d-3023230/mengintip-pembuatan-tenun-ikat-gunung-mako/4
5.	Pekarangan / Kebun: - Tanaman kapas untuk pembuatan benang - Tanaman untuk pewarna alami: mis.	

No	Fungsi ruang	Layout
.	pisang, mengkudu, kunyit	
6.	Rumah tinggal	 https://www.youtube.com/watch?v=Yffi0IkSDYs

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, 2020

Tabel 2 menunjukkan fungsi dan lay out ruang untuk aktivitas produksi tenun di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako. Keragaman fungsi ruang tersebut mencerminkan kelengkapan tahapan proses pembuatan tenun ikat Alor, yaitu: budidaya tanaman penghasil pewarna alam dan bahan dasar benang, pemintalan benang, pembuatan pewarna alam dan proses pewarnaan benang, penjemuran/pengeringan benang, pembuatan tenun, penjualan hasil tenun dan penyimpanan bahan-bahan pembuatan tenun. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan di satu area, namun terpisah dari kegiatan privat di dalam rumah tinggal pemiliknya.

Dimensi Sosial Kearifan Lokal dalam Proses Pembuatan Tenun Ikat Alor

Sejalan dengan pengertian kearifan lokal menurut Sartini (2004), tradisi tenun ikat dalam budaya Alor merupakan bentuk kearifan lokal. Proses pembuatan tenun ikat Alor menunjukkan keharmonisan relasi antara penenun dengan Sang Pencipta, lingkungan dan alam

di sekitarnya. Proses tidak hanya terjadi pada produk tenun ikat yang dihasilkan, namun juga pada penenun yang membuatnya. Tenun ikat yang dihasilkan memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Alor. Dengan demikian, tradisi tenun ikat tidak pernah berhenti di Alor selama budaya Alor masih dipraktikkan.

Arsitektur dan tata ruang sebagai simbol budaya merupakan salah satu sumber kearifan lokal di Indonesia menurut Meliono (2011) dalam Sulistiani, Rukayah & Sari (2018). Arsitektur dan tata ruang rumah tinggal yang dialihfungsikan sebagai ruang produksi di Sentra Tenun Ikat Gunung Mako dibahas dengan 5 (lima) dimensi sosial kearifan lokal menurut Aprianto et al (2008) dalam Hidayati (2016), yaitu: pengetahuan lokal, budaya lokal, ketrampilan lokal, sumber-sumber lokal, dan proses sosial lokal.

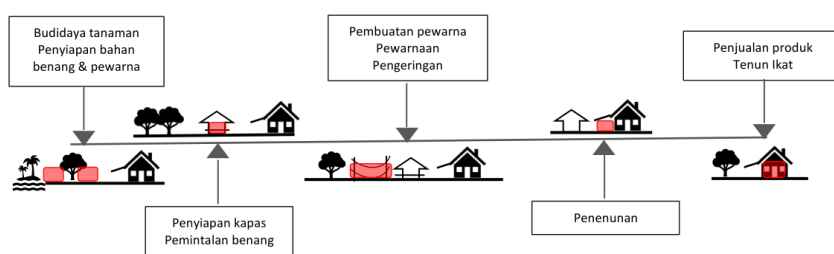
Proses tenun	Dimensi Kearifan Lokal					Ruang
	Pengetahuan	Budaya	Ketrampilan	Sumber-sumber	Proses sosial	
Budidaya tanaman	Hidup berdampingan dengan alam	Tradisi herbal	Berkebun	Tanaman kapas, pisang, mengkudu dll.	Tanaman sebagai aset berharga	Pekarangan/ Kebun (<i>ruang terbuka</i>)
Pemintalan Benang kapas	Benang dari serat alam	Memental Benang	Mengolah bunga kapas sebagai benang	Tanaman kapas	Mengamati, Mencontoh & mencoba	Balai-balai (<i>ruang semi terbuka</i>)

Proses tenun	Dimensi Kearifan Lokal					Ruang
	Pengetahuan	Budaya	Ketram pilan	Sumber - sumber	Proses sosial	
Pembuatan warna & pewarnaan bahan alam	Eksperimen bahan	Harmoni dengan alam	Meramu bahan untuk membuat warna	Tanaman kebun/hutan, biota laut	Mengamati, Mencontoh & mencoba	Balai-balai Pekarangan (<i>ruang semi terbuka</i>)
Pembuatan tenun	Belajar & praktik	Tenun sebagai tugas domestik	Pembuatan tenun dg motif lokal	Peralatan, bahan, ketram pilan	Tradisi turun-temurun	Teras (<i>ruang semi terbuka</i>)
Penjualan	Strategi Pemasaran & Teknologi Informasi	Tenun sebagai Peran gkat adat	Peningkatan motif & kualitas produk	Kelompok tenun	Interaksi dengan dunia luar	Galeri/ ruang tamu (<i>ruang Ter-tutup</i>)

Seperti terlihat pada Tabel 3, proses pembuatan tenun ikat pada Sentra Tenun Ikat Gunung Mako diawali dengan penyediaan bahan pembuatan benang dan pewarna alam yang dilakukan di pekarangan/kebun. Pengetahuan akan tanaman sebagai bahan pembuatan benang dan pewarna alam diperoleh melalui kedekatan masyarakat Alor dengan alam, selain belajar dari nenek moyang.

Pengetahuan dan ketrampilan lokal juga diperoleh para penenun pada tahap pembuatan benang, pewarnaan dan pembuatan tenun. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut semakin berkembang karena adat-istiadat dan budaya yang menempatkan tenun sebagai elemen penting dalam tradisi masyarakat Alor. Proses penjualan memiliki dimensi yang lebih luas karena adanya interaksi dengan dunia luar. Interaksi ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi.

Setiap tahap dalam proses pembuatan tenun memerlukan ruang yang spesifik. Mengacu Tabel 3, terdapat kecenderungan bahwa semakin awal proses aktivitas produksi tenun, ruang yang dibutuhkan semakin terbuka dan terpisah dari rumah. Tahap budidaya tanaman dilakukan di kebun/pekarang, tahap pemintalan benang dan pewarnaan dilakukan di balai-balai yang terbuka dan dekat dengan pekarangan. Tahap pembuatan tenun dilakukan di teras semi terbuka yang memungkinkan penenun tetap mendapatkan kenyamanan visual dan termal. Sedangkan, tahap penjualan dilakukan di dalam ruang galeri yang lebih berorientasi ke dalam ruangan.



Gambar 7. Bagan Ruang Kerja Perajin Tenun berdasarkan Proses Tahapan Pembuatan Tenun
 Sumber: Peneliti, 2020

Gambar 7 menunjukkan posisi dan ruang kerja di Sentara Tenun Ikat Gunung Mako yang terbentuk di area rumah tinggal ketua

kelompoknya. Berdasarkan bagan tersebut, dapat disebutkan bahwa pengaruh kearifan lokal dalam tahapan pembuatan tenun ikat terhadap tata ruang kerja perajin tenun ditunjukkan melalui kedekatan ruang kerja dengan sumber daya (material, sinar matahari, pencahayaan dan penghawaan) dan jenis pelingkup atau ketertutupan ruang (*enclosure*). Kedua elemen ruang tersebut menjadi aspek pertimbangan dalam perancangan ruang kerja perajin tenun yang berbasis kearifan lokal.

Kesimpulan

Sentra Tenun Ikat Gunung di Kabupaten Alor berkembang pesat dan terkenal karena penggunaan kapas sebagai bahan benang dan pewarna alam temuan dari ketua kelompok. Perajin tenun di kelompok ini memproduksi tenun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kultural, namun juga ekonomi keluarga. Mengingat kedekatan fungsi produksi tenun dengan tugas domestik rumah tangga, maka kegiatan menenun dilakukan di rumah dan area sekitarnya.

Pada kasus Sentra Tenun Ikat Gunung Mako, kegiatan produksi tenun dilakukan di rumah dan pekarangan milik ketua kelompok tenun. Hampir semua ruang di lingkungan rumah tinggal ketua kelompok tenun dipergunakan untuk produksi tenun ikat, kecuali ruang yang ditinggali oleh keluarga pemilik rumah. Pengetahuan tentang pembuatan tenun ikat Alor diturunkan dari generasi ke generasi dan memanfaatkan sumber daya lokal. Prinsip kearifan lokal pada pembuatan tenun ikat Alor terlihat pada teknik pembuatan tenun ikat yang dilakukan secara tradisional dan penggunaan bahan dasar benang dan pewarna alam. Kearifan lokal pada proses pembuatan tenun ikat Alor dikaji melalui 5 (lima) dimensi sosial kearifan lokal, yaitu pengetahuan, budaya, ketrampilan, sumber-sumber dan proses sosial. Pengaruh kearifan lokal dalam pembuatan tenun ikat Alor ditunjukkan melalui kedekatan lokasi ruang kerja dengan sumber daya dan jenis

ketertutupan ruang (enclosure). Semakin akhir tahap pembuatan tenun ikat semakin dekat dengan rumah dan semakin tertutup ruang yang diperlukan. Hal ini dipengaruhi oleh jenis aktivitas dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pembuatan tenun.

Pengetahuan tentang keaslian proses maupun produk tenun ikat yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional, khususnya Alor merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang seharusnya dipahami oleh masyarakat umum sehingga dapat semakin meningkatkan nilai tenun ikat. Penelitian tentang aspek kearifan lokal pada tenun ikat Alor penting untuk dilanjutkan, terutama untuk memperdalam pemahaman tentang kualitas ruang hunian yang sekaligus dipergunakan sebagai ruang kerja bagi perajin tenun ditinjau dari aspek optimalisasi dan kenyamanan fisik ruang.

KEPUSTAKAAN

BUKU

Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Rahardja, M. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

JURNAL

Ardiniken, F.A.; Murtini, T.W. & Rukayah, S. (2016). Pola Tata Ruang Kampung Industri Rumah Tangga. Studi Kasus: Sentra Tenun ATBM Desa Wanarejan Utara dan Dan Troso, Jepara. *Jurnal Tesa Arsitektur*, Vol. 14, No. 1, 42 – 54.

Hidayati, D. (2016). Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 39 – 48.

Sartini (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, No. 2, 111 – 119.

Siombo, M.R. (2019). Kearifan Lokal dalam Proses Pembuatan Tenun Ikat Timor. Studi pada Kelompok Penenun di Atambua – NTT. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, 97 – 112.

Sulistiani, F., Rukayah, R.S. & Sari, S.R. (2018). Konservasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Pola Tata Ruang ,Huma Hai’ Djaga Bahen. Studi Kasus: Huma Hai Djaga Bahen di Desa Bahu Palawa, Kalimantan Tengah. *Jurnal Tesa Arsitektur*, Vol. 16, No. 2, 62 – 72.

ARTIKEL/MAKALAH/LAPORAN

Dinas Pariwisata Alor. (2019). Kain Tenun Ikat Alor. <https://www.disparalor.com/kain-tenun-ikat-alor>.

Djunaedi, A. (2020). Pengenalan Metode Penelitian Online (Daring) di Era New Normal. Dipresentasikan dalam Webinar IQRA#2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 23 Juni 2020.

Munir, S. (2010). Tenun Ikat Media Penyatu Perbedaan. *Kompasiana*, 4 Oktober 2010. <https://www.kompasiana.com/www.munir.com/55002e2ba33311bb7450feea/tenun-ikat-media-penyatu-perbedaan>.

Nasir, N. (2018). Tenun Ikat Motif Hewan Laut Simbol Hidup Masyarakat Ternate Alor. Indonesia Visioner 31 Juli 2018. <https://www.visioner.id/lifestyle/15217/tenun-ikat-motif-hewan-laut-simbol-hidup-masyarakat-ternate-alor.html>.

Rini, D.R., Pitang, S. (2020). Struktur Desain pada Visualisasi Motif Tenun Umapura, Alor Nusa Tenggara Timur. Prosiding Seminar Nasional Arsitektur dan Desain (SENADA) Vol. 3, Maret 2020.

Sarana Multi Infrastruktur (2020). Warisan Mama untuk Putri Alor. Artikel di website SMI, 30 April 2020. <https://ptsmi.co.id/id/cerita-csr/warisan-mama-untuk-putri-alor/>.

MEDIA ELEKTRONIK

Altermedia Indonesia (2019). Pengrajin Kain Tenun Pulau Alor (Pewarna Alami) – Mama Sa'riat. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=qQk0qaTZsgo>

Liputan 6 (2007) Kain Tenun Alor dengan Pewarna Alami. 15 Agustus 2007. <https://www.liputan6.com/news/read/146108/kain-tenun-alor-dengan-pewarna-alami>.

Net-12 (2015) Mama Sariat, Pembuat Warna Alami untuk Kain Tenun dari Pulau Alor. Youtube, 16 Oktober 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=Yffl0IkSDYs>.

PENANGGAP

Agnes Ratih Ari Indriyani

Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk memberikan komentar atas riset dari mbak Wiyati. Mungkin, tidak banyak dari apa yang sudah di paparkan. Mungkin ada beberapa hal yang saya komentari terkait dengan bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang bernilai budaya karena unsur kearifan lokal tentang di situ dan kemudian ada konteks ruang, strategi penataan, penataan ruang, lokasi pada sebuah kegiatan produksi tenun ikat. Di sini, ada yang ingin saya konfirmasi dari pilihan ruang tadi. Keputusan tentang penentuan ruang. Tidak adakah semacam nilai kearifan lokal di dalam penentuan ruang itu sendiri. Artinya yang bersifat secara langsung, yang menjadi landasan alasan, misalnya, yang kita pahami bersama, terkait dengan sebuah keyakinan tentang tata letak, tentang penentuan apakah itu akan berada di mana, di hadapkan dengan ruang-ruang pribadi. Dari kesimpulan sudah disampaikan bahwa terkait tentang keberadaan sumber daya. Nah, itu pertama yang ingin saya tanyakan. Tidak adakah hal yang melandasi keputusan mereka yang terkait dengan kearifan lokal di sana itu sendiri, yang bersifat langsung, semacam fengshui, semacam itu. Hal yang menarik juga bahwa ternyata ada penggolongan. Ada penggolongan masyarakat sebagai pembeli. Mungkin hal ini menyiratkan faktor toleransi juga meskipun tidak menjadi bagian dari apa yang akan diteliti. Apakah itu juga berpengaruh masyarakat Kristen sebagai pembeli sedangkan masyarakat muslim itu juga sebagai kelompok produsen. Dengan adanya fenomena seperti itu, apakah itu apa sesuatu yang mungkin tidak berpengaruh juga pada keputusan-keputusan mereka. Mungkin kalau melihat lebih jauh, kemudian akan bisa ditanyakan

berarti untuk masyarakat yang berada di antara pantai dan gunung. Produsen adalah masyarakat pantai. Apakah yang selama ini berposisi sebagai pembeli, apakah mereka akan terbatas posisinya selalu sebagai pembeli. Bagaimana dari sisi kemampuan mereka. Apakah karena sudah tergolong demikian, dengan sendirinya seperti itu. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian atau tidak. Yang memproduksi adalah kelompok tersendiri, lalu yang membeli kelompok tersendiri. Kelompok pembeli ini mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup akhirnya untuk memproduksi. Kemudian terkait dengan ketidakmampuan produksi berarti memiliki ketergantungan besar terhadap produk dari luar, karena mereka hanya terbiasa membeli saja, padahal tenun ikat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat di sana; menjadi kebutuhan yang utama terkait dengan kearifan lokal. Meskipun itu tidak terkait langsung dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian dimana disini ingin menunjukkan strategi-strategi penataan ruang yang terkait dengan kearifan lokal tadi. Dan, mungkin dari apa yang sudah tertulis mungkin perlu ditekankan terlebih mengenai “highlight” yang secara tajam memperlihatkan keterkaitan dengan penelitian terdahulu tentang strategi penataan ruang dengan dihadapkan pada atau pengaruh dari kearifan lokal tadi. Kalau tidak salah, peran dari judul, ada hal yang mau ditunjukkan mengenai strategi penataan ruang terkait dengan kearifan lokal. Dan kemudian tentang tentang pewarnaan alam. Pasti itu menjadi kelebihan dari suatu produk. Apalagi jika mereka sudah mampu untuk melakukan ekspor. Tetapi dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, saya melakukan pendampingan pada perajin yang mereka sebenarnya didorong untuk juga mampu menggunakan pewarna alam. Tetapi kemudian dari sisi biaya itu menjadi sangat mahal dari sisi pengolahannya, pengadaan bahan baku pewarna alam itu sendiri karena harus dalam kuantitas yang besar, dan juga proses yang tidak praktis sehingga akhirnya mereka menyerah menyerah dan kemudian menggunakan pewarna

buatan, dan kemudian lebih menginginkan tidak berorientasi ekspor lagi tapi lebih memilih pasar di dalam negeri. Karena salah satu kendala adalah juga terkait dengan proses produksi yang mereka tidak mampu menjangkau. Mereka rugi laba. Proses dengan warna alam ternyata tidak mampu memperoleh keuntungan yang layak, memadai, secara umum. Dan mungkin juga dari sisi keberlanjutan mereka, keberlanjutan usaha mereka sebagai mata pencaharian utama, apakah kemudian menjadi sesuatu yang berpotensi bermasalah atau tidak. Karena mungkin dalam membicarakan banyak hal, kemudian kita perlu juga untuk melihat pada aspek keberlanjutan itu sendiri.

Transisi Inter-Temporal dalam Penghidupan, Studi Kasus Penghidupan berbasis Pariwisata⁸

Agnes Ratih Ari Indriyani

Gatot Sasongko

Aldi Herindra Lasso

Titi Susilowati Prabawa

Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra

Email: agnes_5ri@yahoo.com

A. Latar Belakang Masalah

Transisi inte-temporal mencakup 2 bahasan, yaitu dua lingkup periode, dan proses transisi. Dua lingkup periode dalam hal ini yaitu periode sebelumnya atau awal dibandingkan dengan periode sesudahnya atau akhir. Dalam dua lingkup periode ini dapat diamati adanya dua dinamika yang berbeda, dan seringkali kontras. Proses transisi ini melingkupi cara dan dinamika dimana suatu penghidupan itu berpindah.

Desa Sambirejo sebelum tahun 2015 adalah desa miskin dan tertinggal. Kondisi alam yang tandus bebatuan menjadikan masyarakat tidak bisa mengandalkan sector pertanian. Sebagian besar mereka berpenghidupan sebagai penambang batu putih (lebih tepatnya sebagai tenaga pemecah batu putih). Pekerjaan itu telah ditekuni secara turun temurun. Namun demikian, pada tahun 2014 pemerintah daerah Sleman mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penghentian penambangan batu berdasarkan pada rekomendasi dari beberapa instansi terkait kondisi geografis wilayah desa Sambirejo, yang pada intinya menyebutkan bahwa

⁸ Kajian ini menjadi bagian dari pengabdian yang diselenggarakan pada tahun 2019-2020

banyaknya penambangan batu putih yang masih aktif memunculkan kekhawatiran terhadap pelestarian sumberdaya arkeologi dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Pariwisata kemudian diadopsi untuk menjadi solusi alternatif penghidupan masyarakat Desa Sambirejo. Pada tahun 2015 Desa Sambirejo ditetapkan menjadi Desa Wisata. Dalam waktu relatif singkat, pada tahun 2017, salah satu destinasi wisata baru yang dimunculkan pada tahun 2015, yaitu obyek wisata Tebing Breksi memperoleh predikat sebagai destinasi wisata terpopuler di DIY. Seiring dengan itu, penghidupan masyarakat yang semula Sebagian besar bekerja sebagai penambang batu dan kemudian bekerja pada bidang pekerjaan penunjang pariwisata, mengalami perbaikan tingkat penghidupan yang cukup signifikan.

Saat ini lebih dari 80 persen penduduk setempat menggantungkan penghidupan mereka pada pekerjaan yang mendukung wisata. Perubahan penghidupan yang mereka jalani dari yang semula sebagai penambang batu dan kemudian beralih pada pekerjaan penunjang pariwisata yang terbukti mampu melepaskan mereka dari kungkungan kemiskinan, telah menjadi gantungan penghidupan mereka. Penghidupan yang lama yaitu penambang batu, sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan. Sebagian besar masyarakat beralih pada pekerjaan yang terkait pariwisata, mengisyaratkan bahwa mereka tidak memiliki pilihan penghidupan yang lain. Saat ini mereka berada dalam ketergantungan besar terhadap penghidupan berbasis pariwisata.

Masyarakat desa Sambirejo dihadapkan pada resiko. Kebergantungan mereka terhadap sector pariwisata yang bersifat rentan, memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan penghidupan (*livelihood*) mereka. Penghidupan yang tidak berkelanjutan, akan membawa mereka pada penurunan tingkat penghidupan mereka, yang berpotensi membawa mereka kembali pada jurang kemiskinan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang strategi penghidupan masyarakat. Strategi penghidupan ditempuh masyarakat untuk menuju penghidupan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri atau untuk mengatasi segala tekanan yang mengganggu baik tekanan yang bersifat jangka panjang atau berupa guncangan. Strategi masyarakat dalam konteks penghidupan berkelanjutan, di mana dalam penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang penghidupannya berbasis pada sektor pariwisata, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Untuk itu pertanyaan payung penelitian ini adalah :

Dalam cara dan dinamika bagaimana masyarakat Desa Sambirejo berpindah dari penghidupan penamban atau pekerja upahan menuju penghidupan berbasis pariwisata ?

Tujuan dari penelitian

Mendapatkan gambaran dinamika transisi inter-temporal dalam suatu penghidupan yang menentukan daya hidup (survival) suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat Sambirejo.

Manfaat

Penghidupan masyarakat yang berbasis pariwisata dari tahun ke tahun di Indonesia terus mengalami peningkatan terutama sebagai transisi. Perubahan penghidupan masyarakat lokal dari non wisata ke sector pariwisata semakin banyak terjadi, seiring semakin banyak bertumbuhnya desa wisata baru di seluruh daerah Indonesia. Pendekatan Sustainable Livelihood (Penghidupan berkelanjutan) memberikan tawaran ide untuk mengenali kapasitas local dan kekuatan yang dimiliki individu/rumahtangga. Pendekatan ini sekaligus memberikan cara pandang baru atas transisi penghidupan. *Sustainable livelihood* memberikan masukan

terhadap pada sector pariwisata (dimana produk pariwisata bersifat unik, berbeda dengan produk industry lain pada umumnya) mengenai gambaran “insentif” atau harapan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang penghidupannya berbasis pariwisata.

C. Kajian Teori

Pembangunan Berkelanjutan; Sektor Pariwisata; Desa Sebagai Sumber Penghidupan

Mengatasi dan menghapus kemiskinan dalam segala dimensi dan bentuknya, merupakan tanggungjawab dan tantangan global yang paling besar serta merupakan prasyarat utama untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Rogers, 2008). Pemikiran tersebut membuat konsep pembangunan berkelanjutan semakin populer seiring dijadikannya konsep ini sebagai jargon pembangunan di hampir seluruh negara.

Tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan selalu lebih tinggi dari wilayah perkotaan (Bappenas, 2020). Data BPS pada bulan Maret 2020 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 12,82%, lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 7,38 % (BPS, 2020). Pada masa pemerintahan presiden ke 7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pembangunan sektor pariwisata diusung menjadi salah satu mesin andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus perekonomiannya. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Indonesia menjadi salah satu bentuk mobilisasi sumber daya yang dimiliki yang semakin signifikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pariwisata diproyeksikan sebagai mesin andalan peningkatan perekonomian masyarakat, pariwisata sendiri membawa perubahan pada penghidupan lokal ketika diperkenalkan pada sebuah daerah. Salah satu dampak

pembangunan pariwisata adalah terjadinya perubahan penghidupan masyarakat lokal di destinasi pariwisata. Tao dan Wall (2009b) menyatakan bahwa pariwisata berpotensi menggantikan kegiatan ekonomi konvensional, mengurangi keragaman, dan mendorong transformasi mata pencaharian yang tidak dapat diubah. Dalam tulisannya Lasso (2018) menyatakan bahwa pariwisata seringkali memicu terjadinya transformasi mata pencaharian tradisional yang kemudian mengakibatkan ketergantungan pada sektor pariwisata.

Penelitian mengenai penghidupan lokal yang beralih ke pariwisata menunjukkan hasil yang beragam. Pada masyarakat yang beralih penghidupan dari sector non pariwisata ke sektor pariwisata, ditemukan bahwa masyarakat mampu beradaptasi dan mengikuti perubahan yang terjadi, serta mampu memanfaatkan lima asset penghidupan, sehingga pemanfaatan perubahan tersebut berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun terdapat satu aset yang mengalami penurunan yaitu aset sumber daya sosial (Sari, 2016). Sedangkan Pertiwi (2016) menemukan bahwa perubahan penghidupan masyarakat yang semula berpenghidupan non pariwisata beralih pada penghidupan pariwisata, dari segi ekonomi masyarakat tidak mengalami peningkatan. Hanya beberapa saja yang mengalami perbaikan ekonomi, sedangkan dari segi sosial terjadi perubahan nilai dalam relasi sosial mereka. Temuan lain menunjukkan bahwa perubahan penghidupan karena pengembangan sector pariwisata mengakibatkan empat asset penghidupan mengalami perubahan positif, sedangkan asset sosial kapital mengalami penurunan (Sari, 2016). Perubahan penghidupan yang terjadi juga bisa memunculkan transformasi pranata ekonomi dari patronase berbasis moralitas menjadi berbasis norma ekonomi pasar (Ekawati, 2014). Bhandari (2012) menemukan bahwa pada masyarakat miskin, perubahan penghidupan terjadi lebih cepat.

Pariwisata merupakan sebuah industri yang rentan terhadap perubahan mendadak yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Temuan Prabawa dan Dahles (2015) mencatat dampak pariwisata di Yogyakarta akibat krisis moneter, isu keamanan serta bencana alam. Oleh karena itu, ketergantungan yang berkelanjutan dari pendapatan berbasis pariwisata menempatkan orang-orang lokal dalam risiko (Tao dan Wall, 2009b; Lasso dan Dahles, 2018). Menurut Fauzi (2004), pembangunan ekonomi harus didasarkan pada pembangunan berkelanjutan.

Kajian tentang desa sebagai sumber penghidupan berkelanjutan dengan kajiannya pada masyarakat dalam memaksimalkan potensi atau asset yang ada di desanya menurut Zamroni (2016) merupakan kajian yang sangat dibutuhkan mengingat permasalahan kemiskinan di desa yang selalu lebih besar daripada kota. Hal ini sesuai dengan semangat undang-Undang desa yang bertujuan mengembalikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan sumber penghidupan sesuai dengan karakter desa dan kewenangan yang dimiliki (Undang-Undang Desa, 2014)

Menurut Fauzan (2016), pemahaman bahwa desa adalah merupakan sumber penghidupan harus terus ditanamkan. Desa bukan lagi sekedar sebagai obyek program kementerian atau SKPD kabupaten. Seringkali peran penting desa terabaikan, ketika paradigma pembangunan berorientasi pasar. Paradigma pembangunan berorientasi pasar memunculkan gaya ekstraksi sumber daya desa yang cenderung bias kapital dan bias urban, di mana ekstraksi dilakukan pada sumberdaya takterbarukan yang relative tidak menuntut investasi jangka panjang dan mahal (Fauzan, 2016) Keuntungan yang terakumulasi cenderung di-reinvestasi di perkotaan yang lebih menjanjikan return yang lebih cepat dan lebih besar daripada jika diinvestasikan kembali di desa. Paradigma pembangunan berorientasi pasar juga berdampak pada pengingkaran adanya inisiatif-inisiatif local dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Padahal dengan adanya pengakuan atas

inisiatif local ini mungkin justru mampu menjadi alternatif yang efektif bagi permasalahan kemiskinan pedesaan yang bersifat akut selama ini.

Pendekatan mainstream yang mendominasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dilakukan, yaitu pendekatan berbasis masalah (*problem-based approach*), selama ini tidak cukup efektif, perlu dimunculkan sebuah pendekatan yang lebih menekankan kemampuan desa untuk mengatasi permasalahannya sendiri dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki oleh desa itu sendiri, yaitu pendekatan berbasis asset (*asset based approach*) (Zamron, 2016).

Disebutkan jika pendekatan ini diadopsi, maka aliran sumberdaya eksternal ke desa tidak lagi dipandang sebagai sumber daya andalan utama untuk mengatasi kemiskinan, karena terciptanya ruang partisipasi yang lebih luas pada actor-aktor desa, dan mungkin cara ini akan lebih efektif. Disebutkan oleh Razekhi (2016) bahwa masyarakat miskin perdesaan yang penghidupannya bergantung pada sumber daya alam, sangat perlu untuk memperhatikan penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Penghidupan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan setiap orang untuk mendapatkan penghasilan, terkait dengan kapabilitas, dan aset yang tangible dan intangible, termasuk didalamnya akses yang dimiliki. Sementara konsep penghidupan berkelanjutan dimaknai sebagai aset, akses dan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk menjamin menunjang kehidupan ((WCED 1987 dalam Chambers & Conway, 1991). Carney (1998), Ellis (2000) dan Scoones (1998, 2009) mengelompokkan berbagai asset penghidupan/livelihood ke dalam lima bentuk modal yaitu modal social (*social capital*), modal alam (*natural capital*), modal fisik (*physical capital*) dan modal insani (*human capital*). Modal ini juga berfungsi sebagai sumber daya untuk mempertahankan penghidupan dan untuk meningkatkan kesejahteraan (Moser,

2008). Sedangkan dari DFID (1999) menyebutkan bahwa modal penghidupan ini juga merupakan aspek kunci dari kerangka penghidupan berkelanjutan yang kepemilikan atau penguasaannya dapat menjadi bekal awal masyarakat untuk menentukan jenis strategi penghidupan untuk mencapai luaran penghidupan yang diinginkan.

Sustainable Livelihood Framework for Tourism

Produk pariwisata bersifat unik, berbeda dengan industri pedesaan pada umumnya. Dengan demikian menggunakan kerangka kerja SL untuk menganalisis pariwisata mungkin akan terlalu menyederhanakan kompleksitas dan gagal untuk memahami secara holistik tentang penghidupan pariwisata desa. Terdapat beberapa gap antara pendekatan penghidupan berkelanjutan dengan pariwisata.

Pendekatan matapencarian berkelanjutan maupun penelitian kepariwisataan konvensional tidak dapat secara eksklusif memandu kepariwisataan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka SL dipergunakan untuk menganalisis pariwisata, dipandang terlalu menyederhanakan kompleksitas dan gagal memberikan pemahaman menyeluruh tentang penghidupan pariwisata pedesaan. Konsekuensinya, dibutuhkan integrasi dari penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) dan pariwisata (Sheen, 2008). Masih sangat sedikit studi yang telah memberikan analisis mendalam, mengeksplorasi dampak pengembangan pariwisata bagi penghidupan berkelanjutan masyarakat local, dengan menggunakan konsep SLFT (Liu-Lastres, 2020). Yaitu SLFT yang dikembangkan berdasarkan Sustainable Livelihood Framework (SLF) yang disesuaikan dengan konteks pariwisata. SLFT secara komprehensif mengeksplorasi dampaknya bagi penduduk, penghidupannya dan komunitas. Serta SLFT menekankan bagaimana masyarakat local dapat memanfaatkan dengan layak/pantas strategi penghidupan pariwisata, untuk

mencapai outcome yang berkelanjutan (Tao & Wall, 2009; Serrat, 2017, Liu-Lastres et al., 2020) , Dari hasil penelitiannya, Shen menyarankan menambahkan asset kelembagaan/institutional asset, dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat. Juga disebutkan oleh Shen (2008) bahwa rekonsiliasi ketegangan akibat gap yang terjadi antara pariwisata dan sustainable livelihood serta peluang antara SLF dan pariwisata perlu ditemukan.

Transisi intertemporal

Transisi inter-temporal banyak diaplikasikan dalam berbagai analisis, termasuk dalam hal kebijakan publik, moneter, perubahan iklim, dan dalam hal ini, dalam hal penghidupan. Suatu bentuk penghidupan mempunyai dinamika tersendiri. Penghidupan ini menjadi penjaga dinamika, serta memunculkan pola kehidupan tertentu. Studi klasik perubahan sosial, misalnya yang dibangun oleh Selo Soemardjan dalam “Perubahan Sosial di Yogyakarta” (disertasi; sebagai publikasi bertahun 2009). Dalam perubahan seperti ini, dinamika yang dimaksud menunjuk pada ruang-ruang baru yang dapat dimasuki oleh suatu masyarakat untuk dapat membentuk pola kehidupan yang lebih dikehendaki.

Transisi inter-temporal juga dibahas sebagai suatu fenomena pelaku ekonomi. Studi yang dikembangkan oleh Ester Duflo dalam “Poor Economics” (tahun 2011) dalam mengamati fenomena kemiskinan. Transisi intertemporal dimungkinkan dan berjalan karena ada perubahan-perubahan kecil yang membuka jalan bagi perpindahan pada penghidupan yang baru

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma *constructivism* melalui pendekatan etnografi. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan studi dokumen. Perairan partisipan dilakukan dengan teknik

snowball. Partisipan yang dilibatkan adalah ;

- Masyarakat pekerja wisata yang dahulu berlatar belakang sebagai buruh pemecah batu/pekerjaan lain non-wisata - Pengelola wisata
- Masyarakat sekitar tempat wisata
- Pemerintah desa dan pengurus Lembaga ekonomi desa (Bumdes)

E. Simpulan

Institutional asset dalam bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu dari pentagonal asset, merupakan asset yang banyak berperan dalam optimalisasi sumber daya/asset yang dimiliki oleh masyarakat local. Partisipasi masyarakat terakomodir pada seluruh proses pengambilan keputusan oleh pihak pengelola pariwisata desa. Berbagai keputusan yang ditujukan sebagai upaya perlindungan terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat local, didasarkan pada kesepakatan bersama antara pengurus pengelola wisata dengan warga masyarakat, melalui pertemuan-pertemuan rutin yang sudah terjadwal sejak tahun 2015 sejak mereka mulai membangun wisata desa .

Peningkatan kapasitas pada aspek sumber daya manusia (*human asset*) juga sangat terlihat. Mayoritas warga yang dahulu bekerja sebagai buruh pemecah batu dan sekarang beralih menjadi pekerja pada sector pariwisata, dan mereka mampu menjalankan perannya dengan baik, menunjukkan upaya besar yang telah mereka lakukan. Upaya mereka terbangun melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi oleh berbagai pihak.

Transisi inter-temporal ini terjadi dimana penghidupan berbasis turisme membuka ruang baru untuk pencapaian kesejahteraan. Dengan adanya capaian-capaian kecil dimana ada upah dan pencapain keuangan lain, kedatangan pihak-pihak yang memfasilitas perubahan, dan juga adanya pengelolaan pariwisata yang dijalankan oleh masyarakat. Dinamika lama dimana

kesejahteraan hanya dihasilkan melalui upah berubah menuju dinamika baru dimana pariwisata menyediakan ruang komunikasi baru dan juga adanya capaian keuangan yang konstan.

KEPUSTAKAAN

Baiquni, M. 2007. *Strategi Penghidupan di Masa Krisis*, Idial Media, Yogyakarta.

Cahyandito, M. Fani, 2006, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Dan Ekologi, Sustainability Communication Dan Sustainability Reporting”, dalam *Science In The Context Of Rural Urban Linkage : Case Study On The Impact Of Ecological Change In The Upper Citarum Watershed To The Food Security And Food Sovereignty In West Java-Indonesia*. September, 2006

Carney D. 1998. *Sustainable Rural Livelihoods: What contribution can we make?* London: Department for International Development (DFID).

Chambers, R. and Conway, G. 1992, *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*, IDS Discussion Paper 296, Brighton:

IDS<https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/775>

Cohen D, Prusak L. 2001, *In Good Company* . Harvard Business School Press, Boston.

Coleman S., 1988, *Social Capital in the Creation of Human Capital*. The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement:

Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120. The University of Chicago Press.

Creswell, John W, 2010, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, University of Nebraska, Lincoln : SAGE Publications Inc.

DFID (1999). *Sustainable livelihoods Guidance Sheets*. Department for International Development.

Dufló, Ester, Banerjee, Abhijit V. (2011), *Poor Economics, A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*, New York: PublicAffairs

Emery, M., Gutierrez-Montes, I. and Fernandez-Baca, E (eds). 2013, *Sustainable Rural Development: Sustainable Livelihoods and the Community Capitals Framework*. London, Routledge; Community Development. Community Development- Current Issues Series No. 8. 107

Engel, 1990, "Introduction: The ethics of sustainable development," In: J. R. Engel and J. G. Engel, (eds.): *Ethics of environment and development: Global challenge, international response*, London: Belhaven Press and Tucson: University of Arizona Press.

Fauzan, Ahmad, 2016, Tawaran Alternatif Atas Persoalan Kemiskinan Berbasis Desa, dalam *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, Institute For Research and Empowerment, Yogyakarta

Fauzi, Akhmad, Alex Oxtavius, 2014, *Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Mimbar , Vol. 30, No. 1 Juni 2014.

Gunawan Sumodiningrat, 2016, *Membangun Indonesia dari Desa*, Media Pressindo, Jakarta

Herry, S., *Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan Berkelanjutan*

<https://newberkeley.wordpress.com/2010/07/02/pengertian-dan-ruang-lingkup-pembangunan-berkelanjutan/>

I Nengah Subadra, 2006, *Dampak Ekonomi Sosial Budaya dan Pengembangan Desa Wisata di Jatiluwih Tabanan*, Jurnal Manajemen Pariwisata, Juni 2006, Vol. 5 No.1

Kozak, Metin, 2015, *Tourism Economic : A Practical Perspective*, First Published, Cambridge Scholars Publishing

Lasso, Aldi & Heidi Dahles, 2018, *Are Tourism Livelihoods Sustainable? Tourism Development and Economic Transformation on Komodo Island, Indonesia*, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23:5, 473-485

Lee Ming-Huang, 2008, *Tourism and Sustainable Livelihoods: the case of Taiwan*, Third World Quarterly, Issue 5 : Tourism and Development in the Global South, Vol. 29, 2008

Lipton, J. K. & Utsa Bhattarai, 2014, *Park Establishment, Tourism, and Livelihood Changes : A Case Study of the Establishment of Chitwan National Park and the Tharu People of Nepal*, 3(1), 12–24.

LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018, *Laporan Akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*.

Mbaiwa, J. E., & Stronza, A. L. 2010, *The Effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana*. Journal of Sustainable Tourism,

Melita, Mendlinger, 2013, *The Impact of Tourism Revenue on the Local Communities' Livelihood: A Case Study of Ngorongoro Conservation Area, Tanzania*. Journal of Service Science and Management, 2013(March),

Ming, Ming Su, Geoffrey Wall, Yanan wang, Ming Jin, 2019, *Livelihood Sustainability in a Rural Tourism Destination - Hetu Town, Anhui Province, China*, *Tourism Management*, Volume 71, April.

Morse, S., N. McNamara, and M. Acholo (2009) '*Sustainable Livelihood Approach: A Critical Analysis of Theory And Practice.*' Geographical paper (189). The University of Reading.

Moser, C. dan A. A. Dani (2008) '*Assets, Livelihoods, and Social Policy.*' Washington DC: World Bank.

Mowforth, M., & Munt, I, (1998). *Tourism and Sustainability: New Tourism in The Third World*. New York : Routledge.

Muhklis, Imam, 2009, *Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Tahun 14, No.3

Pakpahan, Agus, 1989, *Ekonomi Institusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 37, No. 4.

Portes, Alejandro. 2007. *“Migration, Development, and Segmented Assimilation: A Conceptual Review of the Evidence”* The Annals of the American Academy of Political and Social Science 2007:73-97

Rahardjo, Dawam., 1984, *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*, Penerbit Universitas Indonesia

Rasekhi, Behrooz, Hasan Sadighi, Mohammad Chizari, 2016, The Position of Sustainable Livelihood in Developmental Plans of Iran. International Journal of Humanities and Social Science Invention ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org ||Volume 5 Issue 2 ||February. 2016 || PP.21-32 www.ijhssi.org 21

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Sekretariat Negara*. Jakarta.

Rogers, P. Peter, Kazi F. Jalal, dan John A. Boyd, *An Introduction to Sustainable Development*, karya yang dipublikasikan pada tahun 2008.

Rosana, Mira, 2018, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 1 Tahun 2018

Saragih, Sebastian, Jonatan Lassa dan Affan Ramli, *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan*, 2007

Sari, Nindya,, Tias Sukma Abita, A.R Rohman Taufiq, 2016, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Volume 8, Nomor 1, Juli 2016 Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 8, Nomor 1, Juli 2016

Scoone, 2001, *Sustainable Rural Livelihoods A Framework For Analysis*. IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies.

Shen, Fujun, Kenneth F.D. Hughey and David G. Simmons, (2008), *Connecting the Sustainable Livelihoods Approach and Tourism : A Review of the Literature*, Journal of Hospitality and Tourism Management, 15, 19-31

Soemardjan, Selo. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Depok: Penerbit Komunitas Bambu

Suharto Rian, Hilmawan Rizky Yudaruddin, 2015, *Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal: Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 11, Nomor 2, September 2015, 127

Sukirno. 2006. *Hubungan Antara Mata Pencarian dan Pendapatan Masyarakat*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Sulistiyono, Suwanto , Moh. Gamal Rindarjono, 2015, *Transformasi Mata Pencarian Dari Petani Ke Nelayan Di Pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul*, Jurnal GeoEco ISSN:2460-0768 Vol. 1, No. 2

Sutamihardja, 2004, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Sekolah Pascasarjana: IPB.

Tao, Teresa, Geoffrey Wall, 2009, *Tourism as a Sustainable Livelihood Strategy*, Tourism Management 30.

Tiara Citra Septiana, 2015, *Lesson Learned Peralihan Mata Pencarian Masyarakat Sebagai Ketahanan Terhadap Perubahan*

Iklim Kelurahan Mangunharjo, Jurnal Wilayah Dan Lingkungan
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013,

Todaro, Michael P, 2011 , *Ekonomi Pembangunan*, edisi 9, Jakarta,
Erlangga

Tjiptoherijanto, Prijono, 2005, *Pemikiran dan Gagasan Masa Depan
Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

United Nations Development Programme, 2013, *Promoting
Sustainable Livelihoods, Reducing Vulnerability and Building
Resilience in the Drylands Lessons from the UNDP Integrated
Drylands Development Programme*, United Nations Office at
Nairobi, Publishing Services Section.

UNWTO. (2017). *Sustainable Tourism for Development*, 1–227.
Retrieved from
http://www.sustainabletourisonline.com/awms/Upload/Resource/bookshop/Crouch_modelDestnComp-web.pdf

UNWTO Tourism Highlights, 2020, www.unwto.org *Tourism- an
Economic and Social Phenomenon*

Wall G., A Mathieson, 2006, *Tourism, Economic, Physical and Social
Impact*, Tourism Research and Development Department, Midland
Group of Companies, New Zealand.

World Commission on Environment and Development (WCED),
Our common future: The Brundtland Report, (Oxford: Oxford
University Press, 1987).

Zainal, Anwar, 2013, *Sinergi Pengetahuan, Kebijakan dan Pembangunan: Pengalaman Riset Aksi*, Institute for Research and Empowerment , IRE. Yogyakarta.

Zamroni, Sunaji, 2015, *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, Institute For Researchand Empowerment, Yogyakarta

PENANGGAP

Heronimus Heron

Terimakasih Bu Agnes. Paparannya sangat lengkap. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga tanggapan. Yang pertama tentang desa wisata di masa pandemi, karena kita tahu studi mengenai pandemi cukup banyak, salah satunya dari balai penelitiannya DPR menyebutkan bahwa pandemi membuat desa-desa, khususnya desa wisata tutup dan mereka beralih, menjadi mengolah tanahnya lagi untuk bertahan hidup. Memang pandemi membuat semua hal mengenai mobilitas tidak bisa dilakukan. Bagaimana melihat ini. Saya melihat kalau dikaitkan ke sana juga menarik. Itu bagaimana desa wisata di masa pandemi. Bagaimana masyarakat desa bertahan di masa pandemi. Yang kedua tentang desa wisata. Saya juga mencari literatur tentang pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek yang ditekankan sebenarnya aspek gender. Bagaimana misalnya peran perempuan di eko wisata itu, di desa wisata. Bagaimana apakah penghidupan mereka lebih baik, termasuk mengenai pemberdayaan perempuan. Saya belum melihat itu. Mungkin karena tadi dibahas bahwa studinya masih berjalan. Ketiga, bagaimana mekanisme pengelolaan aset. Apakah aset itu milik desa, atau milik koperasi, atau milik bumdes. Bagaimana mekanisme pengolahannya termasuk misalnya *sharing* pendapatan itu seperti apa.

DISKUSI

Muhammad Reza Shahib

Terima kasih banyak atas tanggapan dan pertanyaannya. Ada tiga bagian: soal bagaimana pendampingan termasuk dinamika pendampingan di dua komunitas; terus juga soal kepentingan politik tokoh sentral di daerah-daerah itu; terus juga soal keberlanjutan. Mengenai dua komunitas ini sama sekali berbeda. Yang di Semanga, Kalimantan, itu kasus belum manifest menjadi konflik terbuka; nggak kelihatan. Jadi dimulai dari riset-riset oleh teman-teman Ecoton mereka termasuk live-in di sana. Dimulai dengan mereka mencocokkan data. Jadi mulai mengumpulkan. Sudah ada data-data nasional. terus mereka menyocokkan dengan data-data di dinas dinas setempat: Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Selanjutnya baru ada pendalaman terkait dengan tuturan-tuturan di masyarakat walaupun itu tidak bisa otomatis, karena masyarakat terkadang tidak terbiasa mempertanyakan -terkait hal yang tadi dipaparkan Mas Damas. Itu juga sangat umum di masyarakat sekitar perkebunan sawit. Teman-teman Ecoton mempunyai kemampuan untuk menggali yang lumayan canggih, menurut saya. Jadi dimulai dengan apa menggali memori-memori sudah sejak berapa lama di daerah itu dulu, penggunaan airnya seperti apa, dan seperti itu selanjutnya. Hal dipetakan, baru dijadikan bahan diskusi terus-menerus. Di hampir semua kasus, respon-respon masyarakat itu yang paling aktif biasanya memang perempuan-perempuan. Ada pendekatan lewat obrolan sehari-hari. Pendampingan turut dalam aktivitas masyarakat itu di tempat masyarakat, secara berkala nanti juga harus ke ibu kota kecamatan, sambil mencari data, menunggu jawaban dari permintaan data, dan memang sudah mulai ada kepercayaan diri dari masyarakat untuk sambil pelan-pelan

mengatasi inferioritas-nya, kita sambungkan upaya-upaya itu dengan komunitas-komunitas di tempat lain yang sudah lebih dulu terbuka interaksinya. Ada komunitas yang sudah melakukan pembelaan diri di Jawa, misalnya di Mojokerto, di Lakardowo yang desanya itu dijadikan timbunan limbah B3 itu dan mereka cukup kuat menyuarakannya, juga dengan pendekatan yang sama. Belakangan mereka sudah mulai berani menyampaikan keprihatinan mereka. Saat pelan-pelan kita undang dalam seminar, minimal sebagai penanggap, mereka bisa mengartikulasikan problemnya dan mulai berani. Problemnya malah kalau di situ belum kelihatan, terkait pertanyaan kedua di desa itu, mengenai tokoh-tokoh lokal. Pendampingan khusus di daerah-daerah itu dilakukan terkait akses informasi yang sulit, keamanan pendamping jadi penting. Pendekatannya lebih sering masyarakat. Beberapa beberapa dinas saja yang mulai mempunyai pengamatan yang cermat, misalnya KLH dan kesehatan, yang juga belakangan mulai ada orang lokal. Problem lainnya, di Semanga itu, pendampingan yang berbeda dalam hal pola, antara yang satu dengan yang lain. Ada kebuntuan. Tetapi ada kebutuhan untuk mulai mengurai hal-hal di balik sistem, misalnya mengenai *complaint* mechanism. Riset yang dilakukan teman-teman itu kami akan jadikan bahan riset lebih lanjut itu. Kami juga kontak beberapa negara, termasuk di Afrika, di Filipina, di Amerika Latin, kami bikin satu laporan "Sungai Beracun". Dengan ini, kasusnya dibuka, dan masyarakat merasa mendapat dukungan, dan makin terbuka.

Terus kalau di Banten ini agak berbeda. Pertanyaan kedua mengenai kepentingan politik tokoh-tokoh lokal. Ada situasi lain dimana ada perlawanan masyarakat, lalu ada bantuan atau keterlibatan dari para akademisi. Situasinya seperti dianulir di tengah jalan dengan pendekatan politik. Kalau di Banten, di Padarincang Timur, ada karakter yang berbeda antara Padang Rincang Timur dengan Padang Rincang Barat. Padang Rincang Barat agak tertutup terkait dengan pengaruh elit politik. Kami dibantu

dalam keterlibatan awal kami, karena sebelumnya kami sering melakukan pelatihan mengenai hak atas air dan para pesertanya ada di Serang, termasuk mereka juga punya jaringan di Padarincang Timur. Jadi semacam kunjungan muhibah terus-menerus, pelan-pelan, dan dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Masih banyak banyak pondok pesantren yang jadi panutan warga lokal yang bahkan kalau dibelikan makanan dari luar mereka tidak mau makan, jika makanan itu tidak tahu sumbernya, tidak tahu mengenai proses olahannya, mereka tidak akan makan. Jadi pemahaman seperti itu cukup berpengaruh di luar sekat-sekat politik tadi. Ada pendekatan, yang terus-menerus, pada tokoh berpengaruh, meski membutuhkan waktu yang sangat lama yang untuk menyambungkan logika, tersambung ke asumsi-asumsi, prediksi-prediksi nenek moyang mereka itu bahwa industrialisasi akan sampai ke desa itu, dan orang Banten akan terpaksa mengungsi ke ujung dunia maksudnya Ujung Kulon asumsinya waktu itu, dan itu menggerakkan masyarakat secara luar biasa.

Jadi ada perbedaan pada 2 komunitas yang kita bicarakan. Kalau di Banten, memang kami belum melihat kepentingan yang terkait langsung dengan relasi-relasi politik, misalnya dengan mengambil pembanding konflik sosial di wilayah lain. Ada kooptasi dan fasilitasi dalam hal kekuasaan, Kalau di Banten, selain soal memang formasi dari kelompok-kelompok yang berkuasa secara mapan selama lama, ada juga memang kelompok-kelompok yang lebih kelompok kultural, yang itu juga berkontribusi; tapi kami belum melihat apa kaitannya dengan kepentingan-kepentingan yang lebih pragmatis misalnya penguasaan tanah.

Mengenai keberlanjutan, ini masih menjadi perdebatan di internal saat akan melakukan kritik terhadap pola-pola advokasi yang konvensional, mengharapkan negara yang berubah, kebijakan yang baik, dan termasuk oto-kritik; bagaimana soal keberlanjutannya, ini pertanyaan paling paling besar, dan ini juga terjadi dalam dinamika saat kami melakukan riset-riset bersama di

wilayah lain. Saya dari awal orang yang paling ngotot bahwa hasil-hasil riset itu harusnya bukan diinvestasikan dan diadvokasikan semata-mata kepada pemerintahan atau administrasi, karena nanti ganti Pemilu, ganti orangnya, ganti lagi kebijakan. Artinya tidak akan sustainable apapun yang kita temukan dalam konteks riset itu untuk diletakkan dalam semata-mata peberubahan kebijakan formal. Kita lebih mendorong bahwa itu diinvestasikan di masyarakat, indikatornya apakah ada gerakan-kan di situ. Artinya pendidikan pendidikan, pelatihan di masyarakat itu. Saya kira sejauh ini yang kami anggap sebagai *tools* yang paling berguna. Di kasus Banten itu misalnya, setelah masyarakatnya berhasil, dianggap menang gitu ya, karena ada penghentian rencana pembangunan pabrik air minum dalam kemasan di situ, selanjutnya banyak lembaga lain yang mengirim peneliti-peneliti di situ, bagaimana masyarakat bergerak. Dari masyarakat ada permintaan-permintaan, pendalaman-pendalaman terkait pelatihan hak atas air, dan ini membuat proses belajar dengan berbagai pihak juga dapat berkembang. Jaringan terbentuk dari sekolah atas air. Jadi setiap minggu kami usahakan untuk berkumpul bersama komunitas-komunitas itu untuk *update* situasi. Ada diskusi se-nasional, update terkait situasi daerah, kami menyebutnya bagaimana upaya menjaga tapak, termasuk terkait legitimasi kebijakan nasional, proyek strategis nasional. Itu yang paling menjadi kunci yaitu bagaimana tapak-tapak itu, lahan-lahannya itu tidak lepas -itu di Padarincang Banten khususnya.

Wiyatiningsih

Menanggapi bahasan Agnes Ratih

Tadi dari bu Ratih, apakah ada kearifan lokal yang langsung menentukan ruang bagi perajin tenun di Alor. Jadi kami memang melihat bahwa di Alor ini ada berbagai suku, dan suku-suku itu masing-masing punya punya adat tradisi sendiri. Mengenai masyarakat pesisir yang menjadi perajin tenun ini tinggal di pesisir

yang kami berusaha untuk memetakan rumah-rumah adat yang ada di sana, masyarakat pesisir ini tidak memiliki karakteristik rumah seperti masyarakat yang ada di daerah pedalaman atau di pegunungan. Jadi pendekatan mereka lebih kepada alam. Rumahnya dibangun berdasarkan dari arah hadap ke laut, kemudian rumah mendapatkan angin, mendapatkan apa suhu yang nyaman dan sebagainya tapi tidak ada implementasi tata ruang tradisional seperti yang dilakukan oleh masyarakat Alor yang ada di pegunungan dan pedalaman, karena ada beberapa rumah adat yang disana sehingga kemudian kami melihat bahwa tata ruang yang dipergunakan oleh para perajin itu tidak mengacu pada konsep-konsep filosofis dalam hal tata ruangnya. Ini memang agak berbeda. Ini lebih kepada sifat logis dari ruang; agak berbeda dari tata ruang yang ada di masyarakat Sumba. Ini kami juga mencoba menjawab pertanyaan yang lain tentang *highlight* bagaimana penataan ruang kerja untuk penentun itu dilakukan pada studi-studi sebelumnya. Kami melakukan studi perajin tenun di Sumba. Di Sumba ini berbeda karakternya karena masyarakat Sumba itu punya nilai filosofis tinggi dalam rumah mereka. Tata ruangnya sudah sangat diatur. Ada ruang perempuan, ruang laki-laki. Karena perempuan itu dilekatkan dengan pekerjaan penenun maka ruang kerja penentu ada di area domestik perempuan. Perempuan itu tidak boleh melewati area laki-laki. Ruang tenun itu sangat privat dalam hal ruang perempuan. Ini berbeda jika dibandingkan dengan Alor. Tidak terjadi di Alor. Di Alor ini, rumah masyarakat pesisir kalau dilihat dalam gambar tadi adalah rumah seperti biasa dengan batako, kemudian atap pelana, kemudian ada segitiga yang menghadap ke laut supaya mengurangi angin yang masuk. Semuanya lebih kepada regionalisme berdasarkan iklim setempat dan kondisi alam di lingkungan sekitar. Kalau ditanya bagaimana kearifan lokal yang secara langsung terkait dengan budaya, tidak ada nilai filosofis masyarakat pesisir. Hal ini tersambung dengan pertanyaannya terkait dengan pembagian. Kalau diamati memang

pembagian kaum pantai dan kaum gunung tadi, memang dari studi studi dan beberapa waktu lalu Pak Christian itu observasi, ketika di pegunungan, di masyarakat adat yang ada di daerah pedalaman itu, mereka tidak memproduksi tenun. Mereka mempunyai rumah adat. Mereka mempunyai kehidupan sebagai pekebun. Jadi lingkungannya adalah lingkungan kebun. Kemudian apakah sawah ada, saya tidak tahu apakah ada, tapi itu sebuah area yang jauh dari dari pantai. Mereka tidak melakukan pekerjaan tenun. Pekerjaan itu dilakukan oleh masyarakat di pesisir baik di Alor besar maupun di Alor kecil dan terutama fokus di pulau Ternate yang tadi saya sampaikan. Semua produk mulai dari yang tenun berbahan alami maupun non-alami ada di Ternate. Yang menjadi studi kasus tadi adalah sentra gunung Mako memproduksi tenun dengan pewarna dan bahan alam. Bagaimana ketergantungan itu terjadi, nah itu mungkin kalau masyarakat di sana malah menganggap itu sebagai harmoni. Jadi harmoni sosial budayanya itu antara kelompok masyarakat diwujudkan dengan saling membutuhkan. Masyarakat gunung membutuhkan tenun dan mereka sebagai konsumen membeli dari masyarakat yang ada di pesisir.

Kemudian terkait dengan pewarna alam. Pewarna alam di Jawa akan menjadi sangat mahal. Konteknys berbeda dengan Alor. Alor itu sebuah daerah pedalaman yang sangat jauh dari sumber daya pabrik hasil industri sehingga semua yang dihasilkan oleh industri oleh pabrik itu menjadi sangat mahal kalau sampai di Alor. Jadi kalau kita bandingkan dengan di Jawa, di Jawa akan penggunaan pewarna non-alami lebih murah dengan membeli bahan-bahan yang sudah buatan pabrik. Untuk membuat bahan-bahan alam seperti membuat pewarna dari daun dan sebagainya akan menjadi mahal. Namun yang terjadi di Alor itu berbeda karena mereka kaya sekali dengan sumber alam. Mereka justru hanya punya itu. Kalau mereka harus membeli bahan kimia yang didatangkan dari Jawa, biasanya lewat Surabaya baru dikirim ke sana, harganya bisa berlipat-lipat. Jadi ini sebenarnya sebuah upaya

keberlanjutan. Juga dalam kehidupan mereka. alamnya sangat banyak, kaya sumber, diambil langsung dari situ; diproduksi dari situ. Tinggal bagaimana keterampilan untuk memproduksi itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi karena tidak semuanya sanggup untuk melakukan hal itu. Semuanya tinggal terima, kemudian mau dipakai. Nah yang perlu dipikirkan memang kalau pewarna tadi di anggap di sana lebih murah, tapi kalau yang berbahan benang itu memang itu sebuah pekerjaan prosesnya lama, kemudian juga akan membutuhkan waktu dan tenaga, dan yang itu akan menghasilkan atau berefek pada harga-harga kain tenun. Kenapa jadi mahal sekali itu karena butuh proses yang cukup lama tadi. Nah ini kekhawatirannya adalah kalau benang dari kapas itu itu pasti akan butuh waktu lama dan itu mahal. Sebenarnya secara secara fisik, tenun itu memang lebih nyaman dipakai dengan benang yang diproduksi dari industri karena dia lebih lembut, tidak kasar seperti kalau benang dari kapas. Bagaimana sebenarnya kemudian inovasi itu bisa dilakukan supaya yang alami itu menjadi lebih bagus kualitasnya daripada yang buatan. Di masa pandemi sekarang ini, justru penggunaan bahan alami itu menjadi kekuatan utama dari tenun ikat Alor terutama yang di Gunung Mako ini. Jadi mereka tidak bekerja sendiri karena mereka menjadi, istilah Jawanya, “jujukan”. Designer yang ada di Jakarta itu langsung memilih tenun dari gunung Mako karena dianggap itu yang orisinal. Orang yang paling suka adalah yang unik, yang orisinal. Biaya tidak jadi masalah. Designer dari Jakarta itu merujuk kepastian adanya sumber yang nanti kalau diperlukan melakukan kolaborasi dengan pengrajin setempat, kemudian dapat menghasilkan produk yang bisa sangat kontemporer. Bisa baju fashion, bisa produk yang kecil-kecil, kalau sekarang jadi masker, atau jadi tas atau apa. Mereka tetap berjalan dan pelatihannya dilakukan dengan online. Jadi mereka juga sudah ada teknologi yang bisa memfasilitasi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan keberlanjutan dari tenun ikat

Gunung Mako ini. Siapa tahu anda semua nanti akan tertarik untuk membelinya.

Proses produksi yang dilakukan di dalam rumah itu sangat sedikit. Jadi yang dilakukan adalah hanya untuk menjual. Rumah sebagai tempat berlindung itu juga melindungi aset mereka mereka, itu adalah karya tenun ikat tadi, tinggal dimasukkan di dalam rumah itu untuk dilindungi di supaya tidak dicuri dan sebagainya karena harganya sangat mahal. Mereka pun kalau ditanya berapa gitu langsung berapa juta, jadi kadang orang kaget dulu dengan harganya. Di rumah itu akan menjadi tempat perlindungan, juga untuk menyimpan barang berharga. Yang semi privat adalah yang mendekati dengan rumah, yaitu daerah pinggiran rumah yang lebih dekat dengan teras. Jadi orang beraktivitas menenun itu sudah bukan aktivitas fisik yang terkait dengan lapangan, harus memetik, harus membuat pewarna dan sebagainya, tetapi aktivitas yang duduk diam merenung sambil menenun dilakukan di teras, di dekat rumah dan itu menjadi bagian dari proses kehidupan dari ibu-ibu yang ada di Alor ini. Nah sikapnya adalah karena ini adalah kelompok, jadi sebenarnya rumah tinggal perorangan ketua kelompok, yang dimanfaatkan oleh kelompok, maka yang dilakukan adalah menyisakan satu satu bangunan atau satu rumah yang itu tidak boleh diutak-atik untuk kegiatan yang bersifat komunal produktif ini. Rumah tinggal itu menurut mereka adalah yang paling terang adalah tempat untuk tidur, ruang pertemuan laki-laki dan perempuan. Itu tidak diinterupsi, tidak diintervensi oleh kegiatan produksi tenun ini. Yang dilakukan mengenai di rumah sebagai tempat menerima tamu dan di rumah tempat untuk melakukan kegiatan menenun. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari tentang tenun lebih jauh, ini sungguh filosofi yang indah dari tenun termasuk nilai teologisnya. Jadi bagaimana tenun itu indah karena prosesnya ketika menenun kan orang diam. Orang diam kemudian dia mengenang lagi akan hakikat hidup sebagai

manusia, itu nilainya sangat tinggi dan itu menjadi nilai yang lebih besar daripada sekedar produknya sendiri.

Agnes Ratih

Menanggapi bahasan dari Hieronimus Heron

Ada beberapa pertanyaan dari mas Hieronmis tadi. Sependek yang saya pahami saat ini karena saya memang belum sepenuhnya di lapangan. Dalam situasi pandemi yang mereka alami saat sekarang ini memang kemudian ada sebuah kesepakatan-kesepakatan yang itu cukup unik karena kesepakatan benar-benar harus dilaksanakan secara konsekuen untuk semua warga yang terkait penghidupannya pada penunjang wisata di desa itu. Jadi artinya komunitas-komunitas yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola beberapa objek wisata di sana adalah yang menjadi penyaluran aspirasi bagi masyarakat dalam rangka melindungi keberlanjutan penghidupan mereka. Misalnya disepakati bahwa yang bekerja di sana, dalam penghidupan wisata itu seminimal mungkin dilibati oleh pihak dari luar desa misalnya. Memang kalau dari sisi alasan tentu sangat logis terkait dengan bahwa latar belakang mereka dari sisi kualitas pendidikan pendidikan formal itu mereka yang tataran rata-rata rendah sehingga bisa dipahami bahwa mereka memerlukan sebuah kesepakatan dalam upaya perlindungan atas keberlanjutan penghidupan mereka. Jadi 90% yang terlibat di sana adalah masyarakat lokal desa. Saya melihat kesepakatan itu menjadi upaya optimalisasi dari aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat yang dengan kerangkanya adalah berdasarkan pada 5 aset tadi. Sejauh ini, itu yang saya lihat bahwa peran dari sebuah institusi dari komunitas itu, karena untuk menjalin komunikasi sangat mereka utamakan. Mereka sangat ruti mengadakan pertemuan-pertemuan. Jadi apapun dibicarakan. Kemudian untuk kemudian menjadi keputusan bersama untuk dilaksanakan bersama termasuk sebagai keputusan salah satunya

adalah meminimalkan seminimal mungkin keterlibatan dari masyarakat luar desa dalam sektor pariwisata. Saya belum melakukan kajian lebih jauh juga dampaknya secara lebih luas, tetapi dari sisi penghidupan berkelanjutan ada sebuah institusi yang berupaya untuk melindungi itu. Demikian juga mereka masih rutin menerima upah untuk setiap bulannya, diberikan kepada mereka yang merupakan karyawan dari pengelolaan pariwisata itu. Mereka masih rutin memperoleh gaji untuk pembiayaan mereka sehari-hari, hanya saya belum tahu persis bagaimana besarnya kemudian dibandingkan pada saat sebelum pandemi tetapi bahwa faktor institusi tadi berupaya untuk melakukan pencegahan sedemikian rupa. Terkait situasi alam dimana saat ini masih banyak hujan, nah hal ini menjadi sebuah faktor sangat penting bagi mereka mengingat mereka ini hidup di alam desa yang tandus, bebatuan, batuputih dimana pada saat itu mereka sangat kesulitan air. Kemudian pada masa-masa ini saat musim kemarau dengan masih adanya hujan ini merupakan suatu berkah tersendiri bagi mereka dibandingkan dengan masa “sangat” kemarau. Dari sisi alam mereka masih cukup terbantu untuk kemudian melakukan aktivitas sebisa mereka dengan ternak, kebun dan kayu-kayu seperti itu. Saya belum sangat detil melihat bagaimana upaya mereka bertahan pada masa pandemi. Saya baru pada mencermati institusi yang cukup melindungi, menjadi sedikit banyak menjadi andalan mereka, bisa memberikan upaha pada mereka untuk setiap bulannya. Terkait dengan peran perempuan, saya tidak merencanakan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan peran perempuan. Kajian saya lebih bersifat umum, lebih ada pada masyarakat lokal. Saya belum cukup menggali informasi yang cukup tentang itu. Mengenai aset, hal yang dikaji adalah mengenai bagaimana mereka melakukan strategi untuk mengoptimalkan aset yang mereka miliki pada tataran individu atau rumah tangga.

Yovita Indrayati

Saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari bapak ibu teman-teman semua. Penelitiannya banyak dalam bidang sosial kecuali yang dihadirkan oleh ibu Wiyatiningsih yaitu mengenai arsitektur. Namun, saya juga melihat cukup kental perihal persoalan sosial. Atau penelitian sosial nyaitu juga nampak kental sekali. Nah dari pagi sampai sekarang, saya melihat bahwa penelitian-penelitian ini semua tampaknya membutuhkan penelitian lanjutan. Pertanyaan saya adalah apakah kira-kira sudah punya konsep untuk penelitian lanjutan dari yang sudah dilakukan oleh para penyaji hari ini, terutama yang siang ada bu Wiyati, ada Bu Agnes, ada mas Reza. Kalau mas Reza ini memang di masyarakat dan itu pasti rutin. Saya bertanya apakah sudah punya konsep untuk penelitian lanjutan dari apa yang sudah diteliti.

Muhammad Reza

Menanggapi Yovita Indrayati

Terkait keberlanjutannya, hampir dua tahun ini kami sedang di tengah jalan, kami mengurangi advokasi konvensional tradisional yang lebih mendatangi pemerintah, dan lebih banyak fokus ke proses-proses di masyarakat. Proses advokasinya terkait erat dengan penelitiannya. Maka penelitiannya menjadi *living document*, dia akan terus-menerus dibahas dan dikembangkan. Fokus sekarang adalah bagaimana menginteraksikannya pada lebih banyak komunitas. Tantangan yang masih carikan formulasinya bagaimana membalikan juru bicara dalam. Sekarang tampilan publik kan lebih banyak diukur lewat sosial media. Sebenarnya ada kesenjangan antara aktor-aktor yang membentuk konfigurasi isu, yang datang dengan teks teks tertentu. Masalahnya ini lho. Kelompok-kelompok yang datang ke lapangan. Tetapi tantangannya adalah bagaimana membalikkan situasinya. Karena di banyak kasus, salah satu yang juga kami libati, misalnya di salah satu perkebunan dengan situasi yang khas. Ada kecenderungan memobilisir atau

menyeragamkan semua isu dalam satu tuntutan. Harian yang mereka hadapi setiap hari itu belum selesai. Itu masih tantangan. Formulasinya masih masih dicarikan. Itu penelitian terus-menerus.

Wiyatiningsih

Menanggapi Yovita Indrayati

Kami sebenarnya sudah merencanakan untuk penelitian lanjutan. Memang ini tidak berhenti di sini karena sebenarnya itu kami punya pendampingan masyarakat di Indonesia Timur yang banyak dan memang akan difokuskan pada perajin tenun. Tentu saja ini erat kaitannya dengan peran dari perajin-perajin tenun itu yang sangat memberikan jasa yang sangat luar biasa untuk rumah tangganya sehingga mereka layak untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih lebih nyaman dan lebih sehat. Hal yang kami lakukan ini memang masih permukaan. Jadi nilai sosial, kemudian apa pengaruh-pengaruh yang penting di dalam tata ruang tersebut. Tetapi cita-citanya ingin melanjutkan sampai kepada bagaimana ruang itu nanti terukur. Jadi kalau dibilang nyaman itu seperti apa diukur secara thermal; kemudian pencahayaan nanti itu harus diletakkan dimana yang tidak merusak adat dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu menjadi angan-angan kami; hanya saja kondisi sekarang yang belum memungkinkan. Kami bisa memulai dari studi-studi yang terkait dengan rumah-rumah tenun itu.

Agnes Ratih

Menanggapi Yovita Indrayati

Terkait dengan rencana ke depan, memang ini baru tahap awal sekali. Saya sedang berusaha mematangkan. Saya fokus dari apa yang menjadi pertanyaan penelitian. Saya juga memtangkan konsepnya, juga metodologinya.

RANGKUMAN SESI

Yang pertama, ketika penyaji tadi pertama berbicara tentang ruang, ruang tidak hanya ruang fisik seperti yang disampaikan oleh bu Wiyatiningsih, ruang produksi dan sebagainya tetapi ada ruang sosial, ruang kontestasi, dan kemudian kemudian ruang budaya yang disampaikan melalui riset-riset tadi.

Kemudian yang kedua adalah aspek berkelanjutan. Ini menjadi sangat penting untuk kita bahas. Jadi ada persoalan air adalah persoalan HAM dan dengan demikian adalah persoalan kehidupan itu sendiri, dan dengan demikian juga adalah persoalan keberlanjutan. Kemudian bu Agnes Ratih tentang keberlanjutan penghidupan warga Desa Sambirejo yang kemudian berubah ke kehidupan berbasis pariwisata. Kemudian tadi bu Wiyatiningsih tadi juga menyebut bahwa penggunaan pewarna alami salah satunya adalah wujud dari keberlangsungan.

Yang pertama ruang, yang kedua keberlanjutan. Yang ketiga adalah partisipasi. Saya mencatat betul yang disampaikan Muhammad Reza bahwa hasil riset itu tidak investasikan ke pemerintah, karena pemerintah akan selalu berubah. Lebih baik diinvestasikan kepada masyarakat, dengan demikian akan mendorong gerakan dan partisipasi. Dan partisipasi ini, yang tadi juga disebutkan oleh bu Agnes Ratih, ada partisipasi dari kelompok kelompok yang tidak secara formal ada di pemerintahan, tetapi mereka memiliki peranan cukup besar, dan secara rutin terus bergerak di situ.

RANGKUMAN HARI PERTAMA

Tadi saya mencatat bahwa ada sebuah perkawinan sebenarnya mengenai metodologi apa yang biasa dilakukan oleh para akademisi, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Itu tadi tampak sekali di sampaikan oleh Mas Reza. Saya melihat bahwa kalau dalam perspektif saya kami ini terlibat secara sekaligus, kakinya yang sebelah di akademisi, yang disebelahnya lagi kami ikut-ikutan para teman-teman yang bergerak di NGO. Kami melihat emang dunia akademik itu sering *strict* dengan metodologi, bahkan soal namanya pun tidak boleh salah. Kita sering melakukan itu. Saya melihat teman-teman di masyarakat sipil ini lebih bersifat pragmatis. Jadi bagaimana kemudian kompromi ini, kompromi soal orang-orang akademisi yang harus *strict* soal penamaannya dan itu akan menjadi menarik.

Juga soal penelitian yang sifatnya multidisiplin. Saya melihat kembali lagi dari penelitian mas Reza, saya membayangkan saja, ada berbagai kajian. Ada satu kajian yang terdiri dari berbagai keilmuan. Saya sering melakukan itu tetapi tidak tidak sepenuhnya percaya diri bahwa apa yang kami lakukan ini sebenarnya benar atau tidak. Bagaimana menegosiasikan atau mengkompromikan metode dari berbagai keilmuan itu. Pada penelitian mas Reza, saya mencermati bahwa ada metode penelitian sosial yang campur-campur ilmu politik, ilmu hukum, bahkan ilmu eksakta. Membahas mengenai kualitas air. Ini pasti akan terkait dengan persoalan pengukuran dari perspektif eksaktasnya begitu. Nah bagaimana mengkompromikan dan menegosiasikan ini.

Sepanjang proses ini saya melihat hal menarik dimana banyak dari teman-teman melakukan penelitian sifatnya multidisipliner. Saya ingin sekali sebenarnya perspektif itu kemudian perlu lebih muncul. Bagaimana mengkompromikan dan menegosiasikan itu.

Jadi itu yang sebenarnya ingin kita dalam lebih lanjut. Kadang-kadang kami merasa asal tabrak jangan-jangan begitu, tapi kami tidak pernah pusing dengan metode intinya. kami jalan dan itu yang kemudian sering kali muncul dari kami sendiri apakah ini benar.

SESI 3
RABU, 14JULI 2021
09.00-12.00

1. PEMBUKA SESI

2. AGENDA BAHASAN

Paper dan bahasan:

Dedi Adhuri, *Pengetahuan Tradisional pada masyarakat Nelayan dan Pesisir: Commons Pulau Selayar*

Yovita Indrayati, *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Sumber Daya Genetik untuk Pengembangan Obat-Obatan (Studi di Jawa Tengah)*

Abraham Wahyu Nugroho, *Studi Literatur sebagai Metode Penelitian Unobstrusive, Kajian tentang Konservasi Benda Budaya sebagai Simbol Adat Negeri di Ambon*

Penanggap:

Aloysius Gunadi Brata menanggapi Dedi Adhuri

Dedi Adhuri menanggapi Yovita Indrayati

Ichmi Yani Arinda Rohmah menanggapi Abraham Wahyu Nugroho

3. BAHASAN DAN DISKUSI

Pengetahuan Tradisional pada masyarakat Nelayan dan Pesisir: *Commons Pulau Selayar*⁹

Dedi Adhuri Supriadi

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

BRIN-Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: dediadhuri@hotmail.com

I. Konteks dan Lingkup Penelitian

Pulau Selayar menghadirkan kenyataan maritim di Indonesia. Pulau Selayar mempunyai masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, sekaligus masyarakat nomadik perairan Indonesia -sering dikenal sebagai “suku Bajau”. Pulau Selayar memiliki budaya maritim yang juga dihadirkan oleh kelompok bahasa dan/atau etnisitas yang telah lama hidup dan berinteraksi di wilayah ekosistem Selayar. Mereka termasuk masyarakat Selayar, Bugis, Makassar, Bajau, Buton, dan masyarakat pulau-pulau sekitarnya.

Penelitian mengenai Pulau Selayar ini ada dalam kerangka CCRES (Capturing Coral Reef and Related Ecosystem Services Project). Penelitian ini saat ini terus berlangsung masih berjalan. Pada tahun 2018, penelitian ini didokumentasikan dalam 2 publikasi utama yaitu: “FishCollab: Alat bantu untuk mendukung kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir” (Helen Ross, Dedi S Adhuri, Ali Yansyah Abdurrahim, Andi Penrang, Andi Rismayani, Andi Ismainna, 2018) dan “Pengaruh sosial untuk melindungi terumbu karang: Para champion dari Selayar, Indonesia, dan strategi mereka” (Helen Ross, Dedi S Adhuri, Ali Yansyah Abdurrahim, Andi Rismayani, Andi Ismainna, 2018).

⁹ Kajian dan penelitian partisipatoris “fishcollab”, tahun 2017-sekarang



Gambar 1
Desa-deso di Pulau
Selayar.
Pulau Selayar,
Indonesia: gambar
yang diperbesar
menunjukkan daerah
bagian tengah dan
utara dari pulau
utama.
(gambar di ambil dari:
Ross, Helen; Adhuri,
Dedi S; Abdurrahim,
Ali Yansyah; Andi,
Penrang; Rismayani
Andi & Ismainna,
Andi, 2018)

Pulau ini berada di
lintang selatan 5042'
— 7035' dan bujur
timur 120015' —
122030', dipisahkan
dari pulau Sulawesi
oleh Selat Makassar;
luas wilayah
10.503,69 km²,
termasuk 1357,03 km²
daratan dan
9146,66 km² lautan.
Jumlah penduduk
adalah 130.199 jiwa
(data 2015, BPS
Kapupaten Kepulauan
Selayar 2016).

Ekosistem Komunitas Selayar mempunyai ciri yang menunjukkan konteks dan historisitas “commons”

- Ekosistem Selayar menjadi tempat hidup bagi beberapa suku maritim di Indonesia, terutama Bajau, Buton, Bugis, Makassar. Suku-suku maritim tersebut hidup, melakukan perjalanan laut (*seafaring*) dan penghidupan laut dan pulau-pulau (*island dweller*).
- Penghidupan suku-suku maritim tersebut berbasis pemanfaatan sumberdaya pesisir/laut. Mereka hidup sebagai pelayar(an) rakyat, nelayan, budidaya pesisir/laut.
- Suku-suku tersebut hidup dengan model kelola, nilai, sistem pengetahuan yang berbasis komunitas. Hal ini menjadi ciri penting dari “commons” ekosistem Selayar.

Penelitian ini berangkat dari analisis mengenai karakter khas ekosistem kepulauan dan maritim dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Pintu masuk dari analisis ini adalah mengenai kerusakan ekosistem baik akibat cara penangkapan ikan maupun dari tumbuhnya pola kehidupan modern. Dalam konteks yang lebih luas, analisis juga memperhitungkan mengenai deruralisasi -yaitu, kehidupan desa yang mempunyai karakter tradisional, yang mulai ditinggalkan oleh angkatan muda, atau angkatan muda yang tidak lagi menghidupi penghidupan dari laut, dan mengalami tantangan stagnasi ekonomi sosial.

Dalam hal stagnasi ekonomi, dapat dikatakan bahwa masyarakat pesisir dan kepulauan di Pulau Selayar dan sekitarnya sebenarnya tetap berada dalam perlintasan besar ekonomi maritim. Masyarakat Pulau Selayar juga mempunyai tradisi panjang hidup dalam ekosistem maritim dan kepulauan sehingga tradisi ini membangun pengalaman dan pengetahuan yang kuat dalam penghidupan mereka. Dalam situasi sedemikian, tarikan (*pull factor*) dari ekonomi skala besar (“semakin besar, semakin unggul)

memberikan dampak dimana perikanan kehilangan banyak nilai tukarnya -apalagi masyarakat yang berada di pesisir, dan sepenuhnya hidup di kawasan tersebut. Keinginan untuk mendapatkan “hasil cepat” sering diwujudkan penggunaan sianida. Tarikan (*pull factor*) lain yang timbul adalah adanya arus baru dalam *eco-tourism* dimana jumlah dan pergerakan manusia di wilayah yang sebenarnya tidak besar juga mengalami pertumbuhan. Identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat kondisi ekosistem. Pulau Selayar menjadi rumah bagi 375 spesies ikan pelagis, demersal dan ikan hias, serta 4 spesies penyu (DKP Kabupaten Selayar, 2011). Hal ini memberikan penjelasan mengapa ekosistem terumbu karang hidup sehat dan mempunyai fungsi ekologis bagi sebagian besar biota laut dangkal. Penggunaan bahan-bahan berbahaya dan kompetisi atas wilayah tangkap menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi terumbu karang ini.

Situasi yang digambarkan di atas menimbulkan konflik antar pihak di desa-desa di ekosistem pulau Selayar. Tarikan (*pull factor*) disertai dengan deruralisasi memberikan dampak terhadap lebih seringnya terjadi konflik antar pihak di Pulau Selayar.

Dimana letak “pengetahuan tradisional” dalam situasi transisional di Pulau Selayar ini. Bagaimana pengetahuan tradisional digali, diolah dan diinstitusikan. Bagaimana aktor-aktor dalam wilayah ekosistem ini memahami dan “nyaman” dengan pola kelola pengetahuan tradisional.

II. Pengetahuan Tradisional dalam Teori dan Metodologi

Penyebutan mengenai “masyarakat pesisir dan kepulauan” di wilayah ekosistem Selayar mengimplikasikan 3 hal: (1) masyarakat ini jauh lebih kompleks daripada perihal “etnisitas”. (2) Kompleksitas ini diidentifikasi dalam nilai dan praktek hidup yang saling mengembangkan, saling menumbukan, dan yang membentuk pemahaman bersama (*share region-view*), (3) proses

proyeksi mengenai pengetahuan dan manifestasi pengetahuan dalam kehidupan dan musim.

Pendekatan teori mengenai “masyarakat pesisir dan kepulauan” banyak kita kenal dalam konsep mengenai “commons”¹⁰. Keseluruhan kenyataan sebagaimana dalam paragraf pertama bagian II di atas dijelaskan dalam konsep “commons”. Kehidupan unit sosial-budaya sendiri kita namakan “komunitas”. Seringkali, “commons” dan “komunitas” sering dipertukarkan untuk menjelaskan kenyataan tersebut.

Commons mempunyai dasar-dasar lokalitas yang kuat. Hampir selalu menjadi penanda bahwa “commons” bisa dilacak dalam hal lokalitas mereka. Dalam kajian ekosistem, muncul pula konsep mengenai “eco-region”. Lokalitas inilah yang menjadi penanda (“identitas”) suatu commons.

Ostrom menjelaskan hubungan dan interaksi antara commons dan lokalitas¹¹, dan commons dan pengetahuan¹². Pengetahuan tradisional tumbuh dari dua perihal ini. Pengetahuan tradisional juga menekankan secara lebih kuat (*manifest*) mengenai bagaimana pengetahuan tradisional ini memperkuat pola-pola pengambilan keputusan.

¹⁰ Elinor Ostrom dikenal sebagai akademisi yang dihargai karena kajiannya mengenai “commons”, termasuk penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2009. Namun, kajian mengenai commons ini menjadi bagian dari khasanah yang luas dari tradisi akademik maupun pola-pola sosial. Saat ini, keduanya semakin banyak dipakai sebagai pintu masuk, atau sebagai kerangka olah dalam masyarakat yang hidup secara amat lekat dalam ekosistem.

¹¹ Ostrom, Elinor. 1990. 2015. *Governing the Commons, the Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press. Halaman 182-214

¹² Hess, Charlotte & Ostrom, Elinor (ed.), *Understanding Knowledge as a Commons, From Theory to Practice*. Cambridge, Massachusetts, London, England: the MIT Press, terutama halaman 41-68

Kerangka teori dan analisis mengenai “the commons” dapat dirujuk pada beberapa kajian.

Hardin (1968) *Tragedy of the Commons*

- Sumberdaya tertentu (termasuk padang rumput, hutan dan laut, by ‘nature’ tidak menjadi objek kepemilikan (*Public provery resources*);
- Dalam kondisi demikian, orang per orang akan memaksimalkan eksploitasinya, tidak ada spirit Konservasi. Dalam situasi sedemikian, terjadi kehancuran sumberdaya dan lingkungannya (*Tragedy of the commons*) secara regresif. Dari sini muncul argumen yang mendukung perlunya **Government-based control/management**
- Dalam kajian-kajian merespon Hardin, terutama kajian dari Elinor Ostrom, *tragedy of commons* ini perlu analisis yang lebih cermat mengenai komunitas dan tata kelola berbasis komunitas. Ada pencermatan bahwa tidak semua tata kelola berbasis pemerintah akan menghasilkan maksud yang diinginkan, yaitu keberlanjutan dari sumber daya dan ekosistem.

Kajian-kajian Antropologi tentang Hak ulayat dan pengelolaan laut berbasis tradisi/komunitas (sejak 1970an)

Kajian ini mengangkat konteks dan ruang *communal tenure* (hak ulayat). Dalam kajian ini, individu dianalisis sebagai pihak yang tidak bergerak sendiri-sendiri tetapi terikat pada kesepakatan bersama (*the commons culture*). Dalam hal ini, bahkan ada instrumen pengelolaan, termasuk mengenai bagaimana dan selama berapa lama suatu eksploitasi dilakukan (pengaturan eksploitasi), konservasi, serta rehabilitasi. Di sini ada penegasan mengenai posisi penting dari Community-based management.

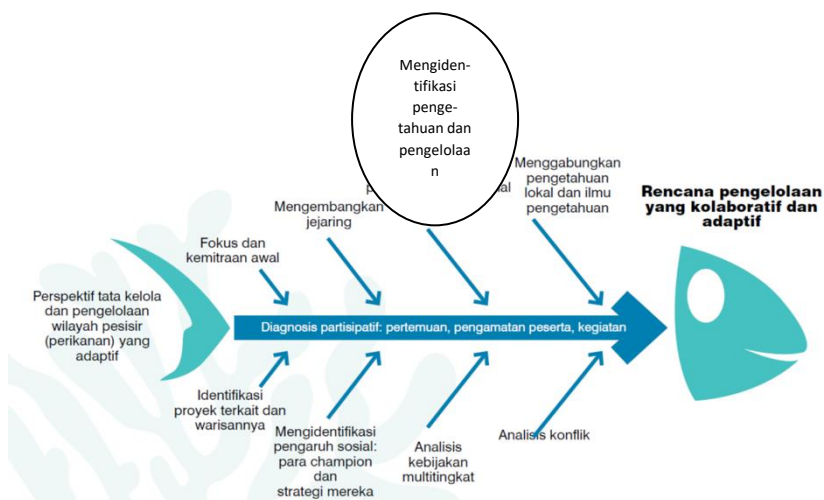
Elinor Ostrom membangun analisis dengan menggambarkan bagaimana dalam teori tindakan kolektif masih perlu melakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana sebuah kelompok utama mengorganisir diri mereka sendiri secara suka rela dan terus-menerus untuk menata dan mengelola hal-hal yang memang perlu dikelola di luar lingkup internal mereka. Namun, perlu dicatat bahwa pola-pola *commons* ini sudah menjadi bagian dari pengetahuan tradisional komunitas-komunitas di Indonesia. Bentuk-bentuk pengetahuan yang tidak langsung nyata atau lugas dalam wujud pengetahuan modern tidak menghalangi bagaimana *commons* ini dipelajari, diperdalam, dan kemudian menempati posisi yang setara dalam ilmu pengetahuan modern.

Pendekatan teoritis terhadap Commons memberikan pemahaman bahwa interaksi antara lokalitas dan negara tidaklah selalu setimbang. Dikatakan tidak setimbang bukan berarti bahwa tidak perlu ada interaksi. Syarat-syarat supaya setimbang perlu diupayakan. Benar bahwa interaksi itu perlu terutama penting untuk menguatkan institusi, terutama yang mempunyai karakter *check-and-balances*. Namun, suatu lokalitas dengan ciri *commons* yang kuat amat ditandai (“identitas”) dengan lokalitas mereka, dan dengan kemampuan tata nilai mereka mendekati satu sama lain. Khususnya dalam perihal ekosistem Selayar, pengetahuan tradisional ini lebih kuat dan lebih nyata dalam memperkuat lokalitas masyarakat yang hidup, dan dalam hal dimana mobilitas, kedatangan, kompetisi atas sumber daya semakin sengit, pengetahuan tradisional ini menjadi titik konflik.

Pengetahuan tradisional yang ada dalam konflik tidak dimaksudkan bahwa pengetahuan tersebut menjadi sama sekali tidak relevan, melainkan pengetahuan tradisional itu perlu mendapat kaji ulang, dan olah ulang, mengingat jenis tantangannya tidaklah sama sebangun ketika pengetahuan tradisional tersebut.

Penelitian yang dilakukan di Pulau Selayar secara terencana memberikan perhatian pada interaksi kelola mengenai ekosistem

yang amat luas. Hal ini dikelola dengan bentuk diagram “tulang ikan” (*fishbone*), sebagai berikut:



GAMBAR 5: Ilustrasi diagram tulang ikan untuk alat bantu diagnosis partisipatif.

Sumber: Disain — 24Point0.com. Isi — H. Ross, D. Adhuri dan A.Y. Abdurrahim
 Dari Ross, et. al. 2018, halaman 8

Interaksi dan pola kelola di atas pada dasarnya adalah memformulasikan kembali bagaimana kehidupan masyarakat yang berciri “commons” ini mengelola tantangan terbaru -termasuk terhadap godaan untuk mengambil jalan pintas. Di bagian kepala dan ekor dari “tulang ikan” ada proses “perspektif” menjadi “rencana”, dan sebaliknya “rencana” didasarkan pada “persepsi”. Masyarakat ekosistem Selayar membangun interaksi dan pola kelola yang, pada hal yang paling mendasar, mengarahkan

perhatian pada “pengetahuan dan praktik adat”, “lembaga lokal (kepranataan)”, “rasa kepemilikan terhadap permasalahan di wilayah pesisir”

Dalam proses sedemikian, apa dan dimana pengetahuan tradisional masyarakat ekosistem Selayar. Hal ini dijabarkan sebagai berikut:

Pengetahuan tradisional yang menjadi penanda (“identitas”):

Pengetahuan yang mengelola ekosistem, membangun kapasitas prediksi dan “rasa nyaman” dengan keberadaan sebagai masyarakat “commons”: pengetahuan mengenai musim (klimatologi dan meteorologi), pengetahuan mengenal ekosistem perairan laut dangkal, pengetahuan mengenai siklus biota laut.

Pengetahuan tradisional yang memperkuat “lokalitas”:

Pengetahuan tradisional yang membangun kesadaran akan kewilayahan, berikut dengan kesadaran akan tata interaksi/konflik: siklus sosial ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengambilan keputusan para pihak dalam wilayah ekosistem Selayar.

Kedua pengetahuan tradisional ini secara umum menjadi proses yang membangun subsidiaritas -proses yang semakin melokal. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat ekosistem Selayar untuk “nyaman” di ekosistem Selayar. Hal ini akan memberikan mendorong penggunaan alat tangkap, model pembiayaan dan pasar, pergerakan di wilayah perairan laut dangkal semakin memperhatikan para pihak di wilayah ekosistem Selayar.

Pengetahuan tradisional ini pada dasarnya merupakan pengetahuan “oral”, “bersifat ingatan”, “termanifestasi dalam alat dan kerajinan”. Pengetahuan tradisional berada dalam proses dalam pengolahan menjadi proses kolaborasi (*knowledge by actors*). Pada saat yang sama, kajian dan publikasi yang sedang dibangun mempunyai fungsi untuk mengomunikasikan realitas

ekosistem maritim kepada lingkup pengambilan keputusan yang lebih besar, dalam hal pemerintah di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat pemerintah pusat.

Bahasa Indonesia digunakan secara bervariasi juga perlu beradaptasi dengan bahasa-bahasa lokal, terutama bahasa Selayar dan bahasa Bajau untuk dapat melacak keluasan pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi pilar dalam kehidupan masyarakat Selayar yang berciri *commons*. Kelola pengetahuan tradisional ke dalam bahasa Inggris juga berkontribusi terhadap interaksi antara asumsi-asumsi besar dalam dunia kebijakan, akademik, dan kajian di berbagai titik di dunia.

Proses kelola *commons* Selayar ini dibangun dalam proses *The Capturing Coral Reef & Related Ecosystem Services* (CCRES) (2014-2018). Proses ini membangun model teknis, alat dan produk pengetahuan untuk mendukung pengelola, pengambil kebijakan dan perencana untuk mengelola ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, dan dengan proses tersebut, mendukung ekosistem tersebut sehingga dapat memberi kehidupan bagi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pemetaan secara bersama, didiskusikan dan dideliberasikan mengenai klaim wilayah Kelola (bukan kepemilikan). Siapa saja bisa masuk tetapi harus mengikuti aturan komunitas tempatan. Ada Kawasan Konservasi (*no take zone*) yang disebut Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang merupakan COREMAP. Juga ada penetapan mengenai Aturan Penggunaan Alat Tangkap (Desa Bongaiya)

ALAT TANGKAP	
1. LAMPRAK	≠ DPL
2. SERO (56 UNIT)	Plano Plastik laka sara
3. PANCING	≠ DPL
4. RAWAT (karamba)	40. Depa
5. BUBU	≠ DPL
6. Sambak	Di luar laka sero ≠ DPL
7. Panah	≠ DPL, Selay Hari
8. Bagan (1)	≠ Dekat sero
9. TABERE	

ASAL NELAYAN /6 NAYAKAP Di	
Perairan Bungaya	
→ Kepulauan	
→ Melayan Bungaya	
→ Barat Kepulauan	menyempit zona p. haur
→ Panatata	
→ Menara Indah	
→ Mekar Indah	
→ Tanette	
→ Bontolung mada	

Kelola ekosistem Selayar juga dituangkan dalam ketentuan mengenai Sero (alat tangkap tradisional yang bersifat menetap, dimiliki oleh orang tertentu tetapi menempati wilayah *commons*).



Dokumen lama yang memuat informasi kepemilikan lokasi pemasangan Sero, yang merupakan pengetahuan tradisional *commons* Selayar.



Peraturan Desa sebagai tata kelola *commons*

PERATURAN DESA PARAK
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA BERKELANJUTAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARAK

- Menimbang:
- a. Bahwa daerah perairan Desa Parak memiliki kekayaan sumber daya alam berupa ikan dan biota lainnya yang dapat memberi kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. Bahwa kekayaan sumber daya alam tersebut perlu dipelihara dan dilestarikan, sehingga dapat menopang kemampuan lingkungan perairan desa secara berkelanjutan;
 - c. Bahwa selama ini masyarakat desa telah mengatur penggunaan alat tangkap dan konservasi atas dasar kearifan lokal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, c, dirasakan perlu dibentuk Peraturan Desa untuk menguatkan dan melengkapi kearifan tradisional dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir.

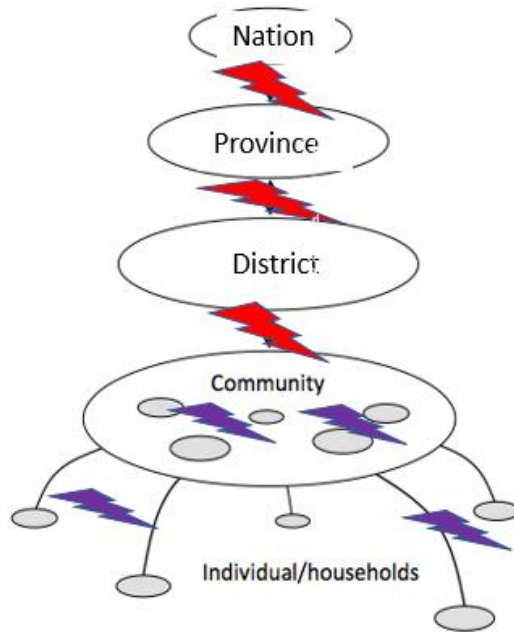
III. Simpulan

Masyarakat *commons* Selayar merupakan salah satu dari sekian banyak titik ekosistem maritim di berbagai lokalitas di dunia. Penelitian yang dilakukan memperkuat pengetahuan tradisional yang selama ini, atau sementara ini memperkuat ekosistem dan komunitas Selayar sendiri. Namun, tantangan dalam hal kecepatan dan kompetisi sumber daya menghadapkan masyarakat *commons* Selayar untuk kembali menilik pengetahuan tradisional mereka. Pengetahuan tradisional ini kemudian dituangkan dalam kolaborasi, dan juga dalam kajian yang bersifat keilmuan.

Kajian yang juga berkelanjutan mengenai pengetahuan tradisional di masyarakat berciri *commons* diperlukan untuk membangun lokalitas tersebut, terutama ketika sumber daya dan wilayah ekosistem menjadi “wilayah lewat” (*passage*) dan kompetisi sumber daya. Kajian ini dibangun dalam tahapan dan kerangka waktu tertentu, dan dengan ini pengetahuan tradisional tidak disalahgunakan untuk eksploitasi, atau tidak digunakan untuk “bersembunyi” dari tantangan terkini.

Karakter dari pengetahuan tradisional ini, termasuk yang dibangun dalam masyarakat *commons* Selayar, menjadi penanda (“identitas”) mereka. Karakter ini “berbasis-komunitas” (*community-based*) dan perlu untuk dikaji untuk kepentingan replikasi dan ekstrapolasi ke *commons* lain. Replikasi berarti menggunakan secara langsung kajian dan alat kelengkapan yang berasal dari *commons* Selayar di wilayah *commons* lain. Ekstrapolasi berarti membangun kajian secara cermat dan berkelanjutan mengenai kajian dan alat kelengkapan dari *commons* Selayar, dan mengolahnya ke dalam berbagai pendekatan (*approach*) dan alat kelengkapan di berbagai masyarakat kepulauan, masyarakat adat, dan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Pola relasi dari *commons* tersebut digambarkan sebagai berikut:



Dalam penggambaran ini, ada keterkaitan horisontal dan vertikal. Di tiap-tiap lokalitas, *commons* menjadi kenyataan keseharian. Individu, rumah tangga hidup sebagai dan mendukung komunitas. Sebaliknya, komunitas mengelola dan mendukung individu dan rumah tinggal dalam konteks alam dan ekosistem dimana mereka hidup dalam cara yang lestari. *Commons* ini adalah kenyataan yang paling kuat dan mendasar; kemudian *commons* berelasi dengan tata pemerintahan, termasuk kabupaten (district), provinsi, dan Indonesia secara keseluruhan.

Problem yang muncul dalam pola relasi tersebut adalah adanya relasi tak simetris, dan seringkali konflik antara regulasi dan kebijakan pemerintah dengan lokalitas *commons* dan kemunculan resistensi komunitas, ruang dan proses pengambilan keputusan yang mendukung lokalitas *commons*.

Dalam pola hubungan antara *commons* dan negara pada umumnya, ketentuan normatif dan pranata sudah dibentuk untuk mendukung dan mengakui subjek dan objek dalam pokok-pokok kebudayaan, termasuk pengetahuan tradisional dalam suatu *commons*. Pengetahuan tradisional yang digali dan dibangun dalam pola hubungan sebagaimana yang berlangsung dalam *commons* Selayar adalah mengenai wilayah kelola, DPL (daerah perlindungan laut), aturan pemanfaatan alat tangkap, pola sanksi, lembaga kelola.

Commons Selayar menyumbangkan model dan proses penetapan mengenai *commons* Selayar sebagai objek Kebudayaan yang menyumbangkan kontribusi penting pada keberlanjutan sosio-ekologis (*socio-ecological sustainability*). Penguatan terhadap *commons* Selayar dilakukan dengan kolaborasi (berbagai cara dan lingkup), dan membangun sinergi atas pengetahuan “modern”.

Dengan ini, kajian pengetahuan tradisional yang terus-menerus akan membantu bagaimana pengetahuan tradisional dapat, dalam tahapan, menjadi sumbangan pengetahuan bagi *commons* lain di dunia dan masyarakat pada umumnya.

* semua gambar berasal dari laporan “fishcollab” dan presentasi pribadi

KEPUSTAKAAN

Abdurrahim, Ali Yansyah, Ross, Helen, Rismayani, Andi, Ismainna, Andi, Adhuri, Dedi S.. 2018. *Pengaruh sosial untuk melindungi terumbu karang: Para champion dari Selayar*. Capturing Coral Reef and Related Ecosystem Services (CCRES), University of Queensland

Ross, Helen, Adhuri, Dedi S, Abdurrahim, Ali Yansyah, Penrang, Andi, Rismayani, Andi, Ismainna, Andi. 2018. *FishCollab, Alat bantu untuk mendukung kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam*

pengelolaan wilayah pesisir. Capturing Coral Reef and Related Ecosystem Services (CCRES), University of Queensland

PENANGGAP

Aloysius Gunadi Brata

Terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi penanggap Mas Dedi Adhuri, dari LIPI. Saya mulai dengan semacam disclaimer dulu, bahwa saya berlatar ekonomi sehingga ketika membaca antropologi, saya tertarik, tetapi mungkin banyak tidak pahamnya. Tetapi jelas saya melihat seperti tadi juga sudah disampaikan, bahwa paper ini menarik. Dan, bagi saya ini termasuk penting. Setidaknya ada tiga hal yang saya bisa dapat dari situ. Pertama, bicara soal suku Bajau yang dalam banyak cerita itu punya budaya maritim yang khas. Salah satunya itu bisa menyelam cukup lama dalam laut tanpa alat. Bahkan, konon sudah secara fisik juga ada sedikit perubahan karena kemampuan menyelamnya itu. Ketiga, secara jelas tadi Mas Dedi menyebutkan bahwa ini sebetulnya ada ada kaitannya dengan implikasi negatif dari developmentalism, modernisation dan dalam konteks ekonomi khususnya, seperti ada ecotourism dan introduksi alat-alat tangkap yang modern. Yang ketiga, saya kira ini pasti terkait dengan posisi maritim dalam konteks pembangunan Indonesia sekarang yang ditempatkan sebagai salah satu tulang punggung masa depan kita. Jadi, jelas apa yang dilakukan oleh mas Dedi ini ada *policy implication* yang sangat serius nantinya, saya kira, karena disana ada kelompok-kelompok komunitas tertentu yang mau tidak mau akan berhadapan dengan arah ke depan maritim kita dan sekaligus juga membawa tantangan dan mungkin juga ancaman bagi mereka. Lalu mengenai perspektif teoritis tadi. Terus terang saya tidak banyak paham soal ini tapi mencoba membaca secara cepat. Karena saya ada di ekonomi, ini lebih masuk ke *resource economics*. Jadi kalau pakai kata *commons* itu, jenis *goods*-nya, jenis barangnya.

Tapi tampak juga ada soal kendali kontrol dan kelola di sana yang tadi kalau dari Mas Dedi ada indikasi eksploitatif. Jadi ada *arrangement* yang pada prinsipnya itu mengeksklusi atau kadang mendestruksi alam, walaupun tampaknya mengelola tapi sebetulnya itu tidak adil. Ketiga ada bisa juga dia lebih ke soal kepemilikan, jadi soal *common property regime*, yang saya baca kemudian, ada juga yang lebih melihat sebagai praktek sosial. Jadi apa yang disebut *commoning* itu sebagai *core determinant* dari *commons* itu sendiri. Khususnya ini ketika konseptualisasi yang sistematis, dan tahu sangat ketat tidak bisa dilakukan. Maka saya masuk ke poin berikutnya, yang lebih berupa pertanyaan saja, mengenai konsepsi *commons*. Apakah dalam konteks *commons* dalam komunitas Bajau ini bisa sebut statis, tapi sepertinya dia sebagai long lived concept yang selalu ada dan begitu. Atau. Apakah hal itu bisa dinamis dan berubah terus-menerus karena terus berhubungan, berinteraksi dengan alam maupun alam yang berubah maupun manusia dan aspek-aspek lainnya terus berubah. Maka andai itu berubah apakah itu masih bisa kita sebut sebagai *commons*. Lalu bila pengetahuan tradisional itu memperkuat pola-pola pengambilan keputusan, apakah ada juga sisi lainnya, yang dapat melemahkan pola-pola pengambilan keputusan. Yang saya tertarik untuk menggali informasi lebih adalah apakah pengetahuan tradisional itu sebetulnya bisa juga mempunyai sisi negatifnya dalam proses-proses pengambilan keputusan, khususnya yang tidak pro pada *common goods*. Lalu pada catatan kesimpulan, kalau tadi disebutkan di *paper* Mas Dedi bahwa masyarakat Kampung Selayar itu adalah salah satu dari banyak titik ekosistem maritim dari berbagai lokalitas dunia. Itu artinya ada banyak diluar sana yang setidaknya saya tidak tahu, yang mas Dedi tentu tahu. Pertanyaannya yang membuat saya tergelitik adalah apakah di lokalitas yang lain itu ada kemiripan atau perbedaan. Situasi maupun tantangan yang dihadapi oleh masyarakat *commons* maritim khususnya. Kalau ada semacam komparasi tentu akan

menarik sekali sehingga kita punya bayangan, misalkan di Inggris sana seperti apa. Seingat saya ada dulu anak UGM yang dulu S3-nya itu di Belanda, tapi disertasinya mau bicara soal masyarakat nelayan di Inggris. Jadi dia *stay* di Inggris untuk riset. Lalu dalam kaitan itu, seperti apa sih kalau di belahan dunia yang lain mengenai gambaran kondisinya terutama karena tadi kan disebut ada project yang banyak masuk ke kawasan. Tentunya ini mengenai bagaimana menularkan dari luar ke dalam, dan dari dalam keluar. Terakhir dalam konteks yang tadi di awal saya sebut kalau Indonesia itu menuju ekonomi maritim, seharusnya seperti apa sih *maritime policy* di Indonesia ini, khususnya ketika dibawa ke konteks masyarakat seperti Suku Bajau yang hidupnya sangat suka atau nyaman dengan laut yang seperti itu.

Kontestasi dalam perlindungan Sumber Daya Genetik untuk Pengembangan Obat-Obatan¹³

Yovita Indrayati
UNIKA Soegijapranata
yovitaindrayati@unika.ac.id

Henry Thomas Simarmata
Apintlaw
henrythomas@apintlaw.info,

Trihoni Nalesti
UNIKA Soegijapranata
trihoni@unika.ac.id

,

A. Introduksi

Norma dan hukum perlindungan sumber daya genetik di Indonesia mengalami dinamika yang mencerminkan antara pengakuan atas pengetahuan terorganisir (:riset, experimentasi, protokol) dengan ekosistem dan cara hidup kolektik suku-suku di Indonesia. Perlindungan ini di satu sisi dipersepsi sebagai “perlakuan istimewa”, “ketidakimbangan” saat sumber daya genetik ini masuk dalam produk dan ruang konsumsi dunia. Perlindungan jenis ini bertumpu pada hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dimana hak moral, hak informasi, dan hak komersialisasi bertumpu sepenuhnya pada pemangku hak tersebut. Negara Indonesia memiliki kedaulatan atas sumber daya alam yang dimilikinya sesuai ketentuan sumber hukum internasional. Prinsip

¹³ Paper diskusi Kolokium 13-14 Juli 2021

kedaulatan negara tersebut merupakan hal penting mengingat Indonesia adalah salah satu negara mega biodiversity. Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) pada tahun 2019 bahwa gabungan biodiversitas daratan dan lautan, termasuk jasad reniknya, menjadikan Indonesia negara dengan biodiversitas terkaya di planet bumi. Kekayaan biodiversitas ini telah menginspirasi karya-karya besar kelas dunia, seperti karya Rumphius, Wallace, dan Eijkman.¹⁴ Menurut Moh. Haryono selaku Kasubid Sumber Daya Genetika, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan keanekaragaman hayati (biodiversity) wilayah darat dan laut Indonesia tercatat terbesar di dunia.¹⁵

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana membangun perlindungan yang tepat dan berkelanjutan. Meskipun sebagai salah satu negara terkaya sumber daya genetik, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan sumber daya genetik dan adanya

¹⁴ Virus Corona dan Sumber Daya Genetik Indonesia, <https://www.kehati.or.id/coronadansumberdayagenetik/> diunduh 15 Juli 2020. Georg Eberhard Rumphius (1627-1702), menghasilkan magnum opus berjudul *Herbarium Amboinense* yang berkontribusi besar dalam pengembangan sistem penamaan ilmiah (taksonomi) modern. Demikian juga Alfred Russel Wallace yang membangun teori evolusi (*survival of the fittest*) setelah menjelajah dan mendokumentasikan keanekaragaman hayati Nusantara selama 8 tahun (1854–1862). Christiaan Eijkman bahkan mendapat hadiah Nobel Kedokteran tahun 1929 setelah laboratorium yang dipimpinya menemukan vitamin B1 sebagai anti beri-beri dari kulit air beras. Laboratorium ini sekarang dikenal dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang berperan besar dalam uji Covid-19.

¹⁵ Keanekaragaman Hayati Indonesia Terbesar di Dunia, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/ps3pww366/keanekaragaman-hayati-indonesia-terbesar-di-dunia>, 7 Juni 2019, diunduh 1 Juli 2019.

ketidakkonsistenanan dalam pengaturan wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Masalah yang timbul, dan bagaimana “membaca”nya

Mengenai kekayaan keanekaragaman hayati, bagi sebuah negara, sudah ada upaya-upaya baik di tingkat domestik (dalam negeri) maupun di tingkat internasional mengenai bagaimana cara mengolahnya. Salah satu pondasi yang penting mengenai hal itu adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (*convention on biological biodiversity*) yang menjadi semacam “pengatur lalu-lintas” mengenai bagaimana cara mengelola dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Dalam proses-proses pengelolaan dan pemanfaatan, muncul proses komersialisasi dimana aturan mengenai hak kekayaan intelektual (IP, *intellectual property rights*) berlaku. Dalam kasus obat-obatan, hal ini mengemuka. Produk dan penggandaan (*propagation*) dari kekayaan intelektual dinyatakan sebagai produk dari IP. Proses komersialisasinya pun diatur dalam lalu lintas kompetisi.

Kita mempunyai 2 hal: kekayaan keanekaragaman hayati dan produk yang berasal dari keanekaragaman hayati. Bagaimana negara mengatur kontestasi ini? Bagaimana juga membentuk perlindungan diperlukan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Bagaimana peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang memuat ketentuan tanggung jawab negara dalam melindungi sumber daya genetik untuk pemanfaatan obat-obatan, termasuk pengetahuan tradisional dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan.

C. kontestasi dalam formula perlindungan yang mungkin (*possible necessary protection*)

Kontestasi formula 1, *propagating*

Propagation, merupakan istilah teknis hukum dan kebijakan yang mengatur mengenai “pemuliaan”, “penggandaan”, “penyemaian-penumbuhan”. Formula ini hendak menilai sejauh mana obat-obatan mendapat “input manusia”, “input teknologi”, “input alam”. *Propagating* ini menimbulkan kontestasi baik mengenai asal-usul maupun mengenai “hak eksklusif” dari si kreator.

Tanggungjawab negara yang langsung muncul terutama muncul dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (UU NRI no. 5 tahun 1994) dan Cartagena Protocol (UU NRI no. 21 tahun 2004) adalah mengenai bagaimana plasma nutfah berada di alam, dan bagaimana *propagation* adalah proses yang aman dan berkeadilan. Negara asal dan pengelola plasma nutfah dan kekayaan keanekaragaman hayati sepenuhnya menjadi kewajiban negara (*final vest*) untuk mengatur dan memastikan perlindungannya.

Tanggungjawab negara dalam hal ini adalah menilai apakah yang disebut “obat” atau “obat-obatan” berada pada rezim hukum IP atau Kekayaan Keanekaragaman Hayati.

Bagaimana jika kategori “obat” ini sudah menjadi kebiasaan yang tetap dan kuat (*established custom*). Tanggungjawab negara akan melakukan perlindungan terhadap proses *propagating* yang terkait “obat” terkait, dan menilai tingkat komersialisasinya, baik di lapangan domestik (dalam negeri) ataupun lintas negara (*transboundary*).

Bagaimana jika kategori “obat” yang sudah dimaksud mengalami *propagating* yang sangat komersial, yang menghasilkan pangsa pasar komersial dan yang menghasilkan keuntungan? Kewajiban negara tentu mengatur mengenai “hak komunitas” dan “hak moral” yang dianggap “berjasa” dalam

menghasilkan “obat” tersebut. Mengenai hak komersial, hal itu akan diatur sepenuhnya dalam hal IP dan mekanism anti-trust.

Kontestasi formula 2, benih

Yang menjadi kontestasi yang amat sengit adalah bagaimana benih diakui dan dilindungi suatu negara. Benih komoditas tentu diukur menurut IP dan mekanisme anti-trust. Bagaimana jika benih itu “asli Indonesia”. Bagaimanakah cara membaca konteks rempah-rempah dan *empon-empon* Indonesia.

Negara mempunyai tanggungjawab terhadap benih yang menjadi “hajat hidup orang banyak”, baik dalam memastikan ketersediaan, memastikan keberlanjutannya, maupun memastikan benih tetap “dimuliakan” komunitas-komunitas di Indonesia. Penemuan benih organik tertentu biasanya menimbulkan perdebatan mengenai cara pengolahan dan penggunaannya, maupun cara melindunginya.

Kontestasi formula ini adalah adanya benih berbasis IP yang kemudian menjadi dominan. Dalam kasus obat-obatan di dunia internasional, IP masih menjadi rujukan utama untuk perlindungan terhadap kreator, dan juga rujukan dalam disputasi benih.

Tanggungjawab negara akan selalu berada pada 2 benih tersebut: benih yang memang asli Indonesia dan benih yang sepenuhnya berbasis IP. Demikian pula dalam produksi obat-obatan, kedua hal akan selalu mengalami “ujian” mengenai bagaimana cara melindunginya.

D. diskusi mengenai kontestasi

Bagi negara yang hendak membangun perlindungan atas sumber daya genetik mereka, diperlukan upaya untuk menginventarisasi mengenai kekayaan sumber daya genetik, dan juga mencermati masalah-masalah yang timbul terutama dalam hal bagaimana membangun pengakuan (terkait hak moral), dan bagaimana mengatur lalu-lintas komersialnya.

Hukum yang timbul dari negara tentu saja akan diuji oleh hukum negara lain yang menjadi pihak komersial, dan juga diuji oleh hukum internasional. Obat-obatan akan mendapatkan ujian yang sangat kuat.

Kejelasan mengenai lingkup dan definisi “sumber daya genetik” akan sangat menolong suatu negara, dalam hal Indonesia, dalam memetakan dan membangun perlindungan terhadapnya. Produk obat-obatan yang “amat dekat” dengan “sumber daya genetik” Indonesia tentu perlu mendapatkan perhatian yang cermat mengenai perlindungan dan utilitasnya.

KEPUSTAKAAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi. 2015. *Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015*. Uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi. 2012. *Putusan Nomor 99/PUU-X/2012*. Uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Uji Materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Okediji, Ruth, L., *Traditional Knowledge and the Public Domain*, Centre for International Governance Innovation, CIGI Papers no. 176 -June 2018.

Redi, Ahmad et. al. 2015. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*. BPHN Republik Indonesia https://bphn.go.id/data/documents/ae_pemanfaatan_sd_genetik.pdf

United Nations General Assembly, Cultural Rights. 2015., A /70/279,
Report of the Special Rapporteur in the field of Cultural rights, 4
August 2015

PENANGGAP

Dedi Adhuri

Menarik sekali, saya bisa belajar banyak dari apa yang Ibu presentasikan dan juga paper-nya. Saya harus memulai dan mengatakan bahwa saya kurang paham tentang hukum, apalagi kebetulan pendekatan bu Yovia itu yuridis normatif. Saya lebih banyak bergerak di lapangan. Jadi melihat realitas. Kalau saya melihat hukum itu bukan teksnya di dalam peraturan perundangan, namun bagaimana itu diimplementasikan di lapangan. Jadi artinya bahasan saya akan lebih merupakan *common sense* dari orang yang belajar antropologi. Yang kedua juga akan Bergeraknya dari lapangan, bukan dari normatif yuridis. Catatan saya pertama itu, saya belum mendapat pencerahan yang cukup jelas terkait sebenarnya *real problem on the ground*-nya itu apa, dengan sumber daya yang sedang ibu bicarakan. Misalnya, di teks saya kurang menemu itu. Tadi saya ada yang mendengarkan di *slide* ke-berapa tadi, tentang masalah apa namanya permisif-nya komunitas terkait dengan permintaan tentang sumber daya genetik itu. Atau dalam penelitian hilang kemudian bisa menyebabkan kepunahan. Kalau saya, saya akan memulai titik bahasan dari persoalan lapangan dulu sebelum kemudian mengarah kepada, jadi “Apa yang harus dilakukan” --bisa dilakukan oleh peraturan perundangan. Dalam pengamatan saya, sepertinya Ibu bicara tentang memproteksi kemungkinan kerusakan di dalam semua aspeknya, soal kehilangan dan lain-lain, dan juga *promoting* penggunaan apa namanya sumber daya hayati itu atau sumber daya genetik itu. Kenapa saya menekankan, dalam perspektif saya, pentingnya menjelaskan secara detail *real problem on the ground*-nya apa, karena selama ini di lapangan saya seringkali menemukan semacam diskrepansi,

antara yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Atau apa ya mudah-mudahan saya tidak masuk terlarut dalam konteks seperti itu. Misalnya saya contohkan ini, contoh yang lain, yang bukan terkait dengan proteksi terhadap sumber itu, tapi isu yang kebetulan saya pelajari. Pemerintah sudah mengakui peraturan mengakui keberadaan praktek-praktek pengelolaan berbasis adat atau mengakui hak-hak masyarakat dalam mengolah sumber daya alamnya termasuk sumber daya pesisir, dan kalau kita realitasnya cukup banyak juga praktek-praktek tersebut dilakukan oleh komunitas. Tetapi pada saat mereka merumuskan peraturan perundangan, menurut saya yang tidak sensitif terhadap realitas di lapangan. Pertama peraturan perundangan itu yang sebenarnya basisnya seharusnya harus diarahkan untuk mengakui keberadaan praktek-praktek pengelolaan berbasis tradisi ini atau hak-hak masyarakat adat secara khusus dalam hubungan dengan sumber daya laut ini, dengan karakteristik yang saya sebutkan tadi, diantaranya tradisi oral, dan lain-lain, peraturan perundangan yang dibuatnya begitu *njelimet* (“rumit, berbelit-belit”), sehingga sedemikian rupa bisa dipastikan masyarakat sendiri tidak mungkin bisa melakukan melakukan permintaan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah itu. Kita lihat disini 12 *step*, dan kebanyakan *step-step*-nya adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. Padahal kita tahu, dalam banyak hal, dalam hal pengaturan apa proteksi dan promosi penggunaan sumber daya yang sedang kita bicarakan, itu pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka perlu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan komunitas terkait. Nah, saya khawatir, kalau pendekatannya hanya normatif, persoalan-persoalan seperti ini jadi *missing*, baik di dalam kajiannya sendiri maupun di dalam rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti. Nah ini contoh realitas di lapangan ini yang *recorded*, masih banyak yang lain, mengenai praktek-praktek pengolahan sumber daya berbasis adat di Pesisir. Karena proses peraturannya seperti itu, hanya sedikit saja, yaitu hanya total33

yang berbasis pengetahuan tradisional itu atau berbasis komunitas adat itu yang diakui oleh pemerintah, karena di antaranya menurut saya ada diskrepansi antara konstruksi legal dari pengakuan ini dengan realitas di lapangan.

Studi Literatur sebagai Metode Penelitian Unobtrusive Kajian Tentang Konservasi Benda Budaya Sebagai Simbol Adat Negeri di Ambon¹⁶

Abraham Wahyu Nugroho
Yulita Titik Sunarimahingsih
Y. Trihoni Nalesti Dewi
Tyas Susanti; Bernadeta Resti Nurhayati
UNIKA Soegijapranata
abraham@unika.ac.id

A. Pendahuluan

Selama ini ketika berinteraksi dengan beberapa kolega dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda namun masih dalam satu rumpun ilmu sosial, diskusi tentang metodologi penelitian menjadi hal yang menarik. Ada yang mengatakan bahwa ketika mendiskusikan metode penelitian, cukup kualitatif atau kuantitatif atau gabungan keduanya (*multiple methods*). Ada pula yang mengatakan yang penting adalah rasionalitas. Logis dalam hal substansi dan metode, misalnya penentuan populasi, sampling, pemilihan responden atau informan, dan tentu saja temuan datanya. Namun ada juga yang mengatakan harus ketat, kualitatif atau kuantitatif yang mana? Mengapa? Karena objek kajian material (*locus of interest*) bisa sama namun objek kajian formalnya (*focus of interest*) bisa berbeda. Sebagai contoh, kedokteran, psikologi, sosiologi memiliki objek kajian material yang sama, yaitu manusia. Namun, ketiganya memiliki kajian formal yang berbeda.

¹⁶ Paparan ini merupakan penelaahan metode unobstrusive atas kajian simbol adat negeri di Kota Ambon tahun 2019 sampai sekarang.

Namun di antara pandangan-pandangan yang muncul, semua (paling tidak sebagian besar) akan sepakat bahwa riset atau penelitian merupakan kegiatan mengungkap kebenaran berdasarkan prinsip berpikir ilmiah. Berbeda dengan penelitian ilmu alam, seperti ilmu kimia atau fisika yang dilakukan di laboratorium, penelitian sosial dilakukan di sebuah ruang yang disebut lapangan.

Penelitian ilmu sosial yang dilakukan di lapangan memerlukan intervensi meski dalam tingkatan tertentu menurut kaum positivistik wajib menjaga jarak terhadap objek kajiannya. Namun, sejatinya dalam penelitian kuantitatif baik survei maupun eksperimen, peneliti bisa saja mempengaruhi proses penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan metode alternatif yang benar-benar tidak mempengaruhi baik proses maupun objek yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dimulai dengan mengembangkan pertanyaan aspek apa saja yang berkontribusi pada konservasi benda budaya di Ambon?

C. Kajian Teori dan Metodologi

Penelitian Durkheim tentang bunuh diri menjadi sebuah contoh sebuah alternatif penelitian sosial yang tidak bisa dilakukan di lapangan, karena akan berpotensi mempengaruhi proses penelitian itu sendiri atau objek yang diteliti. Apa yang dilakukan oleh Durkheim dengan memeriksa statistik bunuh diri yang terjadi di Eropa waktu itu, tidak akan mempengaruhi perilaku bunuh diri saat itu. Apa yang dilakukan Durkheim inilah yang disebut metode penelitian unobtrusive.

Selama ini studi literatur seringkali diposisikan sebagai prosedur penelitian ilmiah. Namun, kajian atau studi literatur bisa dilihat sebagai sebuah metode penelitian unobtrusive dengan isi teks sebagai objek kajian. Menurut Babbie (2016:323) metode penelitian unobtrusive adalah metode penelitian perilaku sosial

tanpa mempengaruhi perilaku sosial itu sendiri. Metode ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode penelitian unobtrusive sangat berguna dalam situasi berbahaya atau sulit untuk menanyai responden secara langsung (Lee, 2019: 421).

Sejatinnya studi literatur memiliki beragam tujuan (Petticrew dan Roberts, 2006: xiii). Pertama, memeriksa teori-teori yang sudah ada, menemukan gap dan kemudian mengajukan teori baru. Kedua, membantu peneliti dalam menyediakan panduan dalam merencanakan kajian dan memberikan ringkasan literatur yang tepat tentang isu tertentu. Ketiga, memeriksa isu metodologis mengapa metode penelitian yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama terkadang mencapai kesimpulan yang berbeda.

Penulis lain yaitu Jesson, Matheson, dan Lacey (2011: 10) mengelompokkan dua pendekatan dalam studi literatur, yaitu kajian literatur tradisional (naratif) dan kajian literatur sistematis. Tabel berikut menunjukkan perbedaan kedua pendekatan tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Kajian Literatur Naratif dan Sistematis

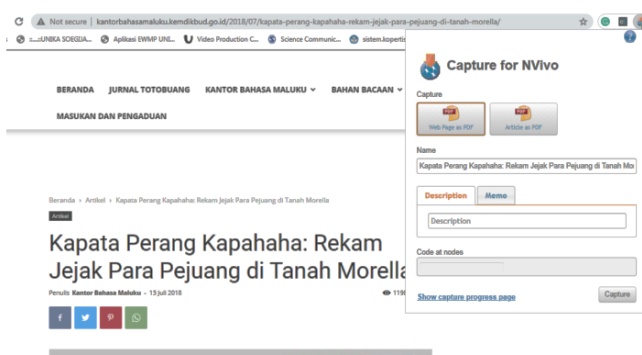
Kajian Literatur Tradisional (Naratif)	Kajian Literatur Sistematis
Memiliki gaya yang bervariasi	Memiliki gaya terstruktur
Metode tidak ditentukan	Metode yang ketat
Tidak ada analisis khusus	Meta analisis, sintesis

Sumber: Jesson, Matheson, dan Lacey (2011: 11)

Penelitian tentang konservasi benda budaya sebagai simbol adat dalam rangka penguatan eksistensi negeri-negeri di Ambon direncanakan menggunakan desain penelitian kualitatif lapangan (*qualitative field research*). Namun dalam situasi pandemi, belum memungkinkan untuk melakukan interaksi melalui diskusi kelompok terarah maupun observasi langsung dengan informan, meski sudah melakukan wawancara dengan bantuan enumerator.

Oleh karena itu, kajian literatur sistematis dilakukan sebagai metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Meminjam definisi yang dikemukakan Petticrew dan Roberts (2006:19), kajian literatur sistematis dilakukan secara komprehensif dengan mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis semua studi yang relevan tentang topik konservasi benda budaya sebagai simbol adat di Ambon.

Sebagai langkah awal dalam menjawab rumusan masalah tersebut, tim peneliti mencari sumber informasi yang menjadi basis data untuk keperluan analisis. Sumber informasi yang digunakan seperti pendapat Jesson, Matheson, dan Lacey (2011: 103) adalah semua literatur yang dianggap relevan dengan rumusan masalah penelitian. Tim peneliti menggunakan aplikasi NVivo 10 untuk memudahkan pekerjaan dalam menyusun database literatur, melakukan identifikasi dan sintesis. Dalam penelitian ini, ada empat kategori literatur yang bisa diidentifikasi, yaitu artikel jurnal, artikel website, laporan penelitian tidak diterbitkan, dan prosiding seminar. Khusus artikel website, disimpan dalam format sesuai dengan aplikasi NVivo agar dapat dibaca bersama dengan data yang lain.



Gambar 1. Proses Konversi Sumber

Website dengan NVivo Capture
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Selanjutnya tim peneliti menetapkan kriteria menggunakan hasil penelitian Susanti (2013) tentang aspek-aspek yang berkontribusi pada konservasi bangunan religius. Terdapat delapan aspek yang meliputi: komunikasi, keterlibatan, partisipasi, nilai, penguatan, pendanaan, peraturan, dan jejaring. Selanjutnya, berdasarkan delapan aspek tersebut, disusun kerangka kerja literatur review sistematis yang memuat kriteria inklusi dengan menyusun kata kunci-kata kunci untuk menyeleksi data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tabel 2. Kerangka Kerja Kajian Literatur Sistematis Konservasi Benda Budaya di Ambon

Aspek konservasi	Kata kunci	Jenis Dokumen (misalnya hasil penelitian terdahulu/ book chapter/peraturan/dll)
Komunikasi	komunikasi antar generasi, komunikasi nilai, pewarisan	
Keterlibatan	berasal dari luar masyarakat seperti pemerintah, NGO dan Balai Pelestarian Cagar Budaya, <i>stakeholder</i>	

Aspek konservasi	Kata kunci	Jenis Dokumen (misalnya hasil penelitian terdahulu/ book chapter/peraturan/dll)
Partisipasi	berasal dari masyarakat itu sendiri (internal)	
Nilai	deskripsi nilai, pemahaman nilai oleh masyarakat	
Penguatan	<i>common value</i> , sejarah konflik, bagian dari bangsa Alifuru, katong samoa Basudara	
Pendanaan	dana desa, diaspora (datang atau mengirim dana), badan usaha milik desa, dana internasional	
Peraturan	UU Cagar Budaya, hukum adat, peraturan negeri, perda, perjanjian internasional, petunjuk, guideline, SOP, model	

Aspek konservasi	Kata kunci	Jenis Dokumen (misalnya hasil penelitian terdahulu/ book chapter/peraturan/dll)
Jejaring	bagian bangsa Alifuru, pela gandong, perjanjian bersaudara	

Setelah tabel kerangka kerja tersusun, maka selanjutnya adalah membaca, menilai dan melakukan sintesis berdasarkan literatur yang sudah tersusun dalam database. Proses sintesis dilakukan dengan memeriksa masing-masing sumber literatur kemudian mengelompokkan atau memberi label berdasarkan kata kunci-kata kunci yang telah ditetapkan. Kemudian membuat hubungan di antara sumber literatur berdasarkan kata kunci yang ada.

Name	Nodes	References	Created On	Created By	Modified On	Modified By
Ademba Hutauri	0	0	11/07/2021 18:44	ABE	11/07/2021 18:44	ABE
Balio Hutauri	0	0	11/07/2021 18:43	ABE	11/07/2021 18:43	ABE
Batu Teong Ambon	0	0	11/07/2021 20:59	ABE	11/07/2021 20:59	ABE
Hukumeng.pembelajaran sosial Hutauri	0	0	11/07/2021 18:45	ABE	11/07/2021 18:45	ABE
inventaris budaya negeri sore	0	0	11/07/2021 21:11	ABE	11/07/2021 21:11	ABE
konsep pelestarian cagar budaya	0	0	11/07/2021 18:22	ABE	11/07/2021 18:22	ABE
GATUNHAAT_HURUMMAN	0	0	11/07/2021 18:22	ABE	11/07/2021 18:22	ABE
NUNAKU lauhale	0	0	11/07/2021 18:22	ABE	11/07/2021 18:22	ABE
pala negeri lauhale dan nagegi Alang	0	0	11/07/2021 18:22	ABE	11/07/2021 18:22	ABE
Totensisme Hutauri	0	0	11/07/2021 18:50	ABE	11/07/2021 18:50	ABE

Gambar 2. Database Literatur
Sumber: Dokumentasi Penelitian

D. Simpulan

Beberapa temuan yang dihasilkan dalam proses studi literatur tentang konservasi benda budaya sebagai simbol adat dalam rangka penguatan eksistensi negeri-negeri di Ambon antara lain:

1. Nilai pada Cuci Negeri

Penyelenggaraan perayaan upacara adat tiap tahun bertujuan untuk memelihara dan menghidupkan sifat dan nilai-nilai positif yang ada secara terus menerus, baik kepada generasi sekarang, maupun generasi mendatang. Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara ini antara lain: musyawarah, gotong royong, kebersihan, dan toleransi. Unsur-unsur tersebut di atas yang menjadikan upacara adat Cuci Negeri dapat bertahan hingga saat ini. Tetapi saat ini Cuci Negeri juga dikaitkan dengan: Persiapan- persiapan perayaan menyambut hari Raya Agama, Kunci Tahun, dan Tahun Baru.

2. Baileo adalah tempat pertemuan, dan tempat ini adalah merupakan tempat pertemuan, Baileo tidak selalu berwujud bangunan akan tetapi bisa juga berupa tanah rata. Baileo pada umumnya berisi simbol-simbol yang menggambarkan makrokosmos dari kehidupan sosial masyarakat negeri yang mewakili setiap peran yang mana disituasikan dalam baileo.

3. Komunikasi lisan kapata dilantunkan dengan menggunakan bahasa tana atau bahasa adat. Bahasa adat hanya diketahui oleh tetua adat atau mereka yang ditugaskan untuk melantunkan kapata. Inilah yang menyebabkan banyak orang tidak mengetahui dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Padahal, di dalam lantunan kapata terkandung banyak makna dan nilai-nilai kehidupan para leluhur.

Sebagai penutup tulisan ini, perlu disadari betul bahwa studi literatur sistematis merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu yang tidak singkat. Artinya temuan-temuan yang sudah dipaparkan di atas bisa jadi bersifat tentatif, karena sampai tulisan ini disajikan masih dalam proses menulis-merevisi-menulis-merevisi. Selain itu dalam kasus penelitian tentang konservasi benda budaya sebagai simbol adat di Ambon ini diperlukan metode lain. Alasannya, sebagai metode penelitian, bisa jadi studi literatur tidak cukup jika digunakan sendiri.

KEPUSTAKAAN

Babbie, Earl. (2016). *The Practice of Social Research*. Boston: Cengage Learning.

Bandur, Agustinus. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Lee, Raymond M. (2019). *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences*. Singapore: Springer.

Jesson, Jill K., Lydia Matheson dan Fiona M. Lacey. (2011). *Doing Your Literature Review: traditional and systematic techniques*. London: SAGE Publications.

Petticrew, Mark dan Helen Roberts. (2006). *Systematic Reviews in the Social Sciences*. Oxford: BLACKWELL PUBLISHING.

Tyas-Susanti, B. (2013) *Conserving Religious Heritage Through People-Involved Management: The Case of Mosques and Chinese Temples in the Urban Coastal Area of Java, Indonesia*. Unpublished Doctoral Thesis, University of Bath, Bath.

PENANGGAP

Ichmi Yani Arinda Rohmah, S.Pd., M.Sosio

Pemaparan yang menarik dan menambah wawasan baru juga tentang metode penelitian sosial. Kepada Abraham, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kembali terkait tentang *locus* penelitiannya tentang konservasi benda budaya sebagai simbol adat negeri di Ambon. Kemudian peneliti karena adanya keterbatasan situasi adanya pandemi yang awalnya ini penelitian lapangan, kemudian beralih pada metode penelitian jenis literatur dengan beberapa teknik pengambilan data yang yang saya istilahkan sebagai data sekunder karena tidak langsung pada penemuan data primer di lapangan. Pertama yang saya tanyakan disini untuk ukuran informasi data yang tadi diambil dari beberapa sumber literatur baik itu dari *e-journal*, kemudian ada *webiste*, dan beberapa literatur lainnya itu, bagaimana cara peneliti untuk mengetahui bahwa data itu sudah cukup dan mewakili untuk menyimpulkan sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian yang peneliti tuliskan. Jadi bagaimana mengukur bahwa data itu sudah mewakili dan sudah dirasa sudah cukup menjawab atas pertanyaan penelitian itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini karena studi budaya dan berkenaan langsung tentang proses bagaimana masyarakat itu sendiri membentuk budaya, terkait tentang benda-benda budaya; yang jelas ini artefak-artefak dalam bayangan saya ini adalah hasil karya dari masyarakat adat di negeri di Ambon. Untuk menggali informasi bagaimana artefak artefak atau benda-benda budaya ini dihasilkan; kemudian mereka meyakini Ini adalah sebuah benda yang memiliki nilai-nilai ini, apabila digali informasinya dengan menggunakan literatur, ini mungkin perlu kita perlu untuk menambahkan sebuah teknik penggalian informasi yang lainnya. Misalkan saja wawancara, salah satunya adalah

wawancara. Karena kalau hanya terpaku pada literatur yang sudah ada, barang kali ini masih bisa diragukan kevalidan data yang dikumpulkan melalui data sekunder tersebut. Kemudian tadi juga sempat disebut analisis konten atau analisis isi. Saya rasa ini penelitiannya lebih mengarah ke analisis konten. Karena ini melihat beberapa tampilan publikasi-publikasi dari website. Bagaimana sebuah website berita tentang benda-benda budaya ini yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat, dan kemudian peneliti mengambil sebagai data informasinya. Yang terakhir, terkait tentang uji kevalidan data atau bagaimana data itu bisa di triangulasikan atau dibandingkan, disandingkan dengan sumber-sumber yang lainnya. Kalau misalnya Profesor Sugiono menyebutkan ada triangulasi sumber, metode atau teknik dan juga waktu. Mungkin ini nanti juga peneliti bisa memasukkan salah satu atau dua dari teknik triangulasi tersebut untuk menguji atau memastikan keakuratan atau kevalidan data informasi yang sudah didapat, misalnya tadi dari sumber jurnal itu tadi, bagaimana hal itu memiliki kesinambungan atau ada relevansinya dengan sumber yang lainnya seperti yang ditampilkan melalui *framing* website itu tadi.

DISKUSI

Abraham Wahyu Nugroho

Menanggap-balik Ichmi Yani

Yang pertama memang sebenarnya *stand point*-nya bahwa penelitian ini tidak menggeser tetapi mencoba memperkaya dengan metode yang lain. Memang awalnya ini kalau kalau saya melihat lebih ke etnografi karena kita bicara tentang pola-pola kebiasaan budaya yang ada di masyarakat di Ambon; tetapi bukan berarti kemudian langsung berubah metodenya tetapi memang yang kami lakukan adalah mencoba memperkaya dengan metode yang lain. Ketika kami melihat bahwa studi literatur itu selama ini kita pahami sebagai salah satu tahapan atau prosedur penelitian, ternyata ada referensi yang menunjukkan bahwa mungkin bapak ibu yang hadir di ruangan ini dari sastra, mungkin ternyata juga bisa dipakai sebagai sebuah metode penelitian, tetapi memang masih pro kontra. Apakah dia bisa berdiri sendiri atau dia harus wajib dikombinasikan dengan metode lapangan, wawancara, focus group discussion dan sebagainya; tetapi paling tidak merujuk dari karya Durkheim tadi memang bisa jadi itu berdiri sendiri tetapi bisa juga tidak, tergantung, bagi saya, rumusan masalah, pertanyaan penelitian mengenai masalah yang dihadapi. Oleh karena itu sebenarnya ketika melihat kembali rumusan masalah ini masih pro-kontra, belum tentu perumusan masalah tentang aspek-aspek apa saja yang berkontribusi pada konservasi pada benda budaya kemudian terjawab melalui studi literatur. Tim peneliti berpendapat bahwa hal ini bisa terjawab dengan studi literatur tetapi paling tidak dengan metode studi literatur ini kami dapat memperkaya lagi, artinya informasi-informasi itu kemudian di-*cross check* dengan dengan data-data di lapangan nantinya, karena ini masih masih berproses. Belum sampai akhir penelitian. Kemudian

berapa jumlah literatur yang harus dicari karena kembali kami punya keterbatasan, kalau dari sisi kualitatif kan kita bicara tentang data yang sudah jenuh yang tidak ditentukan dari awal memang penelitian ini lebih mengarah ke proses mensintesis. Ketika *database* sudah ada kemudian kita dialogkan. Ada lima orang peneliti di sini mendialogkan satu persatu kemudian apakah masih ada yang kurang, kami mencari lagi. Memang sampai hari ini masih merevisi menulis merevisi menulis artinya kami belum sampai pada menentukan berapa jumlah literatur nanti akan kami putuskan. Memang ini masih menulis merevisi menulis. Kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaan tadi, ya memang kembali kami menegaskan bahwa ini lebih cocok ke *interactive method*. Karena kami memang sudah merencanakan seperti itu: bertemu dengan orang-orang, melakukan wawancara dan sebagainya. Menurut saya begini, ketika kita bicara mengenai studi literatur tadi, dalam hal ini agak berbeda kalau saya melihat penjelasan mengenai *content analysis* yang lebih ke teks media, lebih mengenai apa yang disampaikan media, mau media massa, media sosial; tapi ini lebih ke sesuatu yang lebih dari media. Di situ ada hasil penelitian orang lain, atau yang terdahulu, kemudian di situ ada berita juga. Jadi memang cakupan studi literatur ini, berdasarkan buku referensi yang saya baca, memang luas sekali, tidak hanya membatasi pada salah satu media saja. Apapun itu kali itu relevan dimasukkan ke *database*, kemudian lakukan identifikasi, lakukan sintesis, kemudian munculkan kesimpulan dan kesimpulan itu nanti masih bisa diperdebatkan lagi.

Dedi Adhuri

menanggapi Aloysius Gunadi Brata

Menanggapi tanggapan dari Pak Aloysius tadi. Terima kasih pak Aloysius. Tanggapan yang bernas dan menurut saya tepat juga, dan juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dan pernyataannya merupakan bagian yang sedang saya garap termasuk sebenarnya dengan mas Henry juga, pertanyaan-pertanyaan itu menjawab persoalan-persoalan tadi yang diangkat. Jadi saya tidak akan merespon semua poin yang diangkat tadi tapi beberapa hal saja yang menurut saya menjadi isu pondasi. Yang pertama bahwa benar praktek-praktek seperti itu yang di Selayar, itu banyak dilakukan oleh banyak komunitas Indonesia. Tadi saya juga berkesempatan menampilkannya pada saat saya membahas presentasi bu Yovita. Itu banyak di tempat lain di Indonesia. Pendekatan seperti itu merupakan pendekatan yang sekarang sedang banyak digarap, dipromosikan, dikembangkan di berbagai negara berkembang dan meskipun, yang menarik, negara seperti Jepang juga mendapat menggunakan pendekatan itu. Jadi malah mereka sudah lama misalnya memberikan hak kelola untuk perairan pesisirnya kepada komunitas-komunitas pesisir dalam bentuk yang mereka sebut dengan FCA, Fisheries Cooperative Asssocation. Jadi sayangnya di kita pengakuan hukum masih tersendat-sendat, apalagi di realitas bawahnya, secara legal formal terbatas, *acknowledge* dari pemerintah terbatas, seperti saya tunjukkan tadi, meskipun *de facto*-nya, dalam prakteknya itu sudah banyak dilakukan di komunitas pesisir. Saya sedang membantu dalam 3 tahun terakhir ini misalnya di Papua dan di Maluku ada LSM yang sudah membantu komunitas lebih dari 200 desa, pemerintahan desa atau sejenisnya dengan nama yang berlainan di Papua dan di Maluku itu yang sudah punya perdes seperti yang saya tunjukkan di Selayar itu. Jadi *de facto* di level komunitas sudah banyak dilakukan. Wujud ini sebenarnya itu menunjukkan juga dinamika yang terjadi di komunitas sendiri terhadap pengaturan di

peisir nya itu, baik karena adat itu bergerak, ada dinamikanya, ada perubahan perubahan internal yang terjadi di komunitas sendiri karena *social dynamics* maupun karena tuntutan dari luar ya, maupun sebenarnya dorongan dari berbagai macam LSM yang, menariknya, di dalam mereka menguatkan praktek-praktek itu, mereka juga meng-*endorse* elemen-elemen baru yang berkesesuaian dengan dinamika modern sains, dan *resources* yang mereka miliki sendiri. Jadi ada dinamika seperti itu.

Andreas Pandiangan

kepada Dedi Adhuri

Di dalam pengaturan sudah ada semacam pengaturan sejak masa kolonial Belanda.

Dedi Adhuri

Menanggapi Andreas Pandiangan

Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya pengaturan Belanda itu bukan pengaturan yang dilakukan oleh Belanda tetapi mereka melakukan sebenarnya sebagai penyelesaian atas konflik terkait dengan hak penempatan sero di komunitas. Kemudian itu secara implisit menjadi pengakuan praktek *ownership* terhadap wilayah di mana orang-orang menaruh sero itu diketahui yang berlaku di masyarakat, kemudian juga diketahui oleh pemerintah kolonial. Jadi yang saya rujuk tadi adalah dokumen yang merupakan penyelesaian atas konflik-konflik kepemilikan dalam hal wilayah yang menjadi lokasi penempatan sero, kalau dalam konteks Selayar. Di Maluku ada beberapa dokumen sejenis juga yang pada intinya sebenarnya kajian tentang sejarah praktek-praktek pengolahan sasi di Maluku, dikatakan bahwa sebenarnya revitalisasi sasi pada abad, kalau tidak salah ingat, ke-17 itu merupakan kerjasama antara pemerintah kolonial dengan elit lokal yang pada saat itu pemerintah kolonial berkepentingan untuk menarik pajak atas praktek-praktek panen sumber daya alam, sementara elit lokal butuh sumber kekuasaan

baru, yang dalam konteks itu, yang didapat dari pemerintah kolonial karena terjadi mulainya pengenduran *compliance* dari masyarakat adat, dari rakyatnya lah kurang lebih. Jadi ada keterlibatan pemerintah kolonial dalam desain atau implementasi praktek-praktek yang kita kemudian masukkan ke dalam wacana pengolahan berbasis tradisi. Sebenarnya ini juga merefleksikan tadi jawaban terhadap pertanyaan pak Aloysius bahwa ada dinamika internal terhadap praktek-praktek seperti ini yang disebabkan oleh *internal dynamic* oleh komunitas sendiri maupun pengaruh dari luar.

Trihoni Nalesti

kepada Dedi Adhuri

Terhadap presentasinya Pak Dedi karena sedikit banyak ada interseksinya dengan apa yang kami bahas di Ambon begitu, Saya, pak Pandiangan, Mas Ryan ada di sini, saya melanjutkan saja pertanyaan Pak Pandiangan tapi sebenarnya tadi sudah dijawab oleh pak Dedi. Pak Dedi juga sudah punya banyak pengalaman empirik di Ambon. Memang Kami menemukan di beberapa *staatblad* terutama yang kami telusuri terus sejak tahun 1921, ada semacam penguatan terhadap hukum adat oleh pemerintah kolonial Belanda tapi memang penguatan adat ini dilakukan dalam rangka, seperti pak dedi disampaikan karena ada pelemahan *compliance*. Jadi penguatan adat itu terjadi karena sebenarnya pemerintah kolonial Belanda itu kan hanya punya sumber daya sedikit begitu, kan dia membutuhkan tenaga kerja yang murah, bahkan yang membiayai mereka sendiri, dan kemudian mereka membutuhkan sumber daya itu untuk pengelolaan negeri-negeri adat di Ambon. Memang kemudian terkesan bahwa pemerintah kolonial Belanda ini dia melakukan penguatan terhadap hukum adat yang kemudian di era orde baru itu justru, seperti tadi Pak Dedi menyampaikan, ada marjinalisasi terhadap masyarakat adat oleh undang-undang No 5 tahun 1979 sehingga masyarakat Maluku

sendiri memberikan penghargaan yang cukup tinggi pada pemerintah kolonial Belanda yang dianggap mereka yang ikut memelihara adat mereka yang kemudian pemerintah Orde Baru yang justru merusaknya. Ini sangat menarik sekali. Maka pertanyaan yang kemudian muncul misalnya di Selayar ini dalam pengelolaan sumberdaya terutama sumber daya lautnya ini, tadi yang saya tertarik oleh Pak Dedi adalah ada semacam kompromi dulu sebelum melakukan pengelolaan sumber daya lautnya. Tapi yang terjadi di Ambon ini, dalam pengamatan kami dari beberapa hasil wawancara kami, tidak terjadi demikian. Lebih banyak pada negara mengakui dulu seperti yang di hutan-hutan adat sementara ini di hutan adat yang ada di negeri di Ambon yang ini ada 22 negeri yang diakui oleh Kementerian lingkungan hidup hutan adat itu hanya ada di dua negeri negeri sementara di negeri hukurila dan di negeri hutumuri. Dengan pengakuannya ini barulah kemudian masyarakat ini dianggap mempunyai hak atas hutan adat itu, padahal kalau kita melihat bahwa sebenarnya penguasaan petuanan atau hak ulayat masyarakat adat ini sudah ada sejak negara ini sendiri ada tetapi ternyata sekarang ini membutuhkan pengakuan dari negara untuk kemudian bisa menikmati hak-hak tersebut. Ini realitas yang terjadi di Ambon saat ini. Bagaimana realitas itu saya tadi tertarik yang terjadi di Selayar bahwa mereka masih mempunyai hak alamiah ini bahkan mereka mempunyai kekuasaan atau otonomi untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah daerah, lalu kemudian dalam pengelolaannya akan dikompromikan bersama-sama. Kalau yang terjadi di Ambon, dalam pemahaman saya, terjadinya tidak seperti itu. Jadi justru pemerintah daerah ini mempunyai kekuasaan yang cukup tinggi untuk kemudian seolah-olah memberikan pengakuan yang seharusnya pengakuan itu sudah ada pada masyarakat adat itu sendiri sebelum adanya pengakuan dari negara. Pertanyaan saya ini. Kira-kira kok kondisinya berbeda. Di Selayar, mereka

otonominya jauh tinggi daripada otonomi pada negeri-negeri yang ada di Ambon.

Dedi Adhuri

kepada Trihoni Nalesti

Menarik. Itu juga merupakan isu besar. Mungkin saya perlu mempertegas tentang posisi di Selayar. Yang kuat itu, di level *de facto*, adalah karena masyarakat mengimplementasikan Aturan itu sampai kepada pemerintah desa saja. Untuk naik ke atas itu, apa yang dilakukan oleh penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih sulit. Jadi kalau kita kembali ke salah satu “tulang” (dalam *fishbone fishcollab*) itu ada *policy analysis*. Kita melakukan analisis kebijakan untuk melihat posisi *formal legal*-nya mengenai praktek pengelolaan berbasis komunitas atau adat. Sebenarnya berbagai macam peraturan perundangan sudah ada, termasuk misalnya permen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengakuan dan perlindungan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Tapi yang dipakai oleh pemerintah daerah; atau kelemahan dari peraturan perundangan yang meng-*acknowledge* seperti yang tadi dikatakan bu Yustina. Harus ada Pengakuan dari pemerintah dulu. Dan mengurusnya itu sangat administratif dan *njlelimet*, dan bisa dipastikan komunitas setempat tidak bisa mengurusnya dengan pengurus itu secara sendiri tanpa dukungan oleh pihak luar, kebanyakan oleh LSM. Itu satu. Yang kedua, sekarang pemerintahan daerah di kabupaten khususnya, cenderung cuci tangan karena undang-undang pemerintah daerah mencabut hak kelola mereka, 0-4 mil, sepertiga dari wilaha 12 mil, yang tadinya di undang-undang pemerintahan daerah tahun 1999 yang memberi hak mereka untuk mengolah sepertiga perairan pesisir sampai 12 mil itu, sisanya pemerintah kabupaten dan provinsi dan sekarang semua kewenangan sampai 12 mil di tangan pemerintah provinsi sebagai alibi untuk lepas tangan dari pengaturan keterlibatan mereka dalam pengelolaan pesisir. Jadi

memang di level formal legal itu masih lemah posisinya karena peraturan perundangan masih berbasis pada pengakuan dengan kriteria yang tidak mungkin dipenuhi oleh komunitas sendirian. Yang kedua, di level pemerintahan dari daerah sampai pusat masih ada tarik menarik dan keengganan sebenarnya terhadap pengakuan itu. Nah yang ini merupakan *battleground* dari gerakan advokasi hak masyarakat pesisir, kebetulan saya terlibat sendiri, termasuk di dalamnya hak masyarakat adat itu, karena kalau undang-undangnya tidak dirubah bisa dipastikan akan ada *bottleneck*, tidak akan terwujud praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas itu yang benar-benar dilindungi dan di-*acknowledge* oleh peraturan perundangan atau oleh negara. Tadi saya contohkan, prakteknya meskipun ada pengakuan itu hanya ada tigapuluhan saja dari ribuan praktek-praktek berbasis komunitas itu karena hambatan-hambatan itu. Yang ingin saya tambahkan, ada masalah juga di masyarakat adat terkait dengann ini, konstruksi peraturan perundangan mengacu kepada konstruksi tertentu dari sistem peraturan atau sistem pengelolaan atau sistem *governance* yang ada di adat itu, padahal sudah ada dinamika internal di dalam komunitas yang sendiri sedemikian rupa sehingga konstruksi yang dibuat oleh pemerintah itu tidak kompatibel lagi di dengan realitas yang ada di komunitas adat ini. Di Maluku Tengah, Maluku Tenggara misalnya ada peraturan dari pemerintahan provinsi dan kabupaten pun untuk kembali ke sistem pemerintahan tradisional: “negeri” kalau di Maluku Tengah, dan “ohoi” di Maluku Tenggara. Sampai sekarang banyak sekali pemerintahan desa itu tidak memiliki “raja” kalau di Maluku Tengah dan “orang kaya” di Maluku Tenggara karena mereka sendiri berebut, ada kontestasi adat di orang-orang ada di komunitas mengenai siapa yang seharusnya berhak menduduki posisi raja misalnya atau orang kaya di Kei. Itu mengenai akomodasi oleh konstruksi ke formal legal yang dibuat oleh negara saat ini, baik negara dalam pengertian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nampaknya memang harus

selalu didialogkan pendekatan yuridis normatif dengan yuridis sosiologis dan juga merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam riset-riset tersebut terkait kondisi di Ambon.

Henry Thomas Simarmata

Dalam proses 4 atau 5 tahun terakhir sebetulnya juga ada upaya sangat aktif menggunakan MK, Mahkamah Konstitusi. Ada banyak sekali putusan atau norma yang mungkin tidak dipakai dari MK (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). Salah sendiri kenapa tidak memakai MK. Prinsip-prinsip MK menetapkan bahwa yang boleh mengajukan gugatan adalah yang menjadi pemangku hak, dan demikian juga dalam pewujudannya. Salah satunya, penetapan mengenai komunitas berasal dari proses *review* mengenai perlindungan sumber budidaya tanaman. Itu jelas rujukannya yaitu komunitas. Komunitas selalu punya ciri *sustainable*, lestari. Jadi bukan komersial. MK dengan putusan perlindungan ini membuat rincian mengenai apa itu komunitas. Sebenarnya dengan dasar ini, dan komunitas ini tidak perlu pertama-tama “meminta” persetujuan negara karena posisi mereka sebagai pemangku adalah posisi “deklaratif”. Hal ini menegaskan posisi komunitas dalam beragam komunitas, bukan hanya dalam ekosistem maritim tetapi juga pedalaman, ekosistem kontinen seperti Kalimantan. Jadi ini proses “lebih sering memakai”. Dalam hal ini, pengakuan MK menempatkan komunitas sebagai “*law enforcement*” sejauh mengenai cakupan pemangkuannya. Hal ini juga menegaskan posisi deklaratif tadi. Tidak ada halangan untuk untuk menyusun suatu proses di level lokal. Mengenai kenapa hal ini tidak masuk dalam peraturan perundangan, ini masalah sesudah pengakuan komunitas tadi. Saya juga mengambil kasus omnibus Law yang mempunyai masalah dalam hal “penetapan” dan “pelepasan” berhadapan dengan komunitas. Ada “batas waktu” yang dipaksakan dalam yang bisa jadi masuk dalam wilayah komunitas. Ada juga potensi konflik lokal yang muncul dalam “penetapan” dan “pelepasan” yang

muncul. Pada akhirnya, hukum itu akan berguna jika dipakai, sering dipakai. Kalau tidak dipakai, hukum tidak akan berguna. Saya pikir inilah yang penting. Ada sekitar 14 *landmark cases* yang mengakui komunitas, dan itu itu menempatkan bahwa komunitas sebagai pihak.

Aloysius Gunadi Brata

kepada Dedi Adhuri

Saya tidak bertanya soal apa yang tadi disampaikan tetapi soal bagaimana kita bisa menghasilkan seperti itu. Kita tahu kalau berbincang antar disiplin itu sulit dan aneh itu. Kadang kalau saya di bidang ekonomi bicara lain, agak aneh begitu teman-teman ekonomi bicara kuburan. Saya ingin tahu mengenai proses kolaborasi antar disiplin begitu. Bagaimana itu berlangsung di lembaga pak Dedi. Adakah saran-saran yang aplikatif, yang kami bisa gunakan ketika mencoba masuk ke topik topik atau isu yang tidak bisa hanya satu disiplin saja.

Dedi Adhuri

kepada Aloysius Gunadi

Saya diminta untuk berbagi pikiran di Universitas Andalas dimana mereka ingin membuat penelitian dan sebenarnya pengajaran yang multidisiplin. Jadi di situ ada beberapa kiat yang saya rumuskan dengan mencontek beberapa referensi dan pengalaman saya. Dalam konteks ini, saya akan merujuk ke pengalaman saya. Jadi kami mulai terlibat dalam kerja kerja multidisiplin atau mungkin juga transdisipliner yaitu pada saat kerja untuk rehabilitasi pasca tsunami di Aceh. Jadi pada saat itu kita turun ke sana selain situasi natural ecosystem dan social system yang porak poranda, saya memang dipaksa untuk bekerja secara multidisiplin. Yang kedua banyak banyak konflik di antara pekerja-pekerja rehabilitas itu karena satu disiplin atau *single concern*; misalnya teman-teman LSM yang bergerak di bidang konservasi *keukeuh* kalau orang Sunda

bilang, memaksakan untuk mengutamakan pembangunan *coastal green belt* pada rehabilitasi pasca tsunami karena baik secara disiplin buat dalam pengertian kajian mereka dan *concern* mereka itu memang konservasi; harus diutamakan dalam perspektif mereka, *livelihood* harus mengikuti konservasi. Kalau alamnya tidak dikonsepsi, maka *livelihood* tidak akan berkembang. *Concern* yang bias disiplin tunggal itu. Menghadapi realitas seperti itu, kita dipaksa untuk bekerja sama dalam suatu proses implementasi project seperti itu. Misalnya dalam alam ilmu antropologi, kita dikenalkan kepada relativisme budaya dan segala macam yang memungkinkan kita memahami keberadaan cara berpikir yang berbeda-beda itu. Kemampuan itu yang kita dapat dari antropologi dimanfaatkan untuk menyelami perspektif masing-masing LSM yang bias dengan kepentingan mereka masing-masing dan mendudukan mereka di dalam ruang-ruang yang kemungkinan diskusi itu terjadi. Nah proses itu yang kemudian kita rumuskan secara formal dalam metode *fishcollab* itu. Jadi *concern* utamanya adalah ada persoalan yang memang mengharuskan semua orang untuk duduk bareng, tidak bisa sendiri-sendiri itu. *Approach* untuk menstimulai mengenai adanya problem yang memang harus ditangani bersama. Yang kedua, mengenai *leading agency*. Dalam ilmu sosial ada pemahaman bahwa ada *multiple truths* di dalam cara berpikir orang-orang itu; ada fasilitasi konektivitas diantara orang-orang yang duduknya berdasarkan *single* disiplin. *Leading agency* seperti ini dibutuhkan untuk membangun kerja kerja *transdisciplinary*. Dan saya kira, kita di ilmu sosial ini mempunyai kesempatan karena diperlengkapi melalui metode-metode yang kita pelajari di masing-masing untuk menyadari kelemahan masing-masing. Yang kedua, juga menyadari bahwa persoalan-persoalan tertentu itu hanya bisa di-*address* kolaborasi disiplin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang wacana pengelolaan sumber daya alam sekarang misalnya, wacana-wacana itu bergerak ke arah situ. Makanya sekarang orang bicara tentang *socio-ecological system*, di dalam

praktek-praktek wacana-wacana pengelolaan sumber daya alam. Orang-orang menyadari di level wacana sendiri bahwa *natural system* saja, yang artinya merujuk kepada disiplin-disiplin berbasis pemahaman *natural sytem* tidak cukup mumpuni. Mereka ada kesadaran bahwa dalam metode atau pemahamannya tidak secara komprehensif memahami *uncertainties* di dalam dinamika *resource, natural resources, natural ecosystem* sendiri apalagi *social system*nya makanya mereka bergerak untuk mengakomodasi *social system* dan *social scientist* juga untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sebaliknya, orang-orang *social science* juga menyadari bahwa kalau kita tidak bisa memahami dinamika *natural system*, kita tidak bisa juga untuk mendesain praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam. Tetap saja kita butuh *natural scientist* meskipun kita tahu bahwa dalam sejarah teori-teori pengelolaan sumber daya alam, awalnya memang *natural science* dulu ya, *social science* ikut di situ. Tapi saya kira sudah *blend* dua-duanya dalam pengembangan wacana maupun di dalam prakteknya. Mereka mendesain *natural resource management*. Jadi ada dukungan teoritis maupun dukungan di kebutuhan *riil*.

Yovita Indrayati

kepada Dedi Adhuri

Saya hanya sekedar *sharing*, dan kita berdiskusi persoalan mengenai metodologi penelitian yang multidisiplin, kemudian yang monodisiplin. Ini berdasarkan pengalaman praktik saya, sekian lama menjadi konsultan hukum di pemerintah, kemudian beberapa kali melakukan penelitian. bahwa pada dasarnya pada dasarnya, metode penelitian mau yang lintas disiplin atau yang multidisiplin, maupun yang moni disiplin itu ada pada tempatnya masing-masing. Ini berdasarkan pengalaman saya, dan juga disertasi yang saya buat mungkin lebih konkret. Karena yang saya paparkan adalah materi porses disertasi saya. Yang saya kerjakan itu tidak mudah dan

memang betul bahwa untuk meneliti ini saja itu saya butuh banyak ahli. Pertama mengenai biologi, jadi saya itu harus berdiskusi dengan dosen biologi UGM untuk memahami apa itu gen, apa itu sumber daya genetik, apa itu DNA. Hanya untuk memahami itu saja sebagai objek disertasi, saya itu butuh ahli. Kemudian yang kedua tentang obat. Obat itu apa sih, kemudian kalau berasal dari sumber daya genetik, saya diskusi dengan orang farmasi dan kedokteran. Kemudian setelah bicara bioteknologi, biosimilarity, itu akhirnya bicara dengan ahli bioteknologi. Jadi artinya dari 1 disertasi yang tulis yang kelihatannya itu hanya hukum, tetapi hanya untuk memahami objek sumber daya genetik objek obat itu, saya harus diskusi dengan banyak orang. Dalam disertasi saya sendiri ini sebetulnya kalau mau menggunakan metodologi penelitian, disini saya menggunakan multidisiplin maupun monodisiplin, tapi apapun yang terjadi disertasi saya itu karena memang berangkatnya monodisiplin, yang saya tonjolan mono disiplin. Mono disiplinnya di mana, saya harus menemukan pengembangan asas hukum tanggung jawab negara. Asas hukum tanggung jawab negara itu tercantum di undang-undang; itu yang saya analisis. Dari situlah, ketika meneliti asas hukum itu, memang mau tidak mau penelitian saya harus mono disiplin. Tetapi ketika nanti saya akan membantu dalam menyusun konsep, misalnya dalam hal peraturan desa, di sisi lain saya sejalan mengenai bahwa Indonesia itu mestinya tidak menggunakan sistem peraturan yang seperti sekarang yang unifikasi karena apa, karena kita itu beragam. Jadi malah justru sebetulnya sistem hukum kita itu yang paling cocok itu seperti Inggris itu, anglo-saxon itu ya, harusnya begitu kan. Karena banyak masyarakat adat kita, sebagai contoh peraturan desa; kalau untuk desa adat itu memaksakan kehendak bahwa hukum adat itu harus di-unifikasi dalam bentuk tertulis dengan format yang sama semua dan menjadi kaku padahal ciri hukum adat itu adalah fleksibel. Fleksibilitas yang sangat tinggi, akan sangat dinamis, mudah berubah mengikuti mengikuti perkembangan masyarakat adat

maka kenapa hukum adat itu pada umumnya tidak tertulis; kalau kita lihat aslinya. Tetapi kemudian dipaksakan menjadi tertulis. Ini memang menjadi persoalan di dalam sistem hukum dan itu memang jadi kritik saya di dalam disertasi saya itu. Jadi ini persoalan pada hukum positif kita.

Kemudian yang kedua yang menarik adalah ketika kita berbicara masyarakat adat. Terminologi masyarakat adat, kalau kalau kita lihat, kita belum ada kesepakatan. Kita belum ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan mengenai masyarakat hukum adat. Ada yang dikenal masyarakat adat, masyarakat hukum adat. Di Undang-Undang Cipta Kerja ada masyarakat lokal, ada masyarakat tradisional, ada masyarakat hukum adat. Ini memang beda-beda. Kalau masyarakat hukum adat itu memang dia punya hukum adat; kalau yang tidak punya hukum adat maka kemudian namanya bukan itu. Ini memang menjadi persoalan mengenai kesepakatan mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Itu memang harus ada kesepakatan dulu, yang harus dirangkum dalam satu bingkai hukum, disepakati bersama. Kemudian, Udin yang kedua persoalan metodologi penelitian, ketika kita akan membuat suatu kebijakan, ketika akan memutuskan bahwa mau mengeluarkan peraturan yang seperti apa mau tidak mau, tidak mungkin monodisiplin. Disertasi saya itu harus multidisiplin, tetapi ketika saya membahas persoalan asas tanggung jawab negara itu saya tidak mau multidisiplin karena disitu teorinya memang memang normatif sekali, dan itu memang menggunakan metodologi penelitian ilmu hukum yang mono disiplin. Artinya penggunaannya itu tergantung, mau penelitiannya seperti apa. Kalau Pak Dedi kan jelas yang akan sangat dibutuhkan masyarakat, pasti akan banyak ke multidisiplin. Kalau saya akan lebih pada pendalaman ilmu saya, maka harus mau tidak mau memang mono disiplin. Jadi penggunaannya saja.

Terakhir kenapa saya tertarik yang pertanyaannya sumber daya genetik. Kalau kita bicara sumber daya genetik dari segi

pangan, buat saya tidak ada tantangan. Mengapa, karena tidak serumit obat. Kenapa saya memilih obat, karena obat itu sangat rumit. Saya kasih contoh sederhana saja, ketika kita membahas soal vaksin dengan Covid-19, pertentangannya yang luar biasa. Mengapa untuk menghasilkan vaksin yang bisa disuntikkan pada masyarakat itu harus melalui satu tahapan yang panjang sampai ada uji klinis dan sebagainya. Sama dengan obat. Tapi pangan tidak begitu. Kalau kita bicara obat, itu tahapannya panjang. teknologinya sangat rumit maka kemudian ini menjadi persoalan yang menjadi persoalan yang luar biasa. Misalnya mengenai perihal komplikasi, persoalan kontra indikasi, tahapan diantaranya. Perlu ada literasi mengenai tahapan. Semisal mengenai herbal tapi itu apakah sudah berstandar, apakah itu sudah layak kalau dikonsumsi berbarengan obat-obat kimia. Nah itulah yang menjadi persoalan di Indonesia karena ini persoalan teknologi. Jujur saja, Indonesia itu, kalau menurut saya, kekayaan sumber daya genetik itu kalau dikelola dengan baik, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara terkaya di dunia, karena mega-biodiversity. Perlu pemikiran mengenai bagaimana mengelola sumber daya genetik, sebagai aset negara kita, untuk anak cucu kita.

Muhammad Reza

Diskusi sangat perlu diapresiasi karena membahas hal-hal, termasuk mengenai *commons*. Soal bagaimana *commons* ditetapkan sebetulnya sudah cukup ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi tetapi aturan di bawahnya yang sering kali menabrak. Termasuk juga mengenai *natural science* dan *social science*, itu sangat berguna bagi banyak pihak. Saya kira diskusi dan pertukaran pengalaman dan pikiran ini perlu didengar banyak pihak karena banyak sekali masukan yang tidak hanya secara substantif tapi juga cara praktis sangat dibutuhkan hari ini di Indonesia. Misalnya dalam situasi terlalu banyak kasus, yang sudah diputuskan, tetapi prosedur kebijakan yang dirubah, termasuk dalam ajudikasi soal air. Semua

sudah duduk ketetapanannya, tetapi operasinya tetap saja komersial. Terus juga apa yang sering disebut sebagai tren korporatisasi sistem dan badan publik. Badan publik beroperasi seperti swasta.

Soal Selayar tadi, praktek-praktek yang dalam adjudikasi air itu disebutkan bahwa itu lebih kuat posisi hukumnya karena dia bersifat deklaratif, dan bukan konstitutif. Jadi dia lebih dulu ada daripada misalnya undang-undang 27 termasuk undang-undang air belakangan. Saya kira ini sangat perlu untuk di seminarkan jadi pengetahuan yang lebih umum. Bagaimana sebenarnya mungkin menginformasikan proses-proses adjudikasi, ketetapan ketetapan hukum yang pokok itu kepada pemerintah daerah, ke pemerintah, itu juga yang sumber penting karena seringkali mereka tidak bahkan tidak tahu soal itu praktek dibangun, termasuk, yang di Selayar. Menarik banget itu untuk bisa di sini juga diterapkan di tempat lain. Mungkin kalau *panglima laot* (di Aceh) agak berbeda tapi secara kekuasaan politik mereka cukup punya kemewahan untuk bisa mengadopsi itu dalam undang-undang lokalnya.

Soal penegakan hukum tetapi. Saya dalam banyak sekali diskusi seminar selalu mengutip teman-teman di Yunani; ada gerakan merebut air yang sudah diprivatisasi. Mereka berbasis pada prinsip bahwa jika negara gagal menjalankan fungsi-fungsi publiknya, maka warga negara harus tampil untuk mengemban amanat publik itu. Mungkin bukan *civil disobedience*, tetapi *civil obedience*. Bagaimana gerakan-gerakan kewargaan untuk menjalankan amanat konstitusi yang dijalankan oleh otoritas publik. Artinya negara itu bukan Cuma pemerintah, tetapi warga negara juga harus masuk, dan harus berperan aktif. Artikulasi gerakan warga negara itu yang perlu dibangun. Saya kira itu perlu sekali interaksi dari dua sisi; juga perlu mendengar. Dari tadi banyak sekali poin-poin penting mengenai bagaimana hukum kita beroperasi.

BAHASAN SIMPULAN

Henry Thomas Simarmata

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kita semua karena bahasan kita sebetulnya menyentuh apa yang kita sebut sebagai “situasi batas”. Jadi bahasan kita memang persis menyentuh ya hal-hal yang penting (*critical*) yang akan berdampak besar dikemudian hari; yang dapat terlewat begitu saja jika tidak dilakukan kajian mendalam. Akan menjadi suatu *abuse of responsibility*, jika kita, yang sudah menerima harta yang luar biasa, tidak menyertai harta tersebut dengan tanggung jawab yang sepadan. Bahasan ini cukup kuat dan penekanan mengenai “ini kritis”, “ini kritis”, ini saya kira menjadi titik penting terkait masukan-masukan kita yang penting ini. Yang kedua mengenai metodologi itu sendiri, dari berbagai pengalaman, jadi bukan hanya dari sudut keilmuan saja, ada banyak pengetahuan yang sebetulnya masih harus digali. Kalau istilahnya Immanuel Kant “what is to know”. Sebetulnya apalagi sih yang belum kita tahu. Ketika kita cari tahu, ternyata banyak yang kita tidak tahu dan itu terbukti dalam proses kolokium kita. Jadi saya pikir ini sebuah proses yang cukup penting dalam knowledge management, yaitu “tahu dulu” menjadi dasar. Ini penting sebelum kita menganalisa. Kita koleksi dulu, *record* dulu. Itu yang menjadi pekerjaan rumah. Barulah dari sana tumbuh proses mengkaji dan membangun studi yang sepadan.

SESI 4
RABU, 14 JULI 2021
13.00-16.00

1. PEMBUKA SESI

2. AGENDA BAHASAN

Paper dan bahasan:

Pembahasan pembuka, Trihoni Nalesti

Aloysius Gunadi Brata, *Kuburan, Segregasi Kelas dan Bisnis Penguburan*

Heronimus Heron, *Pahlawan dan Imaji Nasionalisme Indonesia*

Penanggap:

Abraham Wahyu Nugroho menanggapi Heronimus Heron

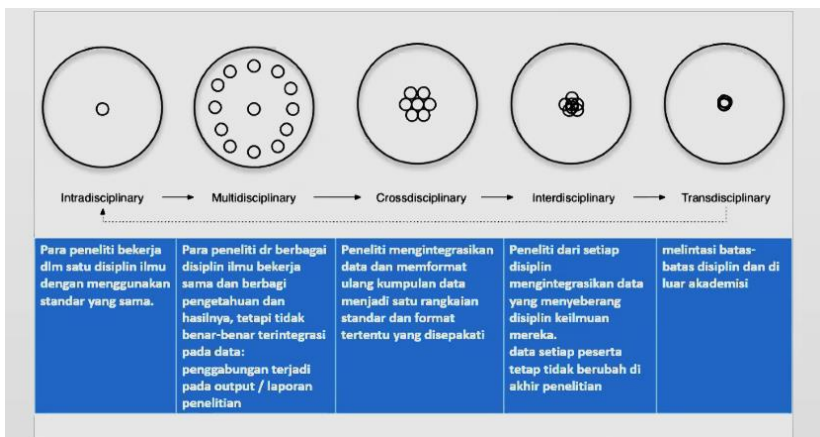
Damasus Ferix Loys Hermawan menanggapi Aloysius Gunadi Brata

3. BAHASAN DAN DISKUSI

BAHASAN PEMBUKA

Trihoni Nalesti

Saya sedikit saja merefleksikan dari apa yang sudah dibahas dalam sesi 1 sampai dengan 3. Saya mencoba untuk langsung mencari tahu apa itu intradisiplin, multidisiplin, *Cross*-disipliner, interdisiplin, dan transdisiplin dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini juga terkait erat dengan *knowledge management*, manajemen pengetahuan. Jadi dalam proses penelitian, kita melakukan *knowledge management*. Secara epintas, saya melihat bahwa ada beberapa manajemen pengetahuan, sebagai berikut:



Penelitian dengan pendekatan yang mono-disiplin mengandaikan bahwa para peneliti itu bekerja sama dalam satu disiplin ilmu yang sama sehingga akan menggunakan standard dan metode yang sama. Dia tidak perlu memformat ulang data-data yang mereka miliki.

Dalam diskusi, tadi ada pendekatan yang sifatnya multidisiplin. Dalam pendekatan multidisiplin, para peneliti dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama dan berbagi pengetahuan dan

hasilnya; tetapi mereka tidak benar-benar mengintegrasikan data-datanya. Datanya tetap menjadi data-data domain disiplin ilmu itu sendiri; dan penggabungan itu nanti terjadi lagi pada saat membuat laporan penelitian dan outputnya.

Lalu ada yang sifatnya *cross*-disiplin. Peneliti mengintegrasikan data dan memformat ulang kumpulan datanya sehingga menjadi sebuah standar yang tertentu yang disepakati bersama. Saya tangkap seperti itu.

Lalu ada pendekatan yang sifatnya interdisipliner. Peneliti dari setiap disiplin mengintegrasikan data-datanya; dari data yang diintegrasikan, ada proses sampai menyeberangkan mereka kepada disiplin keilmuan mereka. Jadi agak *blended*. Data setiap peserta tetap tidak berubah tapi di akhir penelitian dirumuskan.

Yang menarik adalah trans-disipliner. Dia adalah sebuah kajian yang berangkat dari perspektif berbagai ilmu pengetahuan dan dia menghasilkan sebuah keilmuan baru. Biasanya dia akan bekerja tidak hanya dari perspektif akademik, bisa jadi akan bekerja dengan misalnya di luar akademisi. Itu biasanya ini akan terkait dengan para pemangku kepentingan yang lain.

Mudah-mudahan nanti kita akan saling memperkaya pemahaman kita terkait dengan pemaparan tersebut.

Dari gambarnya, kita sudah sudah bisa menduga begitu ya; ini hanya kajian yang sifatnya hanya monodisiplin; di sini dia menggunakan intra disiplin, ini multidisiplin tetapi mereka tidak ada persekutuan yang jelas. Beda dengan *cross*-disiplin ini sudah semakin apa namanya sudah semakin rapat dan interdisiplin ini semakin dalam lagi dan kemudian yang transisi ini hanya menghasilkan suatu keilmuan yang tidak lagi jelas disiplin ilmunya apa, namun jelas memunculkan keilmuan yang baru. Saya memandang prosesnya kira-kira akan seperti itu.

Kuburan, Segregasi Kelas dan Bisnis Penguburan¹⁷

Aloysius Gunadi Brata
MINDSET Institute & Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: aloy.gb@gmail.com

1. Pertanyaan Penelitian

Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati, dengan beragam alasan atau penyebab. Demikian hukum alam yang masih berlaku sampai sekarang dan sejauh ini belum bisa untuk ditolak. Maka, begitu pula manusia, tidak peduli siapa dia, apapun latar belakangnya, termasuk dari mana asal usul kelas sosialnya, pada akhirnya masing-masing akan mati dan menjadi jenazah. Masing-masing manusia hidup dapat menjadi jenazah di mana saja, di rumah sendiri, di rumah sakit, di jalan, di segala tempat. Namun, tidak peduli di manapun lokasi peristiwa seorang manusia menjadi jenazah, ada lokasi lain yang kemudian menjadi tujuan si jenazah. Lokasi lain ini menjadi tempat akhir bagi sosok jenazah untuk bertempat tinggal, dan umumnya membusuk seiring dengan proses alam.

Tentu disadari bahwa setiap masyarakat mempunyai tradisi atau kebiasaan soal tempat akhir bagi jenazah. Tradisi ini bisa saja berbeda-beda antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama dipandu oleh keyakinan agama (beragama), hampir semua jenazah akan berakhir di liang lahat di kuburan. Memang ada jenazah yang mungkin berakhir menjadi abu di krematorium, tempat pembakaran

¹⁷ Bahasan ini merupakan kajian mengenai “kuburan” yang dikerjakan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang.

jenasah, tetapi ini hanya sebagian kecil saja. Oleh sebab itu, kuburan menjadi sesuatu yang penting bagi manusia yang memiliki latar belakang sosial berbeda-beda.

Yang kemudian menarik untuk diperhatikan adalah apakah kematian menjadi titik awal hilangnya asal kelas sosial dari sang manusia yang menjadi jenasah? Terhadap pertanyaan demikian, sayangnya, kita lebih sering dihadapkan pada kenyataan, atau setidaknya kemungkinan, bahwa justru, dan sering kali terjadi, pada tahap pascakematian inilah asal kelas sosial dari si jenasah dipertegas, dipamerkan, atau mungkin juga digugat. Maka, kuburan pun, bagi sesosok jenasah, bisa menjadi penanda ada atau tidaknya, atau parah atau tidaknya praktik segregasi kelas sosial (*class-social segregation*) melingkupi suatu masyarakat.

Segregasi kelas yang dialami seseorang sebelum dirinya menjadi jenasah dan setelah orang tersebut menjadi jenasah dapat diamati misalnya dari keberadaan kuburan di mana sosok jenasahnya akhirnya bertempat tinggal. Segregasi tersebut kini tampak makin difasilitasi pula dengan begitu maraknya bisnis penguburan. Ada anekdot yang inti ceritanya adalah bahwa bisnis penguburan adalah bisnis yang permintaan pasarnya tidak pernah lekang oleh segala krisis, entah resesi ataupun siklus bisnis. Mengapa demikian? Tidak lain karena kematian bisa terjadi di segala situasi, dan keinginan untuk dikuburkan secara berkelas itu, berbeda dari yang lain, selalu ada dari jaman ke jaman.

Tulisan singkat ini mencoba sedikit melihat kembali darimana segregasi kelas dalam kaitannya dengan penguburan tersebut berasal-usul, terutama berangkat dari sejarah semasa kolonial. Setelah itu coba digambarkan sejumlah fenomena bisnis lahan kuburan mewah di Indonesia sebagai penanda bahwa segregasi kelas di urusan penguburan ini berlanjut dan justru menjadi komoditi pasar. Bagian berikutnya mencoba melihat persoalan yang sama, tetapi lebih pada kelompok kelas rendah.

Beberapa catatan kemudian dimuat di penutup.

2. Kajian Teori dan Metodologi

Segregasi kelas sebelum dan setelah mati

Segregasi kelas yang dialami sesosok jenazah manusia sangat mungkin merupakan kelanjutan dari pengalaman segregasi ketika manusia tersebut belum menjadi jenazah, alias ketika yang bersangkutan masih hidup. Dalam kalimat lain, sosok hidup dan sosok mati tidaklah menjadi terputus secara sosial. Ada status sosial yang menjadi penghubung kedua situasi yang tampak terpisah tersebut. Oleh sebab itu, untuk memahami ini kiranya tidak perlu untuk sedikit menelisik kembali apa sebenarnya dimaksud dengan segregasi kelas tersebut yang dalam banyak hal tampaknya lebih terasa di lingkup perkotaan.

Segregasi kelas diakui merupakan topik yang telah lama mendapatkan perhatian. Segregasi kelas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemilahan atau pemeringkatan berdasarkan sistem hirarki yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjuk kepada atribut- atribut kelas yang mudah dikenali seperti pekerjaan, gaya hidup, pola belanja, sikap, maupun perilaku. Ketika seseorang menilai manusia lain memiliki atau menunjukkan atribut- atribut kelas yang berbeda dengannya, maka sejak saat itulah seseorang dan manusia lain itu sudah berada dalam kelas yang saling berbeda, dan dengan demikian manusia lain ini telah disegregasikan oleh seseorang itu. Dari sisi spasial, kendati pun segregasi ini juga terjadi di perdesaan, namun gejalanya diyakini lebih kuat ditemukan di perkotaan (Ischak, dkk. 2018).

Dari aspek historis, masyarakat perkotaan di Indonesia, menurut Colombijn & Barwegen (2009), telah distratifikasi berdasarkan etnis, kelas, dengan gender dan usia yang bersaling-silang dengan kelompok-kelompok etnis dan kelas. Dengan fokus pada permukiman perkotaan pada masa kolonial, Colombijn &

Barwegen menyimpulkan bahwa temuan mereka lebih mendukung tesis from-race-to-classsegregation, bukan the class-segregation-throughout-decolonization thesis. Postulat dari from-race-to-class segregation thesis adalah perubahan pola-pola permukiman di Indonesia, dari semula berbasis etnis, lalu bercampur dengan etnis yang lain dan kelas menengah pinggiran kota (sub-urban); termasuk yang semula “kota Eropa” dan “penduduk asli”, sering digantikan oleh wilayah-wilayah kelas atas dan kelas bawah yang terdiferensiasi baik secara kultural maupun sosial tersebut sangatlah dipengaruhi oleh sistem status sosial. Dan pergeseran ini telah mulai terjadi sejak tahun 1942 yang mana makin menjadi kuat selama masa pendudukan Jepang dan makin cepat bergeser setelah Indonesia merdeka. Adapun menurut class-segregation-throughout-decolonization thesis, pola permukiman di zaman kolonial telah dipengaruhi baik oleh kelas maupun ras dan terus berlanjut sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dari apa yang disampaikan Colombijn & Barwegen (2009; lihat juga Tidey 2012), kita dapat melihat bahwa segregasi kelas itu dapat dilihat dari pola-pola permukiman karena pola-pola ini dapat terjadi berdasarkan perbedaan kelompok atau kelas. Segregasi permukiman ini, menurut Dorling (2014) adalah distribusi diferensial kelompok berdasarkan ruang dan biasanya dipahami dalam bagaimana berbagai kelompok bertempat tinggal di lingkungan-lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan dalam hal pola-pola permukiman ini antar kelompok ras dan kelas menunjukkan adanya jarak sosial (*social distance*). Antarwarga dari kelompok yang berbeda menjadi memiliki jarak sosial yang dapat saja termanifestasikan dalam berbagai rupa interaksi.

Secara lebih luas maka dapat dikatakan bahwa asal usul segregasi kelas tersebut, dalam konteks Indonesia, memiliki sejarah yang tidak pendek. Ini dipercaya tidak luput dari praktik kolonial, khususnya Hindia Belanda. Maka kita pun mengetahui bahwa ada

kampung-kampung seperti Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Keling, Kampung Jawa dan lain sebagainya. Sampai sekarang kampung-kampung tersebut kiranya masih bisa ditemukan kendati di dalamnya mungkin tidak lagi melulu berisi satu kelompok suku saja.

Apakah segregasi kelas ketika hidup ini juga berlanjut ketika seseorang mati? Kita tentu bisa menemukan jejak pekuburan jaman kolonial di Indonesia, terutama di kota-kota besar kita. Mungkin kuburannya sendiri sudah tidak ada, atau tidak sempurna lagi, tetapi area kuburannya masih ada dan bahkan dapat juga menjadi obyek wisata. Di Kebun Raya Bogor misalnya, terdapat kuburan 42 orang penting di jaman Hindia Belanda (*Kompas*, 26/5/2007). Makam-makam tersebut berada di Bogor tidak lain karena tidak lepas dari ketentuan kala itu yaitu bahwa Gubernur Jenderal Belanda diwajibkan bertempat tinggal di Bogor yang dulu bernama Buitenzorg. Disebutkan dalam berita *Kompas* tersebut bahwa ketetapan tinggal di Bogor tersebut adalah berasal dari Kerajaan Belanda kala itu. Yang mencetuskan gagasan ini adalah GW Baron van Imhoff, mantan Gubernur Jenderal, yang kemudian diperkuat dengan saran dari Daendels. Sudah pasti, ketentuan ini berimplikasi juga kepada para ajudan atau staf pendukung sang Gubernur Jenderal sehingga mereka ini juga harus bertempat tinggal di Bogor.

Dan karena alasan tempat tinggal inilah lantas dibuat juga area pekuburan untuk para Gubernur Jenderal dan para pejabat tinggi Hindia Belanda lainnya. Nama-nama pejabat Hindia Belanda yang dikuburkan di area itu antara lain adalah Gubernur Jenderal DJ de Eerens dan Ary Prins, juga ahli ilmu burung (Ornitologis) Heinrich Kuhl, dan JC Van Hasselt dari Commission for Natural Sciences, serta AJGH Kostermans seorang ahli botani Belanda.

Museum Nasional atau biasa disebut sebagai Museum Gajah di Jakarta juga merupakan bekas area kuburan jaman kolonial yang dulunya bernama Kebun Jahe Kober (*Wartakota.tribunnews.com*, 7/11/2019). Awalnya, area kuburan ini hanya untuk kaum

bangsawan dan pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) atau Batavia, tetapi akhirnya diperbolehkan juga untuk masyarakat biasa dengan membayar biaya tertentu. Ini berarti bahwa area pekuburan yang semula untuk kalangan terbatas dan elit, belakangan menjadi lebih bercampur.

Dua lokasi pekuburan di atas hanyalah contoh karena pasti ada banyak lokasi serupa di tempat atau kota lain di Indonesia. Yang jelas, bila dilihat dari soal segregasi kelas, kuburan yang ada di Kebun Raya Bogor maupun di Museum Gajah dapat menjadi contoh adanya segregasi kelas, baik antar orang Belanda sendiri yang tinggal di Hindia Belanda, maupun antara orang Belanda dengan penduduk lokal Hindia Belanda. Namun antara kuburan di kedua lokasi tersebut terdapat perbedaan, yaitu bahwa di Museum Gajah segregasi sosial pascahidup seseorang agak berkurang, kendati pun jelas bahwa hanya jenazah yang sebelumnya berstatus sosial-ekonomi mampu saja yang bisa dikuburkan di sini karena harus membayar; sedangkan di Kebun Raya Bogor adalah hanya untuk pejabat tinggi Hindia Belanda sehingga jejak segregasi kelasnya lebih tajam, lebih terasa segregasi rasialnya.

Praktik segregasi kelas di pekuburan semacam ini tentu juga terjadi di tempat lain. Ada baiknya sedikit melongok dulu persoalan ini dari pengalaman negeri lain. Di Amerika di akhir 1800-an dikenal apa yang disebut hukum Jim Crow yang menempatkan warga Amerika keturunan Afrika sebagai warga kelas dua. Tentu saja hal ini berlaku juga pada urusan kematian dan penguburan, dengan tujuan menegaskan supremasi kulit putih dalam berbagai urusan, demikian menurut Terri William dalam tulisannya berjudul "*Jim Crow and African-American Cemeteries and Burial Practices*". Di masa perbudakan itu, para pemilik lahan pertanian seringkali memberikan kesempatan kepada budaknya untuk dikuburkan di areal pertanian tempatnya bekerja, berikut penggunaan tradisi Afrika mereka. Artinya di lahan pertanian tersebut berlangsung

segregasi rasial dalam hal penguburan di mana para budak dikubur di lokasi yang terpisah dari para pemilik lahan.

Ditambahkan oleh William bahwa di tahun 1897, sebuah ketentuan baru diterapkan, yakni ideologi “terpisah tetapi setara” di mana segala hal terkait kematian dan penguburan menjadi urusan yang secara resmi dipisahkan berdasarkan ras. Dalam peraturan segregasi ini, disebutkan bahwa warga Amerika keturunan Afrika dapat dikuburkan secara bermartabat dengan dimungkinkannya melaksanakan tradisi penguburan menurut adat-istiadat mereka sendiri. Area-area kuburan warga Amerika keturunan Afrika ini banyak yang sudah tidak ada lagi, tetapi ingatan tentang hal ini menegaskan bahwa jenazah seorang keturunan Afrika pun masih dipaksa untuk menerima diskriminasi dan rasisme yang telah dialaminya ketika hidup, yakni tetap sebagai warganegara kelas dua.

Di Kanada, cerita yang mirip juga ditemukan (CBC News, 8/2/2017). Secara tajam disebutkan bahwa ini seperti situasi di mana “bahkan setelah mati pun, tetap ada segregasi”. Hal ini ditemukan oleh peneliti sejarah orang-orang Afrika di Nova Scotia, yaitu bahwa rasisme yang sistemik pun terjadi dalam urusan setelah mati, sebagaimana tampak dari kuburan-kuburan di salah satu provinsi Kanada ini. Persisnya adalah bahwa di banyak kuburan, penduduk kulit hitam hanya boleh dikuburkan di bagian pinggir, bahkan dalam beberapa kasus benar-benar dikucilkan. Menarik ditemukan bahwa di satu kompleks kuburan memang ditemukan ada satu kekecualian untuk satu warga kulit hitam, namun hal ini diyakini tidak lepas dari latar belakang keluarga yang bersangkutan, yakni masuk dalam kelas menengah. Artinya ini bukanlah norma umum yang berlaku saat itu. Dengan demikian, secara umum yang dialami oleh keturunan Afrika, bahkan ketika mati, tidak lain adalah segregasi ras secara tajam.

Kalau di Amerika dan Kanada ditemukan segregasi ras bagi jenazah, mudah diduga bahwa hal serupa terjadi juga di Afrika

Selatan, khususnya di masa berlangsungnya politik apartheid. Garrey Dennie (2009) menyebutkan bahwa sejak 1906, lahan kuburan yang terintegrasi secara rasial tinggal sekedar sejarah. Padahal, sebelumnya, tidak demikian karena setidaknya antara 1886 dan 1896, kulit putih dan kulit hitam dapat berbagi lahan kubur di tanah yang sama, begitu pula mereka dapat saling berbagi kedukaan, saling membantu mengangkat peti jenazah, berdoa, pun menangis. Di Pekuburan Braamfonten di Johannesburg yang merupakan area kuburan umum pertama (yang dibiayai pemerintah), sejak tahun 1906 itu, kuburan untuk kulit putih dan kulit hitam benar-benar terpisah secara rasial. Selanjutnya, di tahun 1909, di satu lokasi orang-orang Afrika, dibuka area kuburan yang khusus hanya untuk orang kulit hitam. Dengan kata lain, segregasi bagi jenazah berbasis ras tersebut berlanjut dan meluas.

Sejumlah catatan sejarah di atas dengan jelas memberikan petunjuk bahwa segregasi kelas bagi jenazah itu sangat erat kaitannya dengan kebijakan politik mereka yang berkuasa. Kendati alasan detil di balik setiap praktik segregasi itu bisa beragam, namun substansinya tetaplah memiliki kesamaan, yakni soal pembuktian supremasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Memahami hal ini kiranya penting sebagai panduan bahwa pembedaan kuburan bagi para jenazah setidaknya ada kait-mengaitnya dengan bagaimana pemerintah melihat urusan ini. Persisnya, harus ada persetujuan pemerintah bila hendak membuat area semacam ini. Bahkan, bisa jadi kebijakan pemerintahlah yang justru memfasilitasi munculnya segregasi sosial dalam urusan penguburan.

Isu ini kiranya penting dilihat karena setelah sekian dekade kolonialis pergi meninggalkan Indonesia, persoalan segregasi sosial masih juga terjadi. Survei yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Litbang Harian Kompas pada 25 September-3 Oktober 2018 misalnya, mengungkapkan, potensi terjadinya segregasi sosial di Indonesia tinggi (*Kompas*, 16/11/2018). Yaitu bahwa masyarakat merasa lebih nyaman

berinteraksi dengan komunitasnya sendiri, entah berdasarkan keturunan keluarga, kekayaan, pendidikan, ras atau etnisitas.

Di satu sisi ini menunjukkan adanya solidaritas internal yang begitu kuat, namun membawa konsekuensi ada segregasi sosial yang tinggi pula karena lebih nyaman berkumpul dengan komunitasnya sendiri. Oleh sebab itu, laporan tersebut menyebutkan hal yang dinilai urgen untuk dilakukan adalah mendorong meningkatnya solidaritas antar komunitas. Bila tidak dikelola dengan baik, potensi segregasi sosial ini bisa berlanjut pula dalam sikap terhadap jenazah dari seseorang yang bukan bagian dari komunitasnya.

Metodologi

Tulisan ini memanfaatkan sumber-sumber sekunder baik studi-studi yang sudah ada maupun data-data bisnis penguburan yang ada di Indonesia. Khusus untuk hal terakhir, informasi diakses dari masing-masing situs internet kuburan mewah yang lokasinya tersebar mulai dari Medan sampai Surabaya. Data-data tersebut yang mencakup sejarah pendirian, pemilik/pengelola, dan tarif makam kemudian diringkas dan ditabulasi secara sederhana untuk dideskripsikan.

3. Temuan dan Simpulan

Bisnis penguburan , setelah mati tetap berkelas

Kembali ke kisah segregasi kelas dalam urusan penguburan di Indonesia, mungkin saat ini kita tidak lagi menemukan adanya kuburan Jawa, kuburan Melayu dan seterusnya yang secara khusus hanya untuk kelompok etnis masing-masing. Tetapi kita dapat melihat jejak segregasi kelas itu di kuburan, atau antar satu kuburan dengan kuburan lainnya. Mungkin nuansanya berbeda, tetapi bagaimana pun segregasi kelas itu terjadi melalui bisnis lahan makam mewah. Hal ini sekaligus menampakkan kian kompleksnya

masalah lahan kuburan, khususnya di perkotaan yang telah berlangsung lama (Dilahur 1990).

Tabel 1. Beberapa kawasan kuburan mewah di Indonesia

Nama kawasan	Lokasi (luas)	Tahun ber-diri	Pemilik/ pengelola	Tarif kavling	Keterangan
San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes	Kabupaten Karawang, Jawa Barat (500 Ha)	2007	Lippo Group	Rp 0,04 - Rp 4 miliar	
Raudlatul Jannah Memorial Park	Kabupaten Karawang, Jawa Barat (50 Ha)	2019	Lippo Group	Rp 40 - Rp 210 juta	Khusus Muslim
Al-Azhar Memorial Garden	Kabupaten Karawang, Jawa Barat (20 Ha)	2011	Yayasan Pesantren Al-Azhar	Rp 0,04 – Rp 1 miliar	Khusus Muslim
Lestari Memorial Park	Kabupaten Karawang, Jawa Barat (32 Ha)	2003	NV Multi Corporation Berhad	Rp 0,4 - Rp 3 Miliar	
Heaven Memorial Park	Kabupaten Bogor (125 Ha)	2002	Yayasan Naga Sakti	Rp 100-300 Juta	Khusus Tionghoa

Nama kawasan	Lokasi (luas)	Tahun berdiri	Pemilik/ pengelola	Tarif kavling	Keterangan
Taman Makam Quilling	Kabupaten Bogor (125 Ha)	2002	Yayasan Naga Sakti	Rp 100-300 Juta	Khusus Tionghoa
Taman Memorial Graha Sentosa	Kabupaten Karawang (50 Ha)	2003	Artha Graha	Rp 0,1- Rp 1,5 miliar	
Mount Carmel Memorial Park	Kabupaten Semarang (100 Ha)	2006	PT Pagoda Karya Abadi	Rp 0,05 – Rp 3 miliar	Non Muslim
Cluster Madinah Memorial Park	Kabupaten Semarang	2006	PT Pagoda Karya Abadi	Rp, 0,05 – Rp 3 miliar	Muslim
Puncak Nirwana Memorial Park	Kabupaten Pasuruan (64Ha)	2011	PT HM Sampoerna	Rp 2 miliar	Tionghoa
Nirvana Memorial Park - Medan	Kabupaten Deli Serdang (125 Ha)	2018	PT Nirvana Memorial Nusantara	Rp 0,2 – Rp 3 Miliar	

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2020), terutama dari laman kawasan pekuburan tersebut. Tarif di atas dapat berbeda dengan kondisi sekarang.

Fenomena bisnis lahan kuburan terutama di kota besar di Indonesia akhir-akhir ini menegaskan, atau lebih tepatnya memberikan arena bagi mewujudnya segregasi kelas antar orang mati. Kian terbatasnya ruang dan akses ke lahan kuburan ini banyak dimanfaatkan oleh para pemilik kapital, seperti pengembang, untuk menjadikan hal ini sebagai bisnis, yakni bisnis lahan kuburan. Artinya, kuburan dapat dianggap sebagai salah satu komoditi dagang yang menjanjikan keuntungan dan dapat dikelola secara serius. Maka tidak heran kita bisa menyebutkan beberapa di antaranya, mulai dari di sekitar Jakarta, Semarang, Surabaya, ataupun Medan.

Yang paling sering kita dengar mungkin adalah area kuburan mewah San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes, yang didesain oleh PT Lippo Karawaci Tbk dan terletak di Karawang Jawa Barat. Sebagaimana dapat dilacak di lamannya, lokasi ini mengadaptasi taman kuburan terkemuka di dunia, yakni Forest Lawn Memorial Parks and Mortuaries di California Amerika Serikat. Di laman itu juga ditulis secara jelas bahwa ini adalah kawasan kuburan pertama di dunia yang menawarkan kelengkapan fasilitas dan layanan berkualitas, bahkan juga bisa digunakan untuk pernikahan dan wisata.

Di situ juga ada danau, kapel, musholla, restoran, trek untuk jogging, kolam renang, florist & gift shop, berikutan padang rumput untuk aktivitas outdoor, dan gedung pertemuan, bahkan ada landasan helikopter. Adanya kapel dan musholla menandakan bahwa kawasan ini bukanlah untuk jenazah beragama tertentu, melainkan untuk mereka yang sanggup membayar lahan kubur. Secara spasial, diatur ada area kubur untuk pasangan, ada area Islam, ada area universal. Harga lahannya, mulai dari puluhan juta rupiah sampai puluhan milyar rupiah, tergantung lokasi dan luasannya. Sebagai contoh, untuk tipe Serenity, harga tunainya tertulis Rp 20 miliar lebih. Ini belum mencakup biaya upacara penguburan yang juga tidak kecil, mulai dari puluhan juta rupiah

sampai ratusan juta rupiah sesuai dengan ukuran tenda dan jumlah kursi yang disediakan termasuk juga fasilitas kotak beton dan batu nisan.

Sejak Desember 2019, Lippo Group juga memasarkan Raudlatul Jannah Memorial Park, tempat penguburan khusus untuk yang beragama Islam. Lokasinya berbeda, di Karawang Barat, walau tidak jauh dari San Diego Hills. Harga lahannya tidak banyak berbeda dengan tarif di San Diego Hills. Dengan adanya Raudlatul Jannah Memorial Park tersebut menambah kawasan kuburan mewah lainnya, yakni Al-Azhar Memorial Garden. Kawasan ini memosisikan diri sebagai “kuburan di dalam taman”. Pekuburan yang dikelola secara profesional dengan mengacu Syariat Islam ini merupakan unit usaha Yayasan Pesantren Al- Azhar. Tarif yang dikenakan di sini juga bervariasi, bahkan ada yang mencapai lebih dari dua milyar rupiah untuk tipe kavling Royal Zone berkapasitas maksimal untuk 14 makam. Tentu saja, tarif-tarif ini belum mencakup biaya pemulasaraan, prosesi penguburan, taman dan nisan.

Di luar itu masih juga yang lain seperti Lestari Memorial Park di Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Taman kuburan ini ada di bawah pengelolaan NV Multi Corporation Berhad yang mempunyai pengalaman panjang dalam mengelola taman kuburan di Malaysia. Kompleks elite ini menawarkan berbagai tipe lahan kubur. Kisaran harga kavling kubur mulai dari puluhan juta rupiah sapa dua ratus jutaan rupiah sehingga relatif agak lebih murah daripada San Diego Hills Park, Raudlatul Jannah Memorial Park, maupun Al-Azhar Memorial Garden. Masih ada juga Heaven Memorial Park berlokasi di Kabupaten Bogor, khusus untuk kalangan Tionghoa yang didirikan tahun 2002 oleh Yayasan Naga Sakti. Dibutuhkan uang dalam jumlah besar juga untuk dapat menguburkan jenazah di sini. Tarif paling murah adalah Rp 100 juta, dan juga ada beberapa unit yang mencapai angka miliaran rupiah. Berdekatan dengan lokasi ini dan juga dikelola oleh Yayasan Naga Sakti, terdapat Taman Quiling

yang dinamakan demikian karena pemandangannya mirip dengan Kota Guilin di China.

Bergeser ke arah timur, terdapat Mount Carmel Memorial Park yang merupakan taman kuburan mewah di Jawa Tengah. Mount Carmel ini juga menyediakan kluster Madinah yang tentu bisa diduga adalah kluster untuk yang Muslim. Ke Jawa Timur terdapat Puncak Nirwana Memorial Park yang dikelola oleh HM Sampoerna. Mantan Preskom HM Sampoerna, Boedi Sampoerna dikuburkan di sini dan menjadi orang pertama yang mengisi kompleks tersebut. Maka jelaslah bahwa sebaran spasial lahan kuburan mewah tersebut juga sejalan dengan lokasi-lokasi di mana konsentrasi kaum kaya berada. Rasanya akan sangat sulit untuk menemukan lokasi mewah seperti ini berada di satu pojok terpencil dan miskin di negeri ini.

Boleh jadi masih ada lokasi-lokasi pekuburan mewah lainnya. Namun apa yang diungkap di atas memberikan gambaran bahwa untuk menjadi penghuni komplek mewah ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan karenanya hanya sedikit yang mempunyai kemampuan untuk membeli kavling di kawasan seperti ini. Tidak aneh pula bahwa kemudian kavling semacam ini juga menjadi obyek investasi. Tidak heran pula bahwa agen-agen properti juga menjadikan kavling kuburan sebagai salah satu obyek yang dipromosikan di pasar. Misalnya, pada bulan Ramadhan bisa ditemukan iklan promosi diskon untuk kavling makam di Al-Azhar Memorial Park.

Dapat ditambahkan pula bahwa pada umumnya area kuburan mewah tersebut menempelkan label bahwa mereka terdaftar di jaringan manajemen internasional. Hal ini untuk mempertegas bahwa area mereka sangat berkelas. Maka, fenomena kuburan mewah ini agaknya dapat diringkas dengan kalimat “sebelum mati mempunyai investasi berkelas, setelah mati tetap berkelas”. Kendatipun demikian, oleh karena ada beragam klaster atau jenis kavling, maka pada dasarnya di kawasan mewah

ini pun terjadi segregasi kelas yang tampak dari segregasi spasial liang kubur; walaupun memang tetap ada perbedaan tajam dengan kuburan-kuburan makam di luar area kuburan mewah semacam ini.

Tentu saja, bagi masyarakat di sekitar lokasi kuburan mewah tersebut, harga kavling makam sangatlah jauh dari jangkauan mereka. Namun keberadaan properti mewah semacam ini boleh jadi memberikan keuntungan lain bagi masyarakat sekitarnya, sebagai implikasi dari hadirnya para pengunjung ataupun mereka yang hanya berwisata di sana karena pemandangannya yang bagus. Maka, keberadaan kuburan mewah pun dapat memperoleh pujian dari mereka yang berada di kelas bawah. Lagi-lagi, mereka yang ketika hidup sudah berkelas, ketika mati pun masih berkelas dan, bahkan, seakan menebarkan berkah bagi para jelata.

Setelah mati, tetap kelas rendah?

Bagaimana dengan jenazah-jenazah yang status sosialnya biasa saja, rendah, atau terabaikan? Di Indonesia ada regulasi yang mengatur ragam tempat kuburan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9/1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, terdapat lima jenis kuburan berdasarkan status tanahnya. Kelima jenis kuburan tersebut adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK), krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah (TPJ). Keterangan soal ini dapat dilihat di Tabel 2. Perihal liang lahat yang dibutuhkan untuk setiap jenazah, menurut peraturan ini tidaklah berbeda jauh ukurannya satu sama lain, dan akan berada di lahan kuburan dengan petak berdimensi sekitar: lebar 1,5 m x panjang 2,5 m x kedalaman 1,5 m (minimum).

Tabel 2. Jenis Tempat Pemakaman

No.	Jenis	Keterangan
1.	Tempat Pemakaman Umum	areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa
2.	Tempat Pemakaman Bukan Umum	areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan
3.	Tempat Pemakaman Khusus	areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus
4.	Krematorium	tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah
5.	Tempat Penyimpanan Jenazah	tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain

Sumber: Pasal 1, Perpu No. 9/1987.

Memperhatikan ketentuan di tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa kompleks kuburan mewah bisa masuk kategori kedua, yakni Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Di manakah tempat bagi jenasah dari masyarakat kebanyakan? Pilihannya adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU). Namun demikian dalam urusan biaya bisa jadi masih terasa mahal juga bagi warga kebanyakan. Sebagai contoh adalah situasi di Jakarta di mana biaya penguburan cenderung lebih tinggi daripada besaran biaya yang tertulis secara resmi (*Kumparan, 7/2/2019*).

Dalam berita tersebut diceritakan bahwa patokan harga pengurusan penguburan di DKI Jakarta, berdasarkan Perda DKI No. 1/2015 Tentang Retribusi Daerah, maksimal adalah Rp 275 ribu, dan bisa gratis. Harga sebesar ini sudah meliputi biaya sewa lahan selama tiga tahun dari Rp 0-100 ribu, sewa ambulans Rp 100 ribu, serta biaya pemakaian peralatan perawatan jenasah Rp 75 ribu. Kenyataan di lapangan bercerita lain, yakni harga itu bisa melonjak sampai berjuta-juta. Kumparan menemukan angka berkisar Rp 2-5 juta. Seringkali biaya ini terpaksa dipenuhi karena keluarga si jenasah berkeinginan lokasi kubur di jenasah berdekatan dengan kuburan sanak keluarganya. Hal ini ternyata sering masih disertai dengan biaya lain seperti untuk rumput dan batu nisan. Belum lagi hal ini ditambah dengan fenomena percaloan liang kubur. Artinya, pada lapis bawah pun sebetulnya terjadi juga segregasi kelas bagi jenasah. Hanya bila urusan kuburan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sajalah persoalan segregasi kelas menjadi minimal. Beberapa tahun lalu terdapat kabar yang cukup menggembirakan bahwa Pemkot Surabaya akan menggratiskan biaya penguburan bagi keluarga tidak mampu (*TribunJatim.com, 22/8/2017*). Perkiraan saat ini setiap tahun terdapat sekitar 900 warga Surabaya yang meninggal dan 10 persen di antaranya adalah warga tidak mampu. Bila hal semacam ini benar-benar dilaksanakan, tentu sangat baik karena warga tidak mampu yang meninggal dapat

dikuburkan di TPU dengan bermartabat, tidak terganggu persoalan biaya mahal yang mempertajam segregasi kelas di masyarakat.

Di luar itu, Pemkot Surabaya juga membuat krematorium di TPU Kemutih di pertengahan tahun 2019 dengan biaya penggunaan yang lebih murah dibandingkan krematorium yang dioperasikan oleh swasta (humas.surabaya.go.id, 19/9/2019). Kehadiran krematorium ini disebut disambut baik warga Surabaya karena biayanya menjadi lebih terjangkau.

Berdasarkan cerita yang terjadi di dua kota besar Indonesia ini kita memperoleh gambaran bahwa kendati pun pemerintah (daerah) menyediakan area pekuburan untuk umum, namun ketika biaya pemanfaatannya masih terasa berat bagi warga tidak mampu maka sebetulnya segregasi kelas terhadap jenazah masih terjadi. Artinya, ketika hidup mengalami penderitaan panjang akibat disegregasi berdasarkan kelas, pun setelah mati tetap berada di kelas bawah. Kita dapat juga menengok, misalnya bentuk dan ukuran nisan di area pekuburan umum. Masih mungkin untuk ditemukan adanya nisan yang tampak lebih besar dan mewah, padahal ukuran standar sudah ditetapkan. Dengan demikian, mengingat ada area pekuburan yang demikian mewah, maka secara ekstrim dapat dikatakan bahwa segregasi kelas itu berlanjut bahkan ketika seseorang menjadi jenazah.

Boleh jadi kenyataan demikian ini diterima apa adanya oleh mereka yang mengalami segregasi kelas. Namun kalau kita menyepakati bahwa segregasi kelas bukanlah hal yang seharusnya terjadi, maka jangan pula jenazah, milik mereka yang sudah berlama-lama sebagai warga tidak mampu ketika hidup, masih mengalami segregasi kelas. Meminjam penjelasan Komnas HAM dan Litbang Harian Kompas yang sudah dikutip di atas, adalah penting mendorong meningkatnya solidaritas antarkomunitas demi mengatasi persoalan segregasi sosial yang sampai saat ini masih terjadi.

Catatan Penutup

Sejarah panjang, bukan cuma di Indonesia, menunjukkan bahwa segregasi kelas pernah dan masih terjadi. Di masa kolonial atau ketika kendali pemerintahan berada di pihak yang pro-segregasi maka praktik segregasi kelas pasti terjadi jauh lebih dalam. Artinya, ketika hidup, seseorang dapat menjadi pelaku atau sebaliknya menjadi korban segregasi kelas. Dan rupanya, setelah mati pun, ketika telah menjadi jenazah, segregasi kelas tetapi berlanjut seperti tampak dari adanya kuburan-kuburan yang hanya untuk kelompok tertentu saja.

Dengan hadirnya area-area pekuburan mewah maka segelintir orang menjadi mampu untuk mencatatkan dirinya dalam kelompok “selama hidup berkelas, setelah mati tetap berkelas”. Syaratnya mampu untuk membayar lahan kubur yang mahal, dan tentunya telah menjadi jenazah terlebih dahulu. Sebaliknya, dalam jumlah yang tidak terbilang terpaksa tetap berada di kelas bawah, bahkan ketika mereka mati dan dikuburkan. Demikianlah, kuburan pun menjadi saksi berlaku dan berlanjutnya segregasi kelas. Bahkan, segregasi tersebut secara cerdas dijadikan produk bisnis. Kendati demikian, tetap perlu dicatat bahwa segregasi kelas dalam konteks kuburan ini sebetulnya bisa lebih rumit, karena di satu area pekuburan pun segregasi itu bisa juga terjadi. Mengamati satu area pekuburan tertentu dan kemudian melacak peta spasialnya kiranya menarik juga untuk dilakukan untuk memahami lebih konkrit bagaimana proses dan latar belakang adanya segregasi sosial yang dialami orang-orang yang sudah mati.***

KEPUSTAKAAN

Colombijn, F., & M. Barwegen (2009), Racial Segregation in the (Post) Colonial City: The Case of Indonesia, *Urban Geography* 30(8): 838-856.

Dennie, G (2009), The Standard of Dying: Race, Indigence, and the Disposal of the Dead Body in Johannesburg, 1886–1960, *African Studies* 68(3): 310-330.

Dilahur (1990), Kuburan di Perkotaan dalam Perubahan Keruangan, *Forum Geografi* 06: 3-10.

Dorling, D. (2014), Class Segregation, , In: Lloyd, C., Shuttleworth, I., & Wong, D.W. (Eds) *Social-spatial Segregation: Concepts, Processes and Outcomes*. Bristol, Policy Press: 363-388.

Ischak, M., B. Setioko, & D.N. Gandarum (2018), Economic Interactive Space: An Adaptation of Community Resilience Mechanism in an Enclave Settlement, *International Journal on Livable Space* 3(2):92-103.

Tidey, S. (2012), A Divided Provincial Town: The Development from Ethnic to Class Segmentation in Kupang, West Timor, *City & Society* 24(3): 302–320.

Williams, T, (n.d), Jim Crow and African-American Cemeteries and Burial Practices,

<http://omeka.wustl.edu/omeka/exhibits/show/washington-park/about-cemetery/jimcrow> (diakses 1 Mei 2020).

PENANGGAP

Damasus Ferix Loys Hermawan

Luar biasa saya mendapatkan banyak pengetahuan dan gambaran banyak tentang bagaimana melakukan penelitian, harus bagaimana. Saya merasa tertarik sekali dengan tulisan tentang kuburan yang dikapitalkan. Setiap orang akan mati. Ketika hidup sudah susah atau mahal, matipun juga harus mahal. Itu sesuatu yang menimbulkan pengamatan bagaimana aku harus hidup. Ini menarik sekali terjadi ketika kematian ini dibisniskan, proses kematian itu juga sudah mahal sejak awalnya. Artinya sebelum menghembuskan nafas terakhir itu pun terkait dengan persiapan atau pengobatan dan sebagainya yang itu mahal. Lalu mati pun akhirnya di ditempatkan atau diberikan dengan keharusan harus membayar lagi. Kamu sudah mati tapi ini harus kau bayar ya -dibebankan ke ahli warisnya. Mengenai kegiatan atau tradisi pemakaman ketika budaya-budaya di pedesaan. Ketika berbicara tentang pemakaman yang *grade*-nya di perkotaan, tetapi saya tertarik dengan pedesaan. Jadi bagaimana segregasi itu terjadi juga di pemakaman di pedesaan. Ini yang membuat saya tergugah untuk lebih jauh ingin mengetahui. Rasanya saya perlu menulis tentang segregasi yang ada di pemakaman di rumah saya, di daerah Rumah saya. Ini menarik sekali buat saya. Jadi beragam latar belakang Lalu tingkat pendidikan dan kekayaan itu semuanya berpengaruh di pemakaman walaupun ketika proses pemakaman. tradisi tadi itu juga dipengaruhi dengan tradisi budaya di sekitar contohnya kalau orang Jawa Itu meninggal itu biasanya *uba rampe*-nya beragam, belum ditambah lagi dengan harus membayar tukang gali, lalu kemudian “kaplingan”nya berapa. Dan, harus ngotot juga dengan pemerintah Desa bila bukan warga lokal. Saya rasa banyak konflik di

situ yang saya temukan yang menarik sekali untuk dilihat lebih. Saya berterimakasih karena diberikan banyak pengalaman dan pengetahuan, mengenai cara memandang suatu fenomena baru. Ini cara saya yang baru untuk melihat suatu fenomena. Hal ini membuat saya menjadi yakin bahwa ketika kita melihat suatu fenomena sesederhana apapun, itu kita dapat menyingkap wacana besar di baliknya. Ini cocok sekali untuk kita dalam. Lalu saya sudah sampaikan bagaimana saya ketertarikan saya untuk meneliti *pasarean*, kalau di Jogja itu *pasarean* termasuk pemakaman umum di tempat saya. Mencermati tulisan tersebut, saya merasa dipinggirkan karena yang dibicarakan adalah pemakaman; di situ kontras mengenai yang mempunyai dan yang tidak mempunyai uang. Hal ini menjadi pengalaman yang dekat dengan kehidupan. Saya jadi punya gambaran bahwa ketika kita harus bertahan hidup dengan berbisnis tetapi ketika kita mati pun masih dibisniskan. Jadi kematian itu bisnis ya. Saya mempunyai teman yang meneliti batu nisan, memperlihatkan bagaimana batu nisan itu mencerminkan identitas sosial seseorang itu. Jadi bukan hanya kuburannya tetapi batu nisannya; hanya batu itu mencerminkan seseorang itu punya kelasnya sendiri.

Pahlawan dan Imaji Nasionalisme Indonesia¹⁸

Heronimus Heron

MINDSET Institute/Mahasiswa Pascasarjana Kajian Budaya

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Email: heronimusher92@gmail.com

A. Pertanyaan Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada individu yang dianggap berjasa bagi republik. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) Kementerian Sosial dari tahun 1959 sampai 2020 terdapat 191 orang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional (Direktorat K2KRS, Kemensos.go.id, 25/6/2021). Orang yang diberi gelar pahlawan di tahun pertama (1959) ialah Abdul Muis (SK No. 218 Tahun 1959), Ki Hajar Dewantara (SK No. 305 Tahun 1959) dan R.M. Surjopranoto (SK No. 310 Tahun 1959).

Individu yang dianugerahi pahlawan di masa Orde Lama berasal dari kalangan politisi, pendidik, jurnalis, tokoh agama dan militer. Walaupun kategori ini tidak bisa dibaca secara *an sich* dikotomis. Abdul Muis seorang jurnalis (de express) dan politisi, Ki Hajar Dewantara seorang pendidik dan aktivis pergerakan, R.M. Surjopranoto seorang aktivis buruh (Persatuan Perhimpunan Kaum Buruh), Husni Tamrin (SK No. 175 Tahun 1960) seorang anggota Volksraad, Danurdirja Setyabudi (SK No. 590 Tahun 1961) seorang politisi, aktivis dan penulis, K.H. Akhmad Dahlan (SK No. 657 Tahun 1961) seorang ulama pendiri Muhammadiyah, Tan Malaka (SK No.

¹⁸ Kajian tahun 2021 yang disiapkan sebagai kajian MINDSET Institute;

53 Tahun 1963) seorang aktivis dan pendiri partai, Mgr. A. Sugiyopranoto (SK No. 152 Tahun 1963) seorang uskup Katolik, Jenderal Gatot Subroto (SK No. 222 Tahun 1962), Jenderal Sudirman (SK No. 314 Tahun 1964) dan sebagainya. Di awal Orde Baru, daftar para pahlawan di isi dari kalangan militer, meskipun dalam perjalanannya terdapat masyarakat sipil. Sementara di masa reformasi, para pahlawan di isi oleh beragam kalangan.

Ide penganugerahan gelar pahlawan memunculkan pertanyaan seperti bagaimana latar belakang munculnya wacana pahlawan nasional? Mengapa pemerintah membuat situs ingatan seperti monumen makam pahlawan? Bagaimana memaknai pahlawan sebagai imaji nasionalisme? Tidak dapat dipungkiri wacana pahlawan nasional menjadi salah satu imaji nasionalisme Indonesia. Apalagi ide mengenai penganugerahan pahlawan nasional tidak datang tiba-tiba. Ada upaya untuk mengkonstruksi perjuangan individu menjadi suatu gambaran mengenai pembebasan dari jajahan kolonial. Apresiasi dan penghargaan terhadap individu yang berjasa bagi pembebasan nasional tidak keliru. Kebijakan ini perlu dilihat sebagai langkah politis para pemimpin bangsa memberikan makna bagi perjuangan membangun republik.

Penulis menumpu istilah imaji dalam bahasa Inggris disebut *image*, dan Latin, *imago*. *Imago* memiliki beberapa pengertian seperti (a) *imago* dipakai untuk menterjemahkan kata Yunani *eidolon* sebagai semacam kerangka yang dikirim objek ke panca indra; (b) *phantasma* diterjemahkan *image* untuk menyebut ide potensial dalam tradisi Aristotelian; (c) *image* disebut *idea* dalam kerangka berpikir David Hume untuk menyatakan ide bersifat partikuler; (d) *image* sering diartikan sebagai sajian foto kombinasi dan berjenis partikuler (Bagus, 1996: 316). Imaji yang penulis maksud ialah sebuah kerangka pikiran yang dikirim objek ke panca indra. Imaji masih bersifat potensial, dan menjadi aktual ketika diwujudkan. Imaji selalu bersifat partikuler. Gagasan ini dekat

dengan ide ‘sesuatu yang terbayang’, imagined dalam pembangunan negara bangsa, dan bukan imajiner (Dhakidae dalam Anderson, 2008: xvi).

B. Kajian Teori dan Metodologi Penelitian

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teori wacana pahlawan dan imaji nasionalisme. Teori wacana mengacu pada perengangan teks atau ucapan lisan yang koheren menjadi eksposisi yang bermakna. Konsep wacana berasal dari filsuf Michel Foucault (Barker, 2004: 54). Wacana dapat menyatukan bahasa dan praktik subjek melalui objek dan memperoleh makna. Produksi pengetahuan melalui bahasa memberi makna pada objek material dan praktik sosial.

Foucault menulis semua wacana didasarkan pada ‘yang sudah dikatakan’ bukan sekedar frasa yang telah diucapkan, atau teks yang telah ditulis, tetapi juga ‘tidak pernah diucapkan’, tulisan itu hanyalah lubang dari tandanya sendiri. Oleh karena itu, wacana sebenarnya tidak lebih kehadiran represif dari apa yang tidak dikatakan, dan ini dapat merusak semua yang dikatakan (Foucault, 2003: 19). Wacana Foucault tidak bisa dilepaskan dari kuasa dan pengetahuan. Ia menjelaskan kuasa tidak mungkin dijalankan tanpa pengetahuan, dan tidak mungkin pengetahuan tidak menimbulkan kuasa (Mills, 2003: 69). Ia mengembangkan konsep panopticon dalam tulisan Jeremy Bentham berjudul *The Panopticon Writings* (1995). Panopticon adalah penjara dengan menara pengawas di tengah-tengahnya sehingga para tahanan merasa selalu diawasi (Bentham, 199: 8-9). Merasa selalu diawasi merupakan cara kuasa beroperasi terhadap individu.

Wacana dapat digunakan untuk merujuk semua ucapan dan pernyataan yang memiliki makna dan pengaruh (Mills, 2003: 53). Menurut Foucault, wacana terbagi dalam wacana yang diterima dan wacana yang dikecualikan, atau wacana dominan dan wacana yang didominasi (Foucault, 1978: 100). Jadi wacana semacam hal-

hal yang bisa dikatakan, dan hal-hal yang disembunyikan, atau pengucapan yang diperlukan dan hal yang dilarang.

Peneliti menggunakan analisis wacana Foucault untuk memeriksa teks dan dokumen mengenai pahlawan dan imaji nasionalisme. Saukko menyebut objek analisis wacana ialah gagasan, teks, kebijakan yang berdampak pada suatu objek (Saukko, 2003: 78). Apalagi pahlawan merupakan wacana yang telah diucapkan, tetapi juga menyembunyikan sesuatu yang tidak dikatakan. Dalam konteks Indonesia, pahlawan berarti orang yang berjuang bagi ideologi persatuan. Ia diberi penghargaan karena ada cerita dan dokumentasi perjuangannya. Sementara wacana yang disembunyikan ialah individu yang berjuang bagi federalisme atau dianggap 'memberontak' pada Jakarta tidak akan mendapat penghargaan pahlawan, walaupun di daerah, perjuangannya selalu diingat masyarakat. Wacana yang disembunyikan juga bisa ditemukan dalam beberapa nama yang diberi gelar pahlawan. Mereka mendapat penghormatan sebagai upaya politis menyatukan beragam ideologi.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Susanna Loeb et al., menulis deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena dan menggunakannya untuk mengetahui mekanisme penyebab, menghasilkan hipotesis dan menafsirkan hasil temuan peneliti (Loeb et al., 2017: 1). Analisis ini untuk memahami 'mengapa' muncul wacana pahlawan nasional. Deskriptif analisis dapat melihat efek kausalitas yang dimunculkan untuk mengidentifikasi wacana, melihat latar belakang dan membangun narasi terhadap suatu fenomena.

Loeb menyebut pertanyaan 'mengapa' wacana menghasilkan sesuatu atau tidak menghasilkan efek kausalitas diperkuat ketika peneliti menulis secara deskriptif yang akurat dan menyeluruh mencirikan konteks dan kondisi sebuah studi. Data yang didapatkan akan mendorong upaya penelitian yang kuat dan

memajukan metode ilmiah bagi penemuan berkelanjutan (ibid., 5). Wacana pahlawan nasional misalnya memiliki alasan untuk memperkuat ideologi persatuan.

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumen perundang-undangan. Studi ini untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan di bagian pertanyaan penelitian. Pertanyaan menjadi sangat penting bagi penelitian sosial dan relevan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tema yang sedang dibahas. Data-data dari studi kepustakaan dan dokumen perundang-undangan menjadi rujukan utama. Sementara data proxy atau data yang berhubungan dengan pembahasan tetapi tidak membahas secara langsung tema yang diperbincangkan dalam tulisan ini akan menjadi data pembanding. Banyak studi deskriptif menggunakan data proxy atau sekunder untuk membangun beberapa argumentasi yang menarik karena dapat memberikan wawasan yang kuat terhadap fenomena.

Penelitian kualitatif dimungkinkan menggunakan studi literatur untuk membantu analisis dan menemukan substansi pembahasan (Given, ed., 2008: 186-187). Tentu penelitian kualitatif tidak akan menampilkan analisis statistik dan perhitungan empiris. Karena tujuan penelitian ini untuk memahami secara lebih mendalam tentang wacana pahlawan dan imaji nasionalisme. Penelitian ini akan menggambarkan dan menafsirkan fenomena secara sistematis dari sudut pandang penulis serta untuk menghasilkan konsep baru (Mohajan, 2018: 24).

Penelitian ini disajikan secara naratif. Penulisan secara naratif tidak lepas dari upaya menganalisis literatur yang dirujuk dan membangun argumentasi bagi pengembangan gagasan. Teks-teks dalam kepustakaan dan dokumen perundang-undangan akan didialogkan, direproduksi dan ditampilkan dalam narasi. Penulisan secara naratif juga akan melihat bagaimana wacana mengenai imaji nasionalisme salah satunya digambarkan dalam perjuangan individu melawan penjajahan kolonial.

C. Hasil Pembahasan

Lombard menulis wacana memunculkan sosok pahlawan digagas penghujung tahun 1950an. Saat itu, ada keinginan untuk merehabilitasi semua korban kesewenang-wenangan Belanda. Semua orang yang sedikit banyak menentang 'kompeni' dapat direhabilitasi. Di daerah-daerah timbul kembali minat terhadap tokoh-tokoh tersebut (Lombard, 2005: 242). Beberapa makam mereka menjadi tujuan ziarah. Untuk memperkuat wacana ideologi persatuan, Sukarno menyusun sebuah daftar resmi pahlawan nasional tahun 1959. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU No. 7 Tahun 1950, Lembaran Negara 1950-56) tanggal 15 Agustus 1950, Pasal 87 yang berbunyi "Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang". Sukarno mengeluarkan Keppres 217 Tahun 1957 tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional dan Keppres 214 Tahun 1958 tentang Tata Cara Penetapan pahlawan Nasional. Berkas permohonan dapat diusulkan daerah atau keluarga ke Sekretariat Negara untuk dipelajari. Mereka yang dinilai pantas dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan presiden. Ada tiga puluh enam nama yang berhasil dianugerahi pahlawan sebelum kudeta 1 Oktober tahun 1965, empat belas di antaranya dikukuhkan tahun 1964.

Wacana ideologi persatuan bagi Sukarno ialah perjuangan kemerdekaan tanah air dan bangsa. Perjuangan ini menaruh alas dan sendi setiap perbuatan serta usaha yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Kaum nasionalis memiliki kewajiban membangun roh kemerdekaan rakyat Indonesia (Sukarno, 1964: 79). Para individu yang membangun roh kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan tersebar di banyak wilayah Indonesia. Mereka berjuang dengan berbagai cara dan dalam periode yang berbeda. Ada perjuangan melalui tulisan seperti Kartini (SK No. 108 Tahun 1964), penulis dan politisi seperti Sukarjo Wiryopranoto (SK

No. 222 Tahun 1962) yang menjadi pembina majalah *Mimbar Indonesia* dan melancarkan perjuangan 'Indonesia Berparlemen', mengangkat senjata seperti Cut Meutia (SK No. 107 Tahun 1964), dan lain sebagainya.

Mereka secara garis perjuangan memiliki tujuan yang sama dengan wacana ideologi Sukarno. Mereka berada di berbagai tempat, bahkan ada yang tidak diketahui makamnya seperti Dr. Muwardi. Namun narasi perjuangan Muwardi dapat disusun sehingga pemerintah memberikan gelar pahlawan dengan SK No. 190 Tahun 1964. Beberapa nama dianugerahi pahlawan nasional bisa dibaca secara politis, walaupun perannya cukup besar bagi republik. Penganugerahannya merupakan momen politis. Ini yang disebut Foucault sebagai praktik subjek terhadap wacana yang dikatakan dan yang disembunyikan. Praktik yang terkatakan ialah individu layak mendapat gelar pahlawan. Namun praktik yang disembunyikan ialah Abdul Muis lahir di Agam, Sumatera Barat mendapat gelar pahlawan nasional satu tahun pasca ultimatum PRRI tanggal 15 Februari 1958.

Atau wacana penganugerahan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara tanggal 28 November 1959. Sudah jamak diketahui Ki Hajar seorang pendidik dan politisi sehingga layak mendapat gelar pahlawan. Praktik ini disebut Foucault sebagai wacana tidak bisa dilepaskan dari kuasa dan pengetahuan. Pembaca mendapat pengetahuan dari praktik wacana pahlawan. Namun wacana yang tidak terkatakan ialah Ki Hajar membangun tesis mengenai 'demokrasi terbimbing'. Ki Hajar mengembangkan konsep 'Demokrasi dan Kebijaksanaan' Soetatmo. Ki Hajar menulis 'demokrasi tanpa kebijaksanaan adalah malapetaka', dan Taman Siswa menjadi satu dengan anak didik harapan masa depan rakyat dengan gagasan 'sama rata sama rasa' (Tsuchiya, 2019: 341). Demokrasi di bawah pimpinan kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan pemimpin.

Namun wacana 'demokrasi terbimbing' diterjemahkan Sukarno sebagai 'demokrasi terpimpin' melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante dibubarkan. Sukarno hanya didukung oleh Angkatan Darat dan PNI (Gonggong, 2001: 37). Sebelum pembubaran Konstituante, Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan Peraturan No.prt/Peperpu/040/1959 yang isinya melarang kegiatan politik. Paska Keppres No. 150 Tahun 1959, Sukarno mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 6 Tahun 1960 untuk menghentikan sementara segala kegiatan politik.

Tan Malaka (SK No. 53 Tahun 1963) dan Alimin (SK No. 163 Tahun 1964) juga tidak lepas dari wacana Sukarno menyatukan ideologi nasionalisme, agama dan komunisme (Nasakom) yang sudah diwacanakannya dalam Suluh Indonesia Muda tahun 1926. Sementara di zaman Orde Baru, para pahlawan revolusi menempati urutan pertama. Schreiner menambahkan pahlawan nasional diberikan kepada mereka yang mendukung wacana Orde Baru, seperti Mayjen. Basuki Rahmat (SK No. 01/TK/1969) yang menjadi saksi Surat Perintah Sebelas Maret dan Laksamana Martadinata (SK No. 220 Tahun 1966) yang mendukung Soeharto setelah gerakan 30 September 1965 (2005). Orang yang layak mendapat gelar pahlawan nasional justru sempat gagal karena bersikap kritis kepada Orde Baru seperti Sutomo (SK No. 041/TK/2008). Tetapi Siti Hartinah Suharto diberi gelar pahlawan tiga bulan setelah meninggal dengan SK No. 060/TK/1996.

McGregor menyebut Orde Baru membangun citranya dengan mendirikan museum, monumen, buku sejarah dan film. Ada upaya membangun wacana versi kekuasaan militer, misalnya pahlawan bukan kedudukannya melawan penjajah tetapi jasanya sebagai pahlawan. Makam pahlawan dihiasi dengan simbol-simbol kesatria seperti bambu runcing, patung prajurit dan diberi pagar. Muncul kesan nasionalisme berada dalam 'pagar' bukan wacana dan praktik sosial masyarakat. Orde Baru juga bermain dengan

artikulasi wacana misalnya ‘pahlawan Diponegoro’ menjadi ‘perang Diponegoro’. Perubahan kata juga berlaku dalam adegan mengenai Imam Bonjol dan Sisingamaraja. Bagi McGregor, perubahan kata ini dipengaruhi oleh Nugroho Notosusanto yang ingin membangun wacana kesatria atau keprajuritan untuk membenarkan peran Orde Baru dalam politik (McGregor, 2008: 55). Sementara pasca Reformasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Gelar diberikan kepada orang yang berjuang untuk Indonesia, namun ada individu yang diajukan berkali-kali mendapat gelar tetapi ditolak. Wacana pahlawan tetap merupakan individu yang mendukung ideologi persatuan dan disetujui kekuasaan.

D. Kesimpulan

penelitian ini membahas mengenai wacana pahlawan dan imaji nasionalisme. Bangsa sebagai sebuah bangunan imaji terbentuk atas berbagai wacana. Salah satu di antaranya ialah wacana pahlawan nasional. Pendekatan teori wacana dapat melihat artikulasi pahlawan. Ada yang diucapkan dan ditunjukkan penghargaannya, namun ada wacana yang disembunyikan. Orang hanya dapat membangun variabel untuk memperkirakan wacana apa yang disembunyikan. Variabel ini bisa dijelaskan melalui deskriptif analisis. Penjabaran berbagai variabel wacana yang ditulis secara sistematis dapat menjelaskan bawah gelar pahlawan diberikan kepada individu yang memiliki kriteria (a) melawan kesewenangan kolonial; (b) mendukung ideologi persatuan; (c) sebagai upaya wacana tanding di luar persatuan dari Jakarta; (d) mendukung kekuasaan.

Wacana pahlawan bergeser menjadi militeristik di masa Orde Baru. Individu yang dekat dengan kekuasaan dianugerahi pahlawan nasional, sementara mereka yang kritis diabaikan. Nasionalisme pahlawan dicipta secara eksklusif seperti tergambar dalam makam (Lih. Keputusan Menteri Sosial No.79/HUK/1994) –ada pagar,

patung prajurit, bambu rinding, terlepas praktik kehidupan sosial masyarakat. Para pahlawan dihilangkan semua dimensi sosialnya. Kesatria ditonjolkan. Tentu ini membawa implikasi besar bagi imajinasi mengenai nasionalisme hari ini. Semua praktik militerisme dianggap sebagai penopang nasionalisme, termasuk jika mengorbankan nyawa masyarakat.

Individu yang dianugerahi pahlawan cukup inklusif. Jika inklusif diletakkan pada penerimaan semua orang, maka individu yang diberi gelar pahlawan berasal dari berbagai kalangan, misalnya Gatot Subroto dari Buddha, KH. Agus Salim dari Islam, Mgr. A. Soegijapranata dari Katolik, I Gusti Ketut Jelantik dari Hindu, Martha Christina Tjihahu dari Kristen. Atau jika inklusivitas diletakkan pada beragam ideologi maka para pahlawan juga berasal dari berbagai ideologi seperti nasionalisme, agama dan komunisme. Artinya wacana pahlawan bagi pemerintah diterima kalau individu mendukung nasionalisme Indonesia.

KEPUSTAKAAN

Anderson, Benedict. (2008). *Imagined Communities*. (Terj. Omi Intan Naomi). Yogyakarta: Insist.

Barker, Chris. (2004). *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. London: SAGE Publications.

Bentham, Jeremy. (1995). *The Panopticon Writings*. London & New York: Verso.

Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS). (2020). *Data Pahlawan*.

<https://direktoratk2krs.kemsos.go.id/datapahlawan>, diakses 26 Juni 2021.

Foucault, Michel. (1978). *The History of Sexuality: An Introduction*. (Translated by Robert Hurley). New York: Pantheon Books.

_____. (2003). *The Archeology of Knowledge*. London: Routledge.

Given, Lisa M. (ed). (2008). *Qualitative Research Methods*. Vol. 1&2. London: SAGE Publications.

Gonggong, Anhar. (2001). *Amandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme Solusi Untuk Masa Depan*. Yogyakarta: Media Presindo.

Keppres No. 217 Tahun 1957 tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Keppres No. 214 Tahun 1958 tentang Tata Cara Penetapan pahlawan Nasional.

Keppres No. 150 Tahun 1959 tentang Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan Menteri Sosial No.79/HUK/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial kepada Daerah Tingkat II.

Loeb, Susanna., et al. (2017). *Descriptive analysis in education: a guide for researchers*. Washington D.C: Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.

Lombard, Denys. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya. Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*. (Terj. Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat dan Nini Hidayati Yusuf). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

McGregor, Katharine E. (2008). *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat.

Mills, Sara. (2003). *Routledge Critical Thinkers: Michel Foucault*. London and New York: Routledge.

Mohajan, Haradhan Kumar. (2018). *Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects*. Journal of Economic Development, Environment People. Vol-7. Issue 01. pp. 23-48.

Nishisato, Shizuhiko. (2007). *Multidimensional Nonlinear Descriptive Analysis*. London & New York: Chapman & Hall/CRC.

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 6 Tahun 1960 tentang Penghentian Sementara Segala Aktivitas Politik.

Saukko, Paula. (2003). *Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approaches*. London: SAGE Publications.

Schreiner, Klaus H. (2005). "Penciptaan Pahlawan-Pahlawan Nasional Dari Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru 1959-1993", dalam *Outward Appearances, Trend, Identitas dan Kepentingan*. Yogyakarta: LKIS.

Sukarno. (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid I. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi.

Tsuchiya, Kenji. (2019). *Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Dasar Sementara No. 7 Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

PENANGGAP

Abraham Wahyu Nugroho

Terimakasih Mas Heron, sudah memberi temuan-temuan, memberikan informasi yang menurut saya sangat menarik. Saya pribadi memang tidak cukup mempunyai energi untuk menanggapi dalam konteks praktek diskursus maupun praktek sosiokulturalnya. Paling tidak sedikit-sedikit belajar tentang analisis wacana tetapi mungkin energinya mentok sampai produksi teks sedangkan konteksnya mungkin butuh belajar banyak hal. Tetapi yang saya kagumi di sini, yang bisa saya berikan informasi, atau saya berikan tanggapan adalah bagi para peserta di ruangan ini, kita melihat bahwa wacana itu sebagai praktek komunikasi strategis. Ternyata itu ya. Saya mendalami komunikasi strategis dan ketika melihat paparan tadi melihat bahwa analisis wacananya adalah komunikasi strategis karena memang dilakukan secara sengaja oleh penguasa yang mempunyai pengetahuan, relasi kuasa dengan pengetahuan, untuk mencapai tujuan tertentu. Inilah pentingnya analisis wacana. Bagi orang awam pemberian gelar tidak langsung ditangkap sebagai wacana. Ya sudah. Oo dia pahlawan. Tapi bagi orang-orang yang misalnya punya daya kritis yang tinggi bahwa pemberian gelar itu tidak sekedar hanya pemberian saja tapi di situ ada sebuah diskursus yang tadi, yang tidak nampak, yang disembunyikan tadi. Nah inilah yang kemudian bisa jadi tidak disadari banyak orang tapi kemudian pelan-pelan meresap dalam ruang-ruang interaksi, ruang praktek sosiokultural kultural, dan kemudian orang meyakini bahwa itu benar, bahwa itu kemudian diterima. Saya, jujur jadi teringat, kalau bicara tentang wacana ini, saya selalu menjadikan contoh, kagum pada pada film-film. Saya memang lebih tertarik pada produksi teks melalui film-film. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar

dengan film Rambo, Rambo I sampai Rambo sekarang. Yang menarik bagi saya adalah Rambo II. Bagi saya, Rambo II itu sebuah praktek komunikasi strategis, sebuah diskursus yang sangat menarik ketika mungkin anak muda atau orang-orang, yang tadi, masyarakat awam, masyarakat umum melihat Rambo II atau seri-seri berikutnya sebagai sebuah aksi heroik, aksi perjuangan, Tapi yang mungkin tidak disadari tapi pelan-pelan masuk ini adalah dalam sejarah, Amerika tidak pernah menang dari Vietnam tetapi di situ, di Rambo II, film itu menggambarkan bahwa Amerika itu bisa menang dari Vietnam. Artinya, ada sejarah yang kemudian dinarasikan ulang dan tanpa disadari masyarakat atau khalayak atau publik itu meyakini bahwa itu benar. Pada kenyataannya tidak demikian. Ada yang disembunyikan tadi. Berikutnya Rambo III, yang masih dalam konteks kehidupan politik di Amerika. Kalau tidak salah ingat, itu bicara tentang perang antara Amerika dengan Afghanistan. *Setting*-nya adalah Amerika dan Afghanistan. Sama, mereka memosisikan, si produser teks memosisikan diri sebagai negara-negara pahlawan, yang berjuang bahwa ini adalah musuhnya yang harus diberantas. Tetapi kenyataannya mungkin tidak demikian. Ini yang sampai saya penasaran, Rambo terakhir itu, saya menduga jangan-jangan itu nanti musuhnya kalau nggak Korea Utara atau Cina. Sebelum film itu keluar, saya sudah menduga demikian. Tetapi ternyata meleset. Kalau tidak salah, film Rambo yang Last Blood itu konteksnya Amerika dengan Mexico. Situasi politik seperti apa yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Mexico. Tetapi di film-film Hollywood yang lain, ini yang saya justru yang, bisa jadi juga sudah, karena kalau bicara film-film Hollywood Amerika, itu kan masuk ke ruang-ruang diskusi interaksi kita. Seperti tidak sadar. Ya memang di Rambo tidak menampilkan relasi perang antara Amerika dengan Korea Utara, tetapi di film berjudul "Olympus Has Fallen", yang beberapa waktu lalu cukup populer, ditayangkan di sebuah stasiun tv, yaitu relasi mengenai teroris, teroris yang berasal dari Korea Utara, sedangkan yang diserang

adalah Amerika. Dalam praktek-praktek seperti ini memang saya tertarik mengamati tetapi memang tidak punya cukup energi untuk membedah dalam konteks yang disembunyikan. Apa sih, ini terkait hal yang sudah disampaikan tadi, sudah sangat luar biasa. Selama ini saya sebagai orang awam, mengenai pemberian gelar, o ya sudah, misalnya, dia itu adalah pahlawan. Tetapi ternyata dibalik itu ada ada wacana tadi, yang memang kemudian, oo ternyata, ini sebuah pengetahuan yang baru bagi saya. Beberapa hal yang saya catat tadi mengenai yang perlu dilakukan untuk mendukung ideologi persatuan tetapi juga harus mendapat persetujuan penguasa. Saya mau tanya, tetapi pertanyaan polos. Kalau tadi dari Soekarno adalah ideologi persatuan, kemudian Soeharto adalah yang penting mendukung penguasa, kemudian pasca orde baru saya membahasakannya kombinasi, ideologi persatuan tetapi dia harus mendukung rezim pemerintahan. Apakah itu berlangsung sampai hari ini karena pasca-soeharto kita mengalami beberapa pemberitaan Apakah itu terjadi sampai hari ini, itu kira-kira pertanyaan polos saya. Dan kemudian sebenarnya bahasa pemahaman mas Heron, apakah masih ada kepentingan politis apa. Tadi memang sudah dijelaskan mengenai hal ingin mempersatukan provinsi-provinsi yang berkonflik dengan pemerintah pusat tetapi kemudian pertanyaannya apakah itu ada variasinya, sampai hari ini seperti apa. Saya teringat film yang lain, negara lain, juga seperti ini. Pelan-pelan tapi masuk dan itu anak muda sarannya. Saya penggemar film animasi Naruto. Dalam film Naruto, ada banyak sekali pernyataan-pernyataan filosofis, salah satunya adalah imajinasi nasionalisme. Itu yang kemudian melihat bahwa pahlawan itu dimunculkan supaya masyarakatnya bersatu. Tetapi versi di film, masyarakat bersatu karena ada musuh bersama. Memang film anak-anak, tetapi saya tertarik *storytelling*-nya sampai sampai beberapa penelitian juga mengarah pada animasi Naruto. Teman saya juga meneliti. Penelitian sampai pada efek pro-sosial, perilaku pro-sosial yang dialami oleh remaja, khususnya SMA waktu.

DISKUSI

Aloysius Gunadi Brata

Saya menyitir bahwa memang di desa itu juga ada segregasi semacam itu tapi mungkin yang tajam itu di kota. Bisa jadi karena mata kita kurang jeli saja. Kalau dalam konteks Jawa setidaknya jejak-jejak itu mudah mungkin agak dikenal. Misalkan kalau di banyak kota di Jawa itu selalu ada tempat atau lokasi yang disebut atau dikenal dengan Kauman, misalkan. Kita barangkali lupa nama kampungnya persisnya secara administratif ya tapi kita bisa paham kalau kauman itu pasti ada atribut tertentu di sana. Lalu ada loji. Itu ada historisnya mungkin itu tempat apa kantor-kantor Belanda zaman dulu. Mungkin saya kalau salah salah tidak salah mengingat ada rujukan dalam satu buku mengenai peta dimana antara yang kaya dan miskin itu lokasinya pun sudah berbeda. Ada struktur, petak-petak mengenai rumah sudah ditetapkan dilihat ada ada area yang sentral di mana para pejabat desa yang kalau zaman dulu turun-temurun itu ada. Lalu ada yang agak jauh. Itu menarik untuk studi lanjut mengenai desa terkait kuburan. Mengenai rencana 1 buku sebetulnya, tentang topik besar kuburan yang ditengok dari macam-macam analisis termasuk dari sastra segala.

Tadi juga ditanyakan kalau sebetulnya ada transaksi-transaksi ekonomi itu. Ya itu betul tetapi kami berbagi tugas . Ada yang lain juga mencoba melacak itu misalkan ya kalau kembang, bagaimana pasarnya. Apakah ada recycling kembang misalkan. Kira-kira semacam itu ya.

Nah kemudian soal tanah. Kalau tanah tidak subur, jadi kuburan itu kan lebih untung. Ya jelas. Saya pernah bilang ke teman saya sudah kalau punya tanah gede. Jadikan saja itu bisnis kuburan yang komersial. Tapi jangan mahal-mahal ya gitu ya bikin saya tidak bisa beli. Tapi itu artinya nilai tanah itu memang harus dicek betul

dan tidak dalam kapasitas saya tahu persis bagaimana pengembang mengalkulasi itu. Tetapi saya kira untuk lokasi kuburan mungkin saja lokasinya menarik, dari tampilannya menarik. Kalau dia tidak subur, mungkin harganya bisa lebih murah; tetapi kalau dia subur, itu menjadi mahal juga. Tetapi ini soal nilai tanah di mata pemilik tanah semula, yang kemudian ditransfer dalam transaksi oleh ke pemodal yang punya lahan. Saya kira itu satu studi sendiri bagaimana apa memahami transaksi tanah untuk lahan kuburan. Tampaknya kalau mau mencari makam untuk umum yang agak murah, kita cari tanah yang tidak laku, yang secara agraria itu barangkali tidak cukup menghasilkan.

Kemudian soal apakah fakta bahwa orang lahir pun sudah ada segregasi. Saya kira kita juga menyadari bahwa ada yang disebut inter-inherited atau intergenerational inequality misalkan dimana orang tua itu mewariskan kemiskinan kepada anaknya sehingga si anak lalu terus berada pada status sosial yang sama. Kan tidak bisa dicegah, anak mau lahir dari siapa. Juga bisa dikaitkan dengan soal, mau lahir dimana, di Amerika? Bapak ibu putih? Bapak ibu hitam? Itu akan mempunyai implikasi yang berbeda. Dari situ ada pengamatan bahwa dari lahir ada problem semacam ini. Yang penting adalah bagaimana hal itu tidak berlanjut karena itu bukan kesalahan dari si anak.

Jadi ketika ada pertanyaan apa manfaat, kalau disebut riset saya tidak berani, tapi kalau disebut tulisan enteng begitu saja, mungkin saya lebih nyaman dia: jadi apa implikasi dari tulisan pendek ini untuk kita supaya lebih nyaman bersama. Saya kira kita bisa tarik lebih jauh terkait dengan bagaimana negara, misalkan itu. memikirkan soal mereduksi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Secara garis besar, karena latar belakang saya ekonomi, itu ada dua garis besar: predistribusi dan redistribusi. Bagaimana itu diimplementasikan. Kita tahu banyak negara punya strategi yang garis besarnya sama tetapi detailnya mungkin berbeda termasuk

apakah misalnya endowment itu diperbaiki dengan pendidikan. Apakah betul itu menjamin lintas strata, kadang tidak selalu betul.

Kaitan antara rumah dan makam. Apakah itu berlanjut. Ada korelasi di sana. Saya duga iya tapi saya terus terang tidak mampu bagaimana membuktikan korelasi itu. Bahwa mereka yang rumahnya itu di perumahan mewah amat mungkin akan berakhir di pemakaman mewah. Tetapi bagaimana saya mengorelasikannya, hal itu persoalan lain, hal yang masih perlu dibaca dan ditengok lebih dalam.

Saya kira saya mau tambahkan, sebetulnya kenapa saya kadang melakukan hal semacam ini yang isinya interdisiplin atau apalah terserah. Saya kadang melakukan hal yang bagi saya menarik. Saya sebetulnya berlatar belakang ekonomi. Dari awal belajar ilmu ekonomi tapi saya selalu merasa bahwa ini tidak bisa dipakai untuk menjawab segala persoalan ekonomi. Ada ketidakpercayaan diri terhadap disiplin ilmu yang digeluti. Kedua saya juga mencoba bahwa okelah kalau memang harus kembali ke ekonomi, jangan fanatik lah pada 1 mazhab atau school tertentu dalam ekonomi. Itu penting karena kalau kita berpikir luas ya harusnya itu akan saling melengkapi. Tapi memang ada yang dominan, dan itu fakta yang segera kita harus selalu tengok kira kanan dengan tujuan ke depan. Ketiga, dalam interaksi dengan lain saya kira saya berharap bahwa apa saya pahami ilmu ekonomi itu bisa membantu memahami fenomena-fenomena sosial, non-ekonomi, dalam interaksi dengan yang lain.

Itu yang bisa saya sampaikan. Akan sangat senang kalau ide-ide awal ini bisa. kalau mungkin istilahnya dieksekusi lebih jauh karena niat kami adalah tidak membuat studi yang mendalam melulu tetapi membuka bahwa ini ada satu ruang yang masih belum banyak dieksplorasi bagi banyak hal walaupun faktanya itu akan kita hadapi semua.

Heronimus Heron

Terima kasih. Yang pertama, kalau misalnya pahlawan nasional di jama Orde Lama itu adalah orang yang yang mendukung Sukarno, kalau di zaman Orde Baru adalah orang yang mendukung Soeharto. Lalu orang yang dianggap melawan Suharto, sebenarnya layak diangkat sebagai pahlawan nasional tetapi tidak dilakukan. Tentu bagaiman di jaman reformasi saat. Sebenarnya pemerintah Indonesia melalui kementerian Sosial itu membuat satu unit di Direktorat untuk penghargaan pahlawan nasional. Apa yang dilakukan adalah untuk mempertimbangkan semua masukan-masukan dan usulan dari masyarakat tentang penganugerahan pahlawan nasional. Beberapa yang sudah masuk misalnya tadi saya sebut tersebut Sultan Hamid II. Ada juga misalnya ada mantan perdana menteri Indonesia. Nampaknya yang kemarin rame adalah Sultan Hamid II. Beberapa diapresiasi juga. Rasuna Said (Hajjah Rangkayo Rasuna Said) dari Sumatera Barat yang berjuang sebagai wartawan dengan menulis. Dan beberapa beberapa orang masih proses screening, layak atau tidak.

Dalam konteks kajian wacana itu, tidak terlalu mendalam dan detil tapi saya melihat apa yang yang terartikulasi keluar, yang tersampaikan ke publik. Apa sebenarnya yang ada di balik di belakang pemerintah. Itu memang tidak terlalu detil studi ini. Misalnya kepentingan politis apa ya. Memang sebenarnya penganugerahan pahlawan nasional itu memang sangat politis walaupun tidak semuanya bisa kita baca seperti. Tidak mudah membaca itu secara politis itu. Karena misalnya beberapa tokoh saya melihat misalnya Ki Hajar Dewantara dianugerahi pahlawan Nasional 2 bulan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana Soekarno membubarkan parlemen. Hanya 2 kekuatan yang mendukung Sukarno yaitu PNI dan Angkatan Darat. Kekacauan politik terjadi Nasution sampai membuat peraturan, maklumat penguasa perang tertinggi negara Indonesia untuk melarang kegiatan politik. Kenapa misalnya dengan melihat Ki Hajar

Dewantara dianugerahi pahlawan nasional. Memang jasanya sangat luar biasa dalam konteks politik. Juga mendirikan Indische party. Juga misalnya tentang pendidikan. Tetapi arah konsep yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang demokrasi terbimbing - demokrasi harus berdasarkan kebijaksanaan. Hal digunakan Soekarno untuk menjadi demokrasi terpimpin. Ada perubahan konsep yang digunakan. Juga ditengarai Taman Siswa nampaknya akan mendukung politik Soekarno kalau Ki Hajar Dewantara mendapat anugerah pahlawan nasional. Mendukung dekret presiden. Mei dianugerahi pahlawan nasional sedang bulan Juli ada Dekret Presiden. Jadi ada korelasi di sana. Tapi apakah semua politis, tidak bisa dibaca hitam putih. Soekarno mengupayakan bahwa penganugerahan pahlawan nasional juga harus merangkul semua kalangan. Misalnya teman-teman penghayat juga ada tokohnya masuk pahlawan nasional. Kalau mau melihat di Pontianak, Jalan Kyai Haji Agus Salim itu ada di Pontianak, Jalan Pattimura juga ada. Saya belum menelusur sejak kapan nama-nama jalan itu muncul tapi memang setelah peristiwa 30 September itu Gubernur Kalimantan Barat diganti oleh PLT Angkatan Darat, kemudian menghabisi gerakan PGRS Paraku di Kalimantan bagian utara, dan Kalimantan Barat adalah salah satu basisnya. Saya berasumsi perubahan nama jalan terjadi di periode itu. Tentang konsentrasi pada nasionalisme, sebenarnya saya memang perlu membuat studi yang membongkar ideologi nasionalisme Orde Baru. Hari ini nasionalisme tidak hanya dilihat dalam konteks pahlawan, tetapi dalam bentuk lain misalnya dalam lagu kebangsaan. Mau tidak mau, saya mengamati, bahwa pahlawan itu membuat kita berimajinasi tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahwa setiap wilayah ada pahlawan.

Dan yang terakhir, apakah Foucault membuat langkah-langkah analisa wacana. Saya pelajari analisis wacana Foucault memang itu tersebar di beberapa buku yang ditulis, misalnya dalam bukunya itu ada "Acheology of Knowledge", ada di situ. Lalu "the

History of Sexuality". Kalau Sara Mill menulis kritik tentang Foucault. Dia melihat Foucault menulis tentang analisa wacana itu tersebar di banyak teks yang ditulis. Jadi dia tidak membuat satu metodologi penulisan atau metodologi analisa wacana tetapi memang dari analisa wacana ini, tadi membantu dengan perspektif analitis.

Henry Thomas Simarmata

Menanggapi Aloysius Gunadi Brata

Tema yang sebetulnya sangat luas, tetapi saya mengucapkan profisiat atas karya ini karena ditulis dengan sangat cantik, enak dibaca. Ketika saya baca pertama kali, saya merasa ini seperti *nouvelle l'histoire*, sesuatu hal yang kecil itu tapi yang ditengarai akan menjadi besar, *coming of age*.

Yang kedua, tema ini menjadi tema yang serius untuk orang Indonesia. Kuburan itu persoalan super serius. Suku-suku dalam masyarakat Indonesia sudah mempersiapkan kuburan jauh hari. Mereka sudah berpikir bukan hanya mengenai lokasi, tetapi sebetulnya mengenai bagaimana korelasi antara yang hidup dengan yang sudah meninggal. Dalam tulisan, hal ini tidak terlalu disinggung tapi bertema ekonomi. Tapi menurut saya, akan menarik kalau ditambahkan sedikit saja mengenai hubungan kuburan dengan masyarakat Indonesia.

Yovita Indrayati

Menanggapi Aloysius Gunadi Brata

Untuk sesi terakhir ini, menarik sekali berkaitan dengan yang sudah meninggal dunia, mengenai kebutuhan makam. Saya hanya sekedar memberi informasi saja untuk pak Aloysius bahwa mengenai makam itu sudah ada aturannya. Sebetulnya sudah ada aturannya, mengenai undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman wajib hukumnya untuk developer untuk menyediakan yang namanya PSU. Itu adalah salah satu bagian dari sarana ketika dia mengajukan izin itu. Sudah termasuk harus menyediakan lahan

untuk makam termasuk untuk yang apartemen rumah susun. Jadi kenapa diatur karena itu persoalan kebutuhan lahan di perkotaan. Pemerintah daerah kesulitan juga untuk menyediakan makam maka itu diatur. Kemudian terkait makam itu, yang yang menjadi masalah adalah kalau PSU itu belum diserahkan maka pemerintah daerah tidak bisa melakukan pemeliharaan ataupun penataan. Jadi selama itu belum diserahkan, masih menjadi keharusan di developer. Mengenai pemakaman yang dikelola oleh desa atau masyarakat setempat, sepenuhnya lokasi itu swakelola, dikelola mereka sendiri, tidak ditarik retribusi. Hanya yang dikelola oleh pemerintah daerah, lahan yang dikelola pemerintah daerah, itu yang diatur. Ketika itu di perkotaan maka itu menjadi persoalan sudah diatur juga dalam peraturan yang ada.

Aloysius Gunadi Brata

Saya berterima kasih atas input dan juga apresiasi. Saya akan coba mengakomodasi apa yang sudah disarankan tapi mudah-mudahan saya masih sanggup mengerjakannya. Yang pasti andai ada dari peserta di sini yang berminat juga menulis tentang apa bagaimana sebetulnya soalnya hukum terkait kuburan, boleh dikirimkan ke saya. Terima kasih sekali atas kesempatan; apa yang sudah kami tulis sampai 1 tahun barangkali itu bisa mencoba kembali dan kalau harus tambal sulam itu artinya kami punya bahan-bahan kosmetika yang sudah diberikan. dan juga barangkali wangi-wangian dari kolokium ini.

Trihoni Nalesti

Terima kasih, terimakasih kepada semuanya. Proses lanjutan, perumusan, dan pengembangan akan kita lakukan bersama-sama.

Henry Thomas Simarmata

Dengan segala yang kita bicarakan pada hari kedua ini, kita mengambil hal-hal yang berharga. Yang pertama tentu masih menjadi bagian dari publikasi PSU mengenai “Kota Inklusif” dan kemudian sekarang dengan tema-tema yang mengikuti mengenai perubahan masyarakat Kontemporer. Saya pikir itu dua *milestones* yang menjadi hal utama yang kita bicarakan dalam 2 hari. Dua-duanya tentu nanti harapannya bisa menjadi publikasi yang terkurasi (*curated publication*).

Kemudian yang kedua, perubahan. Mengenai perubahan itu sendiri kita mencatat ada sekitar 10 perubahan besar baik di tingkat lokalitas maupun di tingkat kebijakan, kemudian ada juga yang di tingkat analisis. Kita sudah berusaha membahasnya. Saya kembali mengangkat suatu “quip” atau semacam pencerah mengenai perubahan ini, yaitu *negotiated change* atau perubahan yang dinegosiasikan. Perubahan yang dinegosiasikan itu pasti kecepatannya juga dinegosiasikan. Bagi Indonesia ini penting karena ada masyarakat yang memang tidak bisa dipaksa *grusa-grusu* untuk berubah. Pun, karena tidak dapat berubah, mereka tidak bisa dianggap bodoh. Jadi ini suatu sikap penting, bukan hanya sikap ilmiah, tetapi sikap yang harus dipunyai untuk mengembangkan kemampuan untuk menera seperti apa perubahan yang dinegosiasikan. Nanti proses lanjutan yang penting adalah mendiskusikan perubahan yang di negosiasikan. Upaya kita ini juga menjadi pembahasan secara akadeis dari hal-hal yang terjadi di lapangan.

Bahasan dan catatan dari kita juga akan penting untuk bisa diterima di luar lingkungan pendidikan tinggi, termasuk pada pihak *policy maker*, juga ke tokoh-tokoh komunitas.

V. Perubahan sosial yang dicermati dengan *mix-methodology*: kajian Unika Soegijapranata

Seri ini juga mengundang paper, penelitian, pengabdian yang menggunakan *mix-methodology*, dan dengan unit obyek yang beragam. Paper berikut berasal di lingkungan akademik UNIKA Soegijapranata.

Pengembangan Instrumen Tabel Hitung Gas Rumah Kaca (GRK) dari Konsumsi Energi dalam Kegiatan Belajar Mengajar di kampus

Amrizarois Ismail¹

UNIKA Soegijapranata Semarang

A. Pertanyaan Penelitian

Penggunaan energi yang tidak efisien merupakan satu dari berbagai faktor yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Pasalnya, penggunaan energi apapun pada akhirnya akan menghasilkan zat buang berupa carbon. Akumulasi zat buang yang dikenal dengan Gas rumah kaca atau GRK secara bertahap bertumpuk pada lapisan udara bumi dan membentuk cangkang ozon sehingga mampu memerangkap suhu panas yang seharusnya dilepaskan oleh bumi. Tumpukan suhu panas tersebut akhirnya berakumulasi terus-menerus hingga turut meningkatkan suhu panas bumi secara signifikan atau bahkan ekstrem, yang juga dikenal sebagai pemanasan global.

Beberapa hal sejatinya telah dilakukan masyarakat global sebagai upaya untuk meminimalisir dampak buruk dari pemanasan global terhadap kerusakan lingkungan sebagai imbas dari zat polutan sisa aktivitas manusia. Mulai dari Protokol Kyoto sebagai salah satu konvensi Kerangka Kerja PBB, dari Konferensi Kyoto berisi tentang komitmen berbagai pihak untuk melakukan pembatasan dan penurunan besarnya emisi karbon yang berasal dari aktivitas manusia dari berbagai kegiatan di muka bumi yang selanjutnya juga dikenal sebagai jejak carbon (*carbon footprint*), hingga *Bali Action Plan* pada *The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCC)* dan hasil COP-

15 di Copenhagen dan COP-16 di Cancun. Indonesia sendiri menjadi satu dari sekian negara yang turut serta menandatangani kesepakatan tersebut dan kemudian diimplementasikan pelaksanaannya melalui UU Nomor 17 Tahun 2004 yang salah satunya memuat Rencana Aksi Nasional pengurangan Gas Rumah Kaca disingkat RAN-GRK yang berisi paket kebijakan tentang rencana pengurangan gas rumah kaca dari berbagai sektor, salah satunya terkait dengan konsumsi energi. Oleh karena itu, pertanyaan tentang penggunaan energi merupakan pertanyaan penting dan mendesak dalam konteks perjuangan melawan kerusakan lingkungan (*environmental degradation*).

Universitas sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi merupakan salah satu sektor yang paling boros energi. Dewasa ini, proses KBM tidak bisa dilepaskan dari penggunaan media ajar yang menggunakan energi listrik seperti laptop, komputer, proyektor, *Over Head Projektor* (OHP), lampu, alat laboratorium, *printer*, *air conditioner* (AC), kipas angin, *sound-system*, hingga energi dari fosil berupa Bahan Bakar inya (BBM) atau dikenal juga dengan Fuel Energi. Bila dihitung dalam lingkup satu institusi saja tentu penggunaan media tersebut mengkonsumsi energi Elektrik/Listrik dan BBM untuk keperluan transportasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari besarnya potensi tersebut, tentu pihak penyelenggara pendidikan tinggi perlu melakukan upaya untuk menurunkan emisi karbon GRK yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis efisiensi, yang dimulai dengan melakukan langkah analisis melalui perhitungan besaran karbon yang dihasilkan dalam aktivitas penggunaan energi dalam kampus sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu mengembangkan instrumen hitung sederhana yang dapat digunakan civitas akademik untuk memperkirakan besaran karbon yang dihasilkan. Instrumen yang dimaksud berupa tabel hitung microsoft excel dengan formula hitung berbasis konversi

penggunaan energi listrik dengan satuan *Kilo Watt Hour* (KWh) dan BBM dalam satuan Liter/jam menjadi Co_2 dengan menggunakan rumus IPCC. Hasil konversi tersebut nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana aksi penghematan energi di kampus, dengan menjawab pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana Konsumsi energi elektrik dan BBM di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kampus.
2. Bagaimana Pengembangan tabel hitung konversi Emisi Karbon GRK di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kampus.

B. Kajian Teori dan Metodologi

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ialah rangkaian proses interaksi dalam rangka penyampaian informasi antara pendidik dan peserta didik. Tingkat ketercapaian KBM sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah Pendidik dan peserta didik. Inti dari proses belajar mengajar adalah efektifitas pelaksanaan KBM. Ketercapaian tujuan pembelajaran tentu sangat dipengaruhi oleh ketepatan metode yang digunakan pendidik dalam praktik KBM di kelas. Penyampaian materi oleh pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif meliputi mengajar dengan jelas, menggunakan berbagai metode pembelajaran, memberdayakan siswa, dan banyak lagi (Bujuri, 2018).

Ketika masa sebelum Pandemi Covid 19, metode penyampaian pembelajaran lebih sering disampaikan dengan metode luring. **Metode luring** sendiri adalah akronim dari luar jaringan artinya sistem penyampaian informasi dalam pembelajaran secara langsung atau tatap muka dan tidak membutuhkan jaringan internet (Jannah, 2021). Sistem luring inilah yang kemudian disinyalir membutuhkan konsumsi energi yang cukup tinggi. Ketika memasuki masa pandemi, proses penyampaian

pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan **sistem daring**. Sistem ini sendiri merupakan akronim dari dalam jaringan, artinya merupakan model penyampaian informasi dan materi pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet dan tidak harus dilakukan secara tatap muka (R. E. Pratama & Mulyati, 2020). Implementasi sistem ini dimasa pandemi sempat disinyalir menjadi trobosan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dari segi konsumsi energi, sehingga kesuksesan dalam pelaksanaannya perlu ditelaah dan dikalkulasi besar-kecil konsumsi energi serta kaitanya dengan emisi GRK, sehingga *maincore* dari suksesnya praktik pembelajaran daring tidak hilang begitu saja dan dapat digunakan sebagai alteratif pembelajaran masa depan yang lebih ramah lingkungan.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

GRK adalah tumpukan zat buang sisa dari kegiatan manusia yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dengan meningkatkan suhu bumi atau menghangatkan planet ini. Semua limbah dari penggunaan energi apa pun menjadi polutan atau zat yang berbahaya bagi lingkungan. Secara umum zat buang tersebut berupa karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan nitrous oxide (NOx) (Astra, 2010). Secara terus-menerus limbah ini tidak dapat diolah kembali oleh alam akan terakumulasi di lapisan ozon, akumulasi polutan tersebut juga dikenal dengan efek rumah kaca. Terjadinya peristiwa Efek rumah kaca dikarenakan karbon dioksida (CO₂) dan gas-gas lain di atmosfer mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa faktor yang mempegaruhi peningkatan tersebut diantaranya penggunaan bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan energi fosil lainnya yang melebihi kemampuan bio-enginar alam dalam mensintesa. Yang dimaksud sebagai bio-enginer tersebut diantaranya adalah tumbuhan, hutan dan laut, sehingga dapat dibayangkan jika hutan gundul maka suhu di permukaan bumi juga dapat meningkat tajam. Polutan yang tidak dapat

disintesa akan menjadi suhu panas yang tidak dapat dilepaskan oleh bumi karena terhalang lapisan GRK di antara atmosfer yang seolah menjadi kubah udara (R. Pratama, 2019).

Metodologi

Kuantitatif merupakan metodologi dasar yang dipilih peneliti untuk mengembangkan kajian ini. Metodologi penelitian kuantitatif merupakan langkah yang digunakan untuk menelaah suatu gejala, kejadian ataupun peristiwa dengan menitik beratkan pada deret angka sebagai data penting untuk mengkodifikasi dan memaparkan ulang dalam bentuk informasi yang lebih valid (Kasiram, 2008). Metode yang digunakan didasarkan pada analisis jejak karbon sebagai alat yang diperuntukan mengkalkulasi besaran jumlah karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan dari aktivitas manusia terkait dengan konsumsi energi. Peneliti akan melakukan kajian terhadap besarnya energi listrik (KWh) dan BBM yang digunakan dalam KBM, dan dikonversi dalam karbon (CO₂) menggunakan tabel Microsoft Excel yang telah dikembangkan dengan basis rumus penghitungan emisi menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), yaitu:

- a. Rumus hitung emisi karbon dari energi listrik

$$\text{Elektric Emision} = \text{EC.EF}$$

Keterangan:

EC : Energi Consumption/Konsumsi Energi (Listrik: KWh)

EF : Emisi Factor / Faktor Emisi (Faktor emisi dari energi listrik menggunakan standar regional jamali (Jawa, madura dan Bali) sebesar 0,84) (Pedoman Teknis Perhitungan Emisi GRK Sektor energi, 2014)

- b. Rumus hitung emisi karbon dari BBM

$$\text{Fuel Emission} = \text{FC.EF}$$

Keterangan:

FC : Fuel Consumption/ Konsumsi BBM (Liter/jam)

EF : Emisi Factor/ Faktor Emisi (BBM jenis Premium yaitu 0,6)

Dari dua rumus hitung emisi karbon dari energi listrik dan BBM tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk tabel Microsoft Excel dengan menggunakan simulasi satu kelas dan jumlah mahasiswa sebanyak 30 orang, sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Simulasi perhitungan karbon dari energi listrik (Ismail, 2020)

No	Unit	Energi listrik (Watt)	Jumlah	Durasi penggunaan (jam)	Konsumsi Listrik (kWh)	FE (kg)	Emisi CO2 (kg)
	a	b	c	d	EC= ((b/1000) .c.d)	Jawa-madurabali	E=EC . FE
1	Lptop	352	30	12	126,72	0,84	106,4448
2	Proyektor	720	1	12	8,64	0,84	7,2576
3	Lampu	15	6	12	1,08	0,84	0,9072
4	AC 1 PK	840	4	12	40,32	0,84	33,8688
5	Speaker	24	2	12	0,576	0,84	0,48384
Jumlah Emisi 1 Kelas/hari					177,336		148,9624

Tabel diatas menunjukkan hasil hitung konversi karbon dari penggunaan daya listrik dari beberapa alat elektronik. Adapun item yang diperlukan untuk pengisian tabel adalah Unit (Jenis elektronik), penggunaan energi listrik (Watt), Jumlah Unit, durasi penggunaan (Jam), Konsumsi Listrik (KWh), Faktor Emisi Untuk wilayah jawa dan Bali (Jamali). Hasil berupa karbon (Kg CO₂) diperoleh dari formula perkalian antara item Konsumsi energi listrik (EC) dengan Faktor Emisi (FE).

Tabel 2. Simulasi perhitungan karbon dari BBM (Ismail, 2020)

Unit	Jenis BBM	Jarak (Km)	Kecepatan Rata-rata (Km/Jam)	Waktu Tempuh (jam)	Konsumsi BBM (Liter/Jam)	Konsumsi Bensin	Faktor Emisi	Emisi CO ₂ (Kg/CO ₂)	Jumlah Mahasiswa/Pengguna	Emisi Total CO ₂ (Kg/CO ₂)
A	b	C	d	$[(c \cdot 2) / d] = e$	f	$e/f = g$	h	$g \cdot h = i$	j	$i \cdot j = k$
Motor	Bensin	7	60	0,23	1,5	0,15	0,6	0,09	30	2,8
Total Emisi										2,8

Tabel diatas menunjukkan hasil hitung konversi karbon dari penggunaan BBM pada kendaraan bermotor jenis roda 2 dengan kapasitas mesin antara 100-150 CC, perkiraan jarak tempuh dari tempat tinggal ke kampus 7 km (Hanavie, A., & Setiawan, 2014). Adapun item yang diperlukan untuk pengisian tabel adalah Unit (Jenis Kendaraan), jenis BBM, Jarak (Km), kecepatan rata-rata (Km/Jam), Waktu Tempuh (Jam), Konsumsi BBM, Faktor Emisi jenis premium. Hasil berupa karbon (Kg CO₂) diperoleh dari formula perkalian antara item Konsumsi BBM/ Fuel Consumption (FE) dengan Faktor Emisi (FE), untuk total emisi diperoleh dengan mengalikan Emisi Karbon dengan jumlah pengguna/mahasiswa.

Kedua tabel tersebut dalam bentuk microsoft excel dapat dilihat pada [link](https://docs.google.com/spreadsheets/d/135CffuPNvDSav0g59vWvH52ELqjejaczZ/edit?usp=sharing&oid=102011717911641331841&rtpof=true&sd=true) berikut: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/135CffuPNvDSav0g59vWvH52ELqjejaczZ/edit?usp=sharing&oid=102011717911641331841&rtpof=true&sd=true>

C. Simpulan

Dari simulasi di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan jumlah emisi karbon yang didapat dari kegiatan konsumsi energi listrik dan BBM kendaraan dalam kegiatan belajar mengajar di kampus dapat dilakukan dengan menggunakan tabel hitung sederhana microsoft excel dengan berbasis formula rumus perhitungan konversi karbon IPCC. Hasil simulasi menunjukkan perkiraan konsumsi energi listrik dalam satu kelas sebesar 177,336 KWh dan Konsumsi BBM untuk kendaraan roda 2 (CC 100-150) jenis bensin tiap mahasiswa dari tempat tinggal dengan rata-rata sebesar 0,15 Liter/Jam, setelah dikonversi dalam emisi karbon satuan Kg CO₂ menggunakan tabel hitung diperoleh 148,96224 Kg CO₂ untuk penggunaan energi listrik dan 2,8 Kg Co₂. Dengan demikian dapat disimpulkan tabel hasil pengembangan dengan formula rumus hitung IPCC dapat digunakan untuk memperkirakan konsumsi energi dan emisi karbon GRK dalam kegiatan belajar mengajar di kampus.

KEPUSTAKAAN

- Astra, I. M. (2010). Energi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika*, 11(2), 127–135. <https://doi.org/10.31172/jmg.v11i2.72>
- Bujuri, D. A. (2018). Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 9(1), 37.

- [https://doi.org/10.21927/literasi.2018.9\(1\).37-50](https://doi.org/10.21927/literasi.2018.9(1).37-50)
- Hanavie, A., & Setiawan, R. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Menggunakan Sepeda. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 3(2), 1–8.
- Ismail, A. (2020). Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Dalam Kegiatan Belajar Di Rumah Secara on-Line: Analisis Jejak Karbon (Carbon Footprint Analysis). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 6(2), 195–203. <https://doi.org/10.20527/jukung.v6i2.9262>
- Jannah, M. (2021). *Efektifitas pembelajaran sistem luring melalui metode belajar dari rumah pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Islamiyah Puri Kabupaten Barito Timur* [IAIN Palangkaraya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3467>
- Pratama, R. (2019). Efek Rumah Kaca Terhadap Bumi. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 1410–4520.
- Pratama, R. E., & Mulyati, S. (2020). Pembelajaran Daring dan Luring pada Masa Pandemi Covid-19. *Gagasan Pendidikan Indonesia*, 1(2), 49. <https://doi.org/10.30870/gpi.v1i2.9405>
- Pedoman Teknis Perhitungan Baseline Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Energi, 1 (2014).

Situasi Sosial Ekonomi sebagai Analisis Ketidaksetaraan dalam Relasi Suami Istri

Pius Heru Priyanto ¹, Esthi Rahayu ²

¹Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata

²Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata

A. Introduksi

Mencermati dan menggunakan lingkungan sosial ekonomi dalam asyarakat dan kemudian mengintrapolasikan ke dalam unit masyarakat yang paling kecil, yaitu pasangan suami istri, tentu memberikan ruang untuk suatu analisis yang lebih unik. Namun, pada saat yang sama, ada kesadaran bahwa proses analisis tersebut mempunyai risiko tersendiri dimana ada perbedaan antar “masyarakat” dan “pasangan suami-istri. Masyarakat mempunyai “relasi nilai” dan “relasi kuasa” yang saling bertingkat (*stratified*) dan menumpuk (*overlapping*). Dalam relasi suami-istri, ada banyak dinamika yang tidak kongruen dengan situasi masyarakat.

Penelitian mengambil langkah untuk melakukan proses tersebut, yaitu menganalisis situasi sosial ekonomi dalam pasangan suami istri dengan menimbang konteks masyarakat dalam lingkungan . Penelitian Choa, M., Chen, S., Impett, E. A., Campos, B. dan Ke, D. memiliki keunikan tersendiri dimana proses bertingkat dan *overlapping* itu dianalisis. Sasaran analisis adalah tetap pasangan suami istri, namun, konteks lingkungan sosial ekonomi dibahas dan dimasukkan dalam analisis hubungan suami istri.

Penelitian ini dapat bercermin dalam penelitian-penelitian penting yang sudah ada sebelumnya, misalnya rangkaian penelitian mengenai hubungan rasial di Amerika Serikat; studi Gunnar Myrdal

paling menonjol diantaranya (publikasi tahun 1944 *An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy*). Penelitian ini membahas mengenai relasi nilai dan relasi kuasa dalam masyarakat Amerika Serikat. Dalam penelitian pasca Myrdal, hal-hal yang bersifat “masyarakat” berdampak dan berkorelasi dengan situasi keluarga inti (dimana hubungan suami istri menjadi intinya).

Penelitian ini hendak membangun bahasan mengenai masyarakat dan, di dalamnya, hubungan suami istri. Hal yang bersifat “masyarakat” yaitu situasi sosial ekonomi masuk ke dalam hubungan suami-istri.

B. Pertanyaan Penelitian

Kualitas hubungan negative pada suami istri dampak akhirnya adalah perceraian, dimana setiap tahun terus meningkat. Contohnya adalah tingkat perceraian Indonesia tahun 2015 sebanyak 5,89% pasangan suami istri bercerai hidup, jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada tahun 2020 tingkat perceraian naik menjadi 6,4 % dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan bercerai. Kasus perceraian naik paling tinggi ada di Pulau Jawa dan Bali yaitu tahun 2015 dari 4,6 % naik menjadi 9,1 % tahun 2020. Kasus kenaikan perceraian paling tinggi terjadi di Kabupaten Kendal dari 4,6 % (2015) menjadi 9,1 % (tahun 2020) dimana kenaikan di atas angka rata-rata nasional. Alasan terjadi perceraian dari Panitera Pengadilan Agama adalah 1) perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 2) salah satu pihak meninggalkan pasangannya, dan 3) factor ekonomi (<https://lokadata.id>).

Kualitas hubungan pasangan suami istri juga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga terutama korbannya adalah anak. Data kekerasan pada anak cukup tinggi, seperti dilansir Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa “Menurut Catatan Tahunan

(CATAHU) Komnas Perempuan pada 6 Maret 2019, jumlah kekerasan terhadap perempuan paling tinggi adalah KDRT atau ranah personal yang mencapai angka 71% atau 9.637 kasus. Paling menonjol adalah kekerasan fisik mencapai 41% atau 3.927 kasus,” (<https://www.kempppa.go.id>). Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas hubungan yang buruk atau negatif antara orang tua dengan anak dan remaja akan berdampak pada penganiayaan anak dan remaja yang akhirnya akan berdampak pada gejala-gejala psikologis negative pada anak dan remaja (Jiang, Xu, Wang, Li, Zhang, Tao dan Wan, 2021).

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti bertujuan meneliti kualitas hubungan pasangan suami istri, dengan kata lain apakah hubungan pasangan suami istri lebih banyak berbobot positif atau negative. Hasil penelitian pada 100 pasangan menunjukkan terdapat peningkatan kualitas hubungan positif akan menurunkan kualitas hubungan negative dengan cara memperhatikan kualitas hubungan seperti tanggung jawab dan empati dan penuh kesadaran yang diamati secara longitudinal (Stanton, Chan, & Gazder, 2021). Kualitas hubungan juga dipengaruhi oleh harapan akan hubungan tersebut, dengan kata lain terjadi kualitas hubungan yang positif karena di dalamnya juga terjadi harapan hubungan yang positif. Hasil penelitian Lemay dan Venaglia (2016) menyatakan bahwa harapan hubungan interpersonal positif, juga berhubungan dengan fungsi interpersonal yang lebih baik, akan menjadikan kualitas hubungan menjadi lebih baik atau positif. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan intensitas hubungan yang tinggi, evaluasi dan motivasi hubungan positif, perilaku prorelasi tinggi, pengampunan tinggi dan saling menghargai (berkurangnya penghinaan).

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi, lama menikah, jenis pekerjaan dengan kualitas hubungan suami istri.

C. Kajian Teori dan Metodologi

Nilai-nilai perkawinan antara suami dan istri sangatlah medasar untuk dipahami bersama dan dilakukan dengan komitmen yang positif dan bertanggung jawab. Nilai-nilai perkawinan yang kurang dipahami secara konsisten dan kurang bertanggung jawab akan menjadikan kehancuran hubungan pasangan suami istri. Kualitas hubungan antara pasangan suami istri adalah salah satu yang mampu mendukung langgengnya perkawinan suami istri. Dampaknya tidak hanya pada relasi suami istri itu sendiri, tetapi juga pada anak-anak yang dilahirkannya yaitu tertanamnya nilai-nilai positif pada kepribadiannya dan terjadinya kualitas hubungan positif antara anak dan orang tua (Lemay dan Venaglia, 2016).

Kualitas hubungan tidak lepas dari hubungan *romantic* juga disebut sebagai kepuasan hubungan antara suami istri dalam suatu perkawinan. Pada era tahun 1970 istilah populer dalam pernikahan adalah kepuasan perkawinan, dan pada awal tahun menjadi populer dengan istilah kualitas hubungan, Kualitas hubungan itu sendiri merujuk pada kualitas hubungan positif dan negative. Apabila terjadi peningkatan kualitas hubungan positif, maka akan terjadi penurunan kualitas hubungan negative. Tujuan dari kajian kualitas hubungan ini adalah bagaimana pasangan saling mengevaluasi pernikahan yang telah dan sedang dilakukan. (Fincham. & Rogge. . 2010).

Label pada perkawinan secara normative positif dengan istilah kepuasan, penyesuaian, kesuksesan, kebahagiaan, persahabatan, kedekatan. Kualitas hubungan sering diistilahkan dengan penyesuaian hubungan yang didalamnya terdapat kasih sayang, persahabatan dan juga konflik. Kualitas hubungan diidentikan dengan kepuasan hubungan yang dapat digunakan secara bergantian kualitas hubungan mempunyai dua dimensi yaitu kualitas hubungan positif dan kualitas hubungan negative. Kualitas hubungan ini diungkap dengan skala (Positive–Negative

Relationship Quality scale - PN-RQ). (Rogge, Fincham, Crasta, & Maniaci, 2017).

Kualitas hubungan sendiri merujuk pada hubungan romantic antara suami istri dimana terdapat hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan sendiri sebagai suatu asosiasi interpersonal dimana dua orang secara konsisten mempengaruhi keidupan satu sama lain, memusatkan pikiran dan emosi terhadap satu sama lain dan secara teratur terlibat dalam aktiitas bersama sebisa mungkin. Kualitas hubungan juga merujuk pada ikatan yang berkualitas dengan orang secara universal didukung sebagai pusat kehidupan yang optimal. Adanya hubungan yang berkualitas juga mengindikasikan adanya empati – gaya kelekatan - kepuasan dalam hubungan. Dari gambar di bawah ini tampak bahwa kelekatan pasangan akan mempengaruhi pembentukan empati dan mempengaruhi kepuasan hubungan. Empati yang terbentuk akan menambah kuatnya kepuasan hubungan, karena akan mempengaruhi secara langsung kepada kepuasan hubungan dan pengaruhi tidak langsung yaitu secara bersama-sama kelekatan akan menambah kepuasan hubungan pasangan (Byrne & Baron, 2005)

Hasil penelitian dari Brown, Manning dan Payne (2015) menyatakan bahwa kualitas hubungan antara pasangan hidup serumah (kumpul kebo) dan pasangan menikah dilaporkan kualitas hubungan menikah lebih tinggi daripada kualitas hubungan serumah. Pasangan suami istri yang menikah dengan direncanakan lebih tinggi kualitas hubungannya daripada kualitas hidup pasangan suami istri menikah tanpa direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pernikahan diidentifikasi adanya waktu dan relasi hubungan romantic selama berpacaran akan menambah kualitas hubungan setelah memasuki pernikahan.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan perkawinan yang berkait erat dengan masa sebelum dan selama perkawinan (Fauzi,M. 2018). Ketimpangan (ketidaksetaraan) status

social ekonomi antara pasangan suami istri juga berpengaruh pada kualitas hubungan. Hasil penelitian Choa, Chen, Impett, Campos dan Ke (2020) menyatakan bahwa ketidaksetaraan social ekonomi (dalam hubungan romantik) memprediksi kualitas hubungan dan ekspresi emosi. Hasil penelitian ini sebagai penelitian longitudinal, yaitu ketidaksetaraan sosial ekonomi merusak kepuasan hubungan (kualitas hubungan) antara pasangan suami istri. Pasangan yang memiliki kekuasaan lebih tinggi status social ekonominya, secara signifikan mengalami penurunan kualitas hubungan dari waktu ke waktu. Penakanannya pada ketidaksetaraan itu sendiri—bukan apakah seseorang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada pasangannya, sehingga mampu memengaruhi kualitas hubungan yang akhirnya menjadi ketidakpuasan hubungan. Semakin tinggi ketidaksetaraan social ekonomi, maka ekspresi emosi negative semakin besar dalam percakapan dengan pasangannya. Penelitian ini berimplikasi bahwa ketimpangan ekonomi yang semakin dalam dapat menyebabkan ikatan intim yaitu menurunkan kualitas hubungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan kuantitatif korelasional dan perbedaan. Subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di daerah tempat tinggal di kawasan kaya, menengah, dan miskin. Adapun kawasan miskin adalah di kampung Tinjomoyo, kawasan menengah di kawasan perumahan Gombel Permai, dan kawasan tinggi atau kaya di daerah Bukit Sari. Adapun lama menikah minimal satu tahun sampai dengan seterusnya dimana subyek dimungkinkan mampu berpikir dan berbicara secara normal.

Teknik pengambilan data menggunakan skala The Positive-Negative Relationship Quality (PN-RQ) Scale dari Rogge, Fincham, Crasta, & Maniaci (2017), yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. Adapun skala tersebut terdiri dari kualitas relasi positif (8 item) dan kualitas relasi negative (8 item). Adapun data lama pernikahan dan jenis pekerjaan diisi pada lembar identitas. Adapun

system pengambilan data dengan cara mendatangi rumah subyek door to door setelah diadakan system random.

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan uji anava dua jalur untuk menguji perbedaan status sosial ekonomi dan jenis pekerjaan terhadap kualitas hubungan. Analisis korelasional digunakan untuk menguji hubungan antara lama menikah dengan kualitas hubungan.

D. Simpulan

Kualitas hubungan suami istri dapat disebabkan oleh faktor status sosial ekonomi, tetapi tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis pekerjaan, usia perkawinan, usia suami/istri, status suami istri. Untuk status sosial ekonomi, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiwati dan Nurhayati (2020), yang menyatakan bahwa kualitas perkawinan secara keseluruhan dipengaruhi oleh banyaknya anak dan pengeluaran per bulan, begitu pula kualitas hubungan atau relasi suami-istri.

Untuk faktor lain, usia perkawinan tidak memengaruhi kualitas hubungan suami istri. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Ghorgi, Hassan, Baba (2015), yang menghasilkan data bahwa tidak ada korelasi antara lamanya menikah dan penyesuaian perkawinan. Dukungan lain didapat dari penelitian Latifah dan Wahyuni (2019), bahwa jenis kelamin (status suami istri) dan usia perkawinan tidak signifikan berpengaruh terhadap penyesuaian perkawinan. Dukungan lain didapat dari hasil penelitian Nihayah, Adriani dan Wahyuni (2012), yang menyatakan bahwa meskipun teori mengatakan bahwa usia pernikahan memengaruhi kebahagiaan dan kepuasan pernikahan, tetapi dalam hasil penelitian mereka, menemukan bahwa usia pernikahan tidak terlalu signifikan berpengaruh dalam kepuasan pernikahan.

Faktor usia suami/istri tidak memengaruhi kualitas hubungan suami istri. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Srisusanti dan Zulkaida (2013). Hasilnya adalah bagi

istri berusia 26-30 tahun, faktor kepuasan perkawinan yang paling dominan adalah hubungan interpersonal. Bagi yang berusia 31-36 tahun adalah hubungan dengan mertua dan ipar. Ketika usia perkawinan 4-5 tahun faktor kepuasan perkawinan paling dominan adalah partisipasi keagamaan. Pada usia perkawinan 6-10 tahun, faktor kepuasan paling dominan adalah hubungan interpersonal.

Jadi kualitas hubungan suami istri dapat dipengaruhi oleh faktor status sosial ekonomi, tetapi tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis pekerjaan, usia perkawinan, usia suami/istri, status suami istri.

KEPUSTAKAAN

Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Psikologi Sosial*; Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih Bahasa: Ratna Djuwita, Dyah Yasmina dan Lita P. Lunanta.

Brown, S.L., Manning, W.D. & Payne, K. K. (2017). Relationship Quality Among Cohabiting Versus Married Couples. *Journal of Family Issues*. Vol. 38(12) 1730 –1753. DOI: 10.1177/0192513X15622236.
journals.sagepub.com/home/jfi

Choa, M., Chen, S., Impett, E. A., Campos, B. dan Ke, D. (2020). Socioeconomic inequality undermines relationship quality in romantic relationships. *Journal of Social and Personal Relationships*. Vol. 37(5) 1722–1742. DOI: 10.1177/0265407520907969.
journals.sagepub.com/home/spr

Fincham, F.D. & Rogge, R. (2010). Understanding Relationship Quality: Theoretical Challenges and New Tools for Assessment. *Journal of Family Theory & Review*, 2, 227–242. DOI:10.1111/j.1756-2589.2010.00059.

Ghorogi, S., Hassan SA & Baba, M. (2015). Marital Adjustment and Duration of Marriage among Postgraduate Iranian Students in Malaysia. *International Education Studies*; 8 (2).

<https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2089/kas-us-meningkat-kemen-pppa-ajak-milenial-cegah-kdrtd>

Jiang, Z., Xu, H., Wang, S., Li, S., Zhang, S., Tao, F., Wan, Y. (2021). Parent-Child Relationship Quality, Childhood Maltreatment, and Psychological Symptoms in Chinese Adolescent. *Journal of Interpersonal Violence*. 1-22. DOI: 10.1177/08862605211035869.

Latifah, AS & Wahyuni, ZA. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan. *TAZKIYA Jurnal of Psychology*. DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/tazkiya.v7i2.13471>.

Lemay, E.P., dan Venaglia, R, B. (2016). Relationship Expectations and Relationship Quality. *Review of General Psychology*. 20 (1), 57–70. <http://dx.doi.org/10.1037/gpr0000066>.

Nihayah, Z., Adriani, Y & Wahyuni, ZI. (2012). Peran Religiusitas dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan.

Conference Proceedings. Annual International Conference on Islamic Studies XIII.

Rogge, R.D., Fincham, F.D., Crasta, D., Maniaci, M. (2017). Positive and Negative Evaluation of Relationships: Development and Validation of the Positive–Negative Relationship Quality (PN-RQ) Scale. *Psychological Assessment*, 29 (8), 1028 –1043. <http://dx.doi.org/10.1037/pas0000392>.

Setiawati, F.A. dan Nurhayati, S.R. (2020). Kualitas perkawinan orang Jawa: Tinjauan factor jenis kelamin, usia perkawinan, jumlah anak dan pengeluaran keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.13>

Srisusanti, S & Zulkaida, A. (2013). Studi Deskriptif Mengenai Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri. *Universitas Gunadarma Jurnal*, 7(6).

Stanton, S.C.E. , Chan, A. P. S. & Gazder, T. (2021). Mindfulness, perceived partner responsiveness, and relationship quality: A dyadic longitudinal mediation model. *Journal of Social and Personal Relationships*. DOI:10.1177/026540752111030327. journals.sagepub.com/home/spr

VI. Catatan Penutup: Interaksi akademik dalam membaca perubahan sosial

Peran akademik dan penelitian pada umumnya adalah membangun pengetahuan yang dapat terus berkembang seturut dengan jenis dan intensitas perubahan sosial tersebut. Pengetahuan ini ditopang oleh metodologi yang dapat secara terorganisir merinci dan memilah pencermatan terhadap perubahan sosial; dan menganalisis secara kronologis dan diakronis, dan kemudian memunculkan pengetahuan yang lebih membuka wawasan.

Secara khusus, metodologi yang dibangun juga mencerminkan titik perhatian dari ilmu-ilmu, termasuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dan ilmu-ilmu keras (*hard sciences*). Metodologi ini menempatkan hubungan subyek-obyek dengan cara yang tertentu, dengan pengambilan kesimpulan tertentu.

Dalam mencermati perubahan sosial, metodologi ilmu-ilmu berinteraksi dengan metodologi lain. Pelaku riset dan lingkungan akademik memperbarui atau melengkapi metodologi mereka. Hal ini seringkali dibaca sebagai “interdisipliner” dan “trans-disipliner”. Metodologi ini menjalani recalibrasi dan dibahas ulang lagi untuk dapat membangun metodologi yang lebih memadai.

Dalam prakteknya, lembaga pengabdian perguruan tinggi, LSM, lembaga riset publik membangun terlebih dahulu apa yang disebut dengan *baseline*: mereka membaca terlebih dahulu apa yang terjadi dalam perubahan sosial. Mereka mendalami perubahan sosial.

Masih dalam praktek, lembaga pengabdian perguruan tinggi, LSM, dan lembaga riset publik dapat memulai membangun metodologi mereka dengan terlebih dahulu membentuk “proyek” dan/atau “asumsi”. Hal ini amat terkait dengan tema-tema yang dekat dengan mereka. Dari “proyek” dan/atau “asumsi”, barulah mereka membangun metodologi mereka.

Dalam peran-peran penelitian dan pengabdian, secara lebih jauh, metodologi ilmu-ilmu akan semakin beradaptasi dan berkembang menurut perubahan sosial. Institusi sosial-budaya manusia bergerak dan terus berkembang: migrasi, urbanisasi, ruang virtual, krisis sumber daya alam, untuk menyebut beberapa hal. Metodologi diharapkan semakin dekat dengan perubahan sosial tersebut.

[page left blank]

**Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1
Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur
Kota Semarang, Jawa Tengah 50234
(024) 8441555

